RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2025-2029

PROVINSI SULAWESI UTARA

"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Daerah yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
   a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
   c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I yang memuat pendahuluan;
   b. bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
   c. bab III yang memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
   d. bab IV yang memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. bab V yang memuat penutup.
(2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota.
(2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup:
a. pelaksanaan RPJMD; dan
b. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(6) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

(7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.

(8) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.

(9) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

(10) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

(11) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur.

(12) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Menteri.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 29 September 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (2-121/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Provinsi Sulawesi Utara perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala Daerah yang akan menjabarkan visi, misi, dan

program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
c. Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
d. Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Selanjutnya RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 akan digunakan sebagai:

a. Pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Daerah tahun 2025-2029;
b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
c. Tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
d. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2025 sampai tahun 2029, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
e. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
f. Instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
g. Instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pelaksanaan *(actuating)*, pengendalian *(controlling)* dan evaluasi pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan

pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk periode tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2

DAFTAR ISI

			Halaman
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	I-1
		1.1. Latar Belakang	I-1
		1.2. Dasar Hukum	I-6
		1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-9
		1.4. Maksud dan Tujuan	I-12
		1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-13
BAB II	:	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	II-1
		2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
		2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
		2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-87
		2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-182
		2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-219
		2.1.5 Standar Pelayanan Minimal	II-270
		2.1.6 Kerjasama Daerah	II-273
		2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	II-280
		2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	II-296
		2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-299
		2.2.1. Realisasi APBD	II-299
		2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	II-310
		2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-314
		2.3.1. Permasalahan	II-314
		2.3.2. Isu Strategis	II-337
BAB III	:	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	III-1
		3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
		3.1.1. Visi	III-1
		3.1.2. Misi	III-6
		3.1.3. Program Unggulan	III-9
		3.1.4. Tujuan dan Sasaran	III-11
		3.1.5. Sasaran Pembangunan Daerah	III-27
		3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-35
		3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	III-37
		3.2.1.1 Strategi Pembangunan Daerah	III-37

3.2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah III-60
3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah III-81
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-97
4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-97
4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) IV-98

BAB V : PENUTUP V-1
5.1 Kesimpulan Substansial V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-2
5.3 Pengendalian dan Evaluasi V-3

Daftar Tabel

Nomor	Keterangan	Hal
2.1	Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-3
2.2	Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara	II-10
2.3	Keadaan Rata-Rata Suhu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 (Derajat Celcius)	II-11
2.4	Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara Milimeter Kubik (mm^3)	II-12
2.5	Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara	II-13
2.6	Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-19
2.7	Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-20
2.8	Produksi Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-20
2.9	Produksi Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-22
2.10	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-23
2.11	Perhitungan Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara	II-25
2.12	Perhitungan Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Utara	II-27
2.13	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	II-29
2.14	Jasa Lingkungan Penyedia Air	II-31
2.15	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	II-33
2.16	Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Longsor	II-36
2.17	Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Banjir	II-38
2.18	Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Karhutla	II-40
2.19	Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air	II-42
2.20	Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Sulawesi Utara	II-46
2.21	Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024	II-47
2.22	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024	II-49
2.23	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024	II-50
2.24	Ketersediaan Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024	II-50
2.25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-51
2.26	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-52

Nomor	Keterangan	Hal
2.27	Capaian IKA, IKU, IKL dan IKAL Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-53
2.28	Realisasi Capaian Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	II-57
2.29	Timbunan Sampah per Tahun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-60
2.30	Indeks Risiko Bencana per Kabupataen/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024	II-64
2.31	Nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) Tahun 2021 – 2024	II-66
2.32	Rasio Jenis Kelamin Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-77
2.33	Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	II-79
2.34	Kepadatan Penduduk menurut Jumlah dan Luas Wilayah Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-82
2.35	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara Tahun 2024	II-85
2.36	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) dan Tahun 2024 (dalam milyar rupiah)	II-88
2.37	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II-89
2.38	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Hb)	II-90
2.39	Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-91
2.40	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota	II-91
2.41	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-101
2.42	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-107
2.43	Perkembangan TPT menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-108
2.44	Angka Melek Aksara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-112
2.45	Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Maret 2023, Maret 2024 dan September 2024 (Persentase)	II-117
2.46	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-121
2.47	Umur Harapan Hidup (UHH) Per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-124
2.48	Prevalensi Stunting per-Kabupaten/kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-132
2.49	Prevalensi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya di Sulawesi Utara Tahun 2021-2024	II-135
2.50	Rata-Rata Lama Sekolah per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-136

Nomor	Keterangan	Hal
2.51	Harapan Lama Sekolah per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-141
2.52	Capaian Literasi Numerasi Assesmen Nasional (AN) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-145
2.53	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-147
2.54	Cakupan Kepesertaam Jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-149
2.55	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020-2024 Sulawesi Utara	II-151
2.56	Data Kebudayaan Sulawesi Utara Desember 2024	II-156
2.57	Daftar Objek Cagar Budaya 2024	II-157
2.58	Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2024	II-160
2.59	Daftar Cagar Budaya Peringkat Nasional 2024	II-160
2.60	Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Sulawesi Utara	II-160
2.61	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-172
2.62	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-177
2.63	Angka Ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-183
2.64	Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-184
2.65	Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman	II-184
2.66	Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-189
2.67	Perkembangan TPAK Menurut Jenis Kelamin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-190
2.68	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-192
2.69	Integrasi *Green Economy* dan *Blue Economy*	II-193
2.70	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024 Provinsi Sulawesi Utara	II-199
2.71	Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-200
2.72	Realisasi Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 (Nilai dalam 000 USD)	II-201
2.73	Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-202
2.74	Indeks Pilar Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-207
2.75	Penanganan Kawasan Kumuh	II-210
2.76	Persentase Desa Mandiri Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-215

Nomor	Keterangan	Hal
2.77	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-217
2.78	Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-217
2.79	Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-219
2.80	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-220
2.81	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-221
2.82	Indeks Integritas Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-222
2.83	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024	II-222
2.84	Persentase Capaian Aksi HAM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024	II-226
2.85	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-227
2.86	12 Pilar Utama Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Utara	II-230
2.87	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2023	II-230
2.88	Indikator Kinerja Utama Sulawesi Utara	II-232
2.89	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	II-233
2.90	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	II-244
2.91	Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-271
2.92	Rekapitulasi Kinerja Capaian SPM se-Sulut Tahun 2023-2024	II-272
2.93	Persentase Realisasi Capaian Spm Per Bidang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024	II-272
2.94	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain	II-275
2.95	Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	II-277
2.96	Sinergi	II-279
2.97	Jenis Proyek yang akan dibiayai oleh APBN	II-284
2.98	Usulan Proyek Prioritas yang akan dibiayai oleh APBN	II-294
2.99	Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020	II-303
2.100	Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024	II-304
2.101	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-306
2.102	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	II-308
2.103	Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024	II-310
2.104	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030 Provinsi Sulawesi Utara	II-313
3.1	17 Program Unggulan	III-10
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025-2030	III-29

Nomor	Keterangan	Hal
3.3	Penahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 (Tabel 3.6 Inmendagri 2/2025)	III-61
3.4	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029	III-64
3.5	Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 diselaraskan dalam Arah Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	III-78
3.6	Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029	III-83
3.7	Keterkaitan antara Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029	III-116
3.8	Penyelarasan antara Arah Pembangunan Kewilayahan (Lampiran IV RPJMN 2025-2029) dengan Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2025 - 2029	III-130
4.1	Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-3
4.2	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Utara	IV-97
4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-98

Daftar Grafik

Nomor	Keterangan	Hal
2.1	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	II-29
2.2	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air	II-31
2.3	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	II-34
2.4	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Longsor	II-36
2.5	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Banjir	II-38
2.6	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi KARHUTLA	II-40
2.7	Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air	II-42
2.8	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-48
2.9	Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-54
2.10	Persentase Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024	II-55
2.11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Prov. Sulut	II-55
2.12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Prov. Sulut	II-61
2.13	Jumlah Penduduk Sulawesi Utara menurut jenis kelamin Tahun 2020-2024	II-67
2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-68
2.15	*Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara*	II-70
2.16	Persandingan Rasio Jenis Kelamin per-Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-78
2.17	Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara	II-80
2.18	5 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tinggi di Sulawesi Utara Tahun 2024	II-83
2.19	5 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Rendah di Sulawesi Utara Tahun 2024	II-84
2.20	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-94
2.21	Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-95
2.22	Garis Kemiskinan Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan) Tahun 2020-2024	II-97
2.23	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan) Tahun 2020-2024	II-98
2.24	Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan) Tahun 2020-2024	II-100
2.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-102
2.26	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-104
2.27	Perkembangan TPT Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-110
2.28	Perkembangan TPT Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024	II-111
2.29	Perkembangan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-114

Nomor	Keterangan	Hal
2.30	Perkembangan Gini Rasio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020-2024	II-116
2.31	Komponen Kesehatan Pembentuk IMM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	II-120
2.32	Persandingan Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-123
2.33	Persandingan Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-125
2.34	Indeks pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-126
2.35	Angka Kematian Ibu, Balita, Bayi dan Neonatal di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-128
2.36	Persandingan Tren Stunting Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-131
2.37	Persandingan Tren Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-138
2.38	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-140
2.39	Persandingan Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-143
2.40	Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-144
2.41	Tren Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2019-2023	II-163
2.42	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Menurut Dimensi IPK Tahun 2023 di Sulawesi Utara	II-164
2.43	Persandingan Tren Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2023	II-167
2.44	Indeks pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-170
2.45	Persandingan Tren Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-174
2.46	Tren Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-176
2.47	Persandingan Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-179
2.48	Persandingan Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Metode Baru) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2023	II-181
2.49	Bauran Energi Primer Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	II-198
2.50	Indeks Pilar Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024	II-206
2.51	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-208
2.52	Backlog Kepemilikan Rumah Sulut Tahun 2020-2024	II-209
2.53	Realisasi Capaian Pembangunan PSU APBN di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020-2024	II-213
2.54	Realisasi Capaian Pemberian BSPS di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024	II-214

Nomor	Keterangan	Hal
2.55	Laju Inflasi menurut KelompoK PengeluaranProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	II-218

Daftar Gambar

Nomor	Keterangan	Hal
1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya	I-12
2.1	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara	II-2
2.2	Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara	II-4
2.3	Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II-4
2.4	Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Utara	II-25
2.5	Peta Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara	II-26
2.6	Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Sulawesi Utara	II-27
2.7	Peta Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi	II-28
2.8	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	II-30
2.9	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Air	II-32
2.10	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Iklim	II-35
2.11	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Longsor	II-37
2.12	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Banjir	II-39
2.13	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi KARHUTLA	II-41
2.14	Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air	II-43
2.15	Peta Kerentanan Perubahan Iklim	II-44
2.16	Penurunan Intensitas Emisi GRK	II-61
2.17	Suku Minahasa	II-73
2.18	Suku Sangihe Talaud	II-74
2.19	Suku Bolaang	II-74
2.20	Tari Maengket Minahasa	II-153
2.21	Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara	II-154
2.22	Komponen Indeks Daya Saing Daerah	II-229
2.23	Perumusan Isu Strategis Daerah	II-340
3.1	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1	III-12
3.2	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2	III-14
3.3	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3	III-16
3.4	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4	III-18
3.5	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5	III-20
3.6	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6	III-22
3.7	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7	III-24
3.8	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 8	III-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan sebagai instrumen utama untuk mengarahkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai karakteristik, potensi, dan tantangan daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan dibagi dalam tiga tingkatan waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk perencanaan tahunan. RPJMD didefinisikan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah terpilih, serta disertai kerangka pendanaan indikatif dan kerangka regulasi yang mendukung.

Penyusunan RPJMD juga merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih, yaitu Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH, telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara. Dengan demikian, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029

disusun sebagai kewajiban konstitusional dan instrumen perencanaan utama untuk masa jabatan Kepala Daerah periode 2025–2029.

Secara strategis, RPJMD 2025–2029 memiliki kedudukan penting karena merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024. Dokumen ini juga harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029, serta mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dengan demikian, RPJMD berfungsi tidak hanya sebagai arahan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai alat sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.

Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program-program pembangunan daerah yang mencakup seluruh Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah. RPJMD juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan. Sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 memiliki nilai strategis dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan efektif selama lima tahun ke depan. Pada tingkat operasional tahunan, RPJMD akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi instrumen perencanaan tahunan untuk mengawal implementasi program-program pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Povinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten/kota

Penyusunan dokumen ini mengacu pada tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahapan, dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan RPJMD sebagai peraturan daerah.

Dokumen RPJMD ini juga merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan teknokratis yang telah disusun pada tahap awal perencanaan. Seluruh proses tersebut berpedoman pada visi, misi, serta program kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terencana dan berkesinambungan.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan berbagai pendekatan perencanaan yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perumusan RPJMD Sulawesi Utara juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
   a) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
   b) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
   c) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan dokumen perencanaan yang memiliki signifikansi strategis dalam pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD berperan sebagai:

1. **Instrumen Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah**
   RPJMD menjadi wadah untuk merealisasikan visi, misi, dan program kerja Gubernur serta Wakil Gubernur terpilih, yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari janji politik dalam masa kampanye.
2. **Penjabaran Tahap Awal RPJPD Sulawesi Utara 2025-2045**
   Dokumen ini berfungsi sebagai perencanaan pembangunan daerah untuk periode pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Utara 2025-2045, sehingga

menjadi pedoman utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terarah.

3. **Pedoman dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan**

   RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah.

4. **Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**

   Dokumen ini menjadi dasar dalam mengukur capaian kinerja Kepala Daerah serta Kepala Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. **Alat Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah**

   RPJMD berfungsi sebagai instrumen bagi satuan pengawas internal (SPI) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

6. **Pedoman bagi RPJMD Kabupaten/Kota**

   RPJMD Provinsi Sulawesi Utara menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD di tingkat kabupaten/kota, sehingga terwujud keselarasan antara kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Dengan demikian, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memastikan pembangunan daerah yang terarah, sinergis, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD ini juga dilakukan paralel dengan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyusunan KLHS ini nantinya dijadikan dasar perumusan Isu Strategis Daerah serta Rekomendasi yang

dihasilkan oleh KLHS ini juga akan menjadi salah satu acuan dalam formulasi Tujuan, Sasaran dan Strategi daerah serta penentuan Program dalam RPJMD. Hal ini tidak lain untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD ini telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dengan kata lain, melalui dokumen RPJMD ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini tergambar melalui Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program Pembangunan Daerah yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);la
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045.
29. Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2045. Sebagai pedoman utama dalam perencanaan jangka menengah, RPJMD menjabarkan arah

kebijakan pembangunan pada periode pertama dari RPJPD, yang telah menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam rentang waktu 20 tahun. Dengan demikian, RPJMD berperan penting dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang daerah dan kebijakan pembangunan nasional, serta menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang terarah dan terukur.

RPJMD Provinsi juga mempedomani RPJPN, RPJMN, dan RPJPD Provinsi sebagai kerangka kebijakan makro. Di tingkat pelaksanaan, RPJMD Provinsi disusun dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi yang dirancang secara simultan, sehingga terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan makro dan rencana strategis sektoral. Selanjutnya, RPJMD Provinsi juga memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Utara, sedangkan Renstra PD Provinsi memperhatikan Renstra PD Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi arah pembangunan lintas tingkat pemerintahan.

RPJMD 2025–2029 juga diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 untuk menjamin sinkronisasi arah pembangunan daerah dan nasional, terutama dalam pencapaian 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Proyek *Quick Wins* dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Keselarasan ini penting agar pembangunan daerah turut berkontribusi terhadap capaian indikator pembangunan nasional.

Dalam hal perencanaan tata ruang, RPJMD mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara sebagai dasar dalam menetapkan lokasi, sebaran, dan integrasi pembangunan antar wilayah di provinsi. Penyesuaian dengan RTRW memastikan pemanfaatan ruang dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai daya dukung lingkungan.

RPJMD Provinsi juga wajib memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang menjadi instrumen analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. KLHS menjamin bahwa program-program pembangunan yang dirumuskan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah juga disusun berbasis bukti, yaitu berlandaskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh seluruh unsur kelembagaan iptek, sumber daya iptek dan jejaring iptek yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik pada lingkup daerah, antar-daerah, maupun nasional, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID). Dokumen RIPJPID berperan sebagai panduan dalam implementasi program riset dan inovasi, serta menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam merancang kegiatan yang selaras dan mendukung penguatan iptek daerah.

Selain itu, penyusunan RPJMD juga mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD, hasil Evaluasi Capaian Pembangunan lima tahun terakhir, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang relevan. RPJMD Provinsi juga memperhatikan Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan sebagai instrumen pengendalian untuk meminimalkan potensi hambatan pencapaian sasaran pembangunan.

Di tingkat sektoral, RPJMD menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahunnya. Seluruh dokumen tersebut disinergikan melalui dokumen tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dituangkan dalam penyusunan R-APBD secara konsisten dan berkelanjutan.

Hubungan antar dokumen perencanaan yang terkait dengan RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar. 1.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

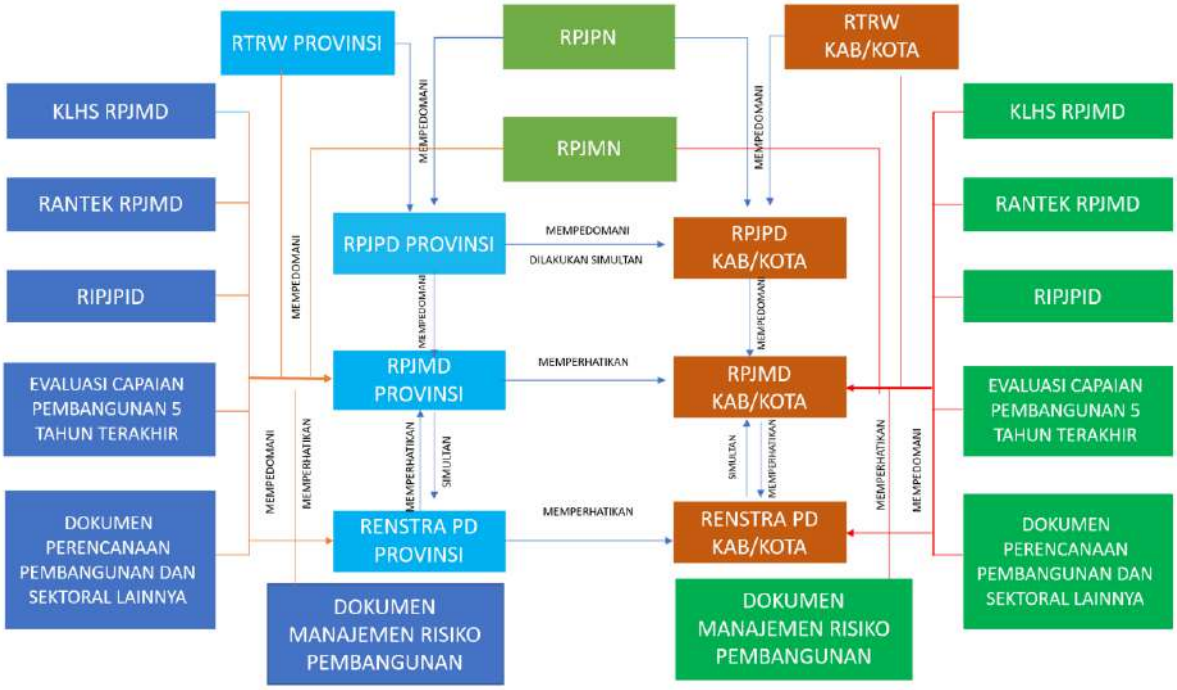

1.4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Sulawesi Utara sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

2. Tujuan

   Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan

pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah yang telah disepakati bersama dalam rangka mensejahterahkan masyarakat Sulawesi Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD 2025–2029 yang mencakup kondisi yang mendasari, definisi, amanat regulasi, nilai strategis RPJMD, serta informasi pelantikan dan masa jabatan kepala daerah. Juga memuat dasar hukum yang relevan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, RIPJPID, dan rencana sektoral, dilengkapi dengan gambar hubungan antar dokumen. Selain itu, bab ini menguraikan maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II. Gambaran Umum Daerah

Menggambarkan secara menyeluruh mengenai kondisi daerah sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahunan. Subbab pertama menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Subbab ini dapat dilengkapi dengan informasi lain sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti kondisi Standar Pelayanan Minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur dari APBN/APBD provinsi di kabupaten/kota, serta peran BUMD dalam mendukung kinerja pelayanan publik. Subbab kedua menyajikan gambaran keuangan daerah, mencakup realisasi APBD Tahun Anggaran 2020–2024 dan proyeksi keuangan Tahun Anggaran 2025–2029. Subbab ketiga mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang

dihadapi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan ke depan.

BAB III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan arah pembangunan jangka menengah daerah yang dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program prioritas. Subbab pertama memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode RPJMD Tahun 2025–2029. Subbab kedua menguraikan strategi dan arah kebijakan daerah yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, serta memuat daftar program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Bab ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menjabarkan keterkaitan antara program perangkat daerah dengan pencapaian kinerja pembangunan daerah serta target penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Subbab pertama memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, lengkap dengan indikator program, target capaian, dan pagu indikatif masing-masing program. Subbab kedua menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang menggambarkan target capaian kinerja tata kelola pemerintahan selama periode RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB V. Penutup

Merangkum keseluruhan substansi RPJMD dengan menekankan poin-poin penting yang bersifat strategis dalam mendukung pencapaian sasaran

pembangunan daerah. Bab ini memuat kesimpulan substansial dari keseluruhan perencanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Seluruh elemen dalam bab ini disusun sebagai bagian dari upaya memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian target pembangunan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan selama periode RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Utara digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi RPJMD 2021-2026, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pusat pertumbuhan wilayah. Kajian ini penting sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lima tahun yang akan datang.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15'-05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur, berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 14.511,27 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3.269,30 km² atau 18,73 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara

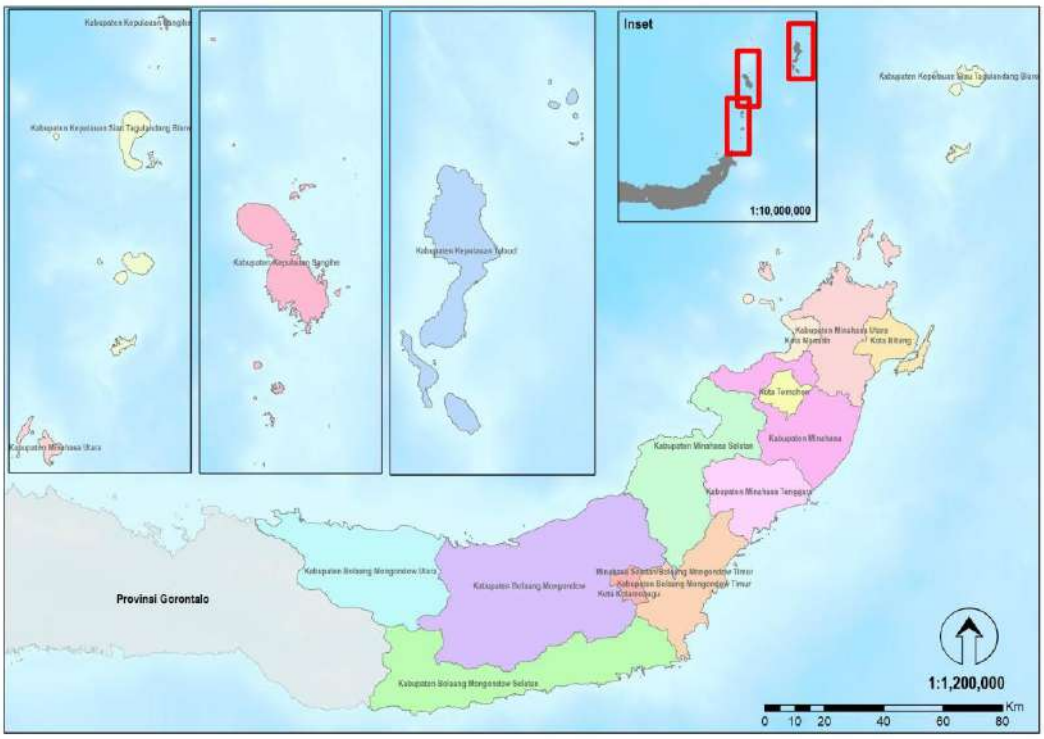

Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado, Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/Kota (11 kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.

Tabel 2.1
Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kab. Minahasa	1.128,47	25	270
2	Kab. Minahasa Selatan	1.456,69	17	178
3	Kab. Minahasa Utara	995,56	10	131
4	Kab. Minahasa Tenggara	753,08	12	144
5	Kab. Bolmong	3.269,30	15	202
6	Kab. Bolmong Utara	1.644,39	6	107
7	Kab. Bolmong Selatan	1.796,07	7	81
8	Kab. Bolmong Timur	859,98	7	81
9	Kab. Kep. Sangihe	607,69	15	167
10	Kab. Kep. Talaud	1.011,87	19	153
11	Kab. Kep. Sitaro	218,21	10	93
12	Kota Manado	162,29	11	87
13	Kota Bitung	329,72	8	69
14	Kota Tomohon	169,06	5	44
15	Kota Kotamobagu	108,89	4	33
Sulawesi Utara		**14.511,27**	**171**	**1.840**

Sumber: BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (diolah)

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 171 kecamatan, dengan jumlah desa/kelurahan mencapai 1.840.

A. Fungsi atau Kontribusi terhadap Wilayah Sekitar

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

Gambar 2.2
Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2.3
Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

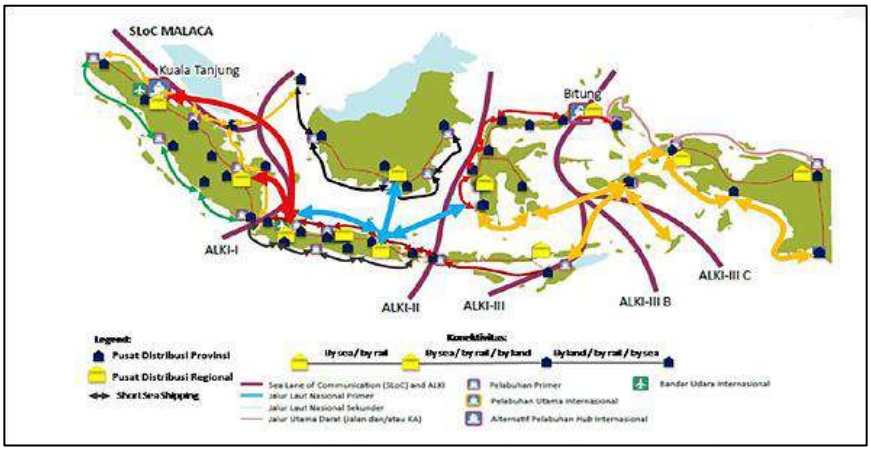

Potensi pengembangan wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat strategi pengembangan klaster yang terdiri dari 5 klaster yaitu: Klaster Wilayah Kepulauan, Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon), Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah cepat tumbuh, dan pembangunan antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam koridor pantai Selatan.

B. Topografi

Dilihat dari topografi Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut.

Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1.895 m) di wilayah Airmadidi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Gunung Lokon (1.579 m) dan Gunung Mahawu (1.331 m) di wilayah Kota Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di wilayah Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara, Gunung Dua Saudara (1.468 m) di wilayah Kota Bitung, Gunung Awu (1.784 m) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang (1.245 m) dan Gunung Karangetan (1.320 m) di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Ambang (1.689 m) di

wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1.954 m) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1.970 m) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2,850 Ha), Langowan (2,381 Ha) di wilayah Kabupaten Minahasa, Modoinding (2,350 Ha), Tompaso Baru (2,587 Ha) di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud

C. Geologi

Kekayaan geologi yang sangat unik dimiliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia (1:250,000), struktur geologi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut:

a) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Kabupaten Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong,

Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;

b) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
c) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (dibagian barat Amurang dan di Pulau Siladen);
d) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api Strato Muda, antara lain, Gn, Soputan, Gn, Mahawu, Gn, Lokon, Gn, Klabat, Gn, Tangkoko;
e) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko–Amurang, daerah sekitar Gn, Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
f) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): terdapat di daerah Gn, Tanuwatik, Gn, Popontolen dan di S, Sinengkeian, Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
g) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di Pulau Nain Besar dan Pulau Nain Kecil, Pulau Talise, Pulau Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
h) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G, Ulutalogon – G, Bumbungan;
i) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;
j) Ttv (batuan Gunung Api): satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;

k) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;

l) Qa (Aluvium): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;

m) Qhav (Batuan Gunung Api Awu) batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P, Sangihe, Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu, Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan Gunung Api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro.

D. Hidrologi

Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

a) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional);

b) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Provinsi); dan

c) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).

Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha, Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP Sub DAS dengan luas 1.423.047 ha, SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 9 (sembilan) danau yaitu Danau Tondano (4.278 ha), Danau Moat (617 ha), Danau Linow (34 ha), Danau Cinta Makalehi (8 ha), Danau Tampusu (2,5 ha), Danau Seper (2,5 ha), Danau Tondok (16,6 ha), Danau Bulilin (21 ha) dan Danau Iloloy (6 ha). Sedangkan untuk sungai besar di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa yaitu Sungai Poigar (54,2 km), Sungai Ranoyapo (51,9 km), Sungai Tondano (40 km), dan Sungai Talawaan (34,8 km) dan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 km), Sungai Sangkup (53,6 km) dan Sungai Ongkaw (42,1 km).

Selain itu terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara).

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di Daerah Irigasi Kasinggolan-Toraut, Daerah Irigasi Dumoga, Daerah Irigasi Sangkup, Daerah Irigasi Ayong-Bolangat dan Daerah Irigasi Lolak.

Tabel 2.2
Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

No	Satuan Wilayah Pengelolaan DAS	Luas (ha)	Persen
1.	Buyat	87.909	6,18
2.	Dumoga Mongondow	204.736	14,39
3.	Essang	79.737	5,60
4.	Kep, Nanusa	3.954	0,28
5.	Kep, Nusa Tabukan	1.205	0,08
6.	Kep, Tatoareng	2.200	0,15
7.	Likupang	97.951	6,88
8.	Mahena	50.852	3,57
9.	Molibagu	116.167	8,16
10.	Pulau Biaro Ds	2.726	0,19
11.	Pulau Bunaken Ds	4.891	0,34
12.	Pulau Kabaruan	10.940	0,77
13.	Pulau Lembeh	5.767	0,41
14.	Pulau Lirung	11.272	0,79
15.	Pulau Siau Ds	13.905	0,98
16.	Pulau Tagulandang Ds	7.897	0,55
17.	Pulau Talise Ds	7.476	0,53
18.	Poigar	81.520	5,73
19.	Ranoyapo	87.154	6,12
20.	Ratahan Pantai	98.754	6,94
21.	Sangkup Langi	287.019	20,17
22.	Tondano	54.124	3,80
23.	Tumpaan	104.891	7,37
T o t a l		**1.42.047**	**100**

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034

E. Klimatologi

a. Suhu

Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2021 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi Utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Kabupten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen.

Tabel 2.3
Keadaan Rata-Rata Suhu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 (Derajat Celcius)

Kabupaten/Kota		Stasiun BMKG	Suhu/Temperatur (°c)		
			Minimum	Rata - Rata	Maksimum
Kabupaten					
1.	Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	--	--	--
2.	Minahasa	Tondano	17,4	23,1	31,4
3.	Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	21,6	27,6	35,0
4.	Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	--	--	--
5.	Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	--	--	--
6.	Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	21,4	26,5	35,8
7.	Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	--	--	--
8.	Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	--	--	--
9.	Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	--	--	--
10.	Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	--	--	--
11.	Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	--	--	--
Kota					
1.	Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	20,4	27,0	35,0
2.	Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	22,0	28,4	34,8
3.	Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	--	--	--
4.	Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	--	--	--

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

b. Curah Hujan

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di

Kabupaten Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot.

Tabel 2.4
Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara Milimeter Kubik (mm^3)

No	Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			Jmlh Curah Hujan (MM)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari *(persen)*
			Min	Rata-Rata	Max			
1.	Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	-	-	-	-	-	-
2.	Minahasa	Tondano	-	-	-	2.306	245	47
3.	Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	-	-	-	4.678	262	61
4.	Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	-	-	-	-	-	-
5.	Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	-	-	-	-	-	-
6.	Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	-	-	-	4.603	281	51
7.	Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	-	-	-	-	-	-
8.	Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	-	-	-	-	-	-
9.	Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	-	-	-	-	-	-
10.	Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	-	-	-	-	-	-
11.	Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	-	-	-	-	-	-
12.	Manado	Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi	-	-	-	4.177	275	58
13.	Bitung	Stasiun Meteologi Maritim Bitung	-	-	-	2.340	240	61
14.	Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	-	-	-	-	-	-
15.	Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

No,	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	persentase (persen)
1	***Kawasan Lindung***	**406,949**	**29,38**
1.1	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	245,165	17,70
1.2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	161,784	11,68
2	***Kawasan Budidaya***	**978,215**	**70,62**
2.1	Pertanian Lahan Basah (Sawah)	107,361	7,75
2.2	Perkebunan	301,600	21,77
2.3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	208,927	15,08
2.4	Kawasan Hutan Produksi (HP)	64,367	4,65
2.5	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	14,696	1,06
2.6	Areal Penggunaan Lain (APL)	281,264	20,31
T o t a l		**1.385.164**	**100**

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (diolah)

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi:

1.1 *Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).*

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari:

1. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Kota Bitung; 2. SA Laut Sidat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan; 2. SM

Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud;

3. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Kota Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Kota Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Kota Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg, Pisok di Kabupaten Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, HB Tg, Kelapa, HB Tg, Walintau, HB Bentenan di Kabupaten Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg, Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg, Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa, di

Kabupaten Minahasa Selatan, di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih dan TWA Batu Angus di Kota Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Kabupaten Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

b. Kawasan Hutan Lindung seluas 161.784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: 1. Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu; 2. Kabupaten Minahasa; 3. Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara; 4. Kabupaten Minahasa Utara; 5. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 6. Kabupaten Kepulauan Talaud; 7. Kota Bitung; 8. Kota Manado, meliputi bakau dan darat; 9. Kota Tomohon.

c. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas : Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Rakyat dan Kawasan Pertambangan. Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi

pemanfaatannya, Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan budidaya dengan luasan 978.215 ha meliputi:

3.1 *Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)*

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2 *Kawasan Perkebunan*

Luas Kawasan perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, didominasi oleh perkebunan kelapa, cengkih dan pala.

3.3 *Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)*

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I dan II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Kabupaten Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon; HPT Kayuwatu di Kabupaten Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Kabupaten Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile-Sungai Gambuta-Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga-Sungai Salongo-Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Kabupaten Bolaang Mongondow.

3.4 *Kawasan Hutan Produksi (HP)*

Kawasan Hutan Produksi meliputi HP Sungai Ranoyapo I di Kabupaten Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I dan II, Sungai Pililahunga-Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow.

3.5 *Kawasan Hutan yang dapat dikonversi*

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi, Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Kabupaten Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.

3.6 *Areal Pegunungan Lain (APL)*

Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

2.1.4.2 Potensi Sumberdaya Alam

A. Potensi Komoditi Daerah

Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa komoditas unggulan berbasis sumber daya alam.

Berdasarkan potensi dan produksi maka, komoditas unggulan Sulawesi Utara sebagai berikut:

a. Produksi Tanaman Pangan

Produksi komoditi unggulan Tanaman Pangan yaitu komoditi Padi dan Jagung selang tahun 2020-2024 mengalami kecenderungan menurun. Penurunan produksi lebih disebabkan karena berkurangnya Luas tanam 10-30 % tiap tahunnya. Konversi lahan baik sawah maupun bukan sawah, konversi komoditi dari padi dan jagung ke tanaman lain (khususnya lahan bukan sawah) seperti nilam dan terjadinya fenomena El Nino yang melanda seluruh daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Utara

Capaian produksi padi turun disebabkan berkurangnya luas panen dan provitas dimana terjadi pergeseran musim panen, tanaman padi terkena serangan hama tikus, adanya perbaikan saluran-saluran irigasi, debit air berkurang sehingga terjadi pergiliran air, kurangnya bantuan benih pemerintah dan berkurangnya minat petani menanam padi secara swadaya, adanya bencana banjir di wilayah potensi, alih fungsi lahan.

Capaian produksi Jagung Luas Panen dan provitas berkontribusi terhadap penurunan produksi jagung ini disebabkan sama halnya dengan komoditi padi tanaman jagung terkena serangan hama tikus, dampak perubahan iklim, alih tanam komoditi ke nilam. Meskipun secara total sulut produksi jagung menurun tapi data berbeda di tiap masing2 kab/kota, ada kab/kota yg naik ada kab/kota yg turun.

Capaian produksi komoditi tanaman pangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Produksi Tanaman Pangan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
PADI	744.881	788.789	793.669	651.218	397.933
JAGUNG	1.434.777	1.538.064	1.553.547	1.301.803	652.241

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

b. Produksi Tanaman Hortikultura

Capaian produksi komoditi hortikultura tahun 2020-2022 mengalami peningkatan disebabkan bantuan pemerintah baik Benih maupun Saprodi di Kabupaten/Kota sentra produksi, sedangkan sejak tahun 2023 – 2024 mengalami kecenderungan menurun karena berkurangnya fasilitasi pemerintah pusat untuk komoditi hortikultura penyumbang inflasi seperti Bawang Merah, Cabe dan Tomat, yang biasanya paket lengkap (benih dan pupuk dan fasilitas penunjang lain). Fenomena El Nino juga menjadi penyebab utama menurunnya produksi hortikultura. Khusus di kabupaten Minahasa sebagai penyumbang produksi terbesar komoditi Cabe, bawang merah dan tomat mengalami penurunan luas tanam disebabkan panen raya cengkih sehingga petani sempat meninggalkan usaha budidaya hortikultura. Sebagian wilayah sentra mengalami penurunan karena di Kabupaten Minahasa Selatan terjadi alih komoditas ke tanaman Bawang Daun dan Petsai.

Capaian produksi komoditi Hortikutura Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
BAWANG MERAH	4.937	4.986	5.020	3.153	2.751
CABE RAWIT	22.414	17.371	19.006	17.978	13.296
TOMAT	57.331	66.711	82.079	59.235	33.883

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

c. Produksi Peternakan

Komoditi peternakan produksi daging babi mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Penurunan ini secara umum disebabkan karena wabah penyakit ASF (Asian Swine Fever) yang berdampak pada kematian ternak Babi yang sangat besar (90%) di seluruh sentra-sentra komoditi ternak Babi di Sulawesi Utara. Untuk komoditi daging Sapi Tahun 2020-2022 mengalami penurunan produksi disebabkan karena kurangnya permintaan daging sapi di masyarakat. Namun pada tahun 2023-2024 terjadi kenaikan karena permintaan daging sapi yang meningkat. Perkembangan produksi komoditi Daging Ayam fluktuatif disebabkan permintaan daging ayam yang menjadi substitusi terhadap daging babi karena mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.

Capaian produksi komoditi Peternakan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Produksi Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
SAPI POTONG	3.491	3.103	1.992	2.737	2.819
BABI	26.742	26.655	26.882	15.197	5.564

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
AYAM BURAS	3.026	16.710	2.907	989	1.330

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

d. Produksi Perkebunan

Produksi *Kelapa Dalam* mengalami kenaikan, tahun 2023 sebesar 265.000,93 ton sedangkan Kopra pada 2024 sebesar 267.143,29 ton kopra. *Kelapa Hybrida* juga menunjukkan kenaikan, dari 1.051,63 ton di tahun 2023 menjadi 1.131,90 ton di tahun 2024.

Komoditi *Pala* sempat stabil pada tahun 2020 dan 2022, ada kenaikan di tahun 2024 sebesar 13.586,71 ton dibandingkan dengan produksi Komoditi *Pala* di tahun 2023 sebesar 12.757,49 ton. Sementara itu, produksi komoditi *Cengkeh* ada kenaikan yang signifikan karena tahun 2024 tahun masa panen tanaman cengkeh, masa panen terjadi setiap 4 (empat) tahun. Produksi komoditi *Cengkeh* Tahun 2023 sebesar 194,06 ton ada kenaikan di tahun 2024 yaitu 13.458,38 ton

Kopi Robusta menunjukkan tren peningkatan yang positif, dari 3.665,55 ton pada 2020 menjadi 3.675,29 ton pada 2023 di tahun 2024 ada penurunan sedikit, produksi komoditi Kopi *Robusta* tahun 2024 menjadi 3.667,63 ton, sedangkan *Kopi Arabika* mengalami fluktuasi dengan penurunan di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 52,3 ton pada 2023. Tahun 2024 untuk Komoditi Kopi *Arabica* kembali meningkat menjadi 56 ton.

Kakao ada peningkatan produksi dari tahun 2020, 5.490,22 ton di tahun 2021 menjadi 5.572,84 ton, dan pada tahun 2022 produksi menurun

menjadi 5.236,85 pada tahun 2023 produksi naik menjadi 5.486,78 dan untuk 2024 ada kenaikan juga menjadi 5.500,33 ton. *Vanila* sempat melonjak tinggi di tahun 2021 (2.387,07 ton) namun kemudian menurun drastis dan mulai sedikit naik kembali di tahun 2023 menjadi 78,09 ton, naik sedikit juga di tahun 2024 sebesar 80,89 ton. Komoditi *Aren* terus mengalami pertumbuhan stabil dari 1.153,06 ton di tahun 2020 menjadi 1.191,9 ton di 2023 di tahun 2024 naik produksinya menjadi 1.401,98 ton. Sedangkan *Kayu Manis* mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dari 41,96 ton di tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 23 ton pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 produksi kayu manis ada penurunan produksi menjadi 22 ton.

Tabel 2.9
Produksi Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

KOMODITI (TON)	2020	2021	2022	2023	2024
KELAPA DALAM	261.147,53	261.646,99	263.230,43	265.000,93	267.143,29
KELAPA HYBRIDA	3.703,16	3.305,66	1.230,55	1.051,63	1.131,90
PALA	12.000,93	12.157,40	12.307,11	2.939,70	13,586,71
CENGKEH	10.109,80	140,81	196,41	194,06	13.459,98
KOPI ROBUSTA	3.665,55	3.690,60	3.592,09	3.675,29	3.667,63
KOPI ARABIKA	39,50	39,70	27,80	52,30	56,00
KAKAO	5.490,22	5.572,84	5.236,85	5.461,78	5.500,33
VANILA	81,57	2.387,07	68,89	78,09	80,89
AREN	1.153,06	1.170,97	1.175,14	1.191,90	1.401,98
KAYU MANIS	41,96	36,70	36,70	23,00	22,00

Sumber Data : Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

e. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Berdasarkan data, produksi perikanan tangkap, mengalami kenaikan. Produksi perikanan

tangkap menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun 2020 sebesar 342.142 ton hingga mencapai 368.057 ton pada tahun 2024.

Sementara itu, perikanan budidaya juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 produksi 379.420 ton dan terus meningkat hingga mencapai 599.491 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.10
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

KOMODITI (TON)	2020	2021	2022	2023	2024
PERIKANAN TANGKAP	342.142	344.426	360.421	366.133	368.057
PERIKANAN BUDIDAYA	370.451	402.312	379.420	493.246	599.491

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

f. Sektor Pertambangan

Selama periode 2020–2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut mengalami penurunan. Pada 2020 kontribusi mencapai 5,41 %, meningkat tipis ke puncak 5,43 % pada 2021, menurun menjadi 5,21 % di 2022, kembali turun ke 4,95 % pada 2023 dan di 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 4,89 %. Meski terjadi penurunan, sektor ini masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,27 % pada 2023.

Lokasi kegiatan pertambangan di Sulawesi Utara tersebar di sejumlah kabupaten, terutama Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bitung, Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow Timur. Untuk wilayah pertambangan

rakyat di Sulawesi Utara saat ini masih relatif kecil dan formalitasnya rendah.

Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir Sulut menunjukkan potensi pertambangan yang cukup besar—khususnya dari emas dan pasir besi—dengan perluasan wilayah konsesi serta adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baru di Wilayah Bolaang Mongondow. Namun, pertumbuhan sektor ini belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, terbukti dari penurunan kontribusi terhadap PDRB, minimnya mekanisme pertambangan rakyat formal, dan minimnya dampak pemberdayaan masyarakat.

2.1.4.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara secara umum mempunyai daya dukung air yang belum terlampaui. Namun begitu, jika analisis dicacah Kembali berdasarkan batas Kabupaten, maka ada beberapa Kabupaten yang sudah terlampaui daya dukung airnya. Kabupaten yang sudah terlampaui tersebut adalah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, dan Kota Tomohon. Untuk lebih lengkapnya data tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.11
Perhitungan Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Status Daya Dukung (Ha)	
				Belum Terlampaui	Terlampaui
Kabupaten Bolaang Mongondow	2.074.849.604,0	1.511.558.059,3	563.291.544,7	194.281	132.650
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1.282.092.012,5	270.616.685,2	1.011.475.327,3	161.664	17.955
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	612.716.498,8	262.350.842,6	350.365.656,2	64.435	22.203
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1.145.943.012,2	385.052.254,0	760.890.758,1	133.307	31.132
Kabupaten Kepulauan Sangihe	535.737.776,9	37.095.427,1	498.642.349,7	59.223	558
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	200.280.479,4	10.050.578,9	190.229.900,5	21.597	211
Kabupaten Kepulauan Talaud	633.269.079,8	377.310.344,5	255.958.735,3	62.492	38.695
Kabupaten Minahasa	662.557.933,2	819.645.609,8	-157.087.676,6	32.888	79.961
Kabupaten Minahasa Selatan	788.793.202,6	975.900.710,1	-187.107.507,6	33.974	111.692
Kabupaten Minahasa Tenggara	453.127.295,6	371.403.518,7	81.723.776,9	34.624	40.688
Kabupaten Minahasa Utara	621.345.332,3	541.551.916,4	79.793.415,9	41.399	58.158
Kota Bitung	254.851.739,2	48.323.530,6	206.528.208,6	29.855	3.117
Kota Kotamobagu	67.775.237,9	110.186.958,2	-42.411.720,3	1.651	9.238
Kota Manado	106.471.600,5	97.987.048,1	8.484.552,4	4.224	12.011
Kota Tomohon	94.934.659,3	135.641.317,3	-40.706.658,0	3.925	12.982
SULAWESI UTARA	**9.534.745.464,1**	**5.954.674.800,9**	**3.580.070.663,2**	**879.541**	**571.252**

Sumber: Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (Tahun 2025)

Gambar 2.4
Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Utara

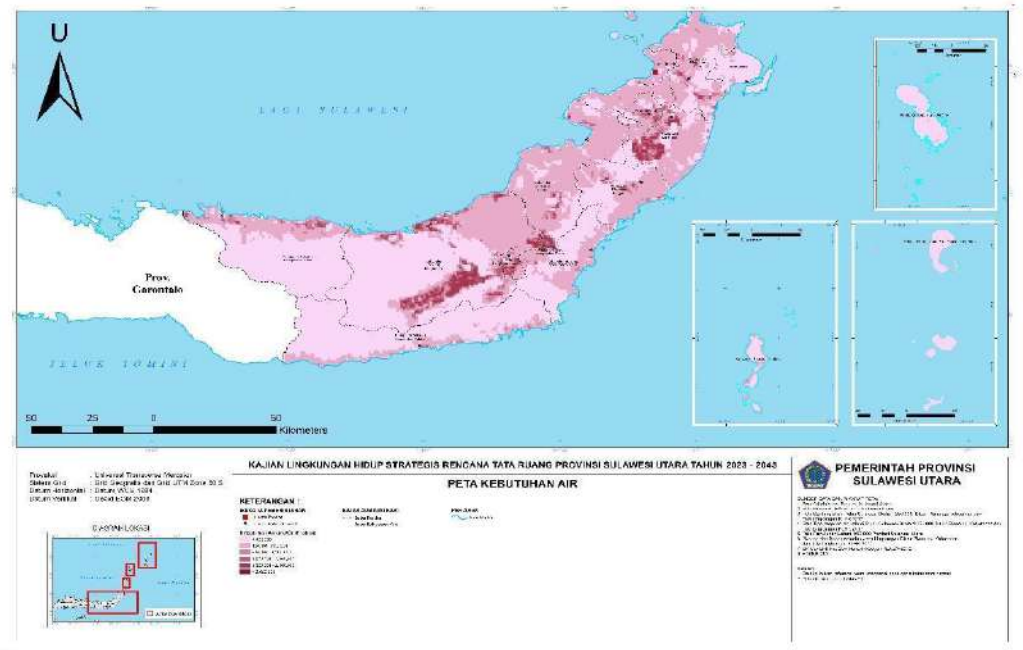

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Utara

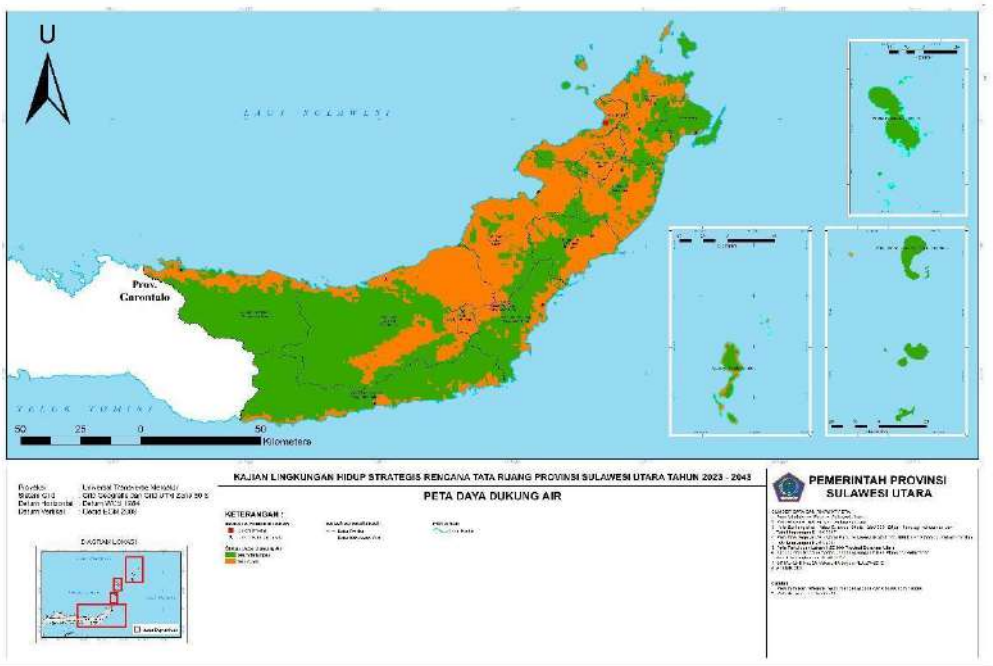

B. Daya Dukung Pangan

Data yang digunakan dalam perhitungan Daya dukung pangan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten/kota. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Provinsi Sulawesi Utara adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten/kota yang dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kkal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masingmasing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung pangan menggunakan pendekatan skala ragam (grid) Provinsi Sulawesi Utara secara umum daya dukung pangannya sudah terlampaui. Provinsi Sulawesi Utara defisit

sebanyak 906.610.453.939 Kkal bahan pangan (beras). 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, hanya ada 4 kabupaten yang masih surplus, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mngondow Selatan, dan Minahasa Selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan gambar 4.8 di bawah.

Tabel 2.12
Perhitungan Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN	Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Penduduk (Jiwa)	Status Daya Dukung (Ha)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
Kabupaten Bolaang Mongondow	222.019.161.856	198.263.948.500	23.755.213.356	282976	270.780,5	56.150,0
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	126.615.815.023	56.097.069.000	70.518.746.023	161319	154.361,9	25.256,9
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	62.870.982.380	72.430.855.500	-9.559.873.120	80106	66.712,8	19.925,7
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	106.195.385.541	66.344.334.500	39.851.051.041	135511	137.235,8	27.203,1
Kabupaten Kepulauan Sangihe	49.841.025.800	110.000.761.750	-60.159.735.950	63592	38.144,1	21.637,8
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	19.684.842.602	56.908.500.500	-37.223.657.898	25097	13.455,8	8.352,5
Kabupaten Kepulauan Talaud	62.218.139.334	74.975.799.750	-12.757.660.416	79441	90.104,9	11.082,2
Kabupaten Minahasa	78.782.983.416	274.906.557.250	-196.123.573.834	100483	70.667,8	42.181,8
Kabupaten Minahasa Selatan	99.723.618.618	18.972.900.750	80.750.717.868	127101	135.342,2	10.324,4
Kabupaten Minahasa Tenggara	52.385.246.888	92.620.118.750	-40.234.871.862	66754	61.829,7	13.482,9
Kabupaten Minahasa Utara	71.688.768.036	180.002.816.000	-108.314.047.964	91396	59.938,1	39.619,0
Kota Bitung	24.721.605.144	180.326.917.750	-155.605.312.606	31543	20.331,5	12.641,0
Kota Kotamobagu	8.702.469.026	98.413.143.250	-89.710.674.224	11089	3.478,0	7.411,3
Kota Manado	11.807.684.243	356.752.058.500	-344.944.374.257	15058	1.838,3	14.396,6
Kota Tomohon	12.525.847.154	79.378.247.250	-66.852.400.096	15978	7.841,6	9.064,8
SULAWESI UTARA	1.009.783.575.061	1.916.394.029.000	-906.610.453.939	1287444	1.132.062,9	318.729,9

Sumber:Hasil Analisis (2024)

Gambar 2.6
Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Sulawesi Utara

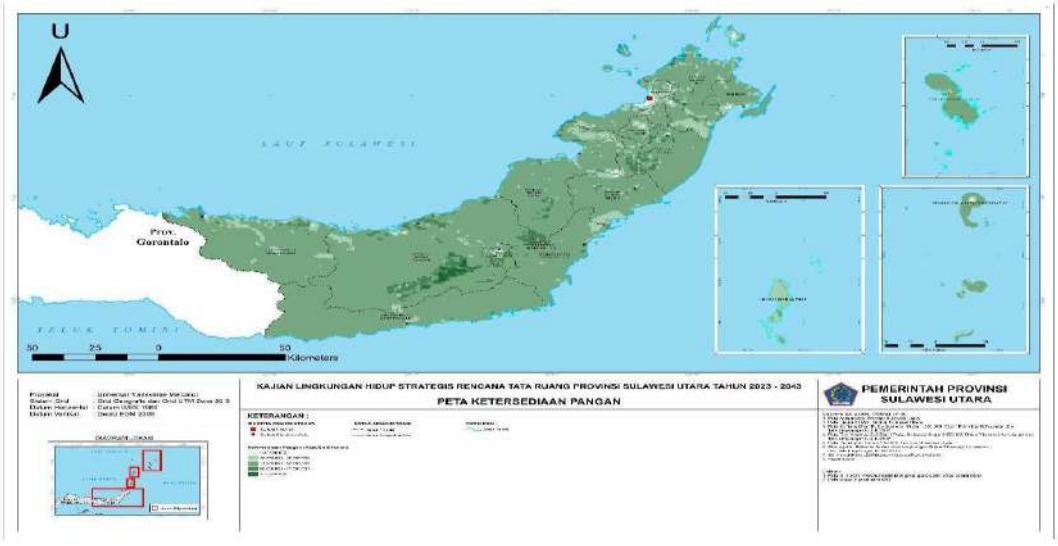

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi

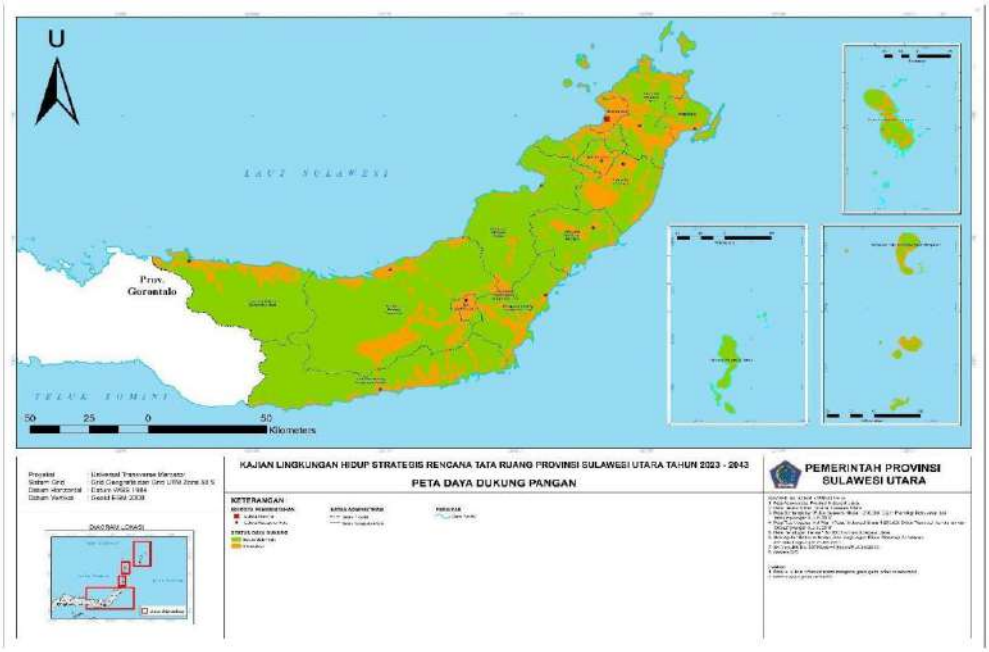

C. Kondisi Baseline Lingkungan Hidup

a. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa lingkungan memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Secara umum, Provinsi Sulawesi Utara mempunyai Indeks Jasa Ekosistem (IJE) Penyedia pangan yang tinggi. 56% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai IJE pangan yang Tinggi. Hal ini dapat

dijelaskan bahwa lahan-lahan pertanian, dalam hal ini sawah di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat mendominasi, serta produktivitasnya cukup tinggi.

Tabel 2.13 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	318,22	29.892,13	53.659,66	207.649,98	35.410,48
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	63,23	61.458,91	9.326,02	107.074,95	1.695,67
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	31,55	22.387,61	8.095,08	54.108,26	2.015,98
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	463,37	1.671,91	94.719,98	62.102,60	5.481,01
Kabupaten Kepulauan Sangihe		2.257,84	597,25	56.426,21	500,60
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		2.672,97	1.097,17	17.702,70	335,46
Kabupaten Kepulauan Talaud	869,31	467,75	98.504,11	1.281,95	64,01
Kabupaten Minahasa	1.455,52	5.088,00	35.526,49	62.870,39	7.909,19
Kabupaten Minahasa Selatan	100,51	4.037,00	26.946,77	107.409,46	7.172,81
Kabupaten Minahasa Tenggara	57,94	2.010,64	26.356,36	44.360,14	2.527,50
Kabupaten Minahasa Utara	154,97	6.824,33	30.026,18	56.135,28	6.416,34
Kota Bitung		3.807,15	473,28	28.493,12	198,95
Kota Kotamobagu		1.987,80	3.170,96	3.288,25	2.442,25
Kota Manado	114,62	6.748,15	2.954,02	6.251,72	166,40
Kota Tomohon		2.182,58	1.974,00	10.319,30	2.430,56
Sulawesi Utara	**3.629,23**	**153.494,78**	**393.427,32**	**825.474,31**	**74.767,21**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (Tahun 2025)

Grafik 2.1 Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

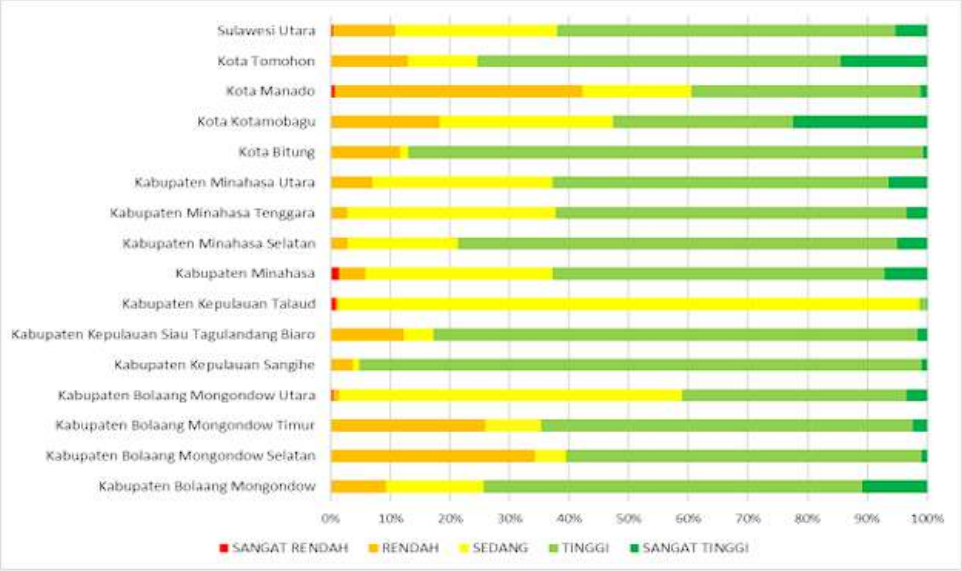

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 2.8
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

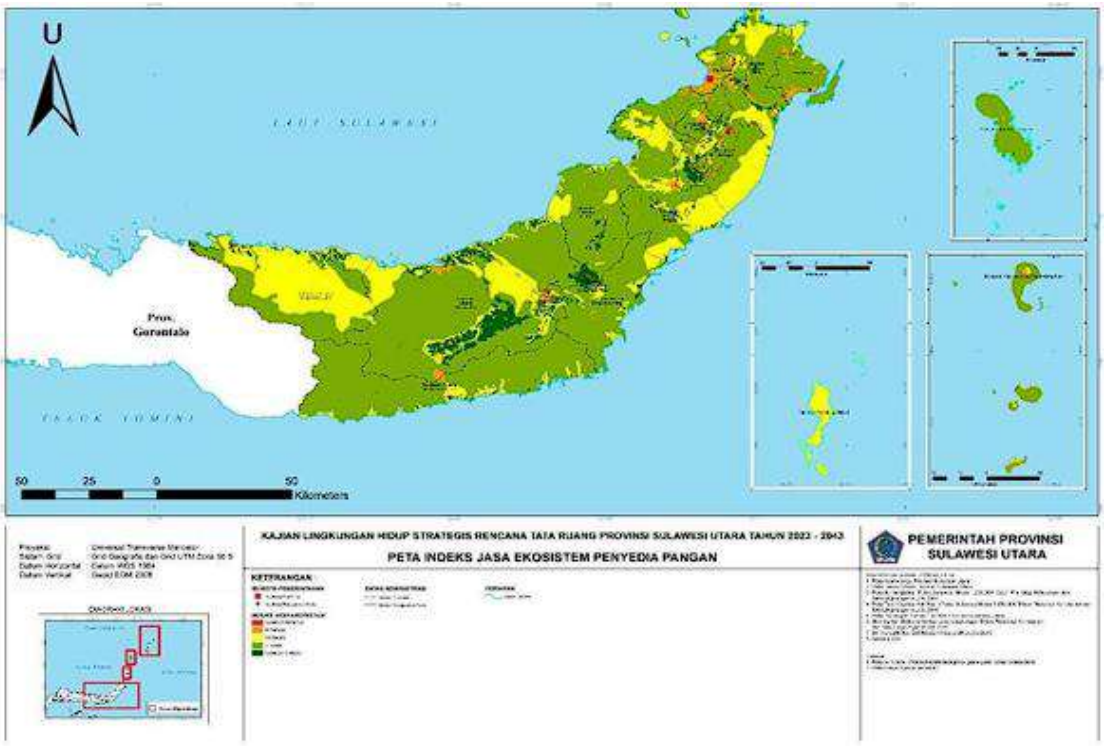

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

b. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Pengolahan Limbah

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Tabel 2.14
Jasa Lingkungan Penyedia Air

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	24.177,39	134.381,51	167.286,03	65,97	1.019,56
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	12.330,46	87.319,44	79.700,26	30,35	238,27
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	10.283,87	37.635,75	37.625,85	675,71	417,29
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3.962,40	26.564,84	133.295,77	155,27	460,60
Kabupaten Kepulauan Sangihe	466,47	3.769,59	55.225,74	257,02	63,08
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.061,17	2.704,31	17.039,71	3,11	
Kabupaten Kepulauan Talaud	38.145,80	10.269,85	52.639,69	131,38	0,40
Kabupaten Minahasa	13.230,02	70.801,01	24.095,67	58,84	4.664,05
Kabupaten Minahasa Selatan	15.661,50	100.783,68	28.892,16	38,65	290,57
Kabupaten Minahasa Tenggara	6.135,65	40.669,11	28.238,45	158,41	110,95
Kabupaten Minahasa Utara	4.252,81	62.859,15	32.115,06	64,22	265,87
Kota Bitung	2.146,51	4.769,56	26.014,41	26,83	15,19
Kota Kotamobagu	883,44	9.654,44	328,90		22,49
Kota Manado	1.550,88	12.388,13	2.226,97	0,90	68,02
Kota Tomohon	5.626,88	7.494,24	3.714,73	3,44	67,15
Sulawesi Utara	**140.915,24**	**612.064,62**	**688.439,39**	**1.670,10**	**7.703,51**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.2
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air

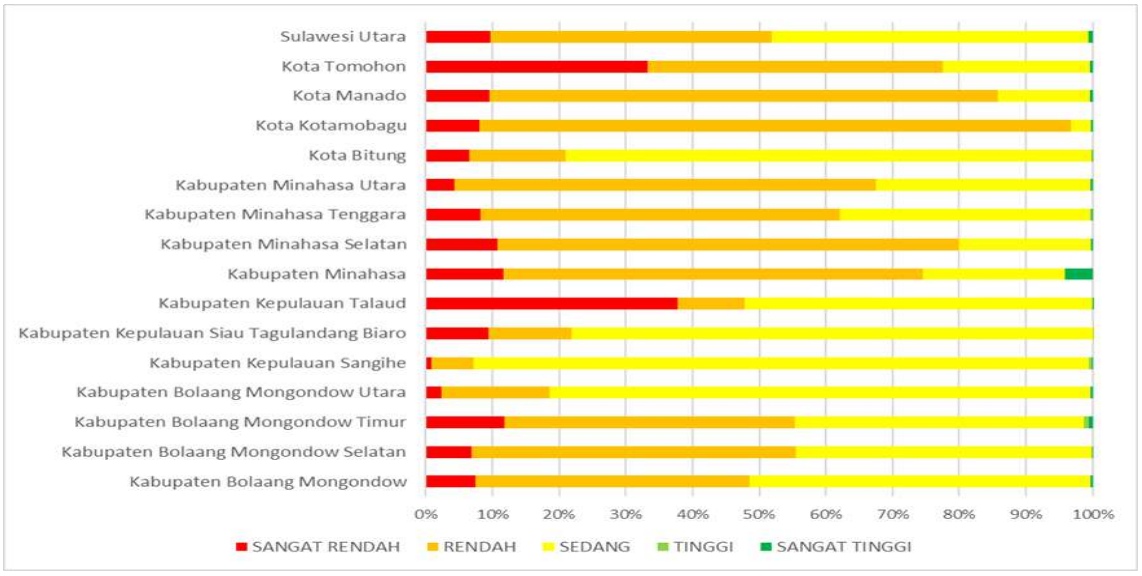

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 2.9
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Air

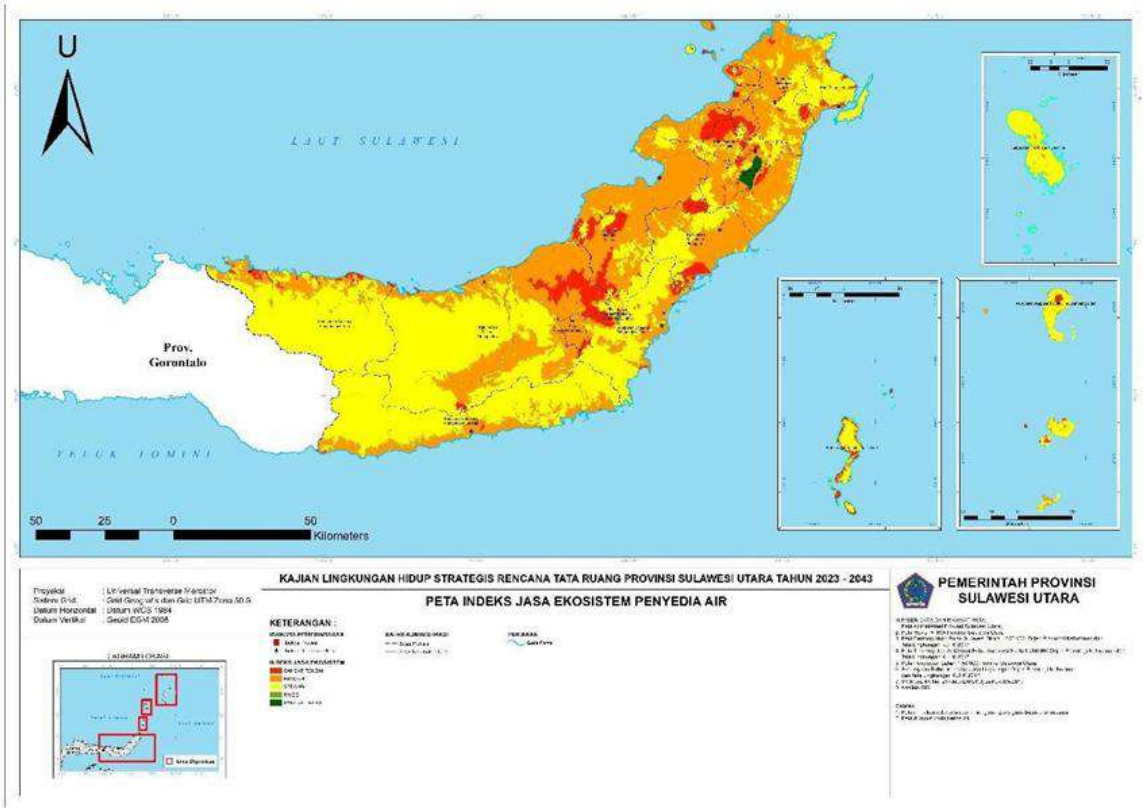

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel, grafik, dan peta di atas, dapat dideskripsikan bahwa IJE penyedia air Provinsi Sulawesi Utara adalah rendah hingga sedang. Dapat dilihat pada gambar 2.9 di atas, secara spasial jasa lingkungan penyedia air dengan kelas sedang berada pada penutup lahan yang terokupasi oleh aktivitas manusia, yakni permukiman, sawah, ladang, perkebunan dan tegalan.

c. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya

vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Tabel 2.15
Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	5.396,06	57.026,08	101.215,88	59.464,31	103.828,14
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	11.655,06	50.607,56	38.175,76	44.596,82	34.583,58
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5.549,82	18.274,45	34.078,89	13.208,95	15.526,36
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	952,71	3.781,78	47.517,64	22.395,18	89.791,56
Kabupaten Kepulauan Sangihe	441,61	1.849,96	4.556,15	22.872,18	30.062,00
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.058,62	1.614,35	1.712,42	8.640,32	8.782,59
Kabupaten Kepulauan Talaud	457,75	1.019,46	47.054,58	14.600,24	38.055,10
Kabupaten Minahasa	2.261,10	16.092,55	70.014,83	13.407,32	11.073,79
Kabupaten Minahasa Selatan	804,27	7.601,88	113.153,38	13.870,01	10.237,01
Kabupaten Minahasa Tenggara	565,51	3.019,40	43.755,66	7.035,17	20.936,84
Kabupaten Minahasa Utara	240,97	6.944,66	66.477,16	10.958,16	14.936,15
Kota Bitung	1.398,59	2.521,76	4.598,37	13.409,63	11.044,14
Kota Kotamobagu	66,18	4.257,81	6.446,11	22,49	96,67
Kota Manado	285,36	6.606,16	7.972,95	1.210,56	159,87
Kota Tomohon	332,14	3.133,84	11.610,85	575,43	1.254,18
Sulawesi Utara	**31.465,75**	**184.351,71**	**598.340,65**	**246.266,77**	**390.367,98**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.3
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

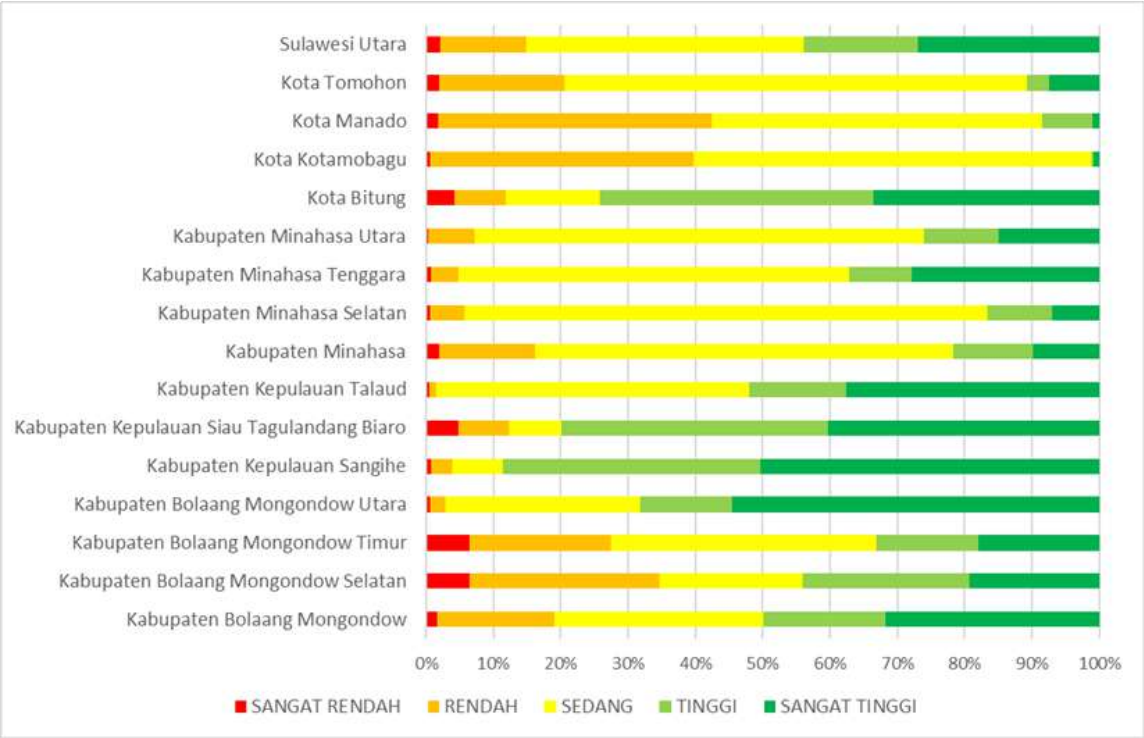

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai IJE Pengatur iklim terluas dengan tingkat sedang dengan luas sebanyak 41% dari luas wilayah, atau seluas 5.983,40 Km^2. Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Bolaang Mongondow Utara dan Kepulauan Sitaro mempunyai IJE pengatur iklim terbaik dari semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Hutan mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar bagi kontrol iklim, baik iklim mikro di bawah tegakan hutan itu sendiri, maupun iklim regional dalam sistem fungsional suatu wilayah, bahkan secara global mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meregulasi kondisi iklim

Gambar 2.10
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

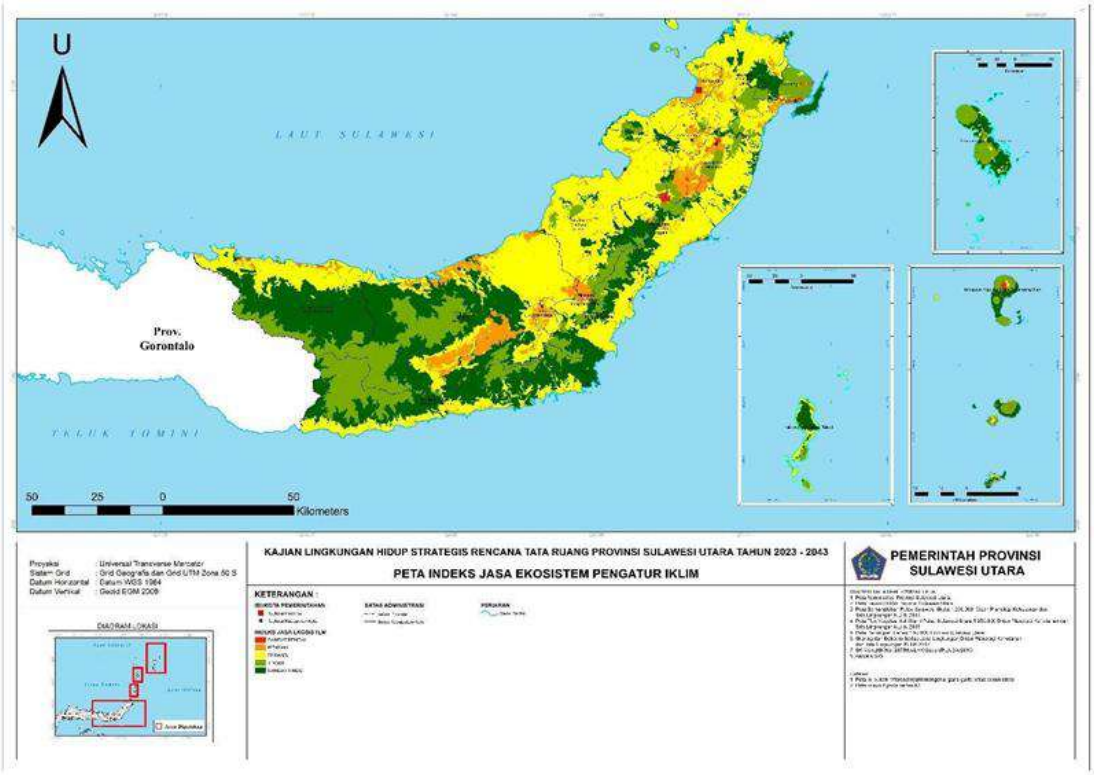

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

d. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Tabel 2.16
Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Longsor

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	5.115,42	45.058,36	113.325,84	138.163,26	25.267,60
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	11.591,83	50.154,97	38.669,02	76.487,24	2.715,71
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5.518,27	22.471,57	29.038,36	28.326,94	1.283,34
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	517,05	9.299,33	42.228,43	57.327,15	55.066,91
Kabupaten Kepulauan Sangihe	441,61	2.510,74	3.833,53	22.623,14	30.372,88
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.058,62	2.420,10	903,56	9.362,17	8.063,84
Kabupaten Kepulauan Talaud	309,29	35.300,76	13.201,56	46.772,39	5.603,13
Kabupaten Minahasa	840,30	25.912,16	61.561,65	20.049,38	4.486,10
Kabupaten Minahasa Selatan	703,76	19.291,59	101.511,70	18.992,06	5.167,44
Kabupaten Minahasa Tenggara	507,57	3.103,61	43.708,87	23.092,07	4.900,46
Kabupaten Minahasa Utara	137,91	10.858,77	62.298,25	16.777,86	9.484,32
Kota Bitung	1.398,59	3.529,99	3.453,53	15.226,31	9.364,07
Kota Kotamobagu	66,18	2.738,88	7.965,04		119,16
Kota Manado	285,36	7.923,56	6.640,68	1.156,50	228,79
Kota Tomohon	332,14	7.693,68	7.050,45	531,30	1.298,87
Sulawesi Utara	**28.823,91**	**248.268,08**	**535.390,48**	**474.887,77**	**163.422,62**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.4
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Longsor

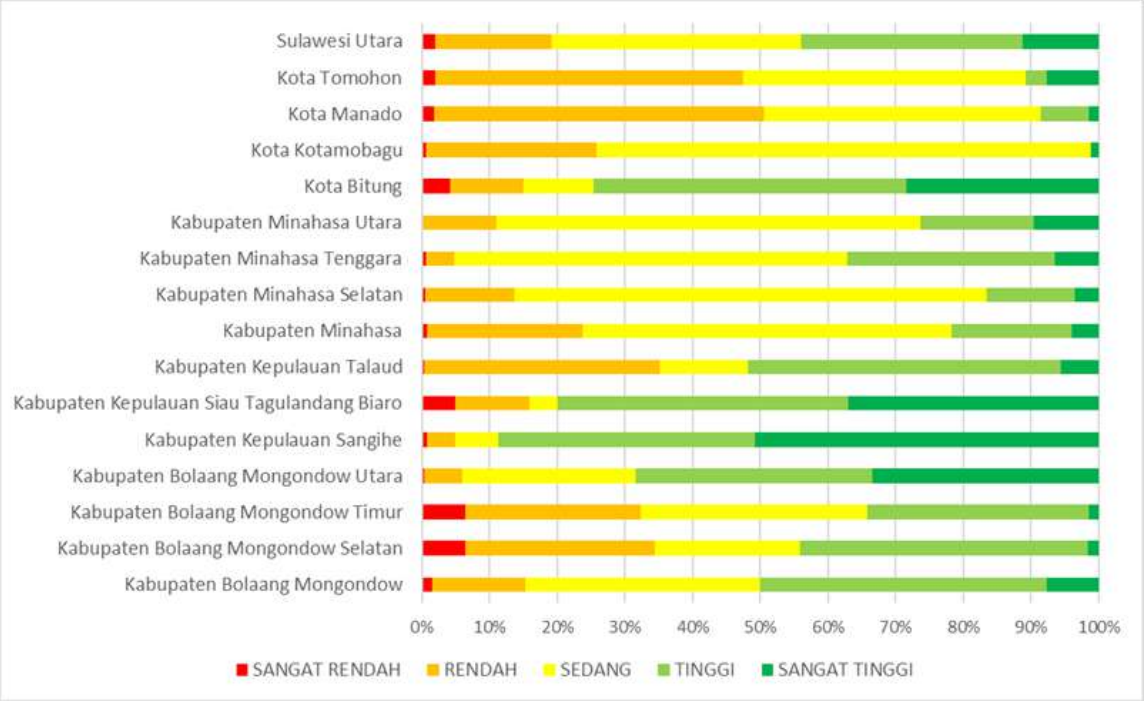

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Bencana longsor mempunyai dampak yang luas biasa terhadap kegiatan manusia. Penyebab longsor sangat bisa meliputi beberapa faktor, bisa karena faktor internal/genetic, maupun faktor eksternal. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai IJE Mitigasi Longsor sedang

hingga tinggi sebanyak 70 % dari total luas wilayah. Area yang mempunyai IJE tinggi – sangat tinggi tersebut berada di wilayah yang bervegetasi rapat seperti hutan (Gambar 4.31).

Gambar 2.11
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Longsor

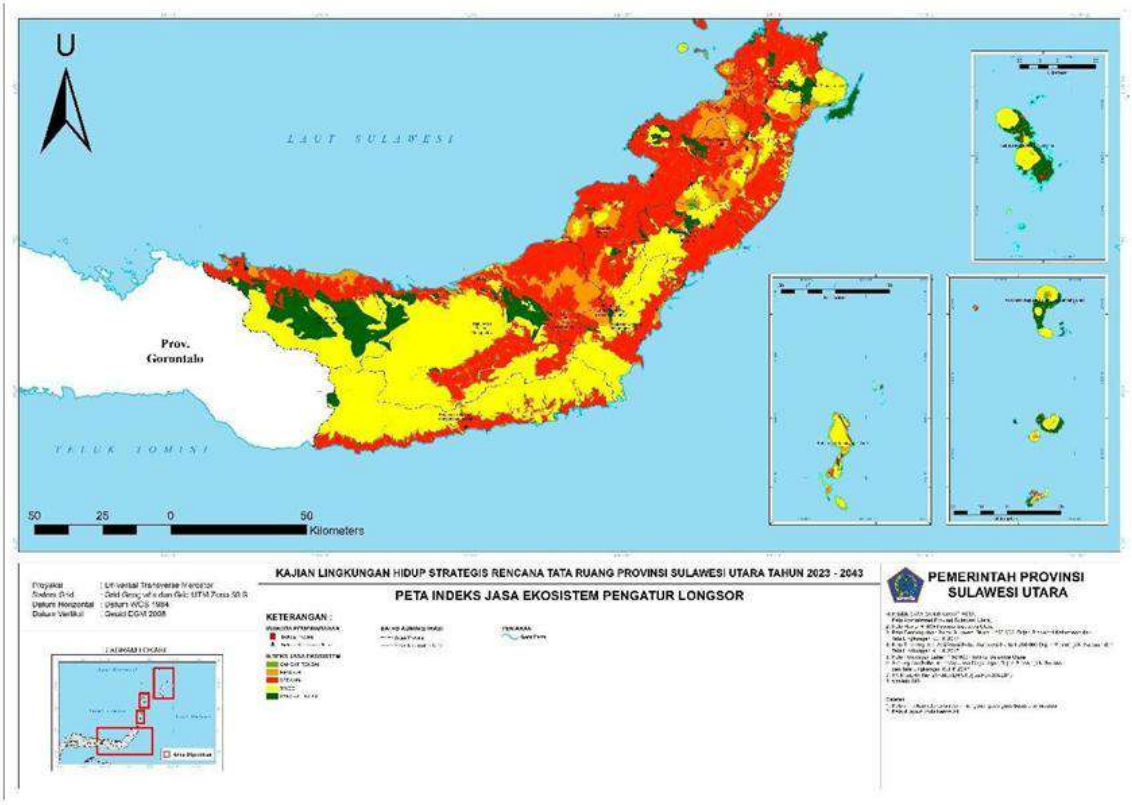

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

e. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Banjir

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari banjir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada

bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi datar.

Tabel 2.17
Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Banjir

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	509,54	91.542,59	71.461,84	1.218,37	162.198,13
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0,01	84.361,53	16.056,69	628,81	78.571,74
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1.168,50	42.764,86	13.096,07	1.061,53	28.547,51
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	4.733,90	32.158,70	15.154,73	660,34	111.731,19
Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.001,22	5.143,81	941,27	22.172,90	30.522,70
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.864,38	2.288,18	229,73	8.856,97	8.569,04
Kabupaten Kepulauan Talaud	402,37	20.281,56	27.806,72	452,33	52.244,14
Kabupaten Minahasa	10.806,18	25.690,48	51.842,33	8.242,65	16.267,95
Kabupaten Minahasa Selatan	1.876,11	28.123,99	91.509,63	4.262,26	19.894,56
Kabupaten Minahasa Tenggara	1.852,93	5.732,52	39.887,12	3.748,52	24.091,49
Kabupaten Minahasa Utara	2.028,55	26.264,84	45.530,81	9.117,37	16.615,53
Kota Bitung	2.058,51	4.718,60	1.721,64	13.406,09	11.067,65
Kota Kotamobagu		5.475,29	5.294,81	15,48	103,68
Kota Manado	217,68	9.558,38	5.089,31	112,45	1.257,07
Kota Tomohon	1.431,65	8.609,89	5.037,61	512,82	1.314,47
Sulawesi Utara	**29.951,53**	**392.715,25**	**390.660,30**	**74.468,92**	**562.996,85**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.5
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Banjir

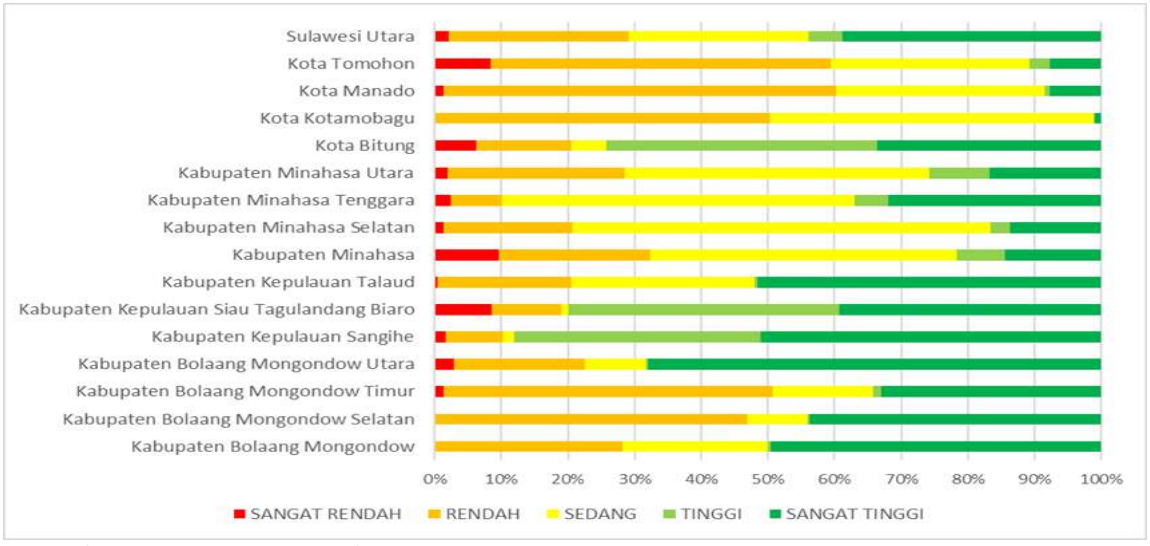

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

IJE mitigasi banjir Provinsi Sulawesi Utara Sangat Tinggi, dan mencakup 39 % luas wilayah, atau seluas 5.629,96 Km^2. Hal ini disebabkan oleh kombinasi bentuk lahan, jenis vegetasi alami dan penutup lahan yang baik. Namun, perlu diperhatikan bagian yang rendah dan sangat rendah yang berada

pada wilayah pemukiman, sawah dan bantaran badan air, karena mempunyai nilai IJE rendah -sangat rendah, sehingga kemungkinan terjadi banjir sangat tinggi.

Gambar 2.12
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Banjir

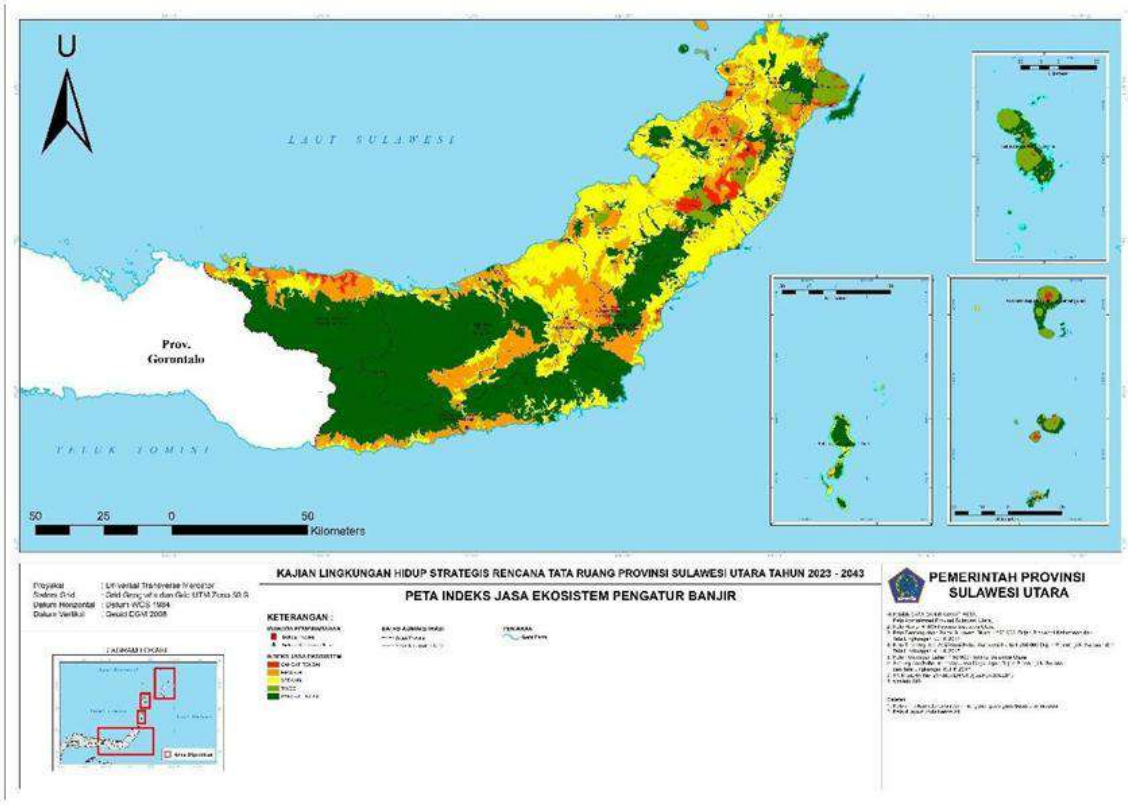

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

f. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi KARHUTLA

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Karhutla di suatu wilayah tentunya menimbulkan asap yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Tidak hanya

itu, kebakaran hutan juga membuat daerah resapan air semakin berkurang karena tidak ada lagi pepohonan.

Tabel 2.18
Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Karhutla

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	23.523,58	103.386,22	36.573,50	138.233,42	25.213,76
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	13.984,27	85.245,72	1.187,15	78.881,62	320,03
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	9.680,92	45.738,18	1.650,00	29.152,08	417,29
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	5.964,70	42.990,25	3.085,96	58.926,72	53.471,24
Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.104,52	5.443,69	22.416,98	30.753,63	63,08
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.151,17	2.629,48	9.241,95	8.785,69	
Kabupaten Kepulauan Talaud	35.296,88	13.136,32	57,45	47.556,83	5.139,64
Kabupaten Minahasa	14.783,16	68.276,96	8.768,43	16.371,08	4.649,96
Kabupaten Minahasa Selatan	20.308,79	95.471,65	9.126,97	19.827,35	931,79
Kabupaten Minahasa Tenggara	1.986,40	43.195,23	5.661,93	24.192,82	276,20
Kabupaten Minahasa Utara	8.786,64	60.016,21	10.935,30	13.389,41	6.429,54
Kota Bitung	2.198,35	5.369,03	14.187,03	11.202,89	15,19
Kota Kotamobagu	883,44	7.388,07	2.498,59		119,16
Kota Manado	1.379,34	13.085,07	385,20	1.317,27	68,02
Kota Tomohon	5.544,15	7.599,13	2.438,50	1.257,52	67,15
Sulawesi Utara	**146.576,32**	**598.971,22**	**128.214,94**	**479.848,33**	**97.182,05**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.6
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi KARHUTLA

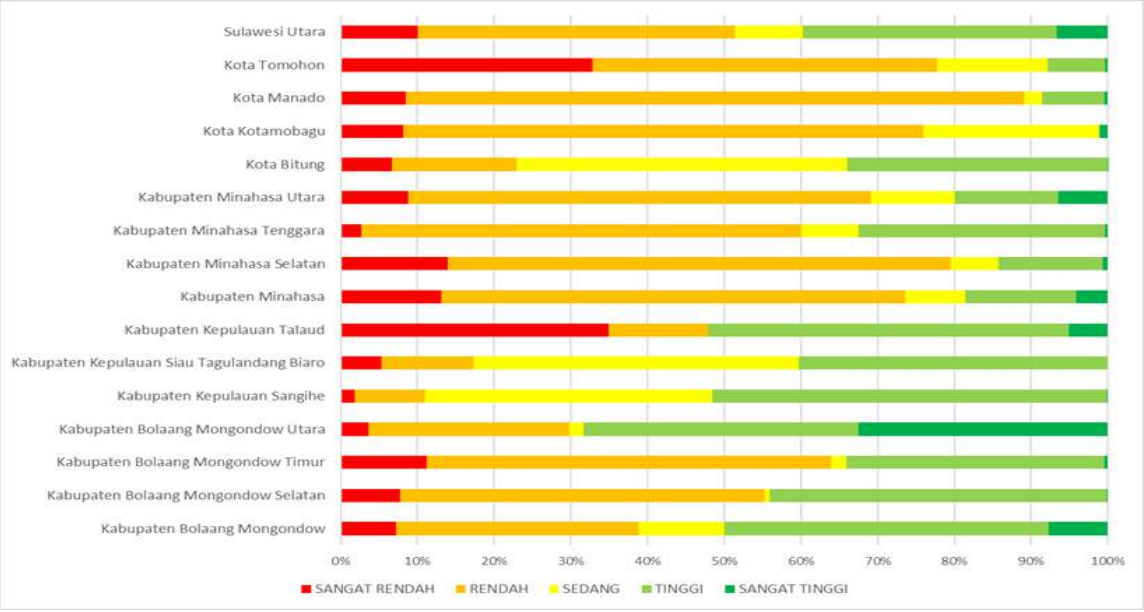

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Provinsi Sulawesi Utara secara umum mempunyai IJE Mitigasi Karhutla yang tinggi, terutama di Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Minahasa Selatan dan Minahasa. Pada Gambar 2.13 dapat dilihat bahwa

wilayah pesisir Pantai dengan penutup lahan Semak dan perkebunan, mempunyai IJE sangat rendah untuk mengatur Karhutla, sehingga risiko karhutla semakin tinggi.

Gambar 2.13
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi KARHUTLA

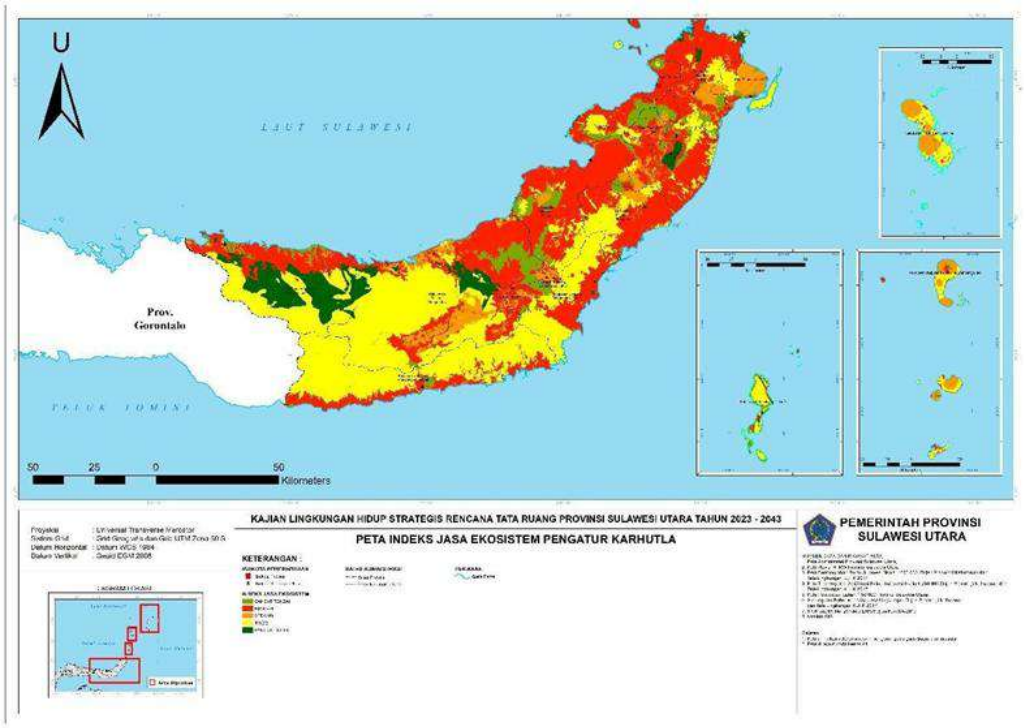

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

g. Jasa Lingkungan Fungsi Ekosistem Pengaturan Tata Air

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan. ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang

normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Tabel 2.19
Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air

KABUPATEN	KINERJA JASA LINGKUNGAN				
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
Kabupaten Bolaang Mongondow	25.211,93	104.613,79	33.688,24	159.558,80	3.857,71
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	59.653,29	30.550,35	10.213,50	78.404,72	796,93
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	21.288,34	28.123,75	7.616,10	27.954,54	1.655,74
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	737,87	46.234,65	5.074,44	109.057,31	3.334,60
Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.174,78	4.002,51	906,93	52.416,45	281,23
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.672,97	1.604,97	104,34	17.210,18	215,83
Kabupaten Kepulauan Talaud	218,66	30.222,58	18.049,42	19.701,52	32.994,96
Kabupaten Minahasa	5.117,94	78.120,74	5.100,31	19.792,53	4.718,08
Kabupaten Minahasa Selatan	2.857,25	111.117,68	7.532,13	23.097,66	1.061,84
Kabupaten Minahasa Tenggara	1.523,80	40.088,47	5.850,70	26.268,97	1.580,64
Kabupaten Minahasa Utara	3.085,58	53.738,12	16.879,67	21.701,00	4.152,73
Kota Bitung	2.135,32	5.459,08	903,04	23.817,59	657,48
Kota Kotamobagu	288,38	4.878,83	5.602,90	103,68	15,48
Kota Manado	5.080,31	9.463,67	321,40	1.257,07	112,45
Kota Tomohon	2.135,32	12.101,32	842,50	1.823,87	3,42
Sulawesi Utara	**134.181,75**	**560.320,51**	**118.685,62**	**582.165,87**	**55.439,11**

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.7
Persentase Indeks Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air

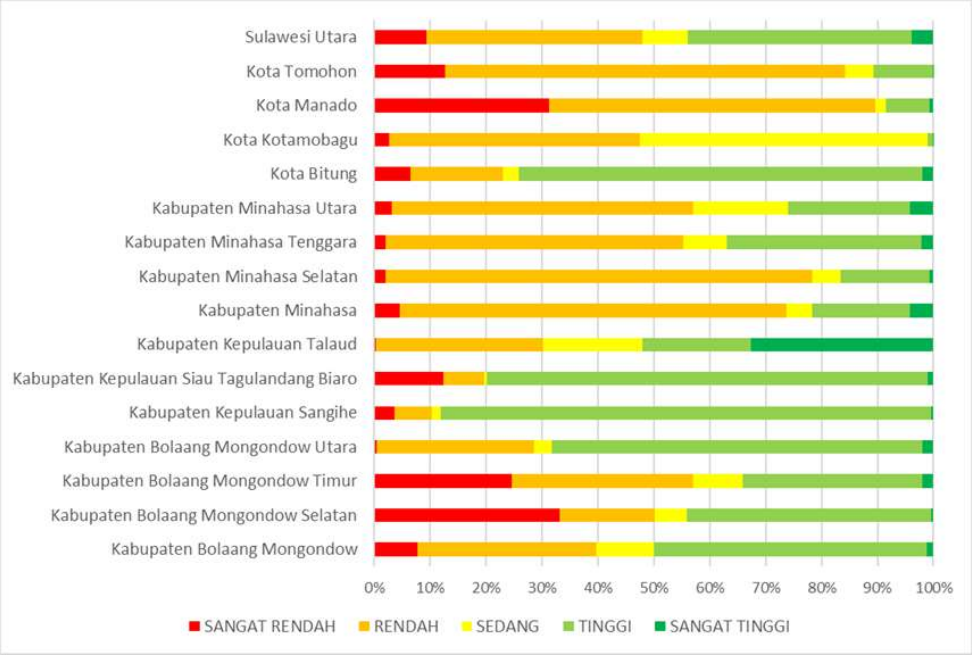

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Provinsi Sulawesi Utara secara umum mempunyai IJE Tata Air dan pengolahan limbah yang tinggi, dengan cakupan wilayah hingga 5.821,65 Km^2 atau 40% dari luas wilayah. Sementara itu, jenis pemanfaatan lahan yang mempunyai jasa lingkungan sangat rendah ada pada permukiman dan perkebunan. Hal ini dapat disebabkan karena pemukiman, dan perkebunan mempunyai potensi limbah domestic yang besar, serta banyak permukaan yang bersifat impermeable, sehingga meningkatkan potensi aliran permukaan serta banjir perkotaan.

Gambar 2.14
Peta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air

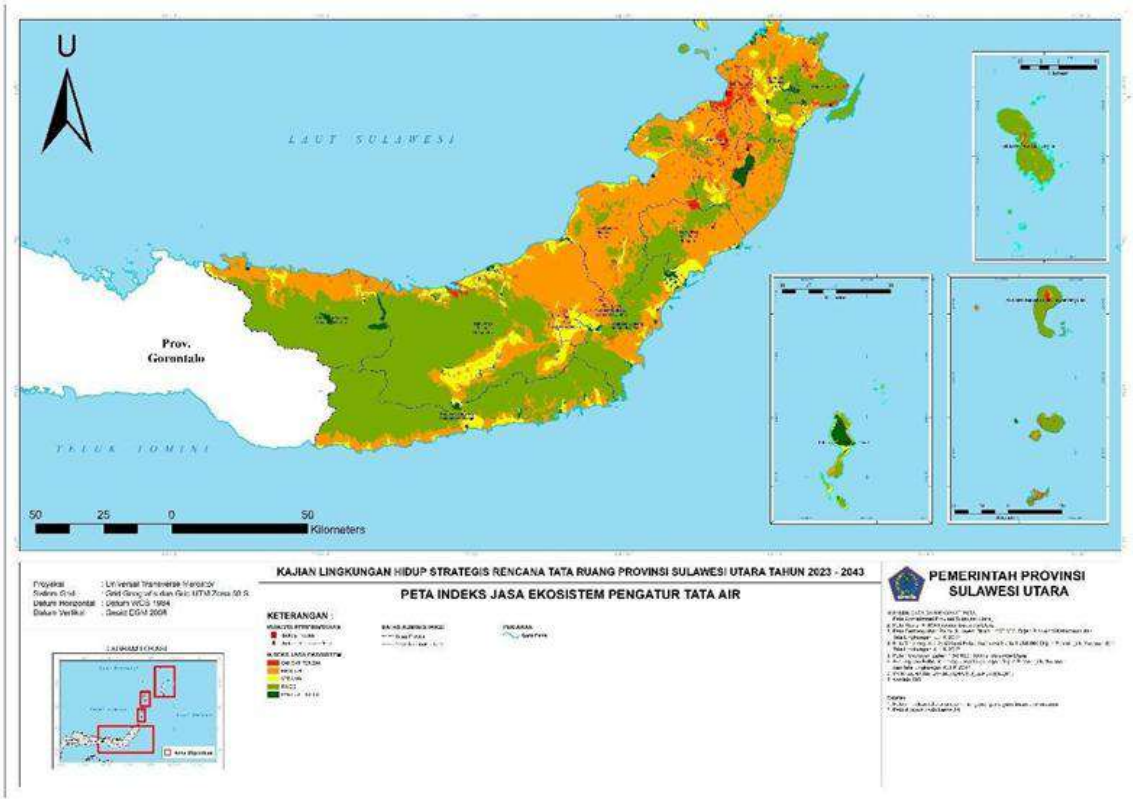

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Gambar 2.15
Peta Kerentanan Perubahan Iklim

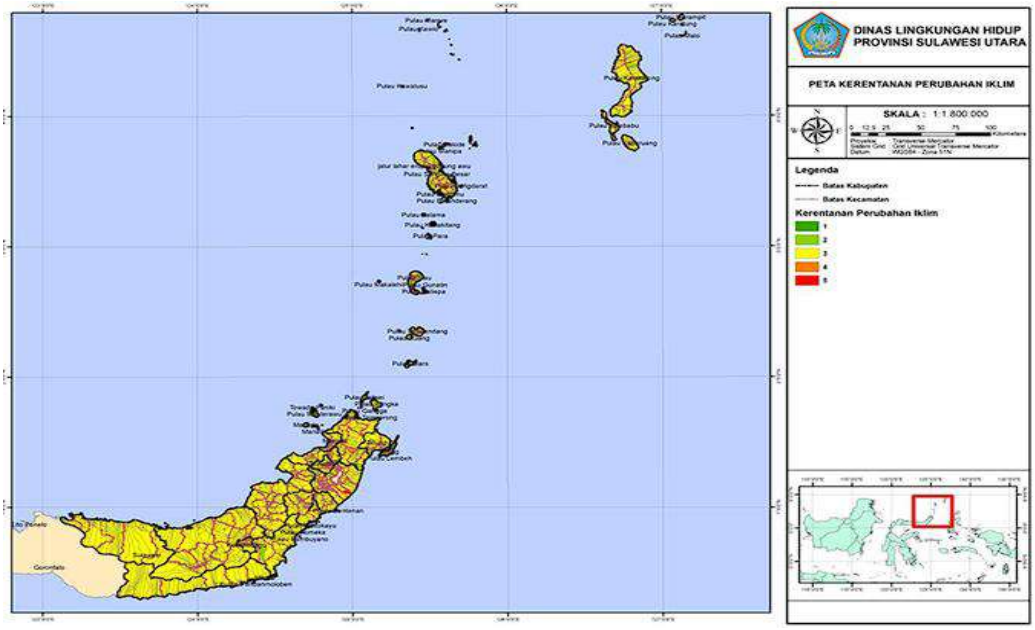

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan peta Kerentanan Perubahan Iklim Sulawesi Utara yang bersumber dari BPKH Provinsi Sulawesi Utara yang tersaji dalam dokumen KLHS, Tingkat kerentanan umumnya berada pada tingkat kerentanan sedang. Sementara itu, jika merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) KLHK, maka tingkat kerentanan di Sulawesi Utara berkisar pada angka 2 (rendah) hingga 4 (tinggi).

2.1.4.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Energi

a. Potensi Energi

Sistem Kelistrikan SulutGo saat ini masih di dominasi oleh Pembangkit listrik Energi Fosil, keberadaan PLTU Amurang 1 dan 2 dengan kapasitas 2×25 MW, PLTU Sewa Amurang 1 dan 2 dengan kapasitas pembangkit 2x30 MW dan PLTU Sulut 3 dengan kapasitas pembangkit 2x50 MW tetap signifikan, meskipun secara umum PLTU di

Sulut cukup terbatas dibandingkan daerah lain. Di wilayah kepulauan dan terpencil digunakan PLTD (diesel), namun jumlahnya menurun seiring program dedieselisasi. Secara total, kapasitas terpasang listrik di SulutGo mencapai sekitar 561,41 MW pada sampai dengan akhir bulan Mei 2025, dengan beban puncak sekitar 484,38 MW, menunjukkan cadangan sekitar 77,03 MW sebelum PLTU Binjeita dengan kapasitas pembangkit 2x50 MW nantinya beroperasi. Tren dekade ini menunjukkan pertambahan kapasitas EBT (~200 MW dari PLTP, PLTA, PLTS, PLTB) dan non-EBT (~100 MW PLTU), mencerminkan transisi energi namun masih dalam masa peralihan menuju sistem yang lebih bersih dan andal.

Sulawesi Utara telah melakukan ekspansi signifikan pembangkit Energi Baru Terbarukan sejak pertengahan dekade. Pembangkit besar seperti PLTS Likupang 15 MW mulai beroperasi tahun 2019, dilanjutkan dengan PLTP Lahendong (geothermal) total kapasitas 120 MW dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energy secara periodik dari pembangkit unit 1 s/d unit 6. Selain itu, PLTA Tonsea Lama dengan kapasitas 14 MW (12 MW efektif), serta turunan PLTA Tanggari 1 (18 MW) dan Tanggari 2 (19 MW) telah memasok energi sejak lama, dengan produksi PLTA Tonsea Lama tetap stabil sekitar 36,7 juta kWh per tahun. Pada dekade terakhir, penambahan pembangkit PLTA Sawangan (12–16 MW) dan PLTS Danau Tondano juga direncanakan untuk meningkatkan porsi EBT

melalui proyek hybrid dan diversifikasi sumber energi.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak Jenis potensi Energi Baru Terbarukan diantaranya Air, Surya, Panas Bumi, Sampah, Bayu (Angin), Arus Laut, Biomas. Berdasarkan data tabel dibawah ini jumlah potensi EBT Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1.546,09 MW.

Tabel 2.20
Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Sulawesi Utara

No	Jenis Potensi	Kapasitas (MW)
1	Air	353,80
2	Surya (Matahari)	284,29
3	Panas Bumi	758,00
4	Sampah	20,00
6	Bayu (Angin)	100,00
7	Arus Laut	20,00
8	Biomas	10,00
Jumlah		1.546,09

Sumber Data : Dinas ESDM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

b. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per Kapita Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan periode akhir Triwulan IV, Desember 2024 adalah *801,02 kWh/Kapita.*

Dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 801,02 kWh pada akhir periode Triwulan IV, tahun 2024, menunjukan bahwa ada trend positif konsumsi listrik per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 781,41 kWh/kapita, naik sekitar 19,61 kWh menjadi 801,02 kWh/kapita di tahun 2024 .

Tabel 2.21
Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	*KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA*	*710,18 kWh/kapita*	*710,27 kWh/kapita*	*735,33 kWh/kapita*	*739,41 kWh/kapita*	*781,41 kWh/kapita*	*801,02 kWh/Kapita*

Sumber: Dinas ESDM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Air

a. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Penyediaan air minum merupakan hal dasar yang harus disediakan oleh negara kepada Masyarakat. hal ini karena air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar Masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, maka penyediaan air minum merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang wajib disediakan negara untuk mencukupi kebutuhan Masyarakat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, Tingkat persentase akses capaian air minum layak di Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat. Tahun 2020, persentase capaian akses air minum layak di Sulawesi Utara berada pada angka 90,31 persen, lebih tinggi sedikit dari capaian rata-rata nasional yang berada di angka 90,21 persen. Sedangkan pada tahun 2024, capaian akses air minum layak Sulawesi Utara mencapai 94,46 persen, yang mana angka ini berada di atas angka rata-rata capaian nasional yang mencapai 92,64 persen.

Grafik 2.8
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

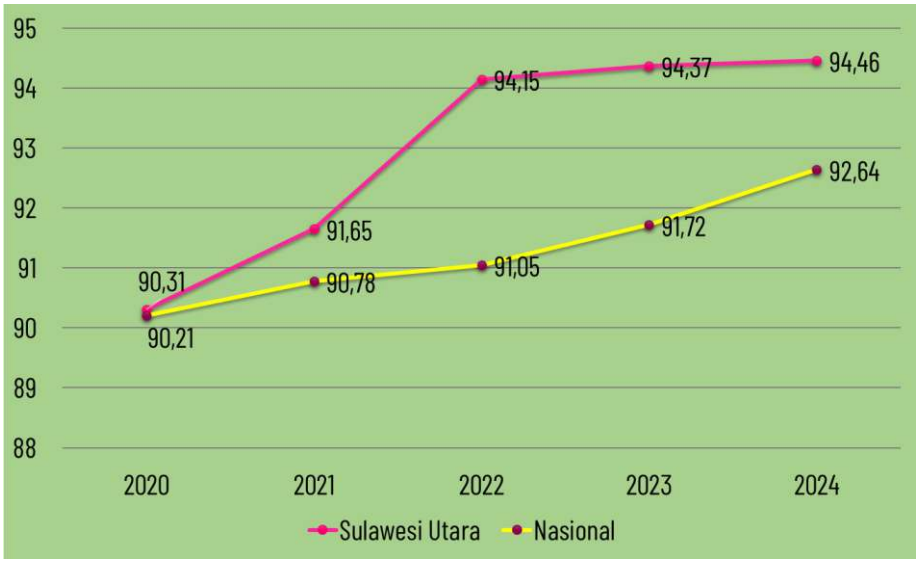

Sumber : BPS Pusat Tahun 2025

Pemerintah Pusat sedang menyiapkan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional BIMATARA untuk melayani kebutuhan air minum curah di Kota Bitung, Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Tahapan perencanaan telah selesai dilaksanakan tahun 2023 dan saat ini sedang dikaji pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui skema KPBU.

C. Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Sebagai Provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan, terutama di kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	81,44	77,79	78,30	74,30	77,32	76,32

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel IKP Sulawesi Utara diatas, menunjukkan angka yang berfluktuatif yang sebagian besar disebabkan oleh adanya penurunan produksi/panen akibat cuaca buruk dan bencana alam. Dari sisi distribusi adanya gangguan dalam sistem distribusi pangan seperti keterlambatan pasokan ataupun kerusakan infrastruktur transportasi dapat mengurangi akses terhadap pangan, terutama masyarakat di wilayah kepulauan.

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Selain mewujudkan ketahanan pangan wilayah, Provinsi Sulawesi Utara juga perlu memperhatikan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah indicator proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi. Capaian Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Utara tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	3,96	4,49	6,91	6,22	6,26	6,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

c. Ketersediaan Pangan

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi penyangga penyedia pangan. Ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 139.853 ton, selanjutnya tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 130.865 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 142.438 ton hingga tahun 2023 menjadi 238.190 ton. Sedangkan tahun 2024 ketersediaan beras mengalami penurunan menjadi 143.160 ton. Penurunan ketersediaan beras tahun 2024 dibandingkan dengan 2023 karena adanya penurunan produksi di wilayah sentra karena perbaikan irigasi dan pengaruh el-nino.

Tabel 2.24
Ketersediaan Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras (Ton)	155.287	139.853	130.865	142.438	238.190	143.160
2	Jagung (Ton)	323.838	351.228	219.578	119.008	88.471	150.743

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

d. Skor Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram

serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara menunjukkan fluktuasi dari 2020 hingga 2024, dengan penurunan pada 2021 yang kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi, diikuti oleh peningkatan signifikan pada 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2023, skor kembali meningkat pada 2024, mencerminkan tren pemulihan dan stabilisasi pola konsumsi pangan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pangan, meskipun tetap perlu penguatan kebijakan ketahanan pangan untuk menjaga keberlanjutan perbaikan ini, yakni perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Tabel 2.25
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,00	83,10	89,70	87,00	87,60

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2.1.4.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air sungai dan danau, udara, lahan dan air laut. Adapun 4 (empat) Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan Danau), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan di Sulawesi Utara.

Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No	IKLHD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target dalam RPJMD	70,51	70,51	70,81	71,11	71,41
2	Capaian	70,69	72,38	72,37	73,87	76,26

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (diolah)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2020-2024 semuanya melampaui target dalam RPJMD. Tahun 2023 ditargetkan RPJMD senilai 71,11 dan capaiannya sebesar 73,87. Capaian ini masuk dalam kategori "baik", dimana rentang skornya berada pada 70-90. Berikut capaian beberapa indikator lingkungan hidup tahun 2020-2024.

Tabel 2.27
Capaian IKA, IKU, IKL dan IKAL Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH :	**70,51**	**72,38**	**72,37**	**73,87**	**76,26**
- IKA	50	50,3	48,24	78,36	58,17
- IKU	90,97	91,27	92,41	50,25	93,44
- IKL	-	-	61,89	93,96	61,75
- IKAL	50	82,65	82,65	100	83,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Secara umum, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Utara cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka persentase akses sanitasi aman Provinsi Sulawesi Utara berada pada 5,41 persen. Sedangkan pada tahun 2024 angkanya naik menjadi 6,4 persen. Akan tetapi, angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, persentase akses aman nasional mencapai 7,64 persen, sedangkan pada tahun 2024 angkanya naik menjadi 10,25 persen. Hal ini tentu memerlukan perhatian kita semua terkait dengan pemenuhan akses sanitasi yang aman bagi masyarakat yang juga merupakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum.

Grafik 2.9
Sanitasi Aman Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut

Tabel berikut menjelaskan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Namun jika dibandingkan data tahun 2021, capaian tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara turun cukup signifikan sebesar 0,8 persen. Hal ini secara umum dikarenakan masih dipengaruhi oleh pasca pandemi Covid-19 serta beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang menyebabkan refocusing anggaran belanja. Namun demikian pada tahun 2023 naik kembali menjadi 85.91 atau naik 1,86 persen dari tahun 2022 yang hanya sebesar 84.05 persen. Sedangkan pada tahun 2024, persentasenya kembali naik menjadi 87,31 persen, meninggalkan capaian rata-rata nasional yang masih berada di angka 83,60 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Persentase Akses Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024

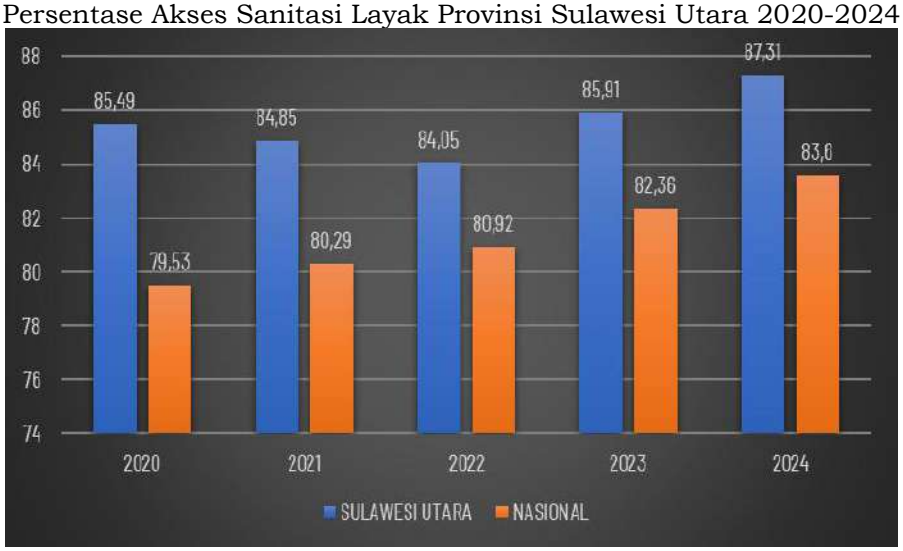

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah

Grafik 2.11
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Prov. Sulut

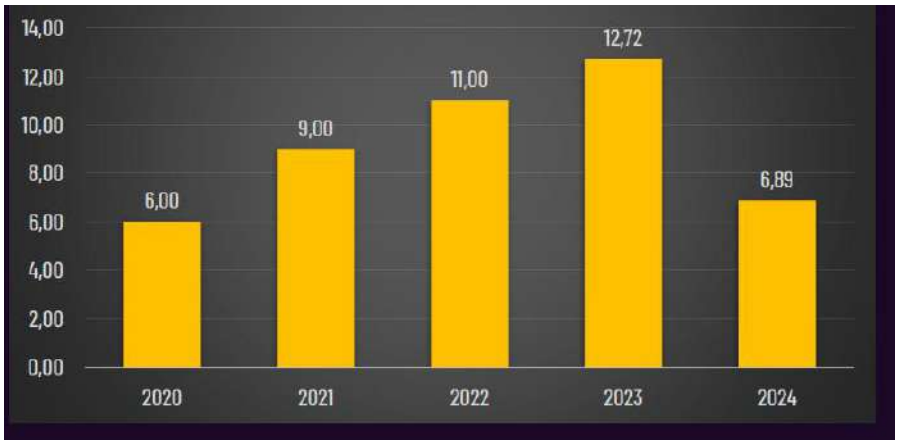

Sumber : SIPSN KLHK, 2025 (Diolah)

Pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Gubernur ini merupakan implementasi dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terbagi dalam 2 (dua) bagian besar, yakni; a) Pengurangan sampah dari sumbernya sebesar 30 persen dari total timbulan sampah pada tahun 2025; dan b) Penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025. Adapun target dan capaian pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.12
Target dan Realisasi Pengurangan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

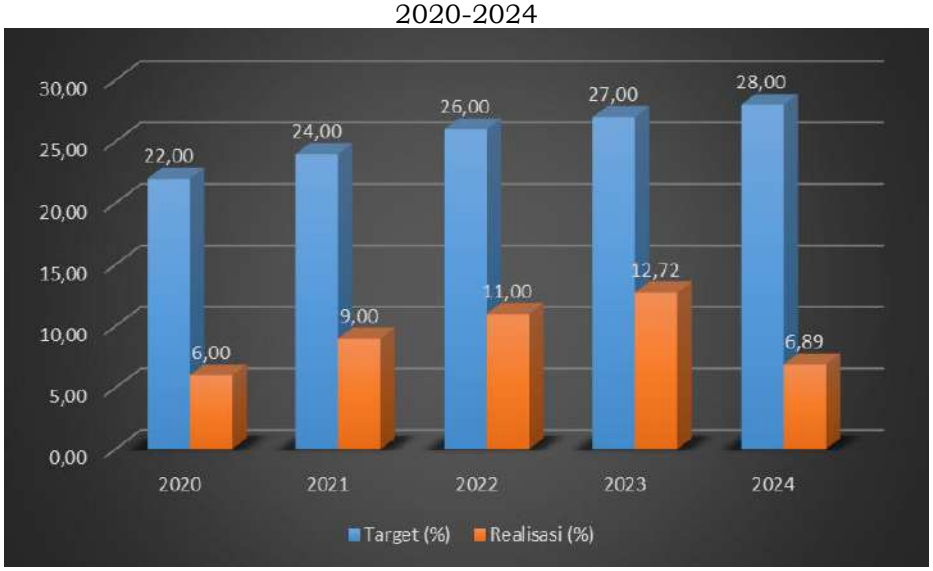

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2025

Grafik 2.13
Target dan Realisasi Penanganan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

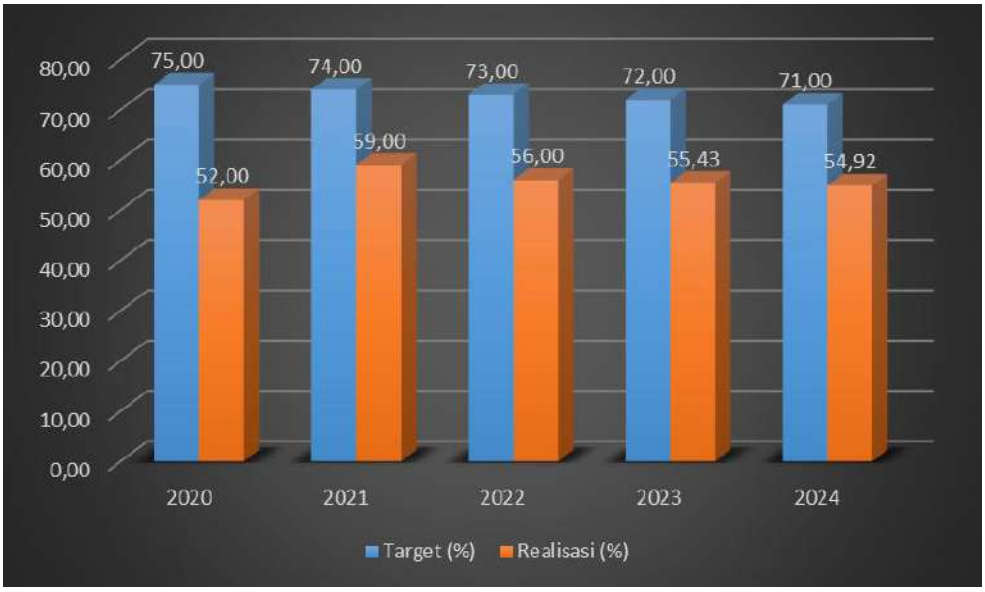

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2025

Tabel 2.28
Realisasi Capaian Pengelolaan Sampah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B)	%Pengurangan Sampah(B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C)	% Penanganan Sampah(C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C)	%Sampah Terkelola(B+C)/A
Kab. Bolaang Mongondow	46.496,44	18,69	0,04	2.920,00	6,28	2.938,69	6,32
Kab. Minahasa	63.922,63	17.595,18	27,53	41.763,30	65,33	59.358,48	92,86
Kab. Kepulauan Sangihe	20.529,64	392,76	1,91	9.084,85	44,25	9.477,61	46,17
Kab. Kepulauan Talaud	14.694,17	0,24	0,00	919,07	6,25	919,31	6,26
Kab. Minahasa Selatan	35.710,14	1.255,70	3,52	11.869,80	33,24	13.125,50	36,76
Kab. Minahasa Utara	43.976,48	1.932,17	4,39	23.849,28	54,23	25.781,46	58,63
Kab. Minahasa Tenggara	17.418,53	380,08	2,18	4.641,70	26,65	5.021,78	28,83
Kab. Bolaang Mongondow Utara	12.572,21	32,30	0,26	6.626,58	52,71	6.658,87	52,97
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	10.640,92	145,73	1,37	3.358,00	31,56	3.503,73	32,93
Kab. Bolaang Mongondow Timur	13.529,97	500,05	3,70			500,05	3,70
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.004,60	164,25	1,49	4.818,00	43,78	4.982,25	45,27
Kota Manado	106.288,37	7.639,21	7,19	89.790,00	84,48	97.429,21	91,66
Kota Bitung	58.055,22	1.655,23	2,85	41.245,00	71,04	42.900,23	73,90
Kota Tomohon	18.810,64	577,72	3,07	13.505,00	71,79	14.082,72	74,87
Kota Kotamobagu	31.626,81	2.542,70	8,04	23.095,37	73,02	25.638,07	81,06
TOTAL SULAWESI UTARA	**505.276,77**	**34.832,01**	**6,89**	**277.485,95**	**54,92**	**312.317,96**	**61,81**

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2025

Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R *(Reduse, Reuse, Recycle)* atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh.

Secara nasional, untuk mencapai target *universal access*, timbunan sampah harus berkurang 20 persen sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80 persen sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70 persen dari timbulan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30 persen sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA.

Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/ sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan "upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri" sebagai gaya hidup masa kini.

Hingga saat ini, masih terdapat 1 (satu) kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat Provinsi, penyediaan TPA Regional MAMITARANG (Manado, Minahasa Utara, Bitung) yang berlokasi di Desa Wori masih dalam proses pembangunan. TPA Regional Mamitarang diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan *open dumping* karena sudah jenuh *(over capacity)*. TPA Regional Mamitarang telah selesai dibangun pada tahun 2023 namun hingga kini belum beroperasi karena peralatan pendukung belum tersedia.

Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di Kabupaten/Kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi,

Berdasarkan data SIPSN kementerian LHK Tahun 2024, total volume/timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mencapai 505.276,76 ton. Sampah yang dikelola mencapai 345.114,02 ton/tahun atau 68,15 persen dari total volume sampah. Capaian pengurangan sampah tahun 2023 mencapai 64.399,46 ton atau 12,72 persen, sedangkan sampah yang tertangani mencapai 280.714,56 ton atau 55,43 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2019, dimana untuk target tahun 2023 pengurangan sampah sebesar 27 persen dan penanganan sampah sebesar 72 persen. Hal

ini membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Timbunan Sampah per Tahun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah/Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bitung	57.521,74	57.874,58	58.055,22	58.055,22	58.055,22
2.	Bolaang Mongondow Utara	15.773,48	15.167,94	12.497,57	-	12.572,21
3.	Bolaang Mongondow Selatan	12.736,86	12.736,86	10.553,46	10.553,46	11.004,60
4.	Kotamobagu	31.553,74	31.620,68	31.463,8	31.661,05	31.626,81
5.	Manado	121.504,81	124.059,81	106.241,06	106.288,37	106.288,37
6.	Minahasa	62.700,43	62.700,43	63.632,82	63.922,63	63.922,63
7.	Minahasa Selatan	34.523,60	34.523,60	34.523,6	34.856,04	35.710,14
8.	Minahasa Utara	37.904,52	41.061,22	43.114,17	43.976,48	43.976,48
9.	Minahasa Tenggara	16.282,65	16.559,47	16.840,95	17.127,26	17.418,53
10.	Kepulauan Sangihe	25.415,32	-	20.393,86	24.045,31	20.529,64
11.	Kepulauan Sitaro	13.106,60	13.429,08	10.776,55	10.492	10.640,92
12.	Kepulauan Talaud	24.104,13	-	13.949,57	-	14.694,17
13.	Tomohon	25.699,98	26.136,88	18.510,43	18.510,43	18.810,64
14.	Bolaang Mongondow	45.397,06	-	45.712,24	46.108,26	46.496,44
15.	Bolaang Mongondow Timur	16.103,98	-	13.476,24	13.476,24	13.529,97
Sulawesi Utara		540.328,90	435.870,55	499.741,54	506.437,31	505.276,76

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh persampahan dapat dilihat pada komposisi sampah di TPA berdasarkan sumber sampah. Di Sulawesi Utara, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sekitar

49,75 persen sampah di TPA berasal dari rumah tangga. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 40,68 persen. Sebagian besar dari proporsi ini merupakan rumah tangga yang tinggal di Kota ataupun di kawasan perkotaan di seluruh kabupaten/kota se Sulawesi Utara. Kedepannya pada tahun 2030 diharapkan angkanya telah berada pada 100 persen.

Grafik 2.12
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Prov. Sulut

Sumber : SIPSN KLHK, 2025 (Diolah)

2.1.4.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Gambar 2.16
Penurunan Intensitas Emisi GRK

Sumber : AKSARA 2025

Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 60,25% dalam kurun waktu 2010 hingga 2024, berdasarkan data dari aplikasi AKSARA Bappenas. Penurunan ini dihitung dengan membandingkan intensitas emisi tahun 2010 (36,98 Ton CO_2eq/Miliar Rupiah) dan tahun 2023 (14,70 Ton CO_2eq/Miliar Rupiah) karena 2024 belum ada data, di mana selisih keduanya menunjukkan peningkatan efisiensi pembangunan ekonomi dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif hijau. Provinsi Sulawesi Utara telah memanfaatkan teknologi rendah emisi serta penggunaan sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih bersih seperti PLTA, PLTP dan PLTS di Likupang. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa intensitas emisi di Sulawesi Utara diprediksi akan terus menurun seiring dengan adopsi praktik ramah lingkungan di berbagai sektor.

B. Indeks Risiko Bencana

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana. Hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi, terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara serta terletak pada lokasi yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Provinsi Sulawesi Utara antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu

bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan resiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Data yang ada menunjukkan bahwa indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berada pada risiko sedang. Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Indeks Risiko Bencana per Kabupataen/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	Kelas Resiko 2024
1.	Bolaang Mongondow	121.75	136.96	136.96	153.00	Sedang
2.	Bolaang Mongondow Timur	148.45	135.19	124.21	114.26	Sedang
3.	Bolaang Mongondow Utara	144.00	144.00	144.00	130.14	Sedang
4.	Kep. Sangihe	137.34	142.46	142.46	142.46	Sedang
5.	Minahasa	199.40	193.85	193.85	193.85	Tinggi
6.	Minahasa Selatan	134.80	137.22	137.22	131.91	Sedang
7.	Minahasa Tenggara	185.08	174.78	174.78	174.78	Tinggi
8.	Minahasa Utara	125.31	122.58	121.37	118.77	Sedang
9.	Kep. Sitaro	155.86	137.95	137.95	137.95	Sedang
10.	Tomohon	119.20	111.55	111.55	111.55	Sedang
11.	Bitung	100.69	104.87	104.87	96.25	Sedang
12.	Kotamobagu	74.83	69.91	65.51	68.28	Sedang
13.	Manado	100.26	90.96	83.38	73.50	Sedang
14.	Bolaang Mongondow Selatan	149.60	141.82	141.82	141.82	Sedang
15.	Kep. Talaud	102.80	100.15	100.15	100.15	Sedang
Sulawesi Utara			**129.62**	**128.01**	**125.91**	**Sedang**

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri Tahun 2024

C. Indeks Ketahanan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, peningkatan Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Sulawesi Utara menunjukkan tren yang cukup positif dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya penanggulangan bencana. IKD merupakan indikator komprehensif yang mengukur

kemampuan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana, mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, perencanaan, sistem peringatan dini, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur pendukung.

Pada tahun terakhir penilaian, Provinsi Sulawesi Utara mencapai skor IKD yang berada pada kategori Tinggi sesuai data terakhir Tahun 2024, dengan capaian tertinggi pada aspek kelembagaan dan peringatan dini, namun masih terdapat tantangan pada aspek partisipasi masyarakat dan pendanaan kontinjensi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas, terutama di tingkat kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi namun kapasitas rendah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka memperkuat kapasitas tersebut, di antaranya dengan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana. Dengan peningkatan IKD yang berkelanjutan, diharapkan Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi daerah yang lebih siap, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.

Tabel 2.31
Nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) Tahun 2021 – 2024

TAHUN	IKD (INDEKS KETAHANAN DAERAH)	TINGKAT KETAHANAN DAERAH
2021	0,82	TINGGI
2022	0,83	TINGGI
2023	0,85	TINGGI
2024	0,85	TINGGI

Sumber Data: BPBD Prov. Sulut, Tahun 2025

Tabel Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2020–2024 menunjukkan tren stabil pada tingkat ketahanan yang tinggi.

Pada tahun 2021, IKD tercatat sebesar 0,82, yang dikategorikan dalam tingkat ketahanan tinggi. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,83, dan terus naik menjadi 0,85 pada tahun 2023. Menariknya, nilai IKD tetap konstan di angka 0,85 untuk dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2023 dan 2024.

Stabilnya nilai IKD pada tingkat tinggi ini mencerminkan konsistensi dan keberhasilan daerah dalam mempertahankan kapasitas ketahanannya terhadap berbagai potensi gangguan atau krisis, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

2.1.4.7 Demografi

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sedang dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Sulawesi Utara tercatat sebanyak 2.666.821 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.364.515 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.302.306 jiwa. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk Sulawesi Utara menjadi 2.660.415 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah

1.360.389 jiwa (51,13%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.300.026 jiwa (48,87%).

Kemudian di Tahun 2024 terjadi lagi penurunan penduduk Sulawesi Utara menjadi 2.645.291 jiwa yang terdiri terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.351.734 jiwa (51,09%) dan penduduk berjenis kelamin Perempuan berjumlah 1.293.557 jiwa (48,90%). Adapun perkembangan penduduk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Grafik 2.13
Jumlah Penduduk Sulawesi Utara menurut jenis kelamin Tahun 2020-2024

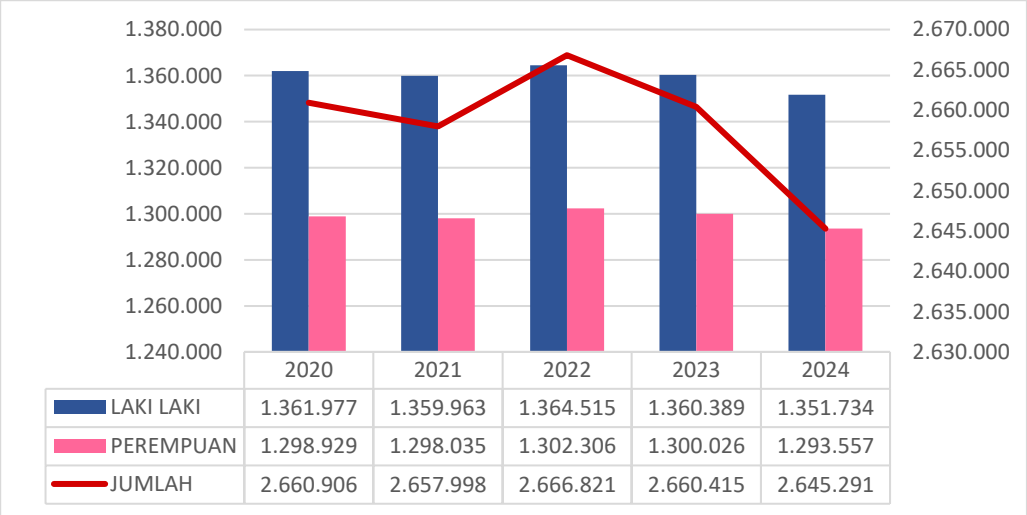

	2020	2021	2022	2023	2024
LAKI LAKI	1.361.977	1.359.963	1.364.515	1.360.389	1.351.734
PEREMPUAN	1.298.929	1.298.035	1.302.306	1.300.026	1.293.557
JUMLAH	2.660.906	2.657.998	2.666.821	2.660.415	2.645.291

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Dari tabel di atas, tampak bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara mengalami perubahan naik turun selama lima tahun terakhir. Perubahan ini terjadi tidak hanya pada total keseluruhan jumlah penduduk, tetapi juga jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika demografis yang mungkin dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti migrasi, kelahiran, dan kematian dalam periode tersebut.

Dengan proporsi hampir separuh dari total penduduk, perempuan di Sulawesi Utara merupakan sumber daya potensial dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender, guna memastikan partisipasi perempuan secara aktif dan setara dalam proses pembangunan.

Perempuan tidak hanya berperan sebagai objek yang menerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kemajuan daerah. Penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah strategis yang harus terus dikembangkan untuk mengoptimalkan peran perempuan sebagai aset pembangunan.

Adapun laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara dalam selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

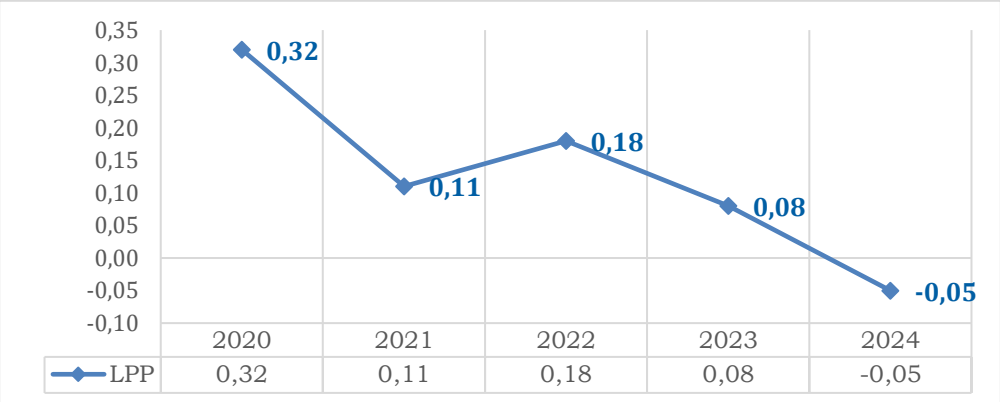

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Grafik di atas menggambarkan tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024 yang cenderung tidak stabil. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, angka pertumbuhan penduduk cukup tinggi di angka 0,32%, namun mengalami penurunan tajam menjadi 0,11% pada tahun berikutnya. Meski sempat naik kembali ke 0,18% pada 2022, tren penurunannya berlanjut hingga menyentuh angka 0,08% di tahun 2023. Menariknya, pada tahun 2024, laju pertumbuhan bahkan turun ke angka negatif yaitu -0,05%, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk. Kondisi ini mencerminkan dinamika kependudukan yang cukup signifikan dan bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti migrasi keluar, penurunan angka kelahiran, atau meningkatnya angka kematian.

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu wilayah. Di Provinsi Sulawesi Utara, karakteristik komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai generasi penduduk yang mendominasi, struktur usia, serta potensi bonus demografi yang dimiliki. Informasi ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Dengan memahami susunan penduduk berdasarkan kelompok umur dan karakteristik demografis lainnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mengantisipasi tantangan masa depan serta mengoptimalkan potensi sumber daya manusia secara lebih efektif dan berkelanjutan. Grafik berikut

menggambarkan komposisi penduduk di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kategori generasi.

Grafik 2.15
Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara

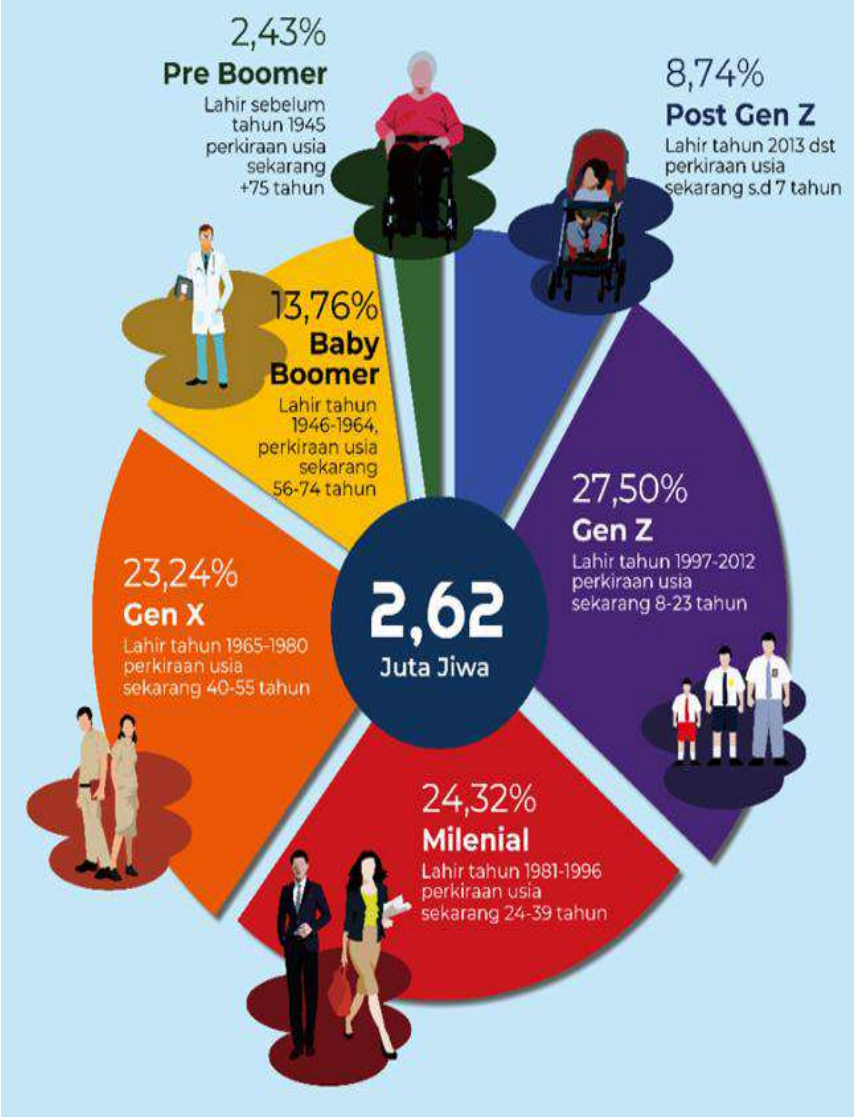

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025.
https://sulut.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/807/hasil-sensus-penduduk-provinsi-sulawesi-utara-tahun-2020.html .

Dari diagram tersebut terlihat bahwa Generasi Z mendominasi populasi dengan persentase sebesar 27,5%. Angka ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an menjadi kelompok terbesar di daerah ini, menandakan potensi besar dalam aspek pendidikan,

tenaga kerja masa depan, serta peran dalam perkembangan sosial dan teknologi.

Di urutan kedua, Generasi Milenial menyumbang 24,32% dari total populasi. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang tumbuh seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet. Persentase yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa kelompok ini memiliki peranan penting dalam berbagai sektor produktif, terutama dalam dunia kerja dan kewirausahaan di Sulawesi Utara.

Generasi X juga memiliki proporsi yang cukup signifikan yaitu 23,24%. Kelompok ini umumnya merupakan angkatan kerja mapan dan banyak menduduki posisi strategis dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Sementara itu, Baby Boomer menyumbang 13,76% dari populasi, yang umumnya terdiri dari kelompok usia yang menjelang atau telah memasuki masa pensiun.

Adapun persentase terkecil berasal dari kelompok Pre-Boomer dan Post Generasi Z, masing-masing sebesar 2,43% dan 8,74%. Kelompok Pre-Boomer merupakan generasi yang lahir sebelum tahun 1946 dan kini telah berusia lanjut. Sedangkan Post Generasi Z, yang kemungkinan besar adalah anak-anak yang baru lahir hingga usia dini, menunjukkan adanya potensi pertumbuhan penduduk baru dalam beberapa dekade mendatang. Komposisi ini memberikan gambaran penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap struktur usia penduduk.

C. Keberadaan Masyarakat Adat

Secara umum, Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sosial budaya yang sangat kaya, termasuk

keragaman komunitas lokal yang diyakini memiliki akar tradisi kuat dan nilai-nilai kearifan lokal yang masih lestari. Meskipun hingga saat ini data resmi mengenai masyarakat adat belum tersedia secara lengkap, hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan untuk melakukan pemetaan partisipatif dan pendataan yang lebih mendalam. Langkah ini tidak hanya penting untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis potensi lokal, Sulawesi Utara berpeluang menjadi contoh daerah yang menghargai keberagaman dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial.

Namun demikian, Provinsi Sulawesi Utara dikenal sebagai wilayah yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang sangat menonjol. Tiga kelompok etnis utama yang membentuk struktur sosial di provinsi ini adalah masyarakat Minahasa, masyarakat kepulauan Sangihe dan Talaud, serta masyarakat Bolaang Mongondow. Masing-masing etnis tersebut terdiri dari sejumlah sub etnis yang memiliki kekhasan tersendiri dalam bahasa, adat istiadat, serta norma sosial. Nilai-nilai kebersamaan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, memperkuat kohesi sosial di tengah perbedaan tersebut.

Etnis Minahasa merupakan salah satu kelompok terbesar di Sulawesi Utara dan terbagi atas berbagai sub etnis, seperti Toulour atau Tondano, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan atau Ratahan,

Ponosakan, dan Bantik. Masing-masing subetnis memiliki dialek dan kebiasaan yang unik. Namun, semua subkelompok ini menjunjung tinggi prinsip gotong royong yang dikenal sebagai Mapalus—suatu praktik tolong-menolong antar warga yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Gambar 2.17
Suku Minahasa

Sementara itu, masyarakat adat Sangihe dan Talaud mendiami wilayah kepulauan di bagian utara provinsi, yang berbatasan langsung dengan Filipina. Kehidupan mereka sangat erat dengan laut, tercermin dalam tradisi kemaritiman yang kuat. Bahasa daerah seperti Sangir Besar, Siau, dan Talaud digunakan oleh komunitas ini sebagai sarana komunikasi harian, di samping Bahasa Indonesia.

Semangat kebersamaan yang dikenal dengan istilah Mapaluse menjadi perekat sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat di wilayah kepulauan ini.

Gambar 2.18
Suku Sangihe Talaud

Suku Sangihe Talaud

Di sisi barat dan selatan provinsi, terdapat komunitas Bolaang Mongondow yang terdiri dari berbagai subetnis seperti Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow. Bahasa dan adat istiadat mereka sangat beragam, mencerminkan kekayaan budaya lokal. Moposad, yang menjadi semangat gotong royong khas masyarakat Bolaang Mongondow, menggambarkan nilai-nilai kerjasama dan kepedulian yang tinggi antar anggota komunitas.

Gambar 2.19
Suku Bolaang

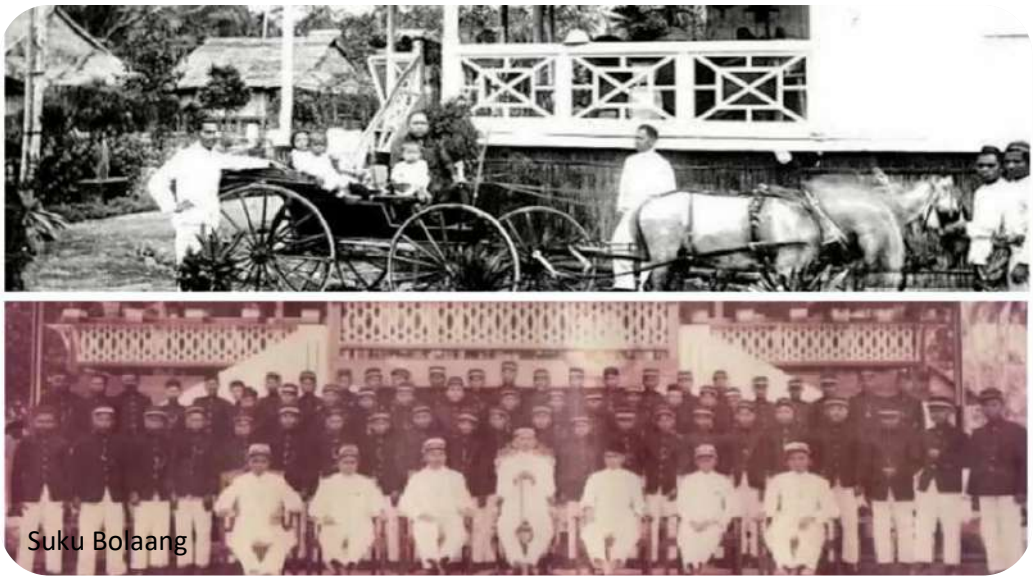
Suku Bolaang

Jika ditinjau dari aspek linguistik, Provinsi Sulawesi Utara memiliki tiga rumpun utama bahasa daerah. Kelompok pertama terdiri dari bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik yang berasal dari Minahasa. Kelompok kedua mencakup bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud yang dominan di wilayah kepulauan utara. Sementara kelompok ketiga meliputi bahasa yang digunakan di Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Mongondow, dan Kaidipang. Kekayaan linguistik ini mencerminkan kedalaman sejarah dan tradisi budaya di daerah tersebut.

Walaupun terdapat keberagaman bahasa lokal, mayoritas masyarakat di Sulawesi Utara mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Bahasa nasional ini menjadi alat pemersatu di tengah kompleksitas budaya dan bahasa daerah yang ada. Keberadaan Bahasa Indonesia juga mendukung interaksi antar etnis serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan.

Tradisi gotong royong seperti Mapalus dalam budaya Minahasa bukan hanya bentuk kerjasama praktis, tetapi juga simbol solidaritas sosial yang mendalam. Sistem ini mengatur bentuk bantuan timbal balik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, pembangunan rumah, hingga penyelenggaraan hajatan. Nilai ini masih dijaga oleh masyarakat hingga hari ini, menjadi salah satu identitas budaya yang kuat di Sulawesi Utara.

Seni dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Sulawesi Utara. Tarian-tarian tradisional seperti Maengket dan Kabasaran, musik bambu, serta berbagai upacara adat

seperti Tulude merupakan ekspresi budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Warisan budaya ini tidak hanya menjadi cerminan identitas lokal, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai aset pariwisata budaya.

Kehidupan masyarakat adat di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi sumber kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Hubungan antar etnis diwarnai oleh toleransi, saling menghormati, dan kolaborasi, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Secara keseluruhan, keberagaman masyarakat adat di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa harmoni dapat tercapai melalui penghargaan terhadap perbedaan. Etnis dan subetnis yang tersebar di provinsi ini telah membuktikan bahwa keragaman dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, tangguh, dan kaya secara budaya. Inilah kekayaan yang menjadi warisan penting bagi generasi mendatang.

D. Rasio Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. RJK berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan rumah sakit bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. RJK dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam suatu daerah.

Rasio Jenis Kelamin (RJK) pun dapat melihat perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian suatu daerah dengan RJK yang berbeda akan mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kebutuhan antara penduduk laki-laki dengan perempuan.

Dengan demikian berdasarkan Rasio Jenis Kelamin (RJK) ini, maka penyediaan sarana tergantung kepada berapa banyak rasio jenis kelamin ini.Tabel berikut memperlihatkan Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2.32
Rasio Jenis Kelamin Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024

KODE WIL	NAMA WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
71	**PROVINSI SULAWESI UTARA**	**1,351,734**	**1,293,557**	**2,645,291**	**Dlm 100 Pr Ada 104 Lk**
71.01	Kab. Bolaang Mongondow	133,94	123,438	257,378	Dlm 100 Pr Ada 109 Lk
71.02	Kab. Minahasa	168,503	162,34	330,843	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
71.03	Kab. Kepulauan Sangihe	69,187	66,673	135,86	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
71.04	Kab. Kepulauan Talaud	51,713	48,663	100,376	Dlm 100 Pr Ada 106 Lk
71.05	Kab. Minahasa Selatan	125,878	117,419	243,297	Dlm 100 Pr Ada 107 Lk
71.06	Kab. Minahasa Utara	116,001	113,23	229,231	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
71.07	Kab. Minahasa Tenggara	62,974	58,58	121,554	Dlm 100 Pr Ada 108 Lk
71.08	Kab. Bolaang Mongondow Utara	45,175	42,827	88,002	Dlm 100 Pr Ada 105 Lk
71.09	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	35,553	34,975	70,528	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
71.10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	47,657	43,687	91,344	Dlm 100 Pr Ada 109 Lk
71.11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	39,368	36,737	76,105	Dlm 100 Pr Ada 107 Lk
71.71	Kota Manado	230,999	228,41	459,409	Dlm 100 Pr Ada 101 Lk
71.72	Kota Bitung	109,932	106,094	216,026	Dlm 100 Pr Ada 104 Lk
71.73	Kota Tomohon	52,524	51,288	103,812	Dlm 100 Pr Ada 102 Lk
71.74	Kota Kotamobagu	62,33	59,196	121,526	Dlm 100 Pr Ada 105 Lk

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Grafik 2.16
Persandingan Rasio Jenis Kelamin per-Kabupaten/Kota Tahun 2024

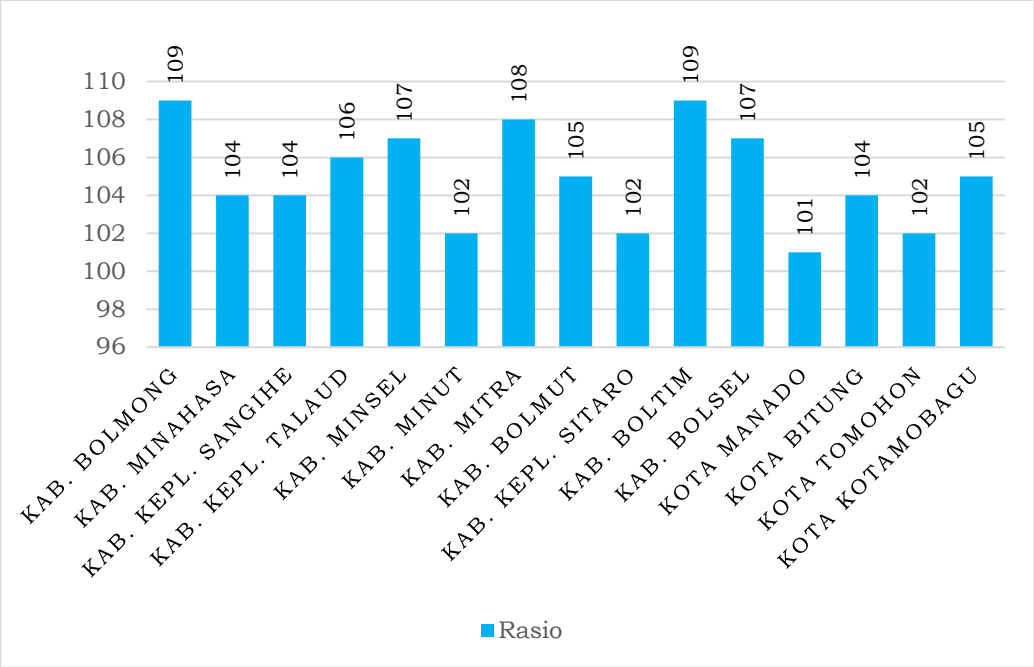

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Rasio Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Utara sebesar 104, yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 orang penduduk laki-laki. RJK di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2024 ini tidak berbeda jauh dengan RJK pada tahun 2023. RJK penduduk paling mencolok terdapat di Kabupaten Bolaang mongondow 109, Kabupaten Bolaang mongondow Timur sebesar 109 dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 108. Dibeberapa daerah tersebut setiap 100 perempuan terdapat 108 sampai dengan 109 penduduk berjenis kelamin laki- laki.

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa di semua daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara jumlah penduduk laki-laki lebih besar apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Selanjutnya, jika dilihat menurut kabupaten/kota dalam 5 tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin per-Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	**105**	**105**	**105**	**104**	**104**
Bolaang Mongondow	109	109	109	109	110
Minahasa	104	104	104	104	104
Kepulauan Sangihe	104	104	104	104	104
Kepulauan Talaud	106	106	106	106	106
Minahasa Selatan	107	107	106	106	106
Minahasa Utara	104	104	103	103	103
Bolaang Mongondow Utara	106	106	106	106	105
Kepulauan Sitaro	101	101	101	101	101
Minahasa Tenggara	107	107	107	107	106
Bolaang Mongondow Selatan	109	109	108	108	108
Bolaang Mongondow Timur	109	109	109	108	108
Kota Manado	101	101	101	101	100
Kota Bitung	105	105	105	105	105
Kota Tomohon	102	102	102	102	102
Kota Kotamobagu	105	105	105	104	104

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

E. Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida) menunjukkan jumlah penduduk (dalam hal ini diwakili dengan persentase jumlah penduduk), sumbu vertikal menunjukkan kelompok umur 5 tahunan. Dasar piramida dimulai dengan umur termuda hingga ke puncak kelompok umur tertua. Bagian kiri piramida adalah penduduk laki-laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Provinsi Sulawesi Utara menunjukan struktur penduduk muda/expansive, dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok usia di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti

angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolute tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Piramida penduduk Provinsi Sulawesi Utara juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam jangka panjang. Dengan piramida yang menunjukkan lebih banyak di kelompok usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun, maka dalam jangka 15 sampai 20 tahun Pemerintah harus mampu merencanakan lapangan pekerjaan bagi penduduk tersebut yang telah menjadi kelompok penduduk yang produktif.

Piramida penduduk ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum. Dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun akan ada banyak pemilih pemula yang harus mendapatkan sosialisasi tentang demokrasi.

Grafik 2.17
Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI tahun 2024

Dari bentuk piramida di atas, dapat dipastikan Sulawesi Utara masih didominasi penduduk usia muda. Khususnya kelompok umur 20-24 tahun menempati urutan pertama yakni 8,80% atau sebanyak 232.842 jiwa. Disisi lain kelompok 0-4 tahun mulai berkurang, diduga kecenderungan angka kelahiran mulai menurun, sedangkan kelompok 5-9 tahun lebih banyak dibanding dengan kelompok dibawahnya. Dapat dikatakan angka kematian bayi di Sulawesi Utara pun memiliki kecenderungan menurun.

Namun hal ini perlu didukung dengan data yang lebih akurat, mengingat pelaporan lahir mati masih cenderung rendah. Selain itu yang perlu dicermati adalah kelompok usia sekolah menengah adalah mulai dari usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun yang merupakan aset Sulawesi Utara untuk menjawab tantangan pembangunan 5 sampai dengan 10 tahun kedepan. Perlu persiapan yang komprehensif antara sektor pendidikan dan sektor ketenagakerjaan, agar hal tersebut tidak menjadi beban pembangunan dimasa yang akan datang.

F. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kepadatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang.

Tabel 2.34
Kepadatan Penduduk menurut Jumlah dan Luas Wilayah Per-Kabupaten/Kota
Tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Km2)	KEPADATAN (Jiwa/Km2)
		N	%		
71	**Provinsi Sulawesi Utara**	**2,645,291**	**100.00%**	**14,500.28**	**182.43**
71.01	Kab. Bolaang Mongondow	257,378	9.73%	3,269.31	78.73
71.02	Kab. Minahasa	330,843	12.51%	1.128,45	293.18
71.03	Kab. Kepulauan Sangihe	135,86	5.14%	597.26	227.47
71.04	Kab. Kepulauan Talaud	100,376	3.79%	1.012,14	99.17
71.05	Kab. Minahasa Selatan	243,297	9.20%	1.456,69	167.02
71.06	Kab. Minahasa Utara	229,231	8.67%	995.55	230.26
71.07	Kab. Minahasa Tenggara	121,554	4.60%	753.14	161.40
71.08	Kab. Bolaang Mongondow Utara	88,002	3.33%	1,644.38	53.52
71.09	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	70,528	2.67%	217.29	324.58
71.10	Kab. Bolaang Mongondow Timur	91,344	3.45%	859.97	106.22
71.11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	76,105	2.88%	1.796.07	42.37
71.71	Kota Manado	459,409	17.37%	162.35	2.829,69
71.72	Kota Bitung	216,026	8.17%	329.72	655.17
71.73	Kota Tomohon	103,812	3.92%	169.06	614.04
71.74	Kota Kotamobagu	121,526	4.59%	108.89	1.116,01

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024
***Luas Wilayah Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022*

Persebaran Penduduk di Sulawesi Utara apabila dilihat dari setiap Kabupaten/Kota, kepadatan penduduk didominasi oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kota. Kota Manado merupakan wilayah terpadat dengan 2.829,69 jiwa/Km², disusul Kota Kotamobagu 1.116,01 jiwa/Km², Kota Bitung 655,17 Jiwa/Km2, Kota Tomohon 614,04 jiwa/Km², dan Kabupaten Kepulauan Sitaro 324.58 jiwa/Km², sebagaimana terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.18
5 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Tinggi di Sulawesi Utara Tahun 2024

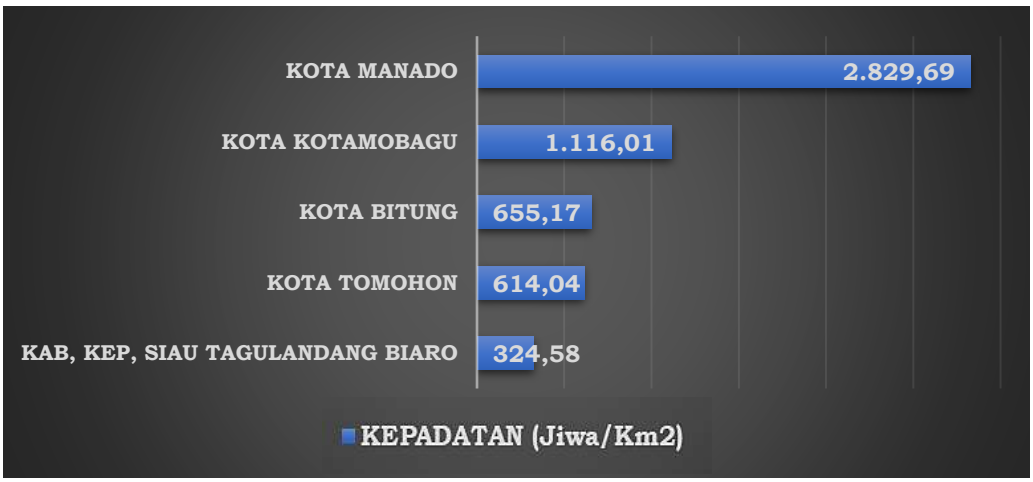

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Sementara itu untuk beberapa daerah lainnya terjadi kebalikan dari daerah-daerah di atas karena memiliki kepadatan terendah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah (jarang) dengan 42.37 jiwa/Km², disusul Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 53.52 jiwa/Km², Kabupaten Bolaang Mongondow 78.73 Jiwa/Km2, Kabupaten Kepulauan Talaud 99.17 jiwa/Km², dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 106.22 jiwa/Km², sebagaimana terlihat pada Grafik berikut :

Grafik 2.19
5 Kabupaten/Kota dengan Kepadatan Penduduk Rendah di Sulawesi Utara Tahun 2024

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk di suatu daerah, faktor pertama adalah kelahiran, jika banyak kelahiran yang terjadi, maka semakin padat juga kondisi di suatu daerah.

Faktor kedua adalah ekonomi. Sebagian besar daerah memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dari daerah yang lain. Hal ini ditentukan dari seberapa banyak tempat industri dan pusat perdagangan, peluang kerja dan jumlah pendapatannya. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam dan letak geografis wilayah yang memiliki cuaca atau iklim yang mendukung untuk menjadi tempat tinggal atau tempat bekerja. Biasa daerah dengan kondisi demikian, lebih diminati oleh penduduk. Letak geografis juga menentukan suatu tempat apakah tempat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau tempat bekerja. Misalnya dekat jauhnya dengan sekolah, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan dan infrastruktur jalan untuk akses keluar masuk daerah tersebut.

G. Penduduk Penyandang Disabilitas

Setiap individu pada dasarnya memiliki harapan untuk dilahirkan dan menjalani hidup dalam kondisi yang sehat dan optimal. Kondisi yang dianggap "normal" sering kali dikaitkan dengan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, realitas kehidupan menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan tersebut. Sebagian masyarakat menghadapi tantangan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang membatasi aktivitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial secara penuh.

Oleh karena itu, data mengenai jumlah dan jenis disabilitas yang dialami penduduk menjadi sangat penting. Informasi ini tidak hanya berguna untuk memahami kondisi sosial masyarakat, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang kebijakan publik yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program pelayanan dan fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

Tabel 2.35
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Sulawesi Utara Tahun 2024

NO	JENIS DISABILITAS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
1	DISABILITAS FISIK	1408	13,07	1056	9,8	2464	22,87
2	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	512	4,75	422	3,92	934	8,67
3	DISABILITAS NETRA/BUTA	946	8,78	918	8,52	1864	17,3
4	DISABILITAS MENTAL/JIWA	2332	21,64	1488	13,81	3820	35,45
5	DISABILITAS RUNGU/ WICARA	364	3,38	270	2,51	634	5,88
6	DISABILITAS LAINNYA	552	5,12	508	4,71	1060	9,84
	TOTAL	**6114**	**56,74**	**4662**	**43,26**	**10776**	**100**

Sumber: Database SIAK Provinsi Sulawesi Utara Hasil Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tahun 2024

Berdasarkan data SIAK Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024, terdapat 10.776 penduduk penyandang disabilitas, dengan komposisi 56,74% laki-laki dan 43,26% perempuan. Jenis disabilitas paling dominan adalah disabilitas mental/jiwa yang mencakup 35,45% dari total jumlah, disusul oleh disabilitas fisik (22,87%) dan netra/buta (17,30%). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan persentasenya kecil dibanding jumlah total penduduk, kelompok ini tetap signifikan dan membutuhkan perhatian khusus.

Disabilitas yang dialami penduduk di Sulawesi Utara berasal dari berbagai penyebab, seperti bawaan sejak lahir, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi yang muncul seiring waktu. Tidak semua kasus disabilitas tercatat secara resmi karena berbagai alasan, termasuk rasa malu atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendataan. Bahkan, ada kemungkinan bahwa jumlah penyandang disabilitas sebenarnya lebih tinggi dari yang tercatat karena masih banyak yang belum terdata atau belum melaporkan kondisinya secara terbuka.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perhatian terhadap kelompok ini melalui kebijakan dan layanan yang inklusif. Informasi mengenai jumlah dan jenis disabilitas sangat penting sebagai dasar perencanaan program yang ramah disabilitas, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan aksesibilitas fasilitas publik. Dengan data yang akurat dan pemahaman yang menyeluruh, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.4.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp.187,37 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.107,57 triliun. Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024 tumbuh sebesar 5,39 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga dengan pertumbuhan sebesar 13,77 persen. Ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 10,17 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga dengan pertumbuhan sebesar 24,61 persen.

Ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,45 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya, yakni sebesar 18,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 25,34 persen.

Tabel 2.36
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) dan Tahun 2024 (dalam milyar rupiah)

No	Sektor/Lapangan Usaha	Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023	*2024*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.705.449	17.994.184	19.186.763	20.044.505	*21.113,98*
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.650.508	4.876.170	4.881.650	4.894.718	*5.043,44*
3.	Industri Pengolahan	8.764.756	9.546.947	10.232.219	10.948.502	*11.410,76*
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	119.828	128.173	141.212	148.445	*155,93*
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	113.292	113.846	115.374	116.970	*116,69*
6.	Konstruksi	11.518.351	12.321.288	12.783.920	13.413.851	*13.812,29*
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.445.858	11.839.704	12.731.910	13.570.050	*14.348,76*
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.790.329	6.911.909	7.726.054	8.648.772	*9.165,30*
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.491.170	1.680.778	1.898.271	2.069.505	*2.209,37*
10.	Informasi dan Komunikasi	4.836.156	4.951.192	5.197.591	5.473.643	*5.802,58*
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.520.446	3.705.996	3.586.050	3.555.510	*3.733,90*
12.	*Real Estate*	3.329.613	3.317.983	3.398.564	3.527.712	*3.729,87*
13.	Jasa Perusahaan	74.745	76.376	79.712	83.058	*87,90*
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.806.035	5.973.748	6.054.216	6.250.320	*6.864,77*
15.	Jasa Pendidikan	2.451.117	2.480.204	2.609.772	2.785.156	*2.978,41*
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.999.186	4.322.967	4.513.035	4.729.763	*4.992,57*
17.	Jasa lainnya	1.509.536	1.549.463	1.631.383	1.810.002	*2.008,49*
	Produk Domestik Regional Bruto	**88.126.374**	**91.790.927**	**96.767.697**	**102.070.480**	***107.575,01***
	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	**87.839.528**	**91.518.160**	**96.430.694**	**101.770.984**	***107.272,32***

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat dari angka PDRB-ADHK tahun 2024 terlihat bahwa masih sama dengan tahun 2023 bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB-ADHK adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu Rp. 21.113.980 diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu Rp. 14.348.760 dan selanjutnya sektor Konstruksi yaitu Rp. 13.812.290. Sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah sektor Jasa Perusahaan yang hanya Rp. 87.900.

Tabel 2.37
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

Sektor/ Lapangan Usaha	Harga Berlaku				
	2020	2021	2022	2023	*2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.071.833	30.059.566	32.820.275	35.165.394	*38.586,08*
Pertambangan dan Penggalian	7.178.794	7.733.985	8.176.269	8.506.042	*9.162,92*
Industri Pengolahan	12.646.946	14.955.341	16.755.335	18.295.066	*19.900,49*
Pengadaan Listrik dan Gas	133.570	142.166	160.445	172.091	*187,12*
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	157.479	160.343	165.281	169.717	*179,56*
Konstruksi	14.987.747	16.784.715	17.966.201	19.265.173	*20.041,93*
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.273.918	18.659.487	20.915.101	23.331.383	*25.583,36*
Transportasi & Pergudangan	12.401.865	12.852.226	16.172.486	19.959.758	*21.768,60*
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.968.971	2.221.418	2.580.381	2.867.636	*3.151,66*
Informasi dan Komunikasi	5.747.231	5.919.774	6.332.927	6.874.199	*7.490,59*
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.194.337	5.739.734	5.941.016	5.983.257	*6.360,05*
Real Estate	4.472.904	4.554.314	4.725.039	5.047.064	*5.589,24*
Jasa Perusahaan	130.021	139.571	148.430	158.846	*172,78*
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.921.539	10.217.899	10.720.377	11.349.887	*12.719,15*
Jasa Pendidikan	4.024.969	4.150.486	4.517.430	5.028.330	*5.660,53*
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.308.716	5.920.951	6.351.096	6.857.613	*7.430,63*
Jasa lainnya	2.290.527	2.388.042	2.580.268	2.937.967	*3.389,60*
Produk Domestik Regional Bruto	**132.299.414**	**142.600.020**	**157.028.356**	**171.969.422**	***187.374,29***
PDRB Tanpa Migas	**131.880.568**	**142.219.960**	**156.570.393**	**171.512.736**	***186.888,97***

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; dan Industri

Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 20,45 persen; 13,57 persen; 11,61 persen; 11,20 persen; dan 10,64 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Utara mencapai 67,47 persen.

Jika ditinjau dari masing-masing sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,95 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,89 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,87 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 0,74 persen.

Tabel 2.38
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Hb)

Sektor/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,51	21,08	20,90	20,45	20,59
Pertambangan dan Penggalian	5,43	5,42	5,21	4,95	4,89
Industri Pengolahan	9,56	10,49	10,67	10,64	10,62
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
Konstruksi	11,33	11,77	11,44	11,20	10,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,06	13,09	13,32	13,57	13,65
Transportasi & Pergudangan	9,37	9,01	10,30	11,61	11,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,56	1,64	1,67	1,68
Informasi dan Komunikasi	4,34	4,15	4,03	4,00	3,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	4,03	3,78	3,48	3,39
Real Estate	3,38	3,19	3,01	2,93	2,98
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,50	7,17	6,83	6,60	6,78
Jasa Pendidikan	3,04	2,91	2,88	2,92	3,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,01	4,15	4,04	3,99	3,96
Jasa lainnya	1,73	1,67	1,64	1,71	1,80
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (diolah)

Tabel 2.39
Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	6,31	6,25	6,20	6,11	6,11
2.	Minahasa	13,11	12,98	12,91	12,83	12,83
3.	Kepulauan Sangihe	3,30	3,35	3,31	3,28	3,28
4.	Kepulauan Talaud	1,70	1,69	1,67	1,65	1,65
5.	Minahasa Selatan	6,60	6,68	6,67	6,68	6,68
6.	Minahasa Utara	10,81	10,95	10,92	10,85	10,85
7.	Bolaang Mongondow Utara	1,94	1,90	1,89	1,89	1,89
8.	Kepulauan Sitaro	1,84	1,83	1,81	1,81	1,81
9.	Minahasa Tenggara	3,92	3,92	3,90	3,89	3,89
10.	Bolaang Mongondow Selatan	1,62	1,60	1,59	1,58	1,58
11.	Bolaang Mongondow Timur	2,32	2,26	2,24	2,21	2,21
12.	Kota Manado	27,54	27,56	27,84	28,14	28,14
13.	Kota Bitung	12,85	13,02	13,07	13,14	13,14
14.	Kota Tomohon	3,29	3,20	3,19	3,16	3,16
15.	Kota Kotamobagu	2,85	2,81	2,80	2,78	2,78
	T o t a l	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat menurut kontribusi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara Dalam 4 (empat) tahun terakhir. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan kontribusi terkecil (≤ 5 persen) adalah datang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	0,98	3,87	5,35	5,18	5,33
2.	Minahasa	-1,03	3,53	5,47	5,55	5,49
3.	Kepulauan Sangihe	0,45	5,99	5,45	5,30	5,32
4.	Kepulauan Talaud	0,43	3,34	5,22	5,21	4,79

No	Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Minahasa Selatan	-0,77	4,91	5,41	5,54	5,58
6.	Minahasa Utara	-0,55	5,96	5,50	5,41	5,21
7.	Bolaang Mongondow Utara	0,71	3,46	5,52	5,43	5,12
8.	Kepulauan Sitaro	1,03	4,43	5,19	5,25	4,93
9.	Minahasa Tenggara	-0,64	4,29	5,30	5,38	5,37
10.	Bolaang Mongondow Selatan	0,63	3,74	5,20	5,33	5,28
11.	Bolaang Mongondow Timur	0,16	3,05	5,18	5,35	5,14
12.	Kota Manado	-3,14	5,14	5,64	5,52	5,53
13.	Kota Bitung	1,37	4,60	5,61	5,66	5,11
14.	Kota Tomohon	-0,41	2,05	5,17	5,32	4,74
15.	Kota Kotamobagu	0,20	4,20	5,15	5,42	5,29
	Sulawesi Utara	**-0,99**	**4,16**	**5,42**	**5,48**	**5,39**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota sejak tahun 2022 dan 2023 rata-rata berada pada angka kurang lebih 5 persen. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan PDRB antar Kabupaten/Kota sudah merata, namun demikian masih perlu dioptimalkan lagi kegiatan-kegiatan perekonomian di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan di tahun-tahun yang akan datang, karena jika laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota meningkat maka laju pertumbuhan ekonomi provinsi juga akan meningkat.

B. Tingkat Kemiskinan

Grafik yang ditampilkan memperlihatkan perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara dari Maret 2020 hingga September 2024, yang dibagi menjadi tiga kategori wilayah: Sulawesi Utara secara keseluruhan, wilayah perkotaan, dan wilayah perdesaan. Dari grafik ini terlihat bahwa terdapat tren penurunan tingkat kemiskinan secara umum di seluruh kategori, meskipun dengan laju dan pola yang berbeda-beda.

Pada awal periode, Maret 2020, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara tercatat sebesar 7,62%, dengan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 5,31%, dan yang tertinggi berada di perdesaan sebesar 10,64%. Sepanjang periode ini, wilayah perkotaan menunjukkan penurunan yang paling stabil dan konsisten, dari 5,36% pada September 2020 menjadi 4,07% pada Maret 2024, menandakan perbaikan kondisi ekonomi yang relatif lebih cepat di kawasan urban.

Sementara itu, wilayah perdesaan mengalami fluktuasi lebih besar. Setelah sedikit menurun dari 10,64% (Maret 2020) menjadi 9,77% (September 2021), angkanya sempat naik kembali menjadi 10,38% pada Maret 2023, dan kemudian turun perlahan menjadi 10,14% pada September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan masih cukup berat, dengan ketergantungan pada sektor pertanian dan terbatasnya akses terhadap fasilitas dasar.

Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Sulawesi Utara berhasil ditekan dari 7,62% pada Maret 2020 menjadi 6,7% pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi di provinsi tersebut, yang kemungkinan didorong oleh berbagai program perlindungan sosial, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun, grafik ini juga menyoroti kesenjangan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terarah dan berbasis wilayah dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan ke depan.

Grafik 2.20
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

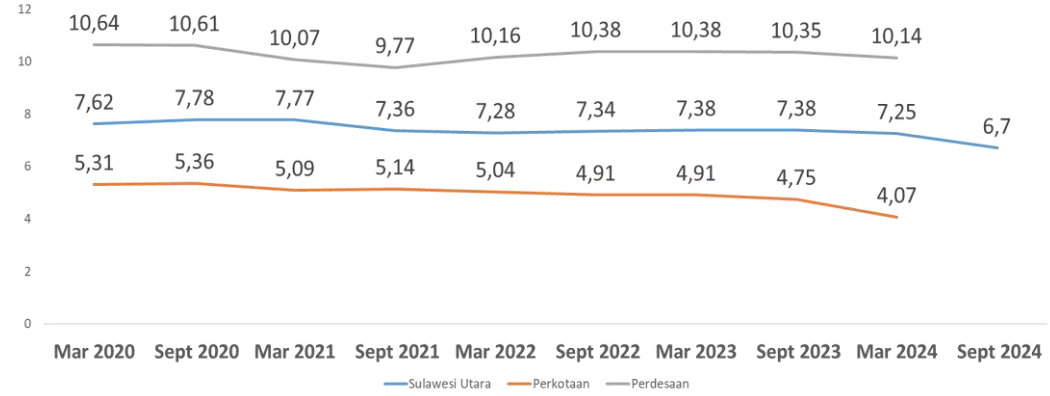

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia secara nasional dan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,78 persen, sementara Sulawesi Utara berada pada angka yang lebih rendah yaitu 7,62 persen. Tahun 2021, baik tingkat nasional maupun Sulawesi Utara mengalami peningkatan kemiskinan yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dengan angka nasional naik menjadi 10,14 persen dan Sulawesi Utara menjadi 7,77 persen.

Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan. Secara nasional turun menjadi 9,54 persen, sedangkan di Sulawesi Utara menurun menjadi 7,28 persen. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana angka nasional turun tipis menjadi 9,36 persen dan Sulawesi Utara berada di 7,38 persen. Pada tahun 2024, penurunan semakin signifikan. Tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,57 persen, dan Sulawesi Utara mencatat angka 6,7 persen.

Dari grafik ini terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, Sulawesi Utara secara konsisten mencatat

persentase penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan angka nasional, serta menunjukkan tren penurunan yang cukup stabil. Hal ini mengindikasikan *adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut*.

Grafik 2.21
Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

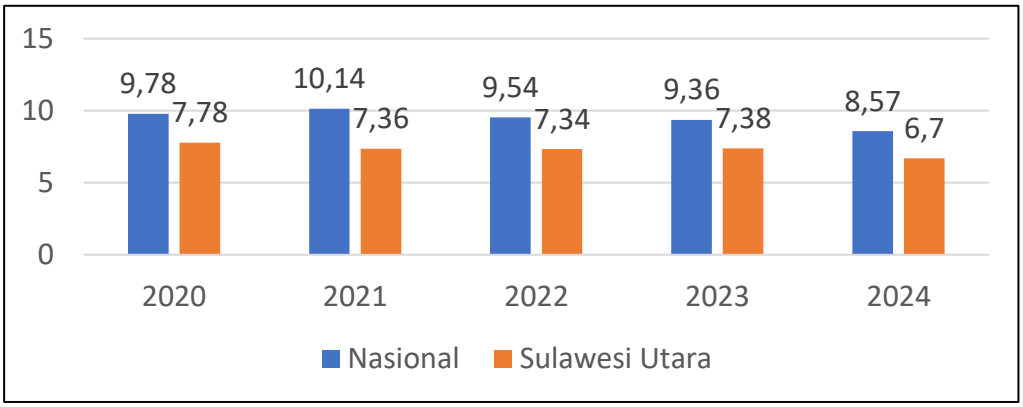

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Grafik kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk miskin (dalam ribuan jiwa) di Provinsi Sulawesi Utara, yang dibedakan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, dalam rentang waktu Maret 2020 hingga September 2024. Meskipun pada grafik sebelumnya (garis) terlihat penurunan persentase kemiskinan, grafik ini menunjukkan bahwa jumlah absolut penduduk miskin justru mengalami kenaikan secara konsisten, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun keseluruhan provinsi.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara adalah sekitar 391.197 jiwa, dengan rincian 395.983 jiwa di perkotaan dan 385.957 jiwa di perdesaan. Angka ini terus meningkat setiap periode. Misalnya, pada Maret 2023, jumlahnya sudah mencapai 463.432 jiwa secara total, yang terdiri dari 470.822 jiwa di perkotaan dan 454.781 jiwa di

perdesaan. Tren ini terus berlanjut hingga September 2024, di mana penduduk miskin mencapai 511.710 jiwa, dengan distribusi 522.165 jiwa di perkotaan dan 498.100 jiwa di perdesaan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan menurun, jumlah penduduk miskin secara absolut meningkat. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Sulawesi Utara, sehingga meskipun proporsinya mengecil, angka absolutnya tetap bertambah. Secara lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan lebih tajam dibandingkan di pedesaan, yang menandakan adanya dinamika sosial-ekonomi baru di wilayah urban, seperti urbanisasi, pengangguran terselubung, atau kesenjangan pendapatan yang melebar.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya fokus pada penurunan persentase, tetapi juga memperhatikan jumlah absolut penduduk miskin, terutama dalam konteks pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi mencakup pertumbuhan populasi dan menjangkau kelompok-kelompok rentan baik di kota maupun desa.

Grafik 2.22
Garis Kemiskinan Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan) Tahun 2020-2024

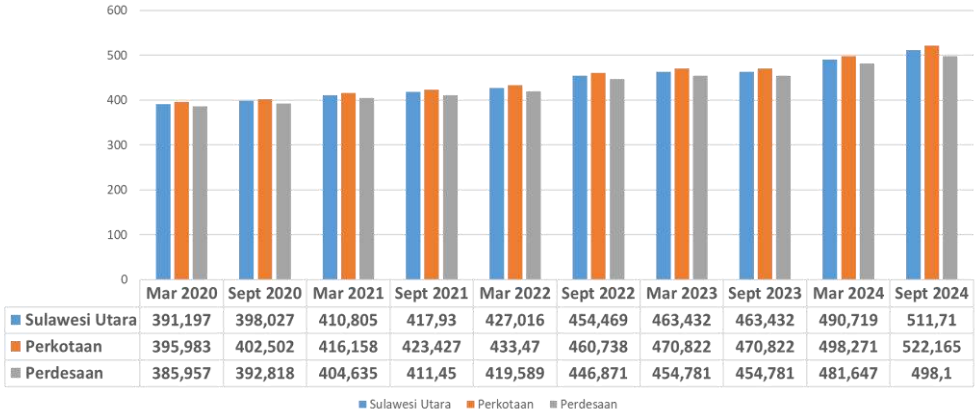

	Mar 2020	Sept 2020	Mar 2021	Sept 2021	Mar 2022	Sept 2022	Mar 2023	Sept 2023	Mar 2024	Sept 2024
Sulawesi Utara	391,197	398,027	410,805	417,93	427,016	454,469	463,432	463,432	490,719	511,71
Perkotaan	395,983	402,502	416,158	423,427	433,47	460,738	470,822	470,822	498,271	522,165
Perdesaan	385,957	392,818	404,635	411,45	419,589	446,871	454,781	454,781	481,647	498,1

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kabupaten dan kota dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa seluruh wilayah di provinsi ini mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju yang berbeda-beda.

Secara umum, Kota Manado menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di tahun 2024, disusul oleh Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. Peningkatan yang cukup tajam juga tampak di beberapa kabupaten seperti Minahasa Selatan dan Minahasa Utara, yang menunjukkan tren lonjakan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sementara itu, kabupaten seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Bolaang Mongondow Utara memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain, namun tetap menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Sulawesi Utara bersifat merata, tidak hanya terjadi di

wilayah urban tetapi juga mencakup wilayah kepulauan dan pedesaan.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di hampir semua wilayah ini konsisten dengan grafik sebelumnya yang menunjukkan tren kenaikan jumlah absolut penduduk miskin di Sulawesi Utara secara keseluruhan. Fenomena ini dapat mencerminkan beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, dampak sosial ekonomi pasca pandemi, urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, serta efektivitas program pengentasan kemiskinan yang perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, grafik ini memperkuat urgensi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menyesuaikan pendekatan kebijakan secara spesifik berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Intervensi berbasis wilayah (area-based development) mungkin menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang kompleks dan menyebar di Sulawesi Utara.

Grafik 2.23
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan) Tahun 2020-2024

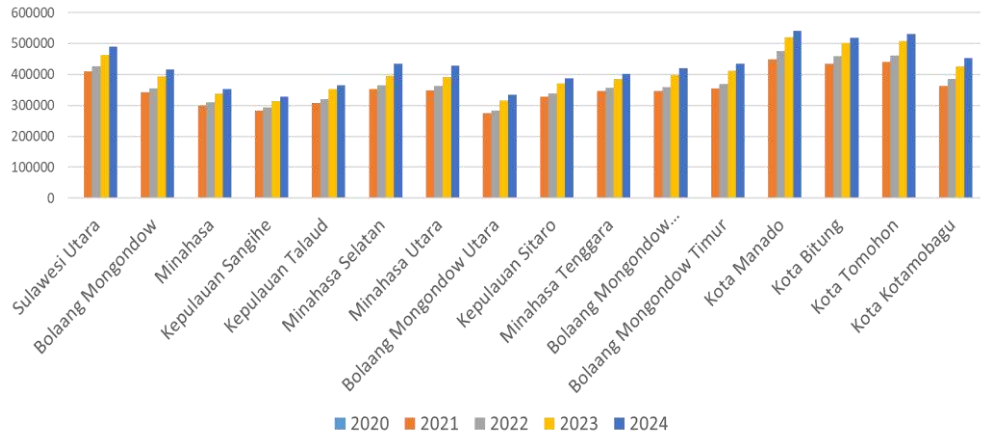

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Perkembangan garis kemiskinan di Indonesia secara nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulan, sedangkan di Sulawesi Utara sebesar Rp391.197. Tahun berikutnya, nilai ini meningkat menjadi Rp479.479 secara nasional dan Rp410.805 di Sulawesi Utara. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana garis kemiskinan nasional mencapai Rp505.000 dan Sulawesi Utara sebesar Rp427.006.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan kembali meningkat, dengan angka nasional sebesar Rp550.458 dan Sulawesi Utara mencapai Rp469.962. Tahun 2024 mencatat angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu Rp595.242 secara nasional dan Rp511.710 di Sulawesi Utara.

Peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun mencerminkan adanya inflasi dan kenaikan kebutuhan hidup minimum, baik di tingkat nasional maupun di Sulawesi Utara. Meskipun angkanya selalu lebih rendah dari rata-rata nasional, garis kemiskinan di Sulawesi Utara juga menunjukkan tren naik yang konsisten, mencerminkan dinamika ekonomi daerah dan kebutuhan dasar yang ikut meningkat dari tahun ke tahun.

Grafik 2.24
Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara (Rp/kapita/bulan)
Tahun 2020-2024

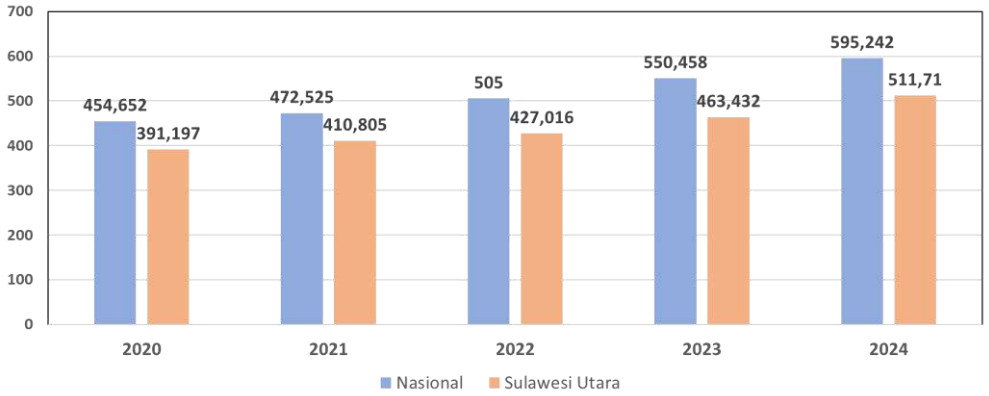

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berikut persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 yang cenderung menurun setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022-2023 yang mengalami peningkatan. Selanjutnya jika dibandingkan persentase penduduk miskin Sulawesi Utara tahun 2020 dan tahun 2024 mengalami penurunan yaitu dari 7,62 persen menjadi 7,25 persen.

Namun, jika dilihat lebih dalam per kabupaten/kota, ketimpangan antarwilayah masih cukup mencolok. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi secara konsisten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang pada tahun 2024 mencatat angka 11,33%, diikuti oleh Minahasa Tenggara (11,72%), dan Kepulauan Sangihe (10,84%). Wilayah-wilayah ini menunjukkan angka kemiskinan yang masih dua digit, jauh di atas rata-rata provinsi.

Tabel 2.41
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	7,27	7,58	7,04	7,37	7,74
2.	Minahasa	7,30	7,67	7,05	6,87	6,53
3.	Kepulauan Sangihe	11,14	11,02	10,50	11,01	10,84
4.	Kepulauan Talaud	9,49	9,00	8,25	8,46	8,17
5.	Minahasa Selatan	9,14	9,37	9,00	8,89	8,97
6.	Minahasa Utara	7,00	7,11	6,60	6,65	6,95
7.	Bolaang Mongondow Utara	8,41	8,03	7,31	7,90	7,88
8.	Kepulauan Sitaro	8,94	8,94	8,20	8,76	8,32
9.	Minahasa Tenggara	12,30	12,47	11,78	11,84	11,72
10.	Bolaang Mongondow Selatan	12,77	12,85	11,92	12,04	11,33
11.	Bolaang Mongondow Timur	5,88	6,10	5,85	5,80	5,87
12.	Kota Manado	5,86	6,19	5,85	5,79	5,43
13.	Kota Bitung	6,41	6,43	6,20	6,56	6,27
14.	Kota Tomohon	5,60	5,69	5,26	5,60	5,38
15.	Kota Kotamobagu	5,42	5,74	5,19	5,03	5,12
	Sulawesi Utara	**7,62**	**7,77**	**7,28**	**7,38**	**6.70**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan dari Maret 2020 hingga September 2024. Indeks ini mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sehingga semakin tinggi nilainya, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami. Secara keseluruhan, indeks di wilayah perdesaan (garis abu-abu) selalu lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa penduduk miskin di desa umumnya berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan. Nilai indeks di perdesaan mengalami fluktuasi, mulai dari 1,54 pada Maret 2020, meningkat hingga 1,76 pada Maret 2021, lalu cenderung stabil di kisaran 1,55–1,61 hingga Maret 2024, sebelum melonjak tajam menjadi 2,03 pada

September 2024, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut.

Sementara itu, indeks di wilayah perkotaan (garis oranye) menunjukkan tren penurunan secara umum. Dari angka 0,78 pada Maret 2020, indeks sempat naik ke 0,90 pada September 2020, namun kemudian turun secara bertahap menjadi hanya 0,59 pada September 2024. Ini menunjukkan perbaikan dalam kedalaman kemiskinan di perkotaan, di mana penduduk miskin secara rata-rata semakin mendekati garis kemiskinan.

Adapun rata-rata Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan (garis biru) mengikuti pola serupa dengan nilai yang berada di tengah antara perkotaan dan perdesaan. Setelah mengalami penurunan dari 1,14 (Maret 2020) ke titik terendah 1,09 (Maret dan September 2023), indeks meningkat kembali ke angka 1,22 pada September 2024, mencerminkan dampak dari lonjakan indeks di wilayah perdesaan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengurangi kedalaman kemiskinan khususnya di daerah perdesaan.

Grafik 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

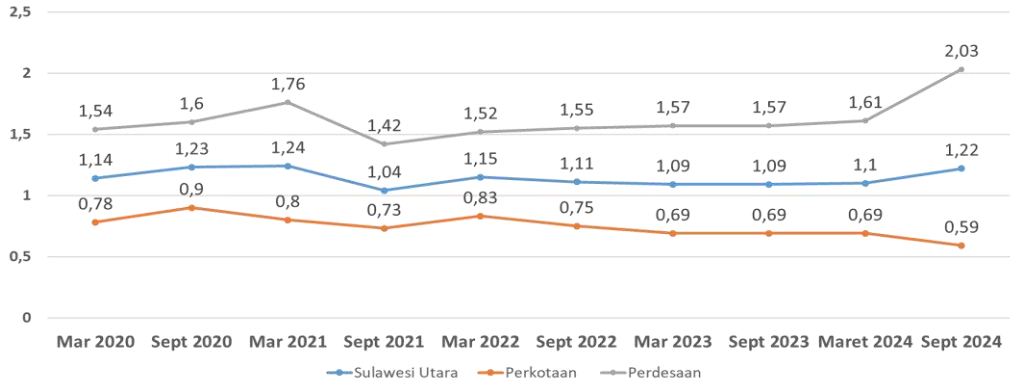

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Grafik tersebut memperlihatkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, dari Maret 2020 hingga September 2024. Indeks ini mencerminkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin; semakin tinggi nilai indeks, semakin besar ketimpangan dan keparahan kemiskinan.

Dari grafik terlihat bahwa wilayah perdesaan selalu memiliki indeks keparahan tertinggi dibandingkan wilayah lain. Nilai indeks di perdesaan meningkat tajam dari 0,35 pada Maret 2020 ke 0,42 pada Maret 2021, kemudian fluktuatif namun stabil di kisaran 0,34–0,38. Namun yang mencolok adalah lonjakan drastis pada September 2024 menjadi 0,64, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan yang signifikan di antara penduduk miskin di desa.

Sementara itu, wilayah perkotaan menunjukkan tren yang cenderung menurun. Dari angka 0,15 pada Maret 2020, indeks meningkat sedikit menjadi 0,2 pada September 2020, namun secara keseluruhan menurun menjadi 0,13 pada September 2024, menandakan kondisi kemiskinan di perkotaan semakin tidak parah dan lebih merata di antara penduduk miskin.

Secara agregat, Provinsi Sulawesi Utara mencatat indeks keparahan kemiskinan yang berada di antara dua wilayah tersebut. Angkanya cenderung stabil di kisaran 0,20–0,26, namun ikut meningkat ke 0,35 pada September 2024. Peningkatan ini diduga kuat dipengaruhi oleh lonjakan tajam yang terjadi di wilayah perdesaan. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan di perkotaan cenderung membaik, wilayah perdesaan masih menghadapi tantangan besar,

terutama dalam hal ketimpangan di antara penduduk miskin yang semakin memburuk menjelang akhir periode pengamatan.

Grafik 2.26
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

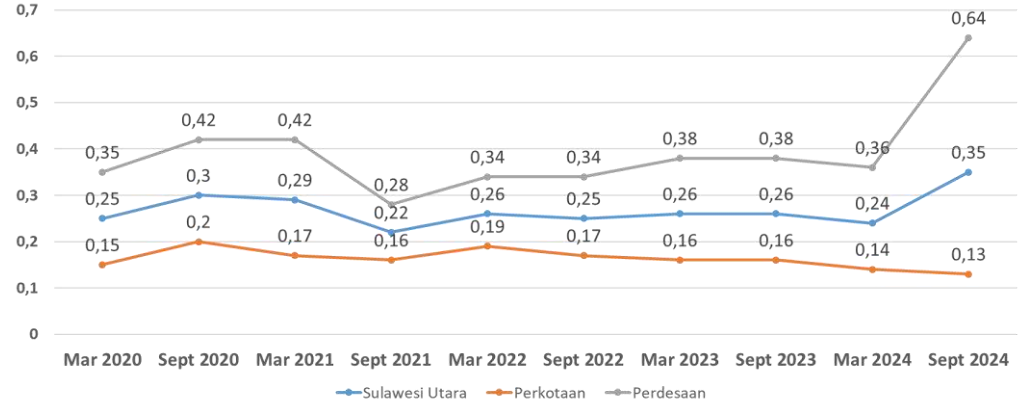

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dari sisi jumlah absolut, penduduk miskin (P1) jauh lebih banyak dibandingkan penduduk miskin ekstrem (P2). Sebagai contoh, pada September 2024, jumlah penduduk miskin di desa mencapai 2,029 juta jiwa, sementara penduduk miskin ekstrem di desa hanya 0,639 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem adalah subset dari kemiskinan secara umum, dan memiliki karakteristik serta tantangan yang lebih mendalam.

Secara tren, kedua grafik menunjukkan pola yang hampir serupa, terutama pada wilayah desa. Keduanya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021, lalu perlahan meningkat, dan memuncak tajam pada September 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa desa merupakan wilayah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial, yang berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem.

Sementara itu, wilayah kota menunjukkan tren penurunan di kedua grafik. Jumlah penduduk miskin maupun miskin ekstrem di kota menurun secara konsisten, mencerminkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan di perkotaan relatif lebih berhasil atau setidaknya lebih stabil dalam menjangkau masyarakat miskin.

Persamaan mencolok dari kedua grafik adalah bahwa desa selalu menjadi penyumbang terbesar jumlah kemiskinan, baik ekstrem maupun umum. Hal ini menandakan perlunya kebijakan dan intervensi yang lebih agresif dan terarah di wilayah pedesaan, agar dapat menjawab ketimpangan dan mengurangi risiko kemiskinan yang semakin memburuk di sana.

Kesimpulannya, meskipun grafik pertama dan kedua berbeda dalam cakupan kemiskinannya, keduanya saling melengkapi dalam menggambarkan tantangan nyata penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terutama bahwa desa tetap menjadi fokus utama penanganan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata.

Melihat perkembangan terbaru dalam tren kemiskinan, terutama lonjakan signifikan jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem di wilayah perdesaan hingga September 2024, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan langkah-langkah yang lebih progresif dan adaptif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penguatan terhadap program-program yang telah berjalan menjadi krusial, namun tidak cukup hanya dengan pendekatan konvensional. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial-ekonomi terkini, termasuk dampak dari ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim,

dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar di desa.

Untuk itu, optimalisasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah daerah harus mendorong integrasi yang lebih tajam antara program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur dasar pedesaan, serta pendidikan dan pelatihan vokasional yang berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut tidak hanya harus saling mendukung, tetapi juga diarahkan pada output yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di desa.

Salah satu langkah strategis yang mendesak dilakukan adalah pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang terpadu. Sistem ini harus mampu merekam pelaksanaan berbagai program secara real-time dan menghasilkan analisis yang akurat tentang efektivitas dan efisiensi program, serta mengidentifikasi hambatan dan celah dalam implementasi. Dengan sistem tersebut, pengambilan keputusan dapat lebih cepat, intervensi lebih tepat sasaran, serta pelaporan dan transparansi publik semakin baik. Ke depan, komitmen dan inovasi daerah akan menjadi penentu keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan, khususnya di desa. Maka dari itu, kolaborasi erat antara pemerintah daerah, desa, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat, agar upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

C. PDRB Per Kapita

Berdasarkan tabel dibawah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Pada harga berlaku, PDRB per kapita meningkat dari Rp. 50.521,13 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp. 69.352,24 ribu pada tahun 2024. Sementara itu, dalam harga konstan 2010, nilai PDRB per kapita juga menunjukkan pertumbuhan, yaitu dari Rp. 33.670,44 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp. 39.816,39 ribu pada tahun 2024.

Tabel 2.42
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RIBU RUPIAH)									
Harga Berlaku					Harga Konstan 2010				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
50.521,13	54.034,12	59.020,57	64.130,96	69.352,24	33.670,44	34.776,43	36.368,64	38.064,20	39.816,39

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika yang cukup beragam di tiap kabupaten/kota. Secara umum, Sulawesi Utara mencatat penurunan TPT dari 7,37 persen pada tahun 2020 menjadi 5,85 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di wilayah ini.

Di antara daerah-daerah tersebut, Kota Manado secara konsisten memiliki TPT tertinggi, meskipun mengalami penurunan signifikan dari 13,88 persen pada tahun 2020 menjadi 8,73 persen pada tahun

2024. Hal serupa terjadi di Kota Bitung dan Kota Tomohon yang juga mencatat penurunan, masing-masing dari 10,23 persen dan 8,99 persen pada tahun 2020 menjadi 7,51 persen dan 7,79 persen di tahun 2024.

Sementara itu, beberapa kabupaten berhasil menekan angka pengangguran hingga di bawah 3 persen. Contohnya adalah Kepulauan Sitaro yang menunjukkan penurunan dari 3,31 persen pada 2020 menjadi hanya 1,94 persen di tahun 2024. Kepulauan Sangihe dan Bolaang Mongondow Selatan juga mencatatkan penurunan yang signifikan, masing-masing mencapai 2,50 persen dan 2,51 persen pada tahun 2024.

Namun, ada pula daerah yang sempat mengalami kenaikan, seperti Kabupaten Minahasa yang TPT-nya sempat naik hingga 7,65 persen pada 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 7,22 persen pada 2024. Kabupaten Minahasa Utara pun menunjukkan tren menurun dari angka yang cukup tinggi, yakni 8,12 persen pada 2021 menjadi 6,73 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat perbedaan antar daerah, tren penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi Utara memberikan sinyal positif bahwa upaya peningkatan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi daerah mulai menunjukkan hasil.

Tabel 2.43
Perkembangan TPT menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	TPT (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	4,87	4,85	4,96	4.61	4,48
2.	Minahasa	6,30	6,14	7,00	7.65	7,22
3.	Kepulauan Sangihe	4,91	4,72	2,87	2.56	2,50
4.	Kepulauan Talaud	2,64	2,30	3,67	3.10	3,06

No	Kabupaten/Kota	TPT (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Minahasa Selatan	5,01	4,90	5,77	4.98	4,79
6.	Minahasa Utara	7,88	8,12	7,09	7.17	6,73
7.	Bolaang Mongondow Utara	5,48	5,23	5,10	4.48	4,10
8.	Kepulauan Sitaro	3,31	3,39	2,96	2.09	1,94
9.	Minahasa Tenggara	3,31	3,39	3,43	2.84	2,76
10.	Bolaang Mongondow Selatan	4,39	4,60	2,75	2.55	2,51
11.	Bolaang Mongondow Timur	6,13	5,99	6,19	5.35	5,35
12.	Kota Manado	13,88	12,17	10,47	8.85	8,73
13.	Kota Bitung	10,23	9,96	8,56	7.82	7,51
14.	Kota Tomohon	8,99	8,84	8,11	8.52	7,79
15.	Kota Kotamobagu	7,44	7,32	6,59	6.34	5,72
	Sulawesi Utara	**7,37**	**7,06**	**6,61**	**6.10**	**5,85**

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2025

Grafik di atas menggambarkan tren penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia secara nasional dan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka nasional tercatat sebesar 7,07 persen, sementara Sulawesi Utara berada di angka yang lebih tinggi yaitu 7,37 persen. Tahun 2021, kedua wilayah mengalami penurunan, dengan angka nasional menjadi 6,49 persen dan Sulawesi Utara 7,06 persen.

Penurunan berlanjut pada tahun 2022, di mana persentase tingkat pengangguran terbuka nasional turun menjadi 5,86 persen, sedangkan Sulawesi Utara menjadi 6,61 persen. Tren ini menunjukkan bahwa upaya penanganan tingkat pengangguran terbuka mulai menunjukkan hasil yang cukup positif. Tahun 2023, angka nasional kembali turun menjadi 5,32 persen, sementara Sulawesi Utara mencapai 6,10 persen. Terakhir, pada tahun 2024, angka kemiskinan

nasional berada di angka 4,91 persen, sedangkan Sulawesi Utara turun menjadi 5,85 persen.

Secara umum, meskipun angka tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara cenderung lebih tinggi dibandingkan angka nasional, keduanya menunjukkan arah penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi dan keberhasilan program-program penanggulangan tingkat pengangguran terbuka yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Grafik 2.27
Perkembangan TPT Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

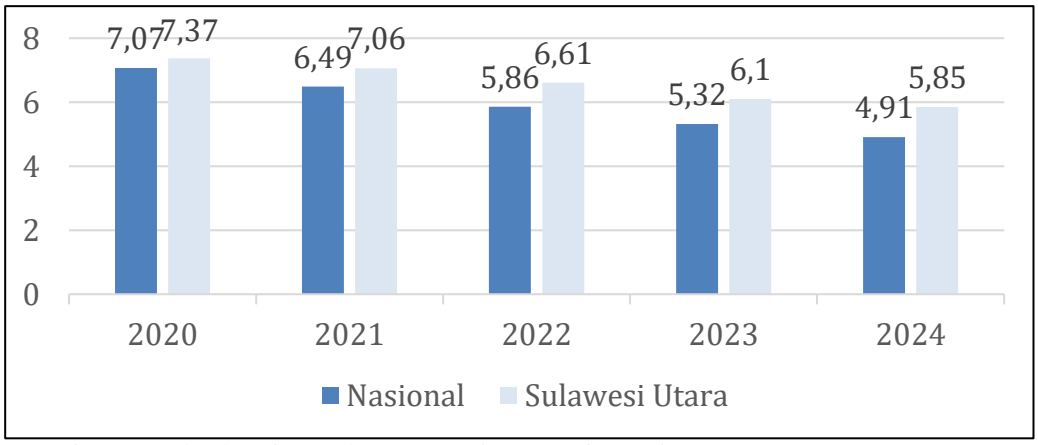

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2025

Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2023, TPT perempuan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 9,28 persen, sedangkan laki-laki hanya sebesar 4,52 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap pengangguran dibandingkan laki-laki, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya akses ke lapangan kerja yang layak, norma sosial yang membatasi peran perempuan di sektor

formal, serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan TPT untuk kedua jenis kelamin, di mana TPT perempuan turun menjadi 7,75 persen dan TPT laki-laki naik sedikit menjadi 4,98 persen. Meskipun terjadi penurunan, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih cukup signifikan, menunjukkan bahwa perempuan tetap menghadapi tantangan struktural dalam memperoleh pekerjaan. Data ini memperkuat pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif gender untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan kerja yang setara dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 2.28
Perkembangan TPT Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023-2024

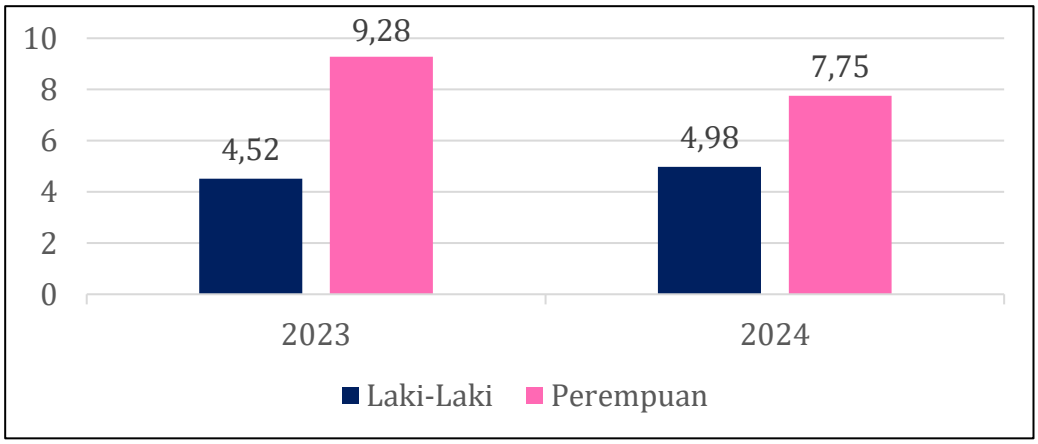

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Secara keseluruhan, tren ini menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap kondisi ketenagakerjaan perempuan. Upaya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender, menjadi strategi penting untuk menekan angka pengangguran terbuka di kalangan perempuan dan

mengoptimalkan potensi tenaga kerja secara menyeluruh di daerah ini.

E. Angka Melek Aksara

Tabel berikut menyajikan data Angka Melek Aksara (AMA) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2019 hingga 2024. Angka Melek Aksara (AMA) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam bahasa tertentu dengan pemahaman yang memadai. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

Tabel 2.44
Angka Melek Aksara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	99,79	99,80	99,81	99,79	99,75

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan data tahun 2025, tingkat angka melek aksara (AMA) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024 tercatat sangat tinggi dan relatif stabil, yaitu masing-masing sebesar 99,79% pada tahun 2020, 99,80% pada tahun 2021, 99,81% pada tahun 2022, 99,79% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 99,75% pada tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk di provinsi ini telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis.

Kondisi AMA yang konsisten tinggi ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pendidikan dan upaya pemberantasan buta aksara yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan di Sulawesi Utara. Meskipun demikian, pemerintah

daerah dan para pemangku kepentingan tetap perlu memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil, serta terus mendorong peningkatan kualitas literasi agar capaian melek aksara yang tinggi ini juga diikuti dengan peningkatan kemampuan literasi fungsional masyarakat.

F. Indeks Gini

Perkembangan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan, baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun secara nasional, dalam periode Maret 2020 hingga September 2024. Secara nasional, nilai Indeks Gini berada dalam kisaran sempit antara 0,38 hingga 0,39, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan yang relatif stabil namun tetap cukup tinggi. Nilai tertinggi tercatat pada September 2020 sebesar 0,39, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada Maret 2021 menjadi 0,384 dan terus berfluktuasi secara minor hingga mencapai 0,381 pada September 2024. Tren ini menunjukkan bahwa secara nasional, belum terjadi perubahan signifikan dalam pemerataan pendapatan selama periode lima tahun terakhir.

Sebaliknya, kondisi di Sulawesi Utara menunjukkan dinamika yang lebih mencolok. Pada Maret dan September 2020, Indeks Gini tercatat sebesar 0,37, sama dengan nilai rata-rata nasional pada periode tersebut. Namun, mulai Maret 2021 terjadi penurunan bertahap, dari 0,365 ke 0,359 pada September 2021. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,365 pada Maret 2022, angka ini kembali menurun ke 0,359 pada September 2022. Peningkatan menjadi 0,37 kembali terjadi pada Maret dan September 2023, yang menandai periode stabil,

namun tren penurunan kembali berlanjut pada tahun 2024. Pada Maret 2024, Indeks Gini Sulawesi Utara menurun menjadi 0,36, dan mencapai titik terendahnya pada September 2024 dengan angka 0,347.

Penurunan Indeks Gini yang cukup konsisten di Sulawesi Utara, khususnya dalam dua tahun terakhir, mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Ini berarti ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin mengecil. Bila dibandingkan dengan kondisi nasional yang relatif stagnan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Utara kemungkinan berjalan lebih efektif. Penurunan signifikan dari 0,37 menjadi 0,347 selama periode lima tahun menunjukkan arah yang positif dalam pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi di daerah tersebut.

Grafik 2.29
Perkembangan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021	Sept 2021	Maret 2022	Sept 2022	Maret 2023	Sept 2023	Maret 2024	Sept 2024
Sulawesi Utara	0.37	0.368	0.365	0.359	0.365	0.359	0.37	0.37	0.36	0.347
Nasional	0.38	0.39	0.384	0.381	0.383	0.381	0.388	0.388	0.379	0.381

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan Rasio Gini di Provinsi Sulawesi Utara dari Maret 2020 hingga September 2024, yang mencerminkan tingkat

ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan. Secara umum, Rasio Gini di Sulawesi Utara mengalami fluktuasi ringan namun menunjukkan tren penurunan menjelang akhir periode. Pada Maret 2020, nilai Rasio Gini secara provinsi berada di angka 0,37, sempat mengalami penurunan hingga 0,359 pada September 2022, kemudian kembali naik ke angka 0,37 pada 2023, sebelum akhirnya menurun ke 0,347 pada September 2024, yang menjadi nilai terendah selama periode pengamatan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, perkotaan cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dengan nilai tertinggi 0,377 pada Maret dan September 2023, kemudian turun menjadi 0,351 pada September 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran di wilayah perkotaan pada akhir periode. Sementara itu, wilayah perdesaan menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah dan stabil, berada dalam kisaran 0,331 hingga 0,346, tanpa lonjakan berarti.

Secara keseluruhan, penurunan Rasio Gini di akhir periode, terutama pada September 2024, mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan ekonomi di Sulawesi Utara. Meskipun ketimpangan masih lebih tinggi di wilayah perkotaan, namun tren positif ini menunjukkan langkah menuju distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.

Grafik 2.30
Perkembangan Gini Rasio Perdesaan dan Perkotaan
Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020-2024

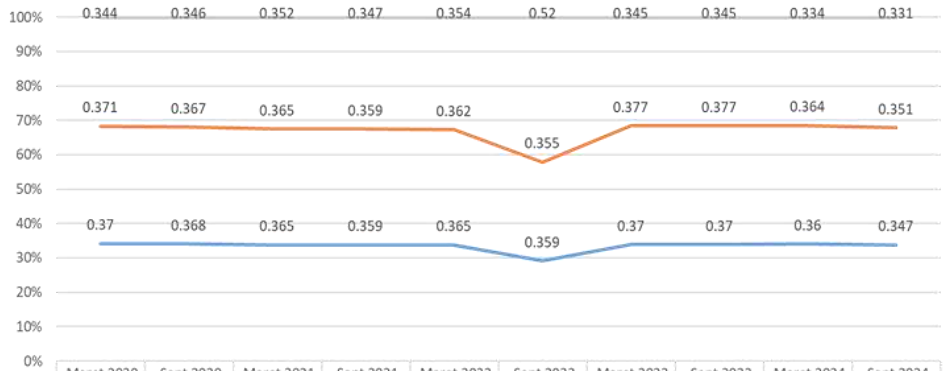

	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021	Sept 2021	Maret 2022	Sept 2022	Maret 2023	Sept 2023	Maret 2024	Sept 2024
Perdesaan	0.344	0.346	0.352	0.347	0.354	0.52	0.345	0.345	0.334	0.331
Perkotaan	0.371	0.367	0.365	0.359	0.362	0.355	0.377	0.377	0.364	0.351
Sulawesi Utara	0.37	0.368	0.365	0.359	0.365	0.359	0.37	0.37	0.36	0.347

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Berdasarkan data distribusi pengeluaran penduduk menurut kelompok ekonomi, terlihat adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam komposisi pengeluaran antara Maret 2023 hingga September 2024. Di wilayah perkotaan, proporsi pengeluaran yang dikuasai oleh 40 persen penduduk terbawah meningkat dari 18,04 persen pada Maret 2023 menjadi 18,86 persen pada Maret 2024, dan terus naik menjadi 19,38 persen pada September 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penduduk miskin dan rentan di perkotaan mulai memiliki daya beli yang lebih baik. Sebaliknya, kelompok 20 persen penduduk terkaya mengalami penurunan penguasaan pengeluaran dari 45,31 persen menjadi 44,75 persen, dan turun lagi menjadi 42,92 persen di periode yang sama, menunjukkan adanya penurunan konsentrasi pengeluaran pada kelompok atas.

Sementara itu, di wilayah perdesaan, kondisi serupa juga terjadi. Kelompok 40 persen terbawah meningkat dari 19,30 persen pada Maret 2023 menjadi 19,69 persen pada Maret 2024 dan 19,93 persen pada

September 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi kesejahteraan di desa, meskipun secara absolut angkanya masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yang menandakan tingkat kemiskinan di desa masih lebih besar. Adapun kelompok 20 persen teratas di desa mengalami penurunan dari 42,72 persen menjadi 41,43 persen, dan turun lagi ke 41,00 persen, yang berarti ketimpangan ekonomi mulai mengecil.

Secara nasional (gabungan kota dan desa), tren distribusi pengeluaran menunjukkan arah yang konsisten: kelompok 40 persen terbawah meningkat dari 18,28 persen pada Maret 2023 menjadi 19,54 persen pada September 2024. Sedangkan kelompok 20 persen atas mengalami penurunan dari 44,69 persen menjadi 42,79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dan sosial pemerintah kemungkinan mulai efektif dalam mendorong penguatan ekonomi kelompok bawah. Meski perubahannya tidak drastis, arah perbaikannya cukup konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir. Pemerintah perlu mempertahankan bahkan memperkuat intervensi berbasis desa dan urban poor agar tren ini terus berlanjut dan kesenjangan ekonomi semakin menyempit.

Tabel 2.45
Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Maret 2023, Maret 2024 dan September 2024 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas	Jumlah
Perkotaan				
Maret 2023	18,04	36,64	45,31	100
Maret 2024	18,86	36,39	44,75	100
September 2024	19,38	37,70	42,92	100
Perdesaan				

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas	Jumlah
Maret 2023	19,30	37,97	42,72	100
Maret 2024	19,69	38,88	41,43	100
September 2024	19,93	39,07	41,00	100
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2023	18,28	37,04	44,69	100
Maret 2024	18,76	37,38	43,86	100
September 2024	19,54	37,66	42,79	100

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

G. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan indikator yang mencerminkan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan. IMM dibentuk dari tiga komponen utama, yakni survival (kelangsungan hidup), kualitas pendidikan, dan kualitas kesehatan. Ketiga komponen ini saling melengkapi dalam membentuk akumulasi human capital, yang sangat menentukan produktivitas dan daya saing suatu daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, IMM menjadi salah satu ukuran strategis dalam perencanaan pembangunan manusia di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Sulawesi Utara.

Komponen pertama adalah kelangsungan hidup balita (CSR - Child Survival Rate), yang mengukur kemungkinan anak bertahan hidup hingga usia lima tahun. Ini adalah fase kritis yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan pendidikan dan perkembangan anak. Pada tahun 2023, Sulawesi Utara menunjukkan capaian sangat tinggi dalam indikator ini, yaitu sebesar 0,98, yang berarti hampir seluruh anak berhasil melewati masa balita dengan baik. Angka ini menunjukkan keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap layanan dasar kesehatan.

Komponen kedua menyangkut kualitas pendidikan, yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) pada usia 4-18 tahun serta rata-rata capaian asesmen pembelajaran nasional. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Utara tercatat sebesar 12,70 tahun, yang mencerminkan potensi lama waktu belajar yang dapat ditempuh anak-anak sejak usia prasekolah hingga pendidikan menengah. Di sisi lain, capaian rata-rata asesmen pembelajaran nasional di Sulawesi Utara adalah 51,72, masih berada di bawah standar nasional dan menjadi perhatian khusus dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan ke depan.

Komponen ketiga adalah kualitas kesehatan, yang mencakup kelangsungan hidup usia produktif (ASR - Adult Survival Rate) serta prevalensi balita bebas stunting. Pada tahun 2023, ASR Sulawesi Utara mencapai 0,83, yang menunjukkan cukup baiknya peluang seseorang bertahan hidup dari usia 15 hingga 60 tahun. Namun demikian, prevalensi stunting masih berada pada angka 21,3%, yang berarti 1 dari 5 balita mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Ini menandakan bahwa masih diperlukan intervensi yang lebih kuat untuk menurunkan angka stunting agar kualitas kesehatan jangka panjang dapat ditingkatkan.

Sampai saat ini, pemerintah pusat baru merilis capaian Indeks Modal Manusia (IMM) berdasarkan provinsi hingga tahun 2023, sementara untuk tahun 2024 masih dalam tahap perhitungan dan belum dipublikasikan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan dan validasi data masih berlangsung di tingkat nasional, yang memerlukan waktu serta koordinasi antarsektor, terutama dalam

memastikan akurasi indikator pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi komponen utama IMM.

Grafik 2.31
Komponen Kesehatan dan Pendidikan Pembentuk IMM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Sumber: KemenPPN/Bappenas RI, Tahun 2025

Secara keseluruhan, Indeks Modal Manusia (IMM) Sulawesi Utara pada tahun 2023 berada pada angka 0,50, yang masih berada di bawah target ideal nasional. Namun demikian, tren proyeksi yang disajikan dalam grafik menunjukkan peningkatan yang cukup optimis hingga mencapai 0,73 pada tahun 2045, lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa Sulawesi Utara memiliki peluang besar untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, selama upaya perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak terus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang diukur melalui harapan hidup saat lahir, pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita. Dengan menggabungkan ketiga aspek ini, IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan masyarakat dan menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Secara umum, IPM provinsi ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka IPM berada di 72,93 dan terus naik hingga mencapai 75,68 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat di wilayah ini.

Tabel 2.46
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	**72.93**	**73.3**	**73.81**	**74.36**	**75,68**
Bolaang Mongondow	67.89	68.16	68.95	69.62	71.14
Minahasa	75.29	75.73	76.18	76.96	79.26
Kepulauan Sangihe	70.73	71.07	71.63	72.22	74.43
Kepulauan Talaud	69.4	69.83	70.43	71.14	72.83
Minahasa Selatan	72.11	72.32	72.89	73.66	75.79
Minahasa Utara	73.9	74.11	74.69	75.31	77.05
Bolaang Mongondow Utara	66.99	67.39	68.06	68.64	71.66
Kepulauan Sitaro	67.64	68.05	68.94	69.57	71.55
Minahasa Tenggara	70.51	71.06	71.48	71.93	73.68
Bolaang Mongondow Selatan	65	65.42	65.9	66.4	69.92
Bolaang Mongondow Timur	65.99	66.55	67.21	67.95	70.68
Kota Manado	78.93	79.2	79.66	80.14	81.86
Kota Bitung	74.1	74.2	74.7	75.11	76.90
Kota Tomohon	76.69	76.86	77.44	78.1	80.06
Kota Kotamobagu	72.97	73.47	73.96	74.43	76.86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat per kabupaten/kota, Kota Manado konsisten menjadi daerah dengan IPM tertinggi selama lima tahun berturut-turut, bahkan pada tahun 2024 mencapai angka 81,86. Diikuti oleh Kota Tomohon yang juga mengalami lonjakan signifikan dari 76,69 di tahun 2020 menjadi 80,06 di tahun 2024. Sementara itu, Minahasa juga menunjukkan peningkatan cukup pesat dari 75,29 menjadi 79,26. Hal ini menandakan bahwa kota-kota besar cenderung memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dibanding daerah lainnya.

Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Utara masih menunjukkan angka IPM yang relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Meski demikian, ketiganya tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya, Bolaang Mongondow Selatan yang awalnya mencatat angka 65 pada tahun 2020, naik menjadi 69,92 di tahun 2024, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Selanjtnya, jika dilihat menurut tren IPM antara nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024 terlihat bahwa, sepanjang lima tahun tersebut, IPM Sulawesi Utara secara konsisten berada sedikit di atas rata-rata nasional. Misalnya, pada tahun 2020, IPM nasional berada di angka 72,81, sedangkan Sulawesi Utara sedikit lebih tinggi dengan 72,93. Selanjutnya, perbedaan ini semakin meningkat setiap tahun, hingga pada tahun 2024, IPM Sulawesi Utara diproyeksikan mencapai 75,68, melampaui IPM nasional yang berada di angka 75,02. Tren ini

mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Utara mengalami kemajuan yang cukup positif dan bahkan melampaui pencapaian rata-rata nasional dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Grafik 2.32
Persandingan Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

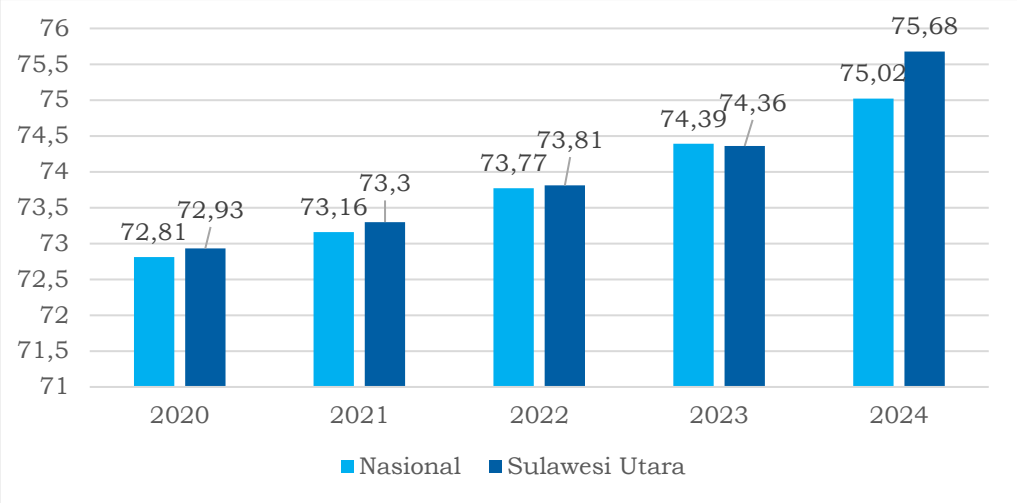

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2.1.4.2 Kesehatan untuk Semua

A. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, lingkungan, dan pelayanan sosial. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Sulawesi Utara mengalami peningkatan UHH yang cukup stabil dari 71,69 tahun di 2020 menjadi 72,69 tahun pada tahun 2024.

Jika ditelusuri lebih lanjut per wilayah, Kota Tomohon secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam hal umur harapan hidup, dimulai dari 71,93 tahun di 2020 dan meningkat menjadi 73,17 tahun pada tahun 2024. Sementara Kota Manado dan Kota

Bitung juga mencatat angka yang tinggi, masing-masing mencapai 72,78 tahun dan 71,95 tahun di tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kota-kota besar dengan infrastruktur kesehatan yang lebih baik memberikan pengaruh positif terhadap usia harapan hidup warganya.

Tabel 2.47
Umur Harapan Hidup (UHH) Per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Perkembangan Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	**71,69**	**71,76**	**72,08**	**72,4**	**72,69**
Bolaang Mongondow	69,36	69,45	69,78	70,07	70,31
Minahasa	71,08	71,16	71,49	71,82	72,11
Kepulauan Sangihe	70,1	70,18	70,51	70,78	70,99
Kepulauan Talaud	70,16	70,24	70,57	70,91	71,21
Minahasa Selatan	69,92	70,01	70,35	70,71	70,94
Minahasa Utara	71,38	71,4	71,68	71,99	72,27
Bolaang Mongondow Utara	67,66	67,73	68,05	68,33	68,56
Kepulauan Sitaro	70,73	70,87	71,27	71,59	71,87
Minahasa Tenggara	70,15	70,21	70,52	70,86	71,17
Bolaang Mongondow Selatan	64,49	64,49	64,74	64,95	65,11
Bolaang Mongondow Timur	67,89	67,94	68,24	68,51	68,73
Kota Manado	71,87	71,9	72,18	72,5	72,78
Kota Bitung	71,07	71,1	71,38	71,68	71,95
Kota Tomohon	71,93	72,06	72,44	72,84	73,17
Kota Kotamobagu	70,47	70,6	70,98	71,34	71,63

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Di sisi lain, wilayah dengan angka UHH yang lebih rendah cenderung berada di kawasan kabupaten yang lebih terpencil atau berkembang. Contohnya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang mencatatkan angka terendah pada tahun 2020 sebesar 64,49 tahun dan meskipun mengalami peningkatan secara bertahap, hanya mencapai 65,11 tahun pada tahun 2024. Bolaang Mongondow Utara pun mencatat UHH terendah kedua, yakni hanya 68,56 tahun pada

tahun 2024, meskipun angka ini sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.33
Persandingan Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional dan Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

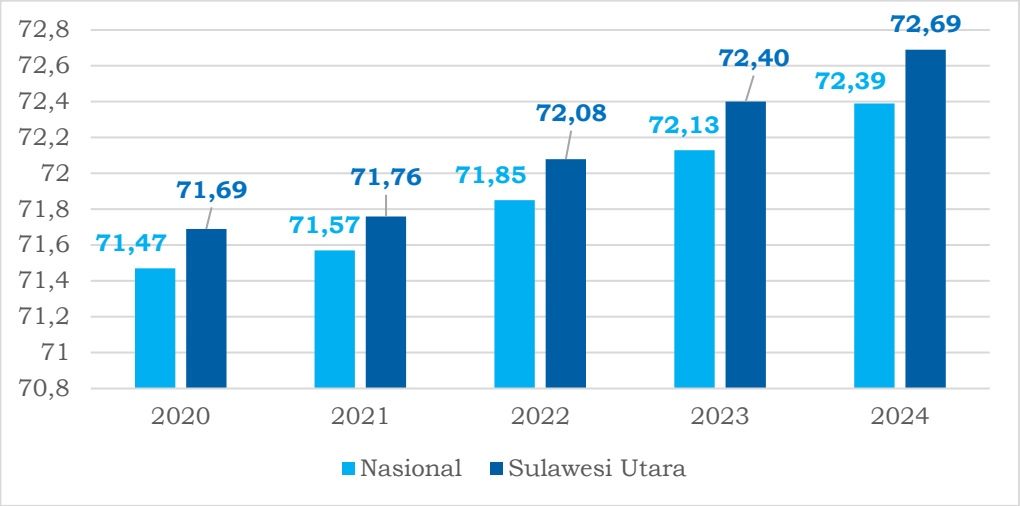

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Selanjutnya, grafik di atas memperlihatkan perbandingan tren Umur Harapan Hidup (UHH) antara tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Sepanjang periode tersebut, UHH Sulawesi Utara secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2020, misalnya, angka UHH nasional tercatat sebesar 71,47 tahun, sedangkan Sulawesi Utara mencapai 71,69 tahun. Selisih ini terus terjaga hingga tahun 2024, di mana UHH nasional mencapai 72,39 tahun dan Sulawesi Utara unggul dengan 72,69 tahun. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Utara, dalam hal kesehatan dan umur panjang, terus mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan capaian nasional.

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pembangunan keluarga di suatu daerah. Indeks ini disusun dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Melalui pendekatan ini, iBangga tidak hanya menyoroti aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan psikologis yang dialami oleh setiap anggota keluarga.

Dengan hadirnya iBangga, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih terarah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan institusi keluarga. Data yang dihasilkan dari pengukuran indeks ini menjadi acuan dalam menyusun program dan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

Grafik 2.34
Indeks pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

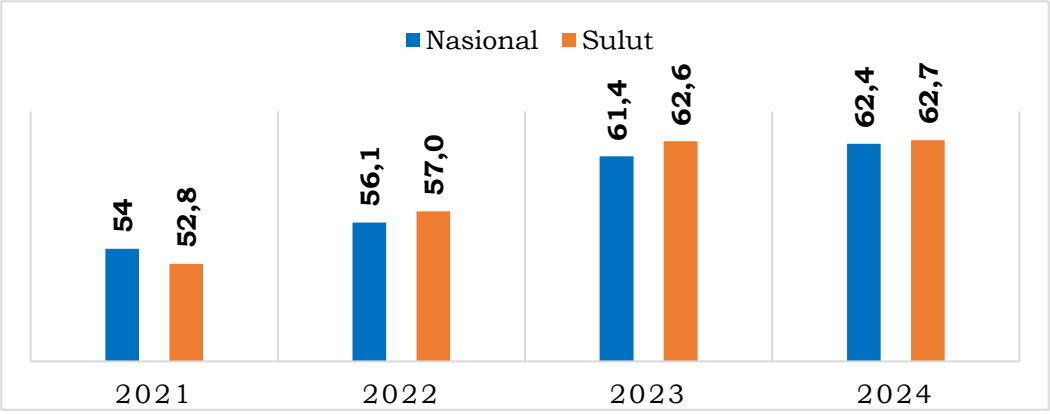

Sumber: Perwakilan BKKBN Prov. Sulut Tahun 2025

Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) antara tingkat

nasional dan Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, iBangga nasional tercatat sebesar 54, sedangkan Sulawesi Utara sedikit lebih rendah di angka 52,8. Peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana iBangga nasional mencapai 56,1, sementara Sulawesi Utara mencatatkan angka 57,0, menunjukkan adanya perbaikan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2024, data menunjukkan tren positif yang berkelanjutan di kedua wilayah. iBangga nasional tercatat sebesar 61,4 pada tahun 2023 dan 62,4 pada tahun 2024, sementara Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang lebih tinggi dengan angka 62,6 di 2023 dan 62,7 di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun iBangga nasional lebih tinggi, Sulawesi Utara telah mengalami perkembangan yang pesat dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, dengan tren yang mengarah pada kesetaraan antara kedua wilayah tersebut.

C. Angka Kematian Ibu, Balita, Bayi dan Neonatal

Tren angka kematian ibu, balita, bayi, dan neonatal di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024. Data ini menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI), yang diukur per 100.000 kelahiran hidup, mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 155 dan mengalami peningkatan menjadi 172 pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 97, kemudian meningkat lagi menjadi 129 di 2023, dan naik ke 151 pada 2024. Perubahan ini menandakan bahwa meskipun ada upaya peningkatan layanan kesehatan ibu, tantangan besar masih ada dalam memastikan keselamatan ibu saat melahirkan.

Angka kematian balita (AKBa), bayi (AKB), dan neonatal (AKN), yang dihitung per 1.000 kelahiran hidup, menunjukkan tren yang lebih stabil meskipun ada sedikit variasi. AKBa berada pada kisaran 5–8 kematian per 1.000 KH selama lima tahun, dengan angka tertinggi tercatat pada 2022. Sementara itu, AKB berkisar antara 4 hingga 7, dan AKN yang mencerminkan kematian pada usia 0–28 hari tetap berada pada kisaran 4 hingga 5. Walaupun tidak setinggi AKI, ketiga indikator ini tetap perlu mendapat perhatian serius karena menggambarkan kondisi kesehatan anak secara menyeluruh, khususnya pada masa-masa awal kehidupan.

Grafik 2.35
Angka Kematian Ibu, Balita, Bayi dan Neonatal di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

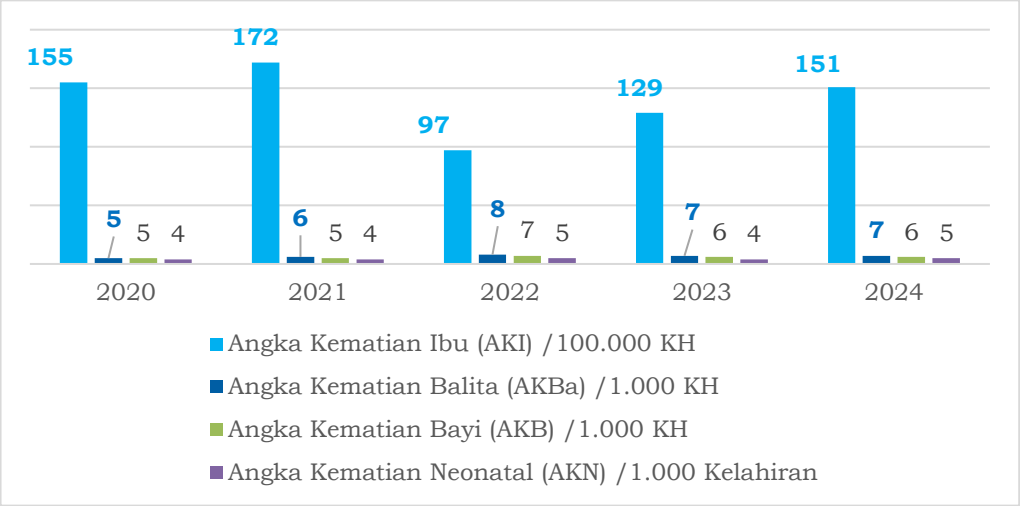

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan bahwa tantangan kesehatan ibu dan anak masih menjadi isu penting di Sulawesi Utara. Kenaikan dan penurunan angka kematian yang tidak stabil menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan maternal dan neonatal secara berkelanjutan, termasuk akses yang lebih merata terhadap fasilitas

kesehatan, tenaga medis terlatih, dan sistem rujukan yang responsif. Investasi pada kesehatan ibu dan anak tidak hanya penting untuk menurunkan angka kematian, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Di balik fluktuasi angka kematian ibu, terdapat hambatan-hambatan spesifik yang masih dihadapi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Faktor geografis, keterbatasan transportasi, rendahnya literasi kesehatan, serta stigma sosial terhadap kesehatan reproduksi sering kali menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Selain itu, fasilitas kesehatan yang belum merata, ketersediaan tenaga medis yang terbatas, serta kurangnya layanan yang ramah perempuan memperburuk situasi. Banyak perempuan juga menghadapi beban ganda dalam keluarga, yang menghambat mereka untuk secara mandiri mencari layanan kesehatan, termasuk untuk kebutuhan prenatal dan pascamelahirkan.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan isu kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan dan strategi pembangunan manusia secara lebih sistematis. Kesehatan reproduksi bukan hanya berkaitan dengan kelahiran dan kematian, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup, kesetaraan gender, dan hak dasar perempuan untuk mengakses layanan kesehatan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan harus mencakup penyediaan informasi yang komprehensif, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta penguatan sistem rujukan dan dukungan psikososial. Dengan

menjadikan kesehatan reproduksi sebagai bagian integral dari pembangunan manusia, Sulawesi Utara tidak hanya akan menurunkan angka kematian ibu dan anak, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Perempuan sering menghadapi hambatan spesifik dalam mengakses layanan kesehatan, seperti keterbatasan informasi, kendala ekonomi, jarak dan transportasi ke fasilitas layanan, serta norma sosial dan budaya yang membatasi mobilitas atau pengambilan keputusan mereka terkait kesehatan. Oleh karena itu, integrasi analisis kesehatan reproduksi ke dalam dokumen perencanaan menjadi penting sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang inklusif. Hal ini mencakup perhatian terhadap akses layanan antenatal, persalinan yang aman, pelayanan KB, serta edukasi kesehatan reproduksi, guna memastikan peningkatan kualitas hidup perempuan dan memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan

D. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan di bawah standar kesehatan. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Kementerian Kesehatan, anak dikategorikan stunting jika nilai z-score-nya kurang dari -2,00 SD, dan tergolong sangat pendek jika kurang dari -3,00 SD. Singkatnya, stunting mencerminkan pertumbuhan anak yang tidak sesuai usianya dan dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Grafik 2.36
Persandingan Tren Stunting Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

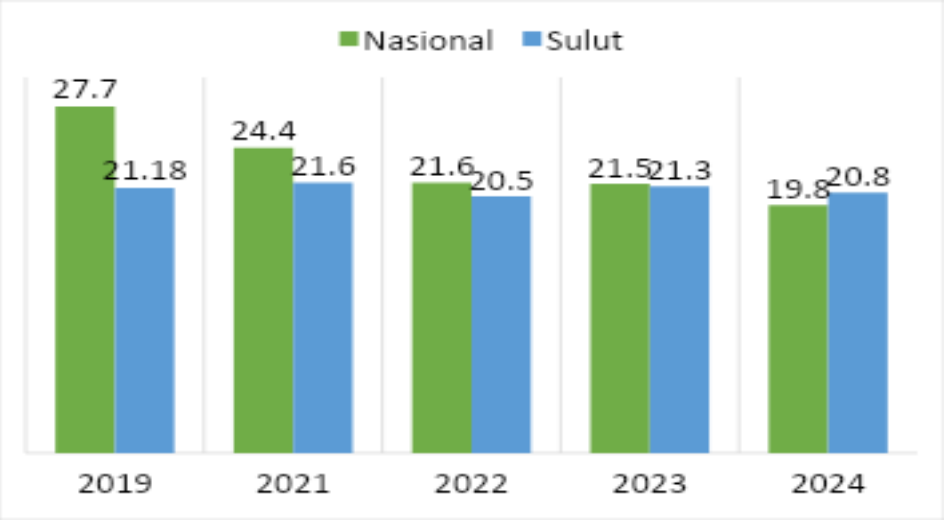

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan tren perbandingan prevalensi stunting antara tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2019 hingga 2024. Secara umum, baik nasional maupun Sulut mengalami penurunan prevalensi stunting secara bertahap. Pada tahun 2019, angka stunting nasional berada pada tingkat 27,7%, sementara Sulawesi Utara sudah lebih rendah dengan capaian 21,18%. Dalam beberapa tahun berikutnya, tren penurunan terus berlangsung, mencerminkan dampak dari program percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pada tahun 2023, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Utara yang berada di angka 21,3%. Memasuki tahun 2024, capaian nasional mengalami penurunan signifikan menjadi 19,8%, sedangkan Sulawesi Utara juga menurun menjadi 20,8%, atau turun 0,5% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun ini posisi Sulawesi Utara

justru berada sedikit di atas rata-rata nasional, menandakan perlunya upaya penguatan intervensi yang lebih terarah dan masif di tingkat lokal agar Sulut dapat kembali mempertahankan keunggulannya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.48
Prevalensi Stunting per-Kabupaten/kota di Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Stunting				
		2020 (SSGBI)	2021 (SSGI)	2022 (SSGI)	2023 (SKI)	2024 (SSGI)
1	Bolaang Mongondow	5,03	26,6	19	24,8	19,3
2	Minahasa	3,11	17,5	16,5	23,1	19,4
3	Kepulauan Sangihe	13,31	21,1	18,5	19	24,2
4	Kepulauan Talaud	11,1	25,8	26	19,3	11,6
5	Minahasa Selatan	2,34	24,2	19,2	26,4	28,1
6	Minahasa Utara	4,5	19,1	20,5	10,9	18,9
7	Bolaang Mongondow Utara	5,02	26,4	21,9	27,8	26,3
8	Kepulauan Sitaro	3,03	22,5	14,4	24,9	19,9
9	Minahasa Tenggara	8,18	25,5	26,5	15	21,9
10	Bolaang Mongondow Selatan	14,78	37,4	27,9	33	23,6
11	Bolaang Mongondow Timur	6,51	24,4	30	28,4	18,8
12	Kota Manado	6,32	23,8	18,4	21,8	18,8
13	Kota Bitung	4,16	22,1	23,5	19,5	25,1
14	Kota Tomohon	1,28	18,3	13,7	10,5	10,8
15	Kota Kotamobagu	5,16	25,1	22,9	20,5	23,2
	Sulawesi Utara	**21,18**	**21,6**	**20,5**	**21,3**	**20,8**

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2025

Tabel di atas menyajikan data prevalensi stunting di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, rata-rata prevalensi stunting di tingkat provinsi menunjukkan tren penurunan, dari 21,18% pada tahun 2020 menjadi 20,8% pada tahun 2024. Meskipun demikian, tren ini tidak seragam di seluruh wilayah. Beberapa daerah mengalami penurunan signifikan, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud yang turun dari 25,8% (2021) menjadi 11,6% (2024), dan Minahasa Utara dari 20,5%

(2022) menjadi 10,9% (2023). Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota justru mengalami peningkatan, misalnya Minahasa Selatan yang melonjak dari 2,34% (2020) menjadi 28,1% (2024).

Tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih memiliki angka stunting di atas rata-rata provinsi. Daerah dengan prevalensi tertinggi adalah Minahasa Selatan (28,1%), Bolaang Mongondow Utara (26,3%), dan Kota Bitung (25,1%). Sementara itu, Kota Tomohon menjadi wilayah dengan prevalensi terendah, yaitu hanya 10,5%. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi yang lebih terarah dan berbasis lokal, mengingat adanya variasi capaian yang cukup tajam antarwilayah dalam upaya penurunan stunting di Sulawesi Utara.

E. Prevalensi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Utara, untuk prevalensi narkoba di Sulawesi Utara di tahun 2021 berada pada angka 1,86 persen, namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen menjadi 1,69 persen. Kondisi ini secara presentaasi berada dibawah angka rata-rata nasional yaitu tahun 2021 di angka 1,95 persen dan pada tahun 2023 mengalami penurunan di angka 1,73

persen berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan BPS.

Angka Prevalensi Nasional

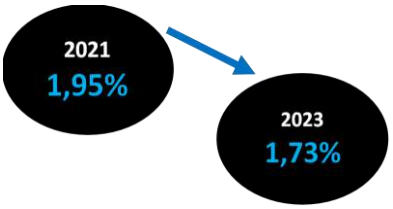

Angka Prevalensi Sulut

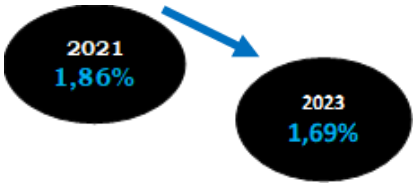

Upaya penurunan angka penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara preventif. Hal ini merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh komponen Masyarakat. Dimulai dari Penataan perencanaan secara selektif, melalui sistem Pendidikan baik formal maupun informal dengan kurikulum yang terintegrasi dengan materi tentang bahaya narkoba, sehingga peserta didik sejak usia dini dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (life skills) untuk menolak segala bentuk godaan narkotika. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada guru, orang tua, dan tokoh masyarakat juga merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat dan bebas narkoba. Selain itu, Melakukan sosialisasi serta kampanye publik yang masif dan berkelanjutan melalui media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik yang menolak narkoba. Pendekatan berbasis komunitas, dengan pelibatan tokoh agama, serta kegiatan pemuda yang positif, dapat menjadi kekuatan sosial yang efektif

dalam membangun ketahanan lingkungan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah sebagai memegang peran penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada pencegahan harus memberi dukungan terhadap program-program pembinaan remaja, penyediaan fasilitas olahraga dan seni, serta peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, pelaksanaan pengawasan secara konsisten dan penegakan hukum secara adil serta Sinergi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem sosial yang kuat dan resisten terhadap narkoba, sehingga dengan pendekatan preventif yang menyeluruh dan kolaboratif, kita dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba dan menciptakan generasi masa depan yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Tabel 2.49
Prevalensi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya di Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Indikator	Realisasi				Satuan
	2021	2022	2023	2024	
Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	4	2	-	Kabupaten /Kota
Jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	4	4	3	Kabupaten /Kota
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3	4	4	4	Kabupaten /Kota
Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	1	1	Kawasan

Indikator	Realisasi				Satuan
	2021	2022	2023	2024	
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang dintervensi	3,01	3,0	2,89	3,09	Indeks

Sumber: Badan Narkotika Nasional Sulut Tahun 2025

2.1.4.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan.

Tabel 2.50
Rata-Rata Lama Sekolah per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	**[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bolaang Mongondow	7.93	8.03	8.17	8.36	8.38
Minahasa	9.59	9.73	9.82	10.11	10.23
Kepulauan Sangihe	8.29	8.34	8.49	8.64	8.65
Kepulauan Talaud	9.51	9.72	9.73	9.91	9.96
Minahasa Selatan	9.08	9.09	9.19	9.41	9.43
Minahasa Utara	9.99	10	10.18	10.3	10.35
Bolaang Mongondow Utara	8.4	8.41	8.57	8.58	8.61
Kepulauan Sitaro	8.97	9.03	9.21	9.25	9.43
Minahasa Tenggara	8.88	9.11	9.12	9.13	9.14
Bolaang Mongondow Selatan	7.9	8.15	8.16	8.17	8.28
Bolaang Mongondow Timur	7.83	7.93	8.09	8.27	8.29

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Manado	11.27	11.42	11.43	11.44	11.46
Kota Bitung	9.88	9.89	9.91	9.94	9.96
Kota Tomohon	10.73	10.74	10.75	10.99	11.03
Kota Kotamobagu	10.1	10.31	10.32	10.33	10.35
Sulawesi Utara	**9.49**	**9.62**	**9.68**	**9.77**	**9.84**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Rata-rata lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan IPM, karena mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah.

Secara umum, rata-rata lama sekolah di Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah di tingkat provinsi tercatat sebesar 9,49 tahun, kemudian terus meningkat hingga mencapai 9,84 tahun pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara secara keseluruhan mengenyam pendidikan formal dalam durasi yang lebih lama seiring waktu.

Kota Manado secara konsisten mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Utara, dari 11,27 tahun pada 2020 menjadi 11,46 tahun di 2024. Kota Tomohon dan Kotamobagu juga menunjukkan angka yang cukup tinggi, masing-masing 11,03 dan 10,35 tahun pada 2024. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan akses pendidikan yang lebih baik, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki lebih banyak fasilitas pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Sementara itu, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow mencatat angka rata-rata lama sekolah terendah. Pada 2020, keduanya hanya mencatat sekitar 7,83 dan 7,93 tahun, dan meski mengalami sedikit peningkatan hingga 2024, angkanya masih berada di bawah 8,5 tahun. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya hambatan akses pendidikan dan kemungkinan angka putus sekolah yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

Meski demikian, beberapa daerah menunjukkan perbaikan signifikan, seperti Minahasa Utara dan Minahasa Selatan yang mengalami peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama empat tahun terakhir. Secara umum, tren pendidikan di Sulawesi Utara terus membaik, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Upaya pemerataan pendidikan sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal, agar seluruh anak-anak di Sulawesi Utara memiliki kesempatan belajar yang sama.

Grafik 2.37
Persandingan Tren Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) Nasional dan Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

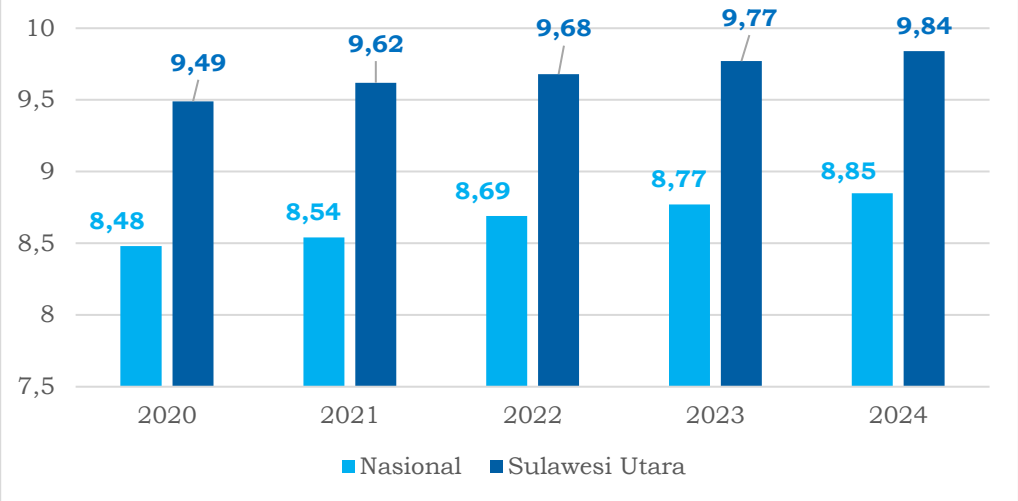

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan tren angka Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) Nasional dan Daerah, Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024 secara konsisten lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Pada tahun 2020, RRLS Sulut berada di angka 9,49 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 9,84 tahun pada 2024. Sementara itu, angka nasional juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun lebih lambat, dari 8,48 tahun di 2020 menjadi 8,85 tahun pada 2024. Kesenjangan antara angka nasional dan Sulawesi Utara ini mencerminkan capaian pendidikan yang relatif lebih baik di daerah tersebut, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin, data perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menurut jenis kelamin selama periode 2020 hingga 2024, menunjukkan adanya tren peningkatan rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun. Namun, yang menarik adalah bahwa sejak tahun 2021, rata-rata lama sekolah perempuan secara konsisten melampaui laki-laki, menunjukkan pergeseran positif dalam akses pendidikan bagi perempuan di wilayah ini.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah laki-laki tercatat sebesar 9,51 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada di angka 9,47 tahun. Namun, mulai tahun 2021, perempuan mencatat capaian yang lebih tinggi, yakni 9,64 tahun dibandingkan laki-laki 9,59 tahun. Tren ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan selisih yang semakin lebar. Tahun 2024 mencatatkan angka

tertinggi, di mana perempuan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 9,97 tahun, lebih tinggi dari laki-laki yang hanya mencapai 9,71 tahun.

Grafik 2.38
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

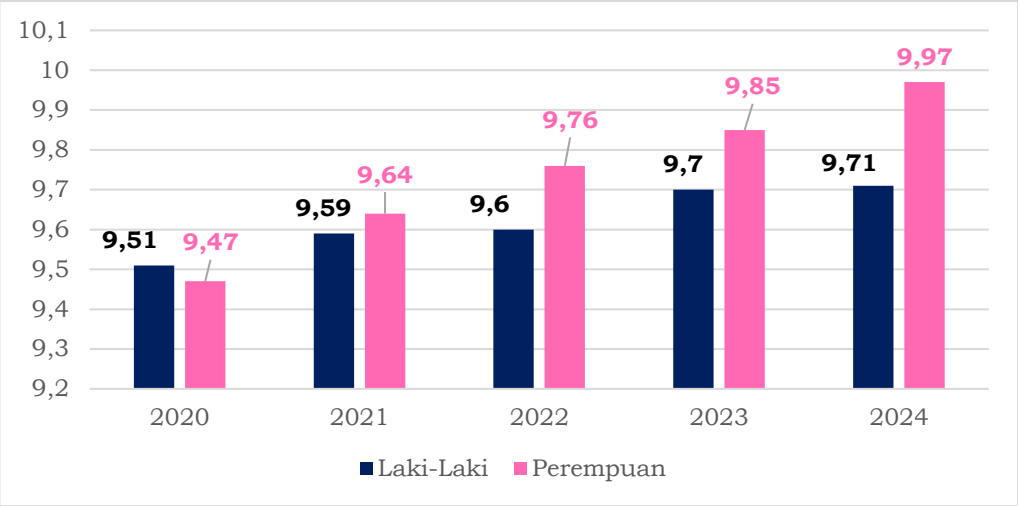

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa perempuan di Sulawesi Utara semakin memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Kecenderungan ini merupakan sinyal positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan yang di masa depan berpotensi berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, kesetaraan akses ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, serta memastikan tidak hanya kuantitas pendidikan yang meningkat, tetapi juga kualitas dan keterhubungannya dengan dunia kerja dan kehidupan sosial.

B. Harapan Lama Sekolah

Sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur dimensi pengetahuan pada Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan estimasi jumlah tahun pendidikan formal yang kemungkinan akan ditempuh oleh seorang anak yang berusia 7 tahun, apabila ia mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku hingga jenjang tertinggi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai akses dan peluang pendidikan yang tersedia bagi generasi muda di suatu daerah, serta mencerminkan harapan terhadap kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan di masa depan.

Tabel 2.51
Harapan Lama Sekolah per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bolaang Mongondow	11.52	11.53	11.61	11.63	11.65
Minahasa	13.98	14.15	14.17	14.18	14.19
Kepulauan Sangihe	12.32	12.47	12.59	12.6	12.61
Kepulauan Talaud	12.51	12.59	12.65	12.66	12.67
Minahasa Selatan	12.74	12.83	12.98	12.99	13.02
Minahasa Utara	12.8	12.92	13.06	13.07	13.08
Bolaang Mongondow Utara	11.91	12.17	12.34	12.38	12.39
Kepulauan Sitaro	11.67	11.86	12.02	12.03	12.04
Minahasa Tenggara	12.27	12.43	12.44	12.45	12.6
Bolaang Mongondow Selatan	12.29	12.3	12.31	12.33	12.34
Bolaang Mongondow Timur	11.59	11.86	11.88	11.9	11.91
Kota Manado	14.15	14.16	14.17	14.19	14.2
Kota Bitung	12.61	12.62	12.65	12.66	12.67
Kota Tomohon	14.2	14.21	14.23	14.24	14.38
Kota Kotamobagu	12.79	12.88	12.89	12.9	13.05
Sulawesi Utara	**12.85**	**12.94**	**12.95**	**12.96**	**12.97**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tabel diatas menampilkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024, dengan cakupan per

kabupaten/kota. Harapan lama sekolah mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki dunia pendidikan, mencerminkan sejauh mana akses dan kesempatan pendidikan tersedia di suatu wilayah.

Secara keseluruhan, angka harapan lama sekolah di Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari 12,85 tahun pada 2020 menjadi 12,97 tahun pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dalam durasi yang lebih panjang seiring waktu.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Kota Manado mencatat angka harapan lama sekolah yang tinggi, yakni 14,15 tahun pada 2020, dan meningkat menjadi 14,2 tahun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di Manado memiliki akses pendidikan yang lebih luas hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain Manado, Minahasa dan Kota Tomohon juga mencatat angka harapan lama sekolah yang tinggi, masing-masing mencapai 14,19 tahun 2024 dan 14,38 tahun pada 2024.

Sebaliknya, daerah dengan angka harapan lama sekolah terendah adalah Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow, yang pada 2020 mencatat masing-masing 11,59 tahun dan 11,52 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, angka ini tetap lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, dengan capaian 11,91 tahun dan 11,65 tahun pada 2024. Hal ini mencerminkan masih adanya keterbatasan dalam akses dan kesempatan pendidikan formal di wilayah tersebut.

Grafik 2.39
Persandingan Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

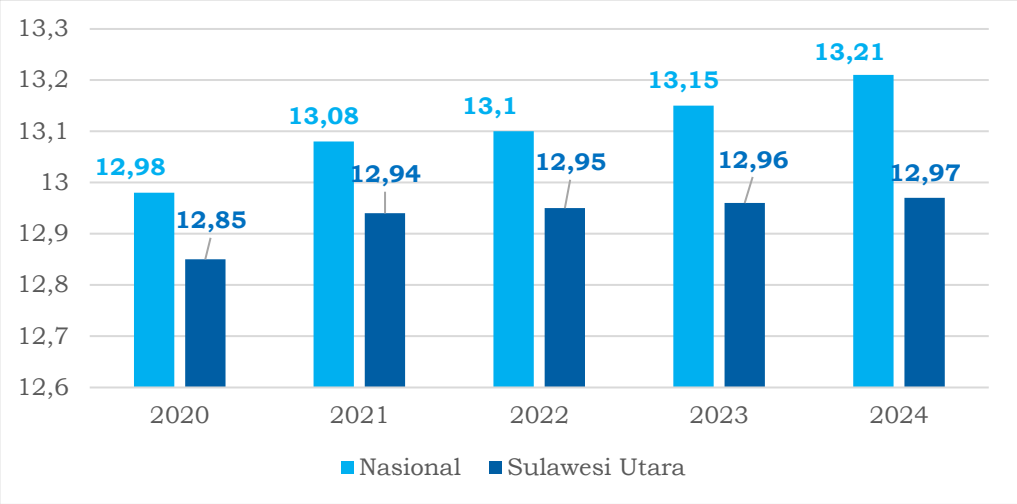

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Selanjutnya jika dilihat perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024. Harapan Lama Sekolah mengukur estimasi tahun pendidikan yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak yang memasuki usia sekolah. Data ini menunjukkan bahwa secara konsisten, perempuan memiliki angka HLS yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, HLS perempuan tercatat sebesar 13,07 tahun, sementara laki-laki berada di angka 12,76 tahun. Tren tersebut terus berlanjut dan meningkat setiap tahunnya, di mana perempuan mencapai angka tertinggi sebesar 13,52 tahun pada tahun 2024, sedangkan laki-laki hanya naik sedikit menjadi 12,80 tahun. Perbedaan yang stabil dan terus melebar ini menunjukkan bahwa anak perempuan di Sulawesi Utara secara umum memiliki peluang lebih besar atau ekspektasi lebih tinggi untuk menempuh pendidikan yang lebih lama.

Grafik 2.40
Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

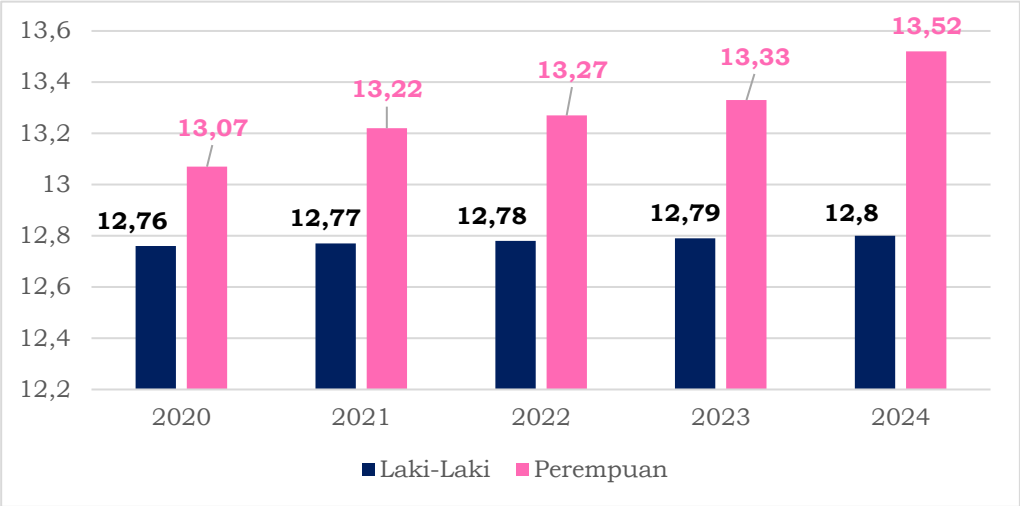

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Fakta ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam akses pendidikan bagi perempuan di daerah tersebut, sekaligus menjadi indikasi positif bagi pembangunan sumber daya manusia berbasis kesetaraan gender. Namun demikian, kesenjangan ini juga mengisyaratkan perlunya peningkatan motivasi dan dukungan bagi anak laki-laki agar tidak tertinggal dalam capaian pendidikan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu terus mendorong kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan hambatan sosial atau ekonomi yang mungkin mempengaruhi partisipasi laki-laki dalam pendidikan.

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar siswa dalam memahami bacaan serta mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak sekadar kemampuan membaca, melainkan mencakup pemahaman, penalaran, dan refleksi terhadap informasi tertulis. Sementara

numerasi mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami angka, pola, dan hubungan matematis serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Kedua aspek ini sangat penting karena menjadi dasar bagi penguasaan pelajaran lain dan keterampilan hidup, sehingga capaian yang tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa siswa memiliki bekal yang kuat untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dalam berbagai situasi.

Tabel 2.52
Capaian Literasi Numerasi Assesmen Nasional (AN) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenjang	Capaian Literasi Numerasi Assesmen Nasional (AN) Provinsi Sulawesi Utara				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemampuan Literasi	SMA	UJIAN NASIONAL (UN)	UJICOBA (ASSESMEN NASIONAL)	1,69	64,49	67,19
2	Kemampuan Literasi	SMK			1,65	57,77	60,2
3	Kemampuan Literasi	SDLB			TIDAK WAJIB IKUT	47,2	61,42
4	Kemampuan Literasi	SMPLB			TIDAK WAJIB IKUT	61,52	55,58
5	Kemampuan Literasi	SMALB			TIDAK WAJIB IKUT	55,38	49,39
6	Kemampuan Numerasi	SMA			1,61	55,36	57,09
7	Kemampuan Numerasi	SMK			1,61	51,45	52,59
8	Kemampuan Numerasi	SDLB			TIDAK WAJIB IKUT	35,46	73,42
9	Kemampuan Numerasi	SMPL			TIDAK WAJIB IKUT	54,28	51,67
10	Kemampuan Numerasi	SMALB			TIDAK WAJIB IKUT	53,2	50,6

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, capaian literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan baru mulai diukur secara resmi pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, belum tersedia data capaian karena proses pengukuran terhadap literasi dan numerasi belum dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan masa transisi dari Ujian Nasional (UN) menuju penerapan Asesmen Nasional (AN) yang

fokus pada pengukuran kompetensi dasar siswa. Sejak dimulainya pengukuran pada tahun 2022, terlihat adanya peningkatan capaian, seperti pada jenjang SMA yang nilai literasinya naik dari 1,69 di tahun 2022 menjadi 67,19 di tahun 2024. SMK pun mengalami perkembangan dari 1,65 menjadi 60,2 pada periode yang sama. Sementara itu, untuk jenjang sekolah luar biasa (SLB) seperti SDLB, SMPLB, dan SMALB, asesmen dilakukan secara terbatas, sehingga data tidak selalu tersedia setiap tahun, namun ketika dilakukan, hasil yang ditunjukkan cukup bervariasi.

Pada aspek numerasi, tren yang muncul sejak 2022 juga menunjukkan perbaikan capaian di berbagai jenjang pendidikan. SMA mencatatkan nilai awal 1,61 dan meningkat menjadi 57,09 di tahun 2024, sementara SMK naik dari 1,61 menjadi 52,59. Di jenjang SLB, pelaksanaan asesmen numerasi pun tidak dilakukan setiap tahun, namun capaian yang diperoleh menunjukkan potensi positif. Sebagai contoh, SDLB mencatat peningkatan signifikan dari 35,46 di tahun 2023 menjadi 73,42 pada 2024. Meskipun pengukuran ini masih tergolong baru, hasil yang diperoleh menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan yang lebih merata dan inklusif di Provinsi Sulawesi Utara.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pencapaian pembangunan di bidang literasi yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Indeks ini menjadi tolok ukur sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap informasi, kemampuan membaca, serta pemanfaatan

sarana literasi seperti perpustakaan dan taman bacaan. Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan literasi menjadi aspek strategis yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, memahami kondisi dan dinamika IPLM di Sulawesi Utara sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendorong terciptanya masyarakat yang literat, kritis, dan berdaya saing di era informasi saat ini.

Tabel 2.53
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	8,33	9,79	66,07	59,15	62,54

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sulawesi Utara merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di provinsi ini. Dengan nilai IPLM yang terus meningkat, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan literasi masyarakat. Pada tahun 2022, nilai IPLM Sulawesi Utara mencapai 66,07. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan literasi masyarakat di provinsi ini telah membuahkan hasil yang positif.

E. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman, keterampilan, dan penggunaan teknologi digital dalam suatu populasi. Indeks ini biasanya mencakup berbagai

aspek, seperti akses terhadap teknologi, pemahaman informasi digital, keamanan digital, serta etika dalam penggunaan internet

Indeks literasi digital pengukurannya untuk tahun 2022 per wilayah; Indonesia Wilayah Barat 3.56, Indonesia Wilayah Tengah 3.48, Indonesia Wilayah Timur 3.55 Pengukuran Indeks Literasi Digital pada tahun 2022 dilakukan melalui survei tatap muka yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Penentuan sampel survei menggunakan multistage random sampling dengan pendekatan home visit di area survei. Total responden pada pengukuran Indeks Literasi Digital tahun 2022 berjumlah 10.000 orang dengan Margin of Error (MoE) +/- 0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang diikutkan dalam penentuan sampel adalah anggota rumah tangga berusia 13-70 tahun, serta mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

2.1.4.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian ekonomi dan sosial bagi pekerja serta keluarganya dalam menghadapi berbagai risiko kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh perlindungan sosial yang mencakup aspek kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun.

Jenis-Jenis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

   Memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, baik yang terjadi di tempat kerja

maupun dalam perjalanan menuju atau dari tempat kerja. Manfaat yang diberikan mencakup biaya pengobatan, santunan cacat, serta santunan kematian akibat kecelakaan kerja.

2. Jaminan Hari Tua (JHT)

   Program tabungan jangka panjang yang dapat dicairkan setelah pekerja mencapai usia pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau meninggal dunia. Dana JHT berasal dari iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja.

3. Jaminan Pensiun (JP)

   Bertujuan untuk memberikan pendapatan berkelanjutan bagi pekerja setelah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Besaran manfaat yang diterima tergantung pada masa iuran dan upah pekerja selama bekerja.

4. Jaminan Kematian (JKM).

   Santunan yang diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat yang diberikan mencakup santunan tunai, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk anak pekerja yang meninggal dunia.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

   Program yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai, akses pelatihan kerja, dan layanan informasi pasar kerja.

Tabel 2.54
Cakupan Kepesertaam Jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	71,67%	81,60%	92,99%	77,89%	71,67%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Daerah Prov. Sulut Tahun 2025

Tabel di atas menampilkan data cakupan kepesertaan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator yang digunakan adalah Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial. Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan sebesar 71,67%. Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 81,60%. Tahun 2022 terjadi kenaikan lebih signifikan menjadi 92,99%. Namun, pada tahun 2023, cakupan kembali turun ke 77,89%. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024, dengan cakupan kepesertaan mencapai 71,67%. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, dengan tren peningkatan hingga 2022, kemudian mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

2.1.4.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2018, Sulut memperoleh skor 76,3, menempatkannya di peringkat kedua setelah Nusa Tenggara Timur yang memperoleh skor 78,9.

Peningkatan kualitas kerukunan ini juga diakui pada tingkat nasional. Pada tahun 2021, Sulut bersama Bali menempati peringkat teratas dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama, menunjukkan bahwa provinsi ini berhasil menjaga hubungan harmonis antarumat beragama.

Lebih lanjut, pada tahun 2024, Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia secara nasional meningkat menjadi 76,47, naik 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun data spesifik untuk Sulut tahun 2024 tidak tersedia, tren positif ini mencerminkan peningkatan sikap toleransi antarumat beragama secara umum.

Pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui berbagai program dan kolaborasi antarumat beragama. Upaya ini meliputi internalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, yang disosialisasikan sejak tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

Dengan komitmen bersama, Sulut diharapkan dapat terus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Tabel 2.55
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020-2024 Sulawesi Utara

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	82,43-82,49	82,97-83,03	83,97-84,03	86,97-87,03	88,97-88,03

Sumber Data: Badan Kesbangpolda Prov. Sulut

Berdasarkan data Tabel Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) diatas. Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2024 Selama lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Pada tahun 2020, indeks berada pada rentang 82,43 hingga 82,49, menandai

fondasi kuat dalam hubungan antarumat beragama di wilayah ini.

Tahun 2021 mencatat peningkatan dengan kisaran indeks 82,97 hingga 83,03, yang kemudian berlanjut secara progresif pada 2022 menjadi 83,97 hingga 84,03. Hal ini menunjukkan komitmen yang terus ditingkatkan dalam menjaga harmoni dan toleransi sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Puncak signifikan tercapai pada tahun 2023 dengan indeks 86,97 hingga 87,03, dan kembali meningkat pada tahun 2024, mencapai rentang 88,97 hingga 89,03. Angka ini menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah bersama tokoh agama dan masyarakat dalam membangun dialog lintas iman, serta mendorong moderasi beragama sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsistensi peningkatan IKUB ini mencerminkan Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi paling harmonis di Indonesia, sekaligus menjadi model nasional dalam penguatan kerukunan umat beragama yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sulawesi Utara dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Keanekaragaman budaya ini tidak hanya tercermin dalam seni dan adat istiadat, tetapi juga dalam sistem sosial yang mengakar kuat di masyarakat. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk melestarikan budaya melalui berbagai kebijakan dan program strategis yang melibatkan komunitas adat, seniman, serta masyarakat secara luas.

Salah satu bentuk pengakuan terhadap kekayaan budaya Sulawesi Utara adalah masuknya sepuluh

warisan budaya daerah ini dalam daftar Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Warisan budaya tersebut mencakup seni musik seperti Kolintang, tarian khas seperti Tari Kabasaran, Tari Maengket, dan Tari Mahambak, serta tradisi seperti Rumambak dan Pengucapan Syukur.

Gambar 2.20
Tari Maengket Minahasa

Tidak hanya itu, beberapa produk khas daerah juga termasuk dalam daftar warisan budaya, seperti Cap Tikus sebagai minuman fermentasi berbasis aren, Cakalang Fufu sebagai makanan olahan ikan khas, serta Dodol Amurang dan Tinutuan yang menjadi bagian dari identitas kuliner Sulut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan budaya Sulut kepada generasi mendatang maupun ke kancah

nasional dan internasional. Selain itu, di daerah ini terdapat dua gedung kesenian yang menjadi pusat aktivitas seni dan budaya, tempat seniman dan komunitas lokal menampilkan serta mengembangkan ekspresi budaya mereka.

Gambar 2.21
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Tak hanya dari sisi seni dan tradisi, keberadaan lembaga adat juga memainkan peran penting dalam menjaga norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Saat ini, terdapat enam lembaga adat yang tersebar di beberapa daerah, dengan rincian dua lembaga di Bolaang Mongondow, satu di Bolaang Mongondow Utara, satu di Bolaang Mongondow Selatan, satu di Minahasa, dan satu di Sangihe. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam mengawal keberlangsungan adat istiadat dan menyelesaikan persoalan sosial berbasis kearifan lokal.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sulawesi Utara masih menjaga berbagai tradisi yang berbasis kearifan lokal. Salah satu tradisi unik adalah Mane'e, yaitu ritual menangkap ikan secara tradisional di perairan Sangihe yang mengedepankan

keseimbangan ekologi. Selain itu, konsep Mapalus yang merupakan sistem gotong royong khas Minahasa masih diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian dan pembangunan desa. Tradisi Pengucapan Syukur juga menjadi bagian penting dari budaya masyarakat, di mana setiap tahun warga mengadakan perayaan untuk mensyukuri hasil panen dan berkat dalam kehidupan.

Selain itu, upacara adat juga masih dijalankan dengan baik, terutama dalam pernikahan dan kematian. Dalam perkawinan, terdapat tradisi seperti Maso Minta dan Balas Gereja, sementara dalam prosesi kematian dikenal tradisi Kumaus, yang menjadi bagian dari penghormatan terakhir bagi keluarga yang meninggal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku seni dan budaya, Sulawesi Utara memiliki 201 sanggar seni yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki jumlah sanggar terbanyak, yakni 47 sanggar, disusul oleh Tomohon dengan 32 sanggar, Manado dengan 23 sanggar, serta Minahasa dengan 19 sanggar. Sanggar-sanggar ini menjadi wadah bagi para seniman untuk mengembangkan kreativitas serta menjaga keberlanjutan seni dan budaya daerah.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya strategis untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya bangsa sebagai identitas serta perekat persatuan. Dalam kerangka tersebut, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang menjadi fokus utama, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,

permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Kesepuluh objek ini mencerminkan keragaman dan kearifan lokal yang harus dijaga, diberdayakan, serta diwariskan kepada generasi mendatang.

Berdasarkan data Pokok Kebudayaan (Dapobud) hingga 28 Februari 2025, jumlah OPK Sulawesi Utara adalah 6.003 Objek. Dari jumlah tersebut, capaian yang OPK yang telah ditetapkan sebagai WBTb sebanyak 32 Objek. Adapun objek tersebut adalah Tari Maengket, Mane'e, Kolintang, Tulude, Kain Koffo, Kabela, Tari Cakalele, Musik Bia, Tagonggong, Mogama, Monibi, Masamper, Tinutuan, Figura, Gunde, Cakalang Fufu Sulawesi Utara, Wale Wangko, Sopulut, Kulipu, Nasi Jaha Minahasa, Batifar, Saguer Minahasa, Palelat, Mapalus, Tari Dangisa, Mojoke, Pernikahan Adat Suku Bolango, Dumia Um Banua, Bahasa Tonsawang, Sasambo, Ma'Zani dan Tamo.

Tabel 2.56
Data Kebudayaan Sulawesi Utara Desember 2024

No.	Kabupaten/Kota	OPK Verif	ODCB Verif	Cagar Budaya	Museum	Penghayat Kepercayaan
1	Kab. Bolaang Mongondow	384	33	0	0	0
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	387	0	2	0	0
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	379	0	0	0	0
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	390	1	7	0	0
5	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	382	0	0	0	0
6	Kab. Kep. Sangihe	393	22	6	0	1
7	Kab. Kep. Talaud	390	0	0	0	1
8	Kab. Minahasa	447	22	3	1	0
9	Kab. Minahasa Selatan	384	1	1	0	1
10	Kab. Minahasa Tenggara	389	14	0	0	0
11	Kab. Minahasa Utara	393	27	6	0	0
12	Kota Bitung	382	2	0	0	0
13	Kota Kotamobagu	438	7	7	0	0
14	Kota Manado	387	17	4	2	2
15	Kota Tomohon	385	54	1	0	0
JUMLAH		6.003	200	37	3	5

Sumber: Data Inventaris Dinas Kebudayaan dan Data Pokok Kebudayaan Daerah, Tahun 2025

***Keterangan**

OPK Verif : Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah terverifikasi datanya dan sudah diinputkan dalam Data Pokok Kebudayaan dengan status Valid

ODCB Verif : Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang sudah terverifikasi datanya dan sudah diinputkan dalam Data Pokok Kebudayaan dengan status Valid

Cagar Budaya : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat yang statusnya sudah terstandardisasi.

Penghayat Kepercayaan : Penghayat Kepercayaan juga dikenal sebagai pemeluk kepercayaan tradisional atau agama adat adalah kelompok masyarakat Indonesia yang mempraktikkan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang berasal dari nenek moyang mereka.

Tabel 2.57
Daftar Objek Cagar Budaya 2024

No	Kategori	Nama Objek	Kabupaten/Kota	Tahun Penetapan	No SK Penetapan
1	Situs	Benteng Amurang	Kabupaten Minahasa Selatan	2003	KM12/PW007 Mkp03
2	Bangunan	Gereja Tua GMIM Watumea	Kabupaten Minahasa	2003	KM12/PW007 Mkp03
3	Bangunan	Keraton Boroko	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2003	KM12/PW007 Mkp03
4	Situs	Waruga Makeret Barat	Kota Manado	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
5	Situs	Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton (Permaisuri Hamengku Buwono V)	Kota Manado	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
6	Struktur	Monumen Dotu Lolong Lasut	Kota Manado	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
7	Bangunan	Gereja Masehi Injil Di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado	Kota Manado	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
8	Situs	Kompleks Waruga Sawangan	Kabupaten Minahasa Utara	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007

No	Kategori	Nama Objek	Kabupaten/Kota	Tahun Penetapan	No SK Penetapan
9	Situs	Kompleks Waruga Airmadidi Bawah	Kabupaten Minahasa Utara	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
10	Situs	Kompleks Waruga Maumbi	Kabupaten Minahasa Utara	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
11	Situs	Kompleks Waruga Kaima	Kabupaten Minahasa Utara	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
12	Situs	Makam Pahlawan Maria J.C. Walanda Maramis	Kabupaten Minahasa Utara	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
13	Situs	Makam Kyai Mojo	Kabupaten Minahasa	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
14	Struktur	Makam Tuanku Imam Bonjol	Kabupaten Minahasa	2007	PM22/PW.007/ MKP/2007
15	Bangunan	Gereja Tua Sion Tomohon	Kota Tomohon	2018	342 Tahun 2018
16	Struktur	Makam D. C Manoppo	Kota Kotamobagu	2022	348 Tahun 2022
17	Situs	Kompleks Makam D. C. Manoppo	Kota Kotamobagu	2022	349 Tahun 2022
18	Bangunan	Gereja Tua GMIBM Kotamobagu	Kota Kotamobagu	2022	350 Tahun 2022
19	Bangunan	Masjid Al-Huda Kopandakan I	Kota Kotamobagu	2022	351 Tahun 2022
20	Struktur	Makam Jogugu Abram Patra Mokoginta	Kota Kotamobagu	2023	292 Tahun 2023
21	Bangunan	Balai Pendidikan dan Pengajaran Islam	Kota Kotamobagu	2023	291 Tahun 2023
22	Bangunan	Makam Raja Wellem David Tatumakenji	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023	442 Tahun 2023
23	Struktur	Sumur Tua Masjid Al Ikhlas	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023	443 Tahun 2023
24	Bangunan	Rumah Ajoeba Saidi	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023	444 Tahun 2023
25	Bangunan	Rumah Juru Tulis Kerajaan Bintauna	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2023	440 Tahun 2023

No	Kategori	Nama Objek	Kabupaten/Kota	Tahun Penetapan	No SK Penetapan
26	Struktur	Makam Datu Binangka	Kota Kotamobagu	2024	23/Disbudpar/ SK.WK/4/2024
27	Benda	Arsip Moradi Tinumbua	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2024	461 Tahun 2024
28	Bangunan	Rumah Ahmad Dodoali Korompot	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2024	462 Tahun 2024
29	Struktur	Makam Paduka Raja Bolaang Uki Moh Kaharuddin Hassan Van Gobel	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2024	143 Tahun 2024
30	Struktur	Istana Raja (Malrigo) Bolaang Uki	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2024	144 Tahun 2024
31	Struktur	Makam Raja Salmon Tuwondai Dumalang	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	273/420/Tahun 2024
32	Bangunan	Rumah Zending Manganitu	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	274/420/Tahun 2024
33	Bangunan	Istana Manganitu	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	275/420/Tahun 2024
34	Struktur	Makam Raja Bataha Santiago	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	384/420/Tahun 2024
35	Benda	Lonceng Tua Gereja Kristen Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	355/420/ Tahun 2024
36	Struktur	Makam Raja Albert Abast Bastiaan	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2024	354/420/ Tahun 2024
37	Benda	Waruga Airmadidi Bawah	Kabupaten Minahasa Utara	2024	358 Tahun 2024

Sumber: Data Inventaris Dinas Kebudayaan 2024

Tabel 2.58
Daftar Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2024

No	Kategori	Nama Objek	Kabupaten/ Kota	Tahun Penetapan	No SK Penetapan Peringkat
1	Bangunan	Gereja Tua GMIBM Kotamobagu	Kota Kotamobagu	2023	575 Tahun 2023

Sumber: Data Inventaris Dinas Kebudayaan 2024

Tabel 2.59
Daftar Cagar Budaya Peringkat Nasional 2024

No	Kategori	Nama Objek	Kabupaten/ Kota	Tahun Penetapan	No SK Penetapan Peringkat
1	Struktur	Makam Tuanku Imam Bonjol	Kabupaten Minahasa	2016	266/M/2016
2	Situs	Makam Kyai Mojo	Kabupaten Minahasa	2016	267/M/2016
3	Situs	Gereja Tua Sion Tomohon	Kota Tomohon	2021	267/M/2021

Sumber: Data Inventaris Dinas Kebudayaan 2024

Tabel 2.60
Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Sulawesi Utara 2024

No	Tahun	No SK Penetapan	Nama Karya Budaya	Domain
1	2013	238/M/2013	Tari Maengket	Tarian Tradisional
2	2013	238/M/2013	Mane'e	Kearifan Lokal
3	2013	238/M/2013	Kolintang	Musik Tradisional
4	2014	270/P/2014	Tulude	Upacara/Ritual
5	2014	270/P/2014	Kain Koffo	Kerajinan Tradisional
6	2014	270/P/2014	Kabela	Kerajinan Tradisional
7	2014	270/P/2014	Tari Cakalele*	Seni Tradisi
8	2015	186/M/2015	Musik Bia	Seni Pertunjukan
9	2016	244/P/2016	Tagonggong	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
10	2016	244/P/2016	Mogama	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
11	2016	244/P/2016	Monibi	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
12	2017	260/M/2017	Masamper	Seni Pertunjukan
13	2017	260/M/2017	Tinutuan	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
14	2018	264/M/2018	Figura	Seni Pertunjukan

No	Tahun	No SK Penetapan	Nama Karya Budaya	Domain
15	2019	362/M/2019	Gunde	Seni Pertunjukan
16	2019	362/M/2019	Cakalang Fufu Sulawesi Utara	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
17	2019	362/M/2019	Wale Wangko	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
18	2019	362/M/2019	Sopulut	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
19	2020	1044/P/2020	Kulipu	Seni Pertunjukan
20	2021	372/M/2021	Nasi Jaha Minahasa	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
21	2021	372/M/2021	Batifar	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
22	2021	372/M/2021	Saguer Minahasa	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
23	2021	372/M/2021	Palelat	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
24	2021	372/M/2021	Mapalus	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
25	2022	414/P/2022	Tari Dangisa	Seni Pertunjukan
26	2023	315/M/2023	Mojoke	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
27	2024	446/M/2024	Pernikahan Adat Suku Bolango	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
28	2024	446/M/2024	Dumia Um Banua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan
29	2024	446/M/2024	Bahasa Tonsawang	Tradisi dan Ekspresi Lisan
30	2024	446/M/2024	Sasambo	Seni Pertunjukan
31	2024	446/M/2024	Ma'Zani	Tradisi dan Ekspresi Lisan
32	2024	446/M/2024	Tamo	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber: Data Inventaris Dinas Kebudayaan 2024

Keterangan: *Penetapan karya bersama dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Melihat banyak potensi dan jika kegiatan penetapan WBTb setiap tahunnya dapat terus

meningkat, maka akan sangat berdampak pada nilai IPK di dimensi warisan budaya. Pun demikian terhadap Cagar Budaya, telah terbentuknya TACB di 11 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi pada tahun 2025, dapat mendorong terbentuknya peningkatan IPK jika kegiatan Penetapan Cagar Budaya dapat berjalan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 1 Objek Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yaitu Gereja Tua GMIBM Kota Kotamobagu dan 3 Objek Cagar Budaya Peringkat Nasional, yaitu:

1. Makam Kyai Mojo (Kab. Minahasa)
2. Makam Tuanku Imam Bonjol (Kab. Minahasa)
3. Gereja Tua Sion Tomohon (Kota Tomohon)

Dari berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Sulawesi Utara tidak hanya kaya secara warisan, tetapi juga terus berkembang berkat adanya regulasi yang mendukung, partisipasi aktif masyarakat, serta peran penting lembaga adat dan sanggar seni. Ke depan, sinergi antara pemerintah, komunitas budaya, dan sektor pendidikan akan semakin diperlukan untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap lestari dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Grafik 2.41
Tren Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional dan Sulawesi Utara
Tahun 2019-2023

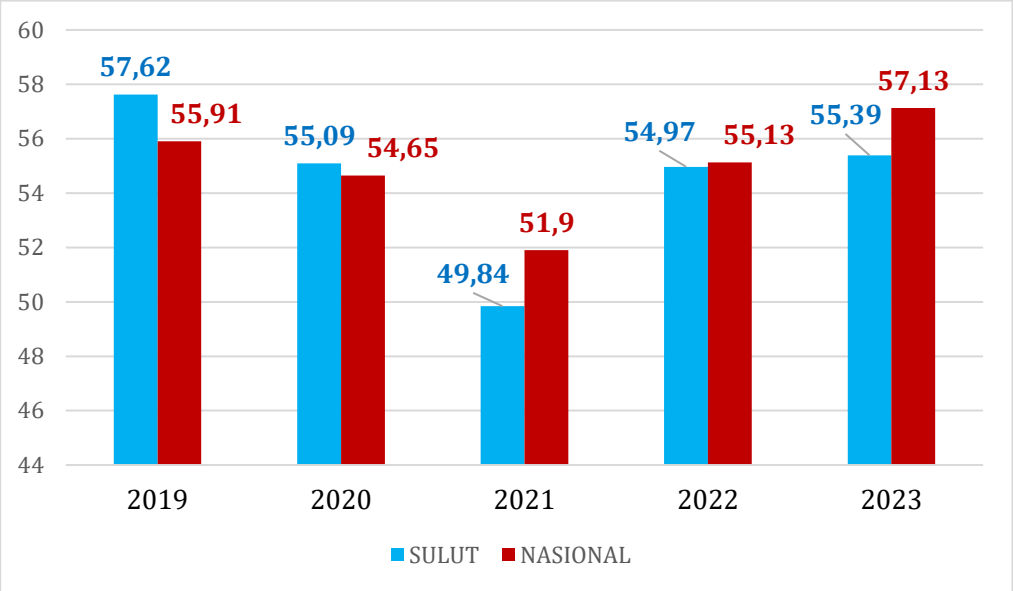

Sumber: https://data.dikdasmen.go.id/dataset/p/kebudayaan-4/indeks pembangunan- kebudayaan-ipk-2024, diunggah pada 14 Januari 2025

Pembangunan kebudayaan di Sulawesi Utara mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018 dan 2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Sulut tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional, mencerminkan kemajuan yang baik di bidang kebudayaan berkat kebijakan daerah yang mendukung serta kekayaan warisan budaya lokal. Namun, saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020 dan 2021, pembangunan kebudayaan di wilayah ini ikut terdampak. Aktivitas seni dan budaya yang dibatasi menyebabkan IPK Sulut menurun cukup tajam, bahkan sempat berada di bawah rata-rata nasional pada 2021.

Meski begitu, mulai 2022 hingga 2023, kondisi mulai membaik. IPK Sulut perlahan meningkat, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Perlu upaya serius untuk mempercepat pemulihan ini, seperti memperkuat dukungan terhadap

pelaku budaya, meningkatkan fasilitas seni, dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi budaya daerah. Dengan langkah yang tepat dan berkelanjutan, Sulawesi Utara berpeluang kembali.

Grafik 2.42
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Menurut Dimensi IPK Tahun 2023 di Sulawesi Utara

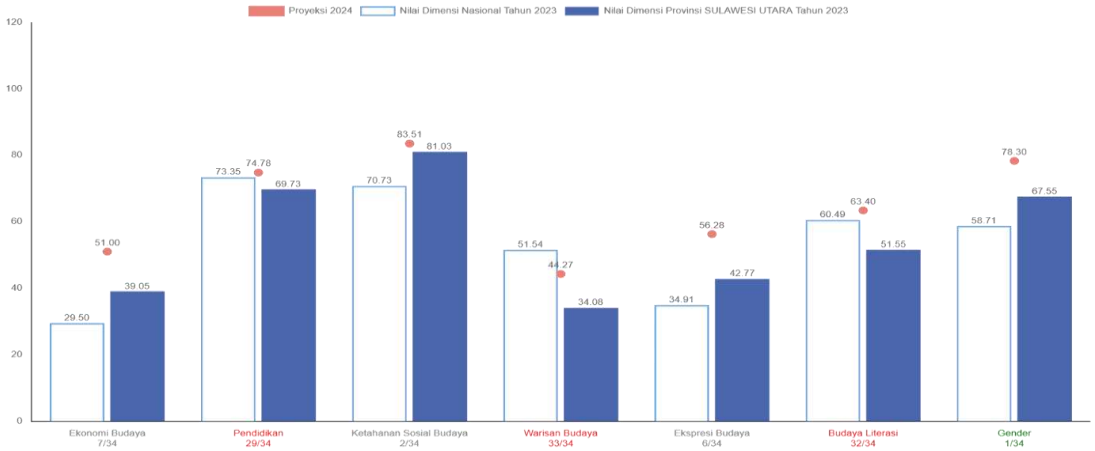

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut Tahun 2024

Grafik diatas memperlihatkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Sulawesi Utara berdasarkan tujuh dimensi utama pada tahun 2023, serta proyeksi tahun 2024. Secara umum, capaian IPK Sulawesi Utara menunjukkan kinerja yang bervariasi antar dimensi. Dimensi dengan capaian tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya sebesar 81,03 poin, melampaui rata-rata nasional sebesar 70,73 dan mendekati target proyeksi 2024 sebesar 83,51. Disusul oleh dimensi Gender dengan nilai 67,55 poin, yang juga mengungguli capaian nasional 58,71. Ini menandakan bahwa Sulut memiliki kekuatan dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya dan kesetaraan gender di tingkat lokal.

Namun, terdapat beberapa dimensi yang masih perlu menjadi perhatian khusus. Dimensi Ekonomi

Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, dan terutama Budaya Literasi menunjukkan nilai yang relatif rendah jika dibandingkan proyeksi maupun rata-rata nasional. Budaya Literasi misalnya, hanya mencapai 51,55 poin, berada di peringkat 32 dari 34 provinsi, jauh dari proyeksi 2024 sebesar 63,40. Sementara itu, Ekonomi Budaya (39,05 poin) dan Warisan Budaya (44,27 poin) juga menunjukkan bahwa potensi sektor budaya belum dioptimalkan secara maksimal sebagai kekuatan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai tradisi. Oleh karena itu, upaya penguatan kebijakan pembangunan kebudayaan di Sulawesi Utara harus diarahkan pada pengembangan literasi budaya, peningkatan nilai tambah ekonomi budaya, serta pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan.

Untuk mendorong peningkatan IPK, pemerintah provinsi sulawesi utara terus mendorong kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan pelaku seni dan budaya yang menjadikannya sumber penghasilan; banyaknya satuan pendidikan yang menjalankan pengarusutamaan kebudayaan melalui penerapan mulok; menciptakan ketahanan Sosial Budaya Toleransi, Gotong Royong, Rasa Aman di lingkup Sulawesi Utara; meningkatkan jumlah Cagar Budaya & Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan; meningkatkan kunjungan ke museum dan masyarakat yang menonton pertunjukan; mendorong masyarakat menggunakan produk tradisional; memfasilitasi Aktivitas pertunjukan, upacara adat, dan kearifan lokal; dan mendorong peningkatan literasi budaya serta pelestarian bahasa daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen kuat untuk meningkatkan IPK melalui Sasaran strategis yang diarahkan pada meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan dan diukur melalui dua indikator, yaitu persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan, serta persentase warisan budaya yang dilestarikan.

2.1.4.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa baik upaya sebuah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Indeks ini menilai berbagai hal, seperti akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk didengar. Semakin tinggi angkanya, berarti perlindungan terhadap anak di daerah tersebut semakin baik. Indeks ini penting untuk mengetahui apakah anak-anak sudah hidup di lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka.

Selama periode 2020 hingga 2023, Indeks Perlindungan Anak di Sulawesi Utara mengalami naik-turun yang cukup signifikan. Di tahun 2020, indeks mencapai angka tertinggi sebesar 67,13, menandakan bahwa perlindungan terhadap anak-anak pada masa itu berjalan relatif baik. Namun setahun setelahnya, angka tersebut turun drastis menjadi 60,81, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih kuat terasa dan memengaruhi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi anak.

Kondisi ini mulai membaik pada 2022, ketika indeks naik menjadi 64,59, mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan sistem perlindungan anak di berbagai sektor. Meski demikian, tren positif itu sedikit terganggu pada 2023, dengan indeks kembali turun ke angka 62,71. Penurunan ini tidak terlalu drastis, tapi cukup menjadi sinyal bahwa stabilitas perlindungan anak belum sepenuhnya terjaga. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih konsisten dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas perlindungan anak dapat terus meningkat dan memberikan dampak jangka panjang yang nyata.

Grafik 2.43
Persandingan Tren Indeks Perlindungan Anak (IPA) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023

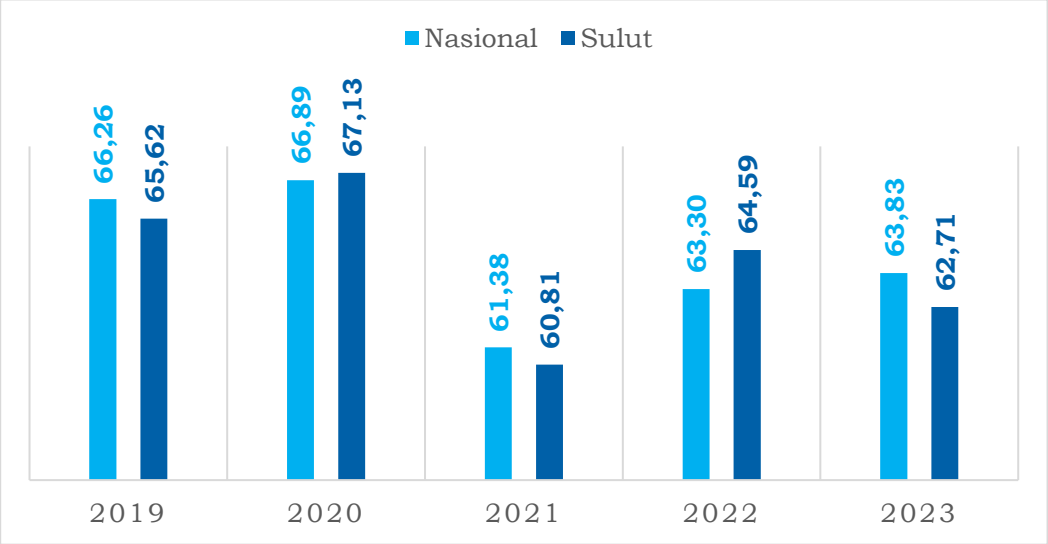

Sumber: Dinas P3A Prov. Sulut Tahun 2025

Jika dilihat berdasarkan persandingan tren Indeks Perlindungan Anak Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa posisi Sulawesi Utara sempat unggul dibanding rata-rata nasional pada tahun 2020. Saat itu, indeks di Sulut mencapai 67,13, sedikit lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 66,89. Kondisi ini menunjukkan

bahwa berbagai program dan kebijakan perlindungan anak di Sulut cukup efektif dijalankan sebelum pandemi berdampak besar. Namun, memasuki tahun 2021, kedua indeks mengalami penurunan tajam—terutama di Sulawesi Utara yang turun ke angka 60,81, bahkan lebih rendah dari nasional yang berada di 61,38. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan aktivitas serta kendala anggaran dan akses pelayanan anak akibat pandemi.

Pada tahun-tahun berikutnya, yakni 2022 dan 2023, indeks perlindungan anak mulai mengalami pemulihan secara perlahan. Sulawesi Utara mencatat kenaikan menjadi 64,59 pada tahun 2022, kembali mendekati capaian nasional sebesar 63,30. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengembalikan program perlindungan anak ke jalur yang lebih baik. Namun, di tahun 2023, meskipun angka nasional naik menjadi 63,83, indeks Sulut justru mengalami sedikit penurunan ke angka 62,71. Ketidakkonsistenan ini memperlihatkan bahwa meskipun perbaikan sudah mulai tampak, tantangan dalam menjaga keberlanjutan perlindungan anak masih cukup besar dan memerlukan upaya yang lebih stabil dan terencana.

Dalam upaya peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA), keberadaan Forum Anak memiliki kontribusi yang signifikan. IPA merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan melibatkan Forum Anak secara aktif dalam proses perencanaan, pemerintah daerah dapat lebih tepat dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas, merancang intervensi yang sesuai kebutuhan,

serta memperkuat sistem perlindungan anak yang komprehensif. Hal ini pada akhirnya mendukung pencapaian target peningkatan IPA dan memperkokoh komitmen Sulawesi Utara sebagai daerah yang ramah anak.

Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Forum Anak berperan sebagai wadah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka mengenai isu-isu yang berpengaruh terhadap kehidupan dan masa depan generasi muda. Keterlibatan ini juga sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak dan kebijakan nasional yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan ruang partisipasi nyata bagi Forum Anak melalui berbagai mekanisme, baik dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, forum konsultasi publik, maupun kegiatan strategis lainnya. Kehadiran Forum Anak dalam ruang-ruang tersebut tidak hanya menjadi simbol inklusivitas, tetapi juga memberikan kontribusi substansial dalam memperkaya perspektif perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, Forum Anak turut memperkuat terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini serta menjamin kesinambungan pembangunan Sulawesi Utara di masa depan.

B. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pembangunan keluarga di suatu daerah. Indeks ini disusun dan diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Melalui pendekatan ini, iBangga tidak hanya menyoroti aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan psikologis yang dialami oleh setiap anggota keluarga.

Dengan hadirnya iBangga, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih terarah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada penguatan institusi keluarga. Data yang dihasilkan dari pengukuran indeks ini menjadi acuan dalam menyusun program dan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

Grafik 2.44
Indeks pembangunan Keluarga (iBangga) Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

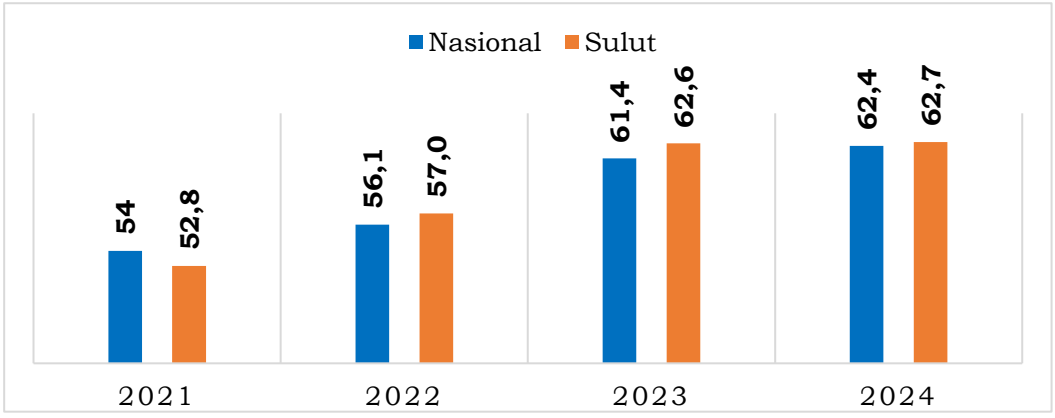

Sumber: Perwakilan BKKBN Prov. Sulut Tahun 2025

Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) antara tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, iBangga nasional tercatat sebesar 54, sedangkan Sulawesi Utara sedikit lebih rendah di angka 52,8. Peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana iBangga nasional mencapai 56,1, sementara Sulawesi Utara mencatatkan angka 57,0, menunjukkan adanya perbaikan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2024, data menunjukkan tren positif yang berkelanjutan di kedua wilayah. iBangga nasional tercatat sebesar 61,4 pada tahun 2023 dan 62,4 pada tahun 2024, sementara Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang lebih tinggi dengan angka 62,6 di 2023 dan 62,7 di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun iBangga nasional lebih tinggi, Sulawesi Utara telah mengalami perkembangan yang pesat dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, dengan tren yang mengarah pada kesetaraan antara kedua wilayah tersebut.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana perbedaan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek penting pembangunan. IKG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi (seperti angka kematian ibu dan kelahiran remaja), pemberdayaan gender (meliputi keterlibatan perempuan dalam politik dan pendidikan), serta partisipasi di pasar kerja. Nilai IKG berada dalam rentang 0 sampai 1, di mana semakin tinggi angkanya, semakin besar ketimpangan gender di suatu wilayah.

Indeks ini penting untuk mengukur kemajuan kesetaraan gender dan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih adil bagi semua kelompok.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Sulawesi Utara secara umum mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 0,453 pada tahun 2019 menjadi 0,422 di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender di tingkat provinsi. Meskipun begitu, masih terlihat adanya variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota, yang mengindikasikan bahwa tantangan dan capaian dalam pembangunan kesetaraan gender tidak merata di seluruh wilayah.

Tabel 2.61
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Kabupaten/Kota					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	**0,453**	**0,431**	**0,439**	**0,444**	**0,422**	**0,386**
Bolaang Mongondow	0,526	0,515	0,496	0,538	0,528	0,510
Minahasa	0,269	0,314	0,326	0,368	0,359	0,320
Kepulauan Sangihe	0,525	0,535	0,495	0,508	0,477	0,480
Kepulauan Talaud	0,542	0,481	0,454	0,499	0,494	0,480
Minahasa Selatan	0,474	0,432	0,419	0,447	0,445	0,410
Minahasa Utara	0,469	0,509	0,543	0,504	0,485	0,360
Bolaang Mongondow Utara	0,504	0,465	0,412	0,511	0,395	0,410
Kepulauan Sitaro	0,442	0,424	0,369	0,445	0,403	0,330
Minahasa Tenggara	0,504	0,391	0,466	0,501	0,207	0,350
Bolaang Mongondow Selatan	0,577	0,537	0,54	0,521	0,512	0,500
Bolaang Mongondow Timur	0,56	0,483	0,549	0,498	0,499	0,480
Kota Manado	0,327	0,167	0,36	0,208	0,167	0,150
Kota Bitung	0,416	0,48	0,479	0,369	0,451	0,390
Kota Tomohon	0,167	0,162	0,172	0,215	0,155	0,170
Kota Kotamobagu	0,463	0,423	0,358	0,237	0,329	0,380

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Beberapa daerah menunjukkan capaian IKG yang cukup tinggi, seperti Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur, yang pada tahun 2023 mencatatkan IKG masing-masing sebesar 0,512 dan 0,499. Angka-angka ini mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang masih cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, Kota Manado dan Kota Tomohon menampilkan angka IKG yang cukup rendah dan cenderung stagnan, yakni masing-masing berada di angka 0,167 dan 0,155 pada tahun 2023. Ini mengisyaratkan bahwa di dua kota ini, kesenjangan gender relatif lebih kecil.

Tren menarik juga terlihat di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang sempat mencatatkan angka IKG tertinggi sebesar 0,501 pada tahun 2022, namun turun tajam ke angka 0,207 pada tahun 2023. Perubahan drastis ini bisa jadi mencerminkan adanya intervensi kebijakan yang cukup efektif atau perubahan metodologi dalam pengukuran. Di sisi lain, Kepulauan Sangihe dan Talaud konsisten berada pada tingkat IKG menengah, mencerminkan stabilitas dalam ketimpangan gender meskipun belum mencapai tingkat yang ideal.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa daerah yang menunjukkan perbaikan signifikan, masih banyak wilayah di Sulawesi Utara yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pengurangan ketimpangan gender. Perbedaan antar daerah menjadi indikator penting bahwa strategi pembangunan kesetaraan gender perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Hal ini penting agar pembangunan yang berkeadilan dapat

dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara, tanpa terkecuali.

Selanjutnya, perbandingan tren Indeks Ketimpangan Gender (IKG) antara tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024. Selama lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten menunjukkan nilai IKG yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yang menandakan tingkat ketimpangan gender yang relatif lebih kecil di provinsi ini.

Grafik 2.45
Persandingan Tren Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

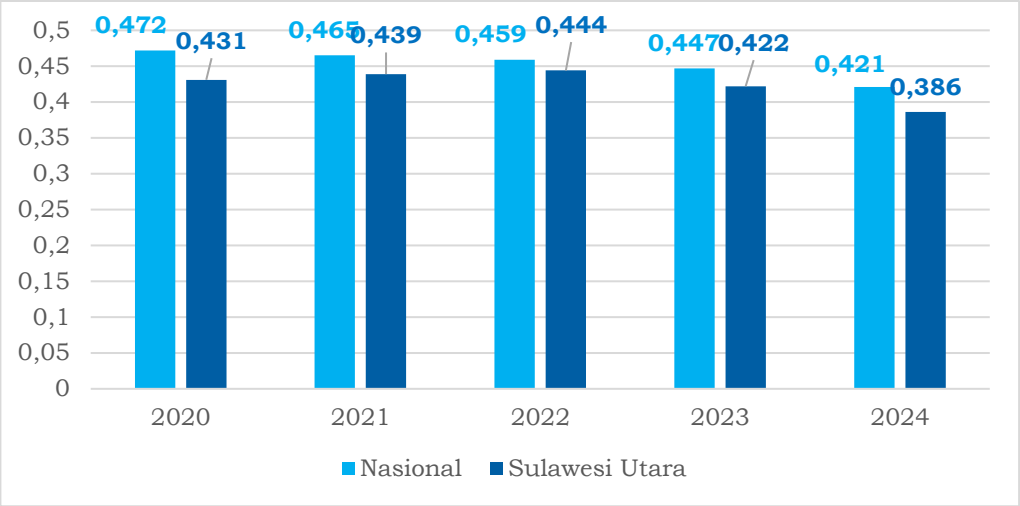

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Pada tahun 2020, IKG Sulawesi Utara berada di angka 0,431, sementara nasional di angka 0,472. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022, nilai IKG Sulawesi Utara menurun secara bertahap masing-masing menjadi 0,439 dan 0,444. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana IKG Sulawesi Utara mencapai titik terendah selama periode pengamatan, yaitu 0,386. Sebaliknya, IKG nasional juga mengalami penurunan, tetapi lebih lambat, dari 0,472 (2020) menjadi 0,421 (2024). Hal ini

memperlihatkan bahwa Sulawesi Utara mengalami perbaikan yang lebih progresif dalam upaya mengurangi ketimpangan gender dibandingkan secara nasional.

Penurunan konsisten IKG di Sulawesi Utara mencerminkan adanya kemajuan dalam mendorong kesetaraan gender melalui berbagai program dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa perempuan di Sulawesi Utara semakin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, serta peran dalam pengambilan keputusan publik. Meskipun demikian, nilai indeks yang masih berada di atas nol menandakan bahwa ketimpangan belum sepenuhnya hilang, dan masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat keadilan gender di semua sektor pembangunan.

Selanjutnya tren partisipasi perempuan dalam dua bidang strategis di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2020 hingga 2024, yaitu sebagai tenaga profesional dan sebagai anggota parlemen. Secara umum, grafik memperlihatkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di bidang profesional relatif tinggi dan cenderung stabil, dengan kisaran antara 52% hingga 55%. Sementara itu, keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024.

Pada tahun 2020, sebanyak 53,59% perempuan tercatat sebagai tenaga profesional, sementara tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih berada pada angka 29,27%. Angka ini relatif stagnan hingga 2022, meskipun proporsi perempuan profesional sempat meningkat menjadi 55,39%. Namun, pada

tahun 2023 mulai terlihat perubahan, di mana keterlibatan perempuan di parlemen naik menjadi 32,56%, dan melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi 45,24%, mendekati tingkat partisipasi perempuan profesional yang saat itu mencapai 53,98%.

Grafik 2.46
Tren Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

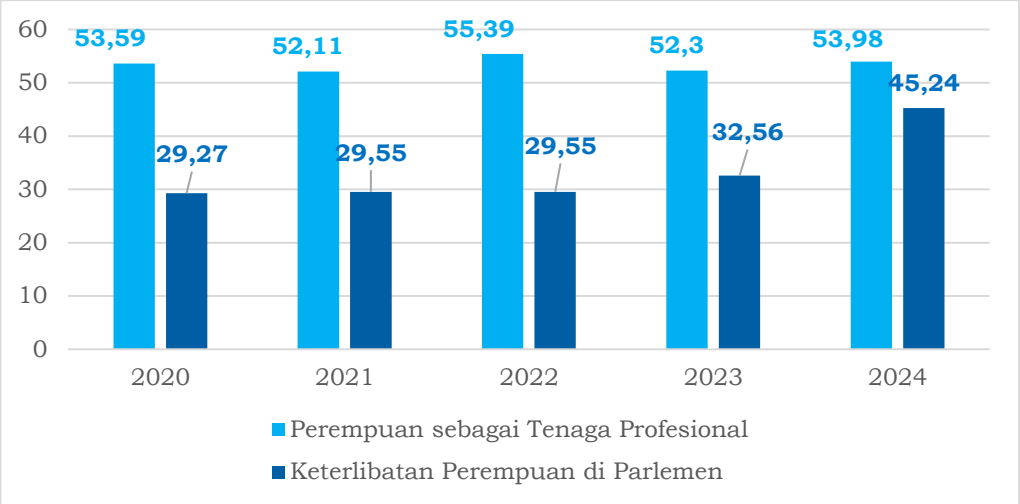

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Tren ini menunjukkan perkembangan positif dalam upaya memperkuat peran perempuan dalam bidang profesional maupun politik di Sulawesi Utara. Meningkatnya keterlibatan perempuan di parlemen pada 2024 menjadi indikasi bahwa representasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik semakin diperhatikan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan afirmatif serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan dan profesi strategis. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini, perlu ada dukungan kebijakan yang konsisten dan ruang partisipasi yang inklusif bagi perempuan di berbagai sektor.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan di suatu wilayah mampu menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Nilai IPG semakin tinggi berarti semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi di suatu daerah.

Sepanjang lima tahun terakhir, IPG Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 94,70 dan secara bertahap naik hingga mencapai 95,98 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif terhadap keseimbangan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya, jika dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020 hingga 2024. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Per-Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	**94,7**	**94,94**	**95,29**	**95,47**	**95,98**
Bolaang Mongondow	88,33	88,46	88,55	88,61	89,18
Minahasa	97,26	96,79	97,14	97,34	97,8
Kepulauan Sangihe	95,72	96,48	96,59	96,29	96,66
Kepulauan Talaud	98	98,21	98,19	98,26	98,49
Minahasa Selatan	89,01	89,07	89,16	89,81	90,36
Minahasa Utara	97,02	96,89	96,95	97,23	97,43
Bolaang Mongondow Utara	86,86	87,13	87,51	87,81	88,22
Kepulauan Sitaro	88,75	89,3	89,42	89,68	90,14
Minahasa Tenggara	91,97	92,19	92,43	92,58	93,08
Bolaang Mongondow Selatan	79,87	80,32	80,64	81,11	81,72
Bolaang Mongondow Timur	90,89	91,03	91,14	91,6	92,06

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Manado	97,04	97,26	97,31	97,37	97,75
Kota Bitung	94,63	95,02	95,12	95,3	95,51
Kota Tomohon	99,77	99,83	99,95	100,25	100,4
Kota Kotamobagu	95,9	95,97	96,17	96,31	96,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota dengan capaian IPG tertinggi secara konsisten adalah Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kota Tomohon mencatat angka tertinggi sejak tahun 2020 dengan IPG sebesar 99,77 dan meningkat menjadi 100,4 pada 2024. Demikian pula, Kabupaten Kepulauan Talaud mempertahankan nilai IPG di atas 97 sepanjang periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut telah menciptakan akses dan peluang yang relatif setara bagi laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki IPG paling rendah dari seluruh wilayah di Sulawesi Utara, dengan nilai awal 79,87 pada tahun 2020 dan meningkat secara perlahan menjadi 81,72 pada tahun 2024. Meskipun mengalami kemajuan, angka tersebut masih cukup jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya, menandakan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam hal pemberdayaan perempuan dan pemerataan akses layanan dasar.

Secara keseluruhan, IPG rata-rata Provinsi Sulawesi Utara meningkat dari 94,7 pada tahun 2020 menjadi 95,98 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang responsif gender mulai membuahkan hasil. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan

antarwilayah yang perlu diatasi agar seluruh perempuan di Sulawesi Utara memiliki kesempatan dan hak yang setara dalam segala aspek kehidupan.

Grafik 2.47
Persandingan Tren Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

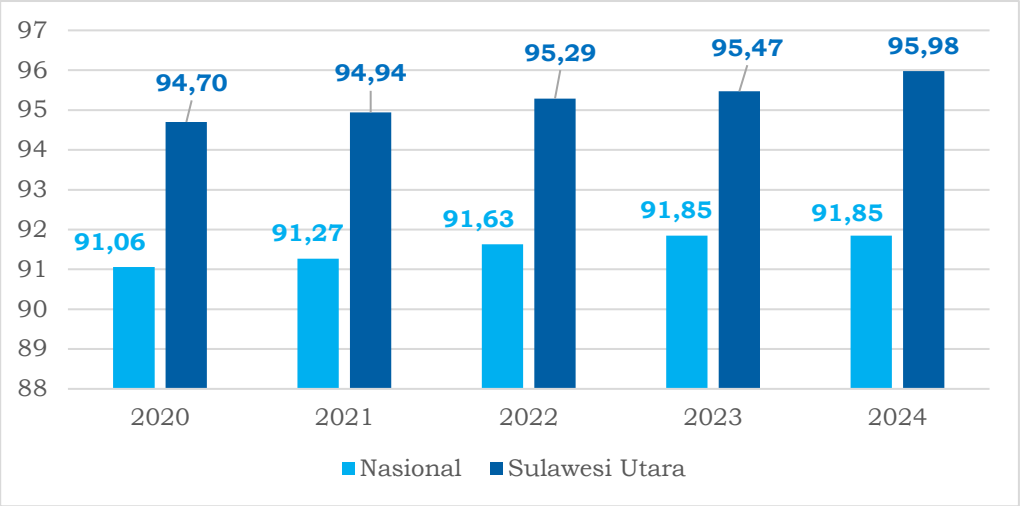

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Adapun, jika dibandingkan dengan IPG nasional, Sulawesi Utara konsisten mencatatkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata Indonesia. Pada tahun 2020, IPG nasional hanya berada di angka 91,06 dan naik perlahan hingga 91,85 di tahun 2024. Sementara itu, Sulawesi Utara sudah melampaui angka tersebut sejak awal periode, menunjukkan bahwa daerah ini tergolong cukup progresif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih setara gender.

Dalam rangka mendorong pencapaian kesetaraan gender serta peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Provinsi Sulawesi Utara telah membangun kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang relatif lengkap. Kelembagaan tersebut meliputi keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, penetapan focal point pada perangkat daerah, serta dukungan regulasi berupa Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya kelembagaan dan regulasi tersebut, diharapkan setiap program dan kegiatan perangkat daerah mampu lebih responsif terhadap kebutuhan, pengalaman, serta peran berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sekaligus memperkuat pencapaian target Indeks Pembangunan Gender di Sulawesi Utara, serta memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pemuda di Indonesia. Indeks ini menyajikan informasi yang dapat menggambarkan berbagai aspek penting terkait kondisi dan perkembangan pemuda, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendukung peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional.

Grafik 2.48
Persandingan Tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Metode Baru) Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2020-2023

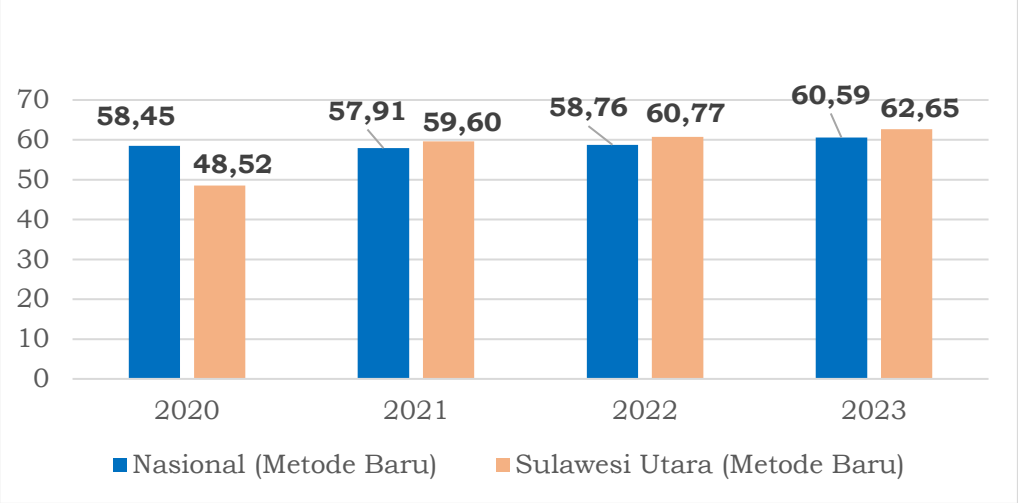

Sumber: diolah oleh Bappenas dan Kemenpora, 2025

Grafik di atas menunjukkan perbandingan tren Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) antara tingkat nasional dan Sulawesi Utara pada periode 2020 hingga 2023, berdasarkan metode baru. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, IPP nasional tercatat sebesar 58,45, sementara Sulawesi Utara berada di angka 48,52. Selanjutnya, pada tahun 2021, IPP nasional meningkat menjadi 57,91, sedangkan IPP Sulawesi Utara tercatat 59,60, mencatatkan sedikit kenaikan.

Pada tahun 2022, IPP nasional dan Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan IPP nasional mencapai 58,76 dan Sulawesi Utara mencatatkan angka 60,77. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan IPP nasional mencapai 60,59 dan Sulawesi Utara berhasil mencatatkan angka tertinggi sepanjang periode tersebut, yaitu 62,65. Grafik ini mencerminkan perkembangan yang positif dalam Indeks Pembangunan Pemuda di kedua wilayah tersebut selama empat tahun terakhir.

Dari data yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa meskipun IPP di tingkat nasional lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Utara pada setiap tahunnya, kedua wilayah mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan dalam pembangunan pemuda, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yang berfokus pada pengembangan potensi dan kualitas sumber daya pemuda untuk masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, meskipun angka IPP Sulawesi Utara masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nasional, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam membangun pemuda di wilayah tersebut. Peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya menunjukkan efektivitas program-program pembangunan pemuda yang telah dijalankan, serta memberikan gambaran positif bagi masa depan pemuda di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Ke depannya, penting untuk terus memperkuat dan memperluas program-program ini agar dapat meningkatkan kualitas hidup pemuda secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan rasio yang menunjukkan jumlah penduduk usia non-produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, terhadap 100 penduduk usia produktif, yaitu yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Indikator ini menggambarkan seberapa besar beban yang

ditanggung oleh penduduk usia kerja dalam menopang penduduk yang tidak bekerja.

Berdasarkan data yang tersedia, angka ketergantungan pada tahun 2022 berada pada angka 38,91. Kemudian, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 41,22 pada tahun 2023. Tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2024 dengan angka ketergantungan sebesar 41,60. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, data untuk tahun 2020 tidak tersedia.

Tabel 2.63
Angka Ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka ketergantungan	40,85	40,00	38.91	41.22	41.60

Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2.1.4.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mengalami tren peningkatan kontribusi selama periode 2020 hingga 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 9,55 persen terhadap total PDRB, kemudian meningkat menjadi 10,38 persen pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya sebesar 10,66 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya sedikit

menurun menjadi 10,64 persen dan kembali turun tipis menjadi 10,62 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.64
Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	9,55	10,38	10,66	10,64	10,62

Sumber: diolah Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara untuk sektor akomodasi makan dan minum menunjukan tren positif, hal ini terlihat dari peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 1,50% menjadi 1,58% ditahun 2021 dan terus meningkat ditahun 2022 sampai tahun 2024 berada di angka 1,68%.

Tabel 2.65
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Indikator	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akomodasi Makanan dan Minuman	1,5	1,58	1,64	1,67	1,68

Sumber : BPS Prov. Sulut Tahun 2025

C. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Dalam lima tahun terakhir (2019–2024), ekonomi kreatif di Sulawesi Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terutama setelah pandemi, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data dari BPS dan laporan lokal mencatat stabilnya arus

pertumbuhan di sektor kreatif dan pariwisata: jumlah tenaga kerja kreatif meningkat dari ±131.049 pada 2022 menjadi 149.126 pada 2023, seiring sektor pariwisata yang menyerap lebih dari 243 ribu pekerja . Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Sulut yang sempat terkontraksi −0,99 % pada 2020, bangkit kembali menjadi +4,16 % pada 2021 dan stabil di kisaran +5,4 % pada 2022–2024.Pemulihan ini tak lepas dari kontribusi ekonomi kreatif, serta penguatan UMKM dan sektor pariwisata.

Potensi ekonomi kreatif Sulawesi Utara sangat besar dan khas, berpusat pada kaya budaya dan sumber daya lokal. Produk kuliner seperti tinutuan dan cakalang fufu, serta kerajinan limbah mewakili kearifan lokal yang potensial dikembangkan. Keunggulan utama daerah ini terletak pada kombinasi potensi perikanan, warisan budaya, dan daya tarik wisata bahari.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Kualitas bahan baku lokal terkadang belum memenuhi standar ekspor, dan investor kesulitan bergabung karena tata ruang serta sengketa lahan . Regulasi ekonomi kreatif nasional juga baru pada tahap dasar; implementasi daerah masih terbatas, meski Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah mengatur kerangka hukum ekonomi kreatif . Hambatan lain termasuk pengangguran lulusan tinggi dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah.

Nilai tambah ekonomi kreatif di Sulawesi Utara menunjukkan peran penting sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap aktivitas ekonomi kreatif—baik melalui kuliner, fesyen,

kriya, musik, maupun subsektor pariwisata berbasis budaya—menciptakan nilai tambah yang tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan kontribusi pajak daerah. Nilai tambah inilah yang kemudian tercermin dalam proporsi PDRB ekonomi kreatif, yaitu bagian dari total PDRB Sulawesi Utara yang berasal dari aktivitas kreatif. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan, semakin tinggi pula proporsi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Dengan kata lain, nilai tambah menjadi faktor penggerak utama yang menentukan seberapa besar ekonomi kreatif memberi sumbangan nyata terhadap struktur PDRB. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha kreatif, pengembangan inovasi produk, serta perluasan akses pasar akan berbanding lurus dengan peningkatan proporsi PDRB ekonomi kreatif di Sulawesi Utara.

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan, yang mengukur persentase penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan wirausaha, menjadi indikator kunci untuk memahami geliat ekonomi dan semangat inovasi di Bumi Nyiur Melambai ini. Tahun 2020 menjadi periode yang penuh tantangan bagi seluruh sektor ekonomi, termasuk kewirausahaan, akibat hantaman pandemi COVID-19. Di Sulawesi Utara, rasio kewirausahaan mungkin mengalami sedikit tekanan. Pembatasan mobilitas, penurunan daya beli masyarakat, dan ketidakpastian ekonomi global secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aktivitas usaha.

Memasuki tahun 2021, Sulawesi Utara, seperti daerah lain, mulai menunjukkan tanda-tanda

pemulihan ekonomi. Program vaksinasi yang masif dan pelonggaran pembatasan sosial secara bertahap memberikan angin segar bagi pelaku usaha. Rasio kewirausahaan diperkirakan mulai menunjukkan tren peningkatan seiring dengan adaptasi masyarakat dan dunia usaha terhadap "kenormalan baru".

Tahun 2022 menjadi momentum pertumbuhan yang lebih solid bagi kewirausahaan di Sulawesi Utara. Dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali, kepercayaan diri pelaku usaha dan masyarakat kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemungkinan besar juga terus menggalakkan program-program pemberdayaan UMKM, fasilitasi akses permodalan, dan pelatihan kewirausahaan.

Pada tahun 2023, tren positif rasio kewirausahaan di Sulawesi Utara diperkirakan terus berlanjut. Fokus mungkin bergeser ke arah konsolidasi usaha yang sudah ada dan diversifikasi sektor. Para wirausahawan semakin matang dalam mengelola bisnis mereka, mencari pasar baru, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

Dengan fondasi yang kuat dari tahun-tahun sebelumnya, rasio kewirausahaan di Sulawesi Utara pada tahun 2024 diproyeksikan akan terus menunjukkan peningkatan, tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas.

UMKM di Provinsi Sulawesi Utara menjadi motor utama lahirnya wirausahawan baru, sehingga peningkatan kualitasnya menjadi fokus penting pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan kewirausahaan berbasis manajemen usaha, inovasi produk, dan literasi digital; fasilitasi akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan dan

lembaga keuangan mikro; serta dorongan pemanfaatan platform digital untuk memperluas pasar. Selain itu, promosi dan pameran produk UMKM terus digelar untuk membangun jejaring bisnis dan memperkuat daya saing. Dengan langkah-langkah ini, wirausahawan di Sulawesi Utara diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas, inovatif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Pada Agustus 2024, TPAK Sulawesi Utara mencapai 66,07 persen. Nilai TPAK ini naik 1,98 poin dari tahun 2023, yaitu 64,09. Kenaikan TPAK di Sulawesi Utara dapat mencerminkan peningkatan keterlibatan tenaga kerja, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta perubahan sosial dan demografi. Hal ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan seperti tekanan pada pasar kerja dan dominasi sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang untuk memastikan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2024 cenderung naik bila dibandingkan dengan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	TPAK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bolaang Mongondow	64,01	62,06	62,17	65.50	68,23
2.	Minahasa	62,34	59,41	64,99	61.11	64,94
3.	Kepulauan Sangihe	64,56	63,60	66,11	65.19	63,25
4.	Kepulauan Talaud	80,97	79,19	74,20	73.88	69,38
5.	Minahasa Selatan	67,09	63,04	60,39	63.62	66,81
6.	Minahasa Utara	61,64	61,99	58,82	61.59	63,47
7.	Bolaang Mongondow Utara	64,75	64,43	64,79	64.45	67,22
8.	Kepulauan Sitaro	65,14	63,09	62,20	62.76	69,54
9.	Minahasa Tenggara	64,34	64,87	67,45	67.97	73,02
10.	Bolaang Mongondow Selatan	63,51	59,05	65,02	64.46	66,62
11.	Bolaang Mongondow Timur	66,94	65,07	67,64	69.23	62,56
12.	Kota Manado	58,63	59,08	59,51	61.27	63,17
13.	Kota Bitung	61,73	62,22	61,88	64.54	67,87
14.	Kota Tomohon	59,59	57,90	63,41	63.64	63,73
15.	Kota Kotamobagu	66,48	64,77	65,87	69.41	71,20
	Sulawesi Utara	**63,42**	**62,15**	**63,08**	**64.09**	**66,07**

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2025

Selanjutnya, jika dilihat TPAK menurut jenis kelamin dan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan gambaran tentang distribusi dan kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di pasar kerja. Informasi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, terutama dalam mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan tingkat partisipasi ini juga mencerminkan dinamika sosial dan struktural di masing-masing wilayah, yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Data Perkembangan TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Perkembangan TPAK Menurut Jenis Kelamin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Persen)									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sulawesi Utara	**80,52**	**45,68**	**78,98**	**44,72**	**80,77**	**44,79**	**80,93**	**46,53**	**81,91**	**49,59**
Bolaang Mongondow	84,67	41,42	83,23	39,24	84,23	38,3	86,14	42,7	86,06	48,52
Minahasa	79,04	44,92	75,32	42,85	82,53	46,76	78,07	43,56	79,84	49,54
Kepulauan Sangihe	79,3	49,74	75,46	51,68	81,21	50,96	78,92	50,92	80,64	45,18
Kepulauan Talaud	89,3	72,3	87,66	70,45	85,61	62,42	85,51	61,58	80,4	57,74
Minahasa Selatan	83,95	49,09	78,62	46,44	81,22	38,21	81,77	44,36	84	48,62
Minahasa Utara	76,39	46,48	78,46	45,07	77,07	40,1	79,38	43,22	82,7	43,66
Bolaang Mongondow Utara	81,88	46,91	81,57	46,5	85,31	43,39	82,57	45,39	84,19	49,42
Kepulauan Sitaro	83,04	47,84	81,08	45,82	82,38	42,85	82,85	42,53	83,78	55,19
Minahasa Tenggara	84,59	42,24	82	46,26	83,77	49,69	82,49	52,44	87,19	57,93
Bolaang Mongondow Selatan	84,65	40,21	78,89	36,79	86,01	41,71	86,47	40,31	87,3	44,36
Bolaang Mongondow Timur	86,26	44,91	85,33	41,82	89,01	43,22	85,82	51,01	85,46	37,76
Kota Manado	75,97	41,46	77,29	41,08	75,22	44,01	74,76	47,86	76,34	50,09
Kota Bitung	78,87	43,89	79,28	44,52	78,34	44,8	84,64	43,39	82,61	52,39
Kota Tomohon	75,02	44,23	72,39	43,49	75,44	51,45	78,83	48,22	76,36	50,92
Kota Kotamobagu	84,16	48,2	81,77	47,29	83,92	47,25	84,95	53,19	86,25	55,52

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2025

Tabel di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2020–2024. Secara umum, TPAK laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh wilayah dan tahun pengamatan. Pada tingkat provinsi, TPAK laki-laki meningkat dari 80,52% (2020) menjadi 81,91% (2024), sedangkan TPAK perempuan juga mengalami peningkatan dari 45,68% menjadi 49,59% dalam periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan tren positif keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi meskipun masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan laki-laki.

Di tingkat kabupaten/kota, variasi TPAK antar wilayah cukup mencolok. Kabupaten dengan TPAK laki-laki tertinggi pada 2024 adalah Minahasa Tenggara (87,19%), sedangkan TPAK perempuan tertinggi tercatat di Kota Kotamobagu (55,52%). Sebaliknya, daerah dengan TPAK perempuan terendah adalah Bolaang Mongondow Timur (37,76%). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi angkatan kerja antarwilayah, yang bisa dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, akses pendidikan dan pelatihan, serta kesempatan kerja yang tersedia bagi perempuan. Data ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif gender di tingkat daerah.

F. Indeks Inovasi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Penjabaran dari undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah berbentuk inovasi tata Kelola

pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menumbuhkembangkan dan berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan daya saing daerah melalui penilaian inovasi daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan beberapa indikator. IID dinilai berdasarkan skor total maksimum 250, dengan skala 0-100. Kategori penilaian IID adalah:

- Sangat Inovatif: 60,01-100
- Inovatif: 35-60
- Kurang Inovatif: 0,01-34,99
- Tidak Dapat Dinilai: 0

Tabel 2.68
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020*	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	-	41	41	48,71	48,72

*Sumber : Balitbangda Prov. Sulut Tahun 2025 (*data belum tersedia)*

Berdasarkan kategori dan data indeks inovasi daerah, Provinsi Sulawesi Utara masuk pada kategori inovatif.

2.1.4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru merupakan dua pendekatan pembangunan berkelanjutan yang saling melengkapi. Ekonomi hijau berfokus pada upaya pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan pelestarian lingkungan daratan, sementara ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Integrasi antara keduanya menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga

keseimbangan ekosistem sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan rendah karbon.

Tabel 2.69
Integrasi *Green Economy* dan *Blue Economy*

No.	Unsur/ Aspek	Ekonomi Hijau	Ekonomi Biru	Hubungan Terintegrasi
1	Sumber Daya Alam	Pemanfaatan SDA darat secara berkelanjutan (pertanian, kehutanan)	Pemanfaatan SDA laut secara berkelanjutan (perikanan, ekowisata laut)	Keduanya mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam
2	Energi	Energi terbarukan (matahari, angin, biomassa)	Energi laut (ombak, pasang surut, OTEC/Ocean Thermal Energy Conversion)	Mendorong transisi energi bersih dari darat dan laut sebagai bagian dari dekarbonisasi
3	Ekosistem & Lingkungan	Konservasi hutan, lahan gambut, pertanian ramah lingkungan	Konservasi mangrove, terumbu karang, padang lamun	Ekosistem darat dan laut saling mendukung (misalnya, mangrove penting bagi karbon biru)
4	Ekonomi Sirkular	Pengurangan sampah, daur ulang limbah industri	Pengelolaan limbah plastik laut, industri perikanan berkelanjutan	Keduanya mendukung pengurangan limbah dan pencemaran di seluruh rantai pasok
5	Perubahan Iklim	Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari sektor darat	Perlindungan pesisir dan mitigasi risiko iklim pesisir dan laut	Upaya terpadu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan resiliensi wilayah
6	Pembangunan Ekonomi	Investasi hijau, lapangan kerja (green jobs) ramah lingkungan	Investasi biru, blue jobs (nelayan, wisata bahari, budidaya laut)	Keduanya menciptakan ekonomi inklusif dan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan
7	Kelembagaan dan Tata Kelola	Regulasi lingkungan, insentif hijau, kebijakan fiskal hijau	Kebijakan kelautan, blue governance, insentif industri kelautan ramah lingkungan	Mendorong sinergi lintas sektor dan lintas wilayah antara darat dan laut

Sumber: diolah

Pengelolaan integratif ini sangat relevan dalam konteks wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 715 dan WPP 716). Banyak wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Dengan menggabungkan

prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pusat dapat merancang kebijakan yang lebih adaptif, berdaya saing, dan inklusif. Lebih jauh lagi, pendekatan terintegrasi tersebut membuka peluang untuk menciptakan pekerjaan ramah lingkungan (green jobs dan blue jobs), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis alam, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan krisis iklim. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, kerangka regulasi yang konsisten, dan partisipasi masyarakat, integrasi ekonomi hijau dan biru menjadi landasan utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan resilien di masa depan

A. Indeks Ekonomi Hijau

Sulawesi Utara berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi hijau. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan energi surya di daerah pesisir dan kepulauan, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Parameter penunjang capaian indikator hijau di Sulawesi Utara meliputi peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan pertanian organik, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Provinsi ini juga telah mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijak. Potensi besar Sulawesi

Utara dalam ekowisata juga telah mulai dikembangkan, dengan penekanan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil masih perlu diatasi untuk mencapai target ekonomi hijau yang ambisius.

Sulawesi Utara telah menunjukkan komitmen strategis terkait *Forestry and Other Land Use Net Sink* (FOLU Net Sink 2030), hal ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi hijau, yaitu pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Utara telah berhasil meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energinya dan mengurangi emisi karbon dioksida. Provinsi ini juga telah menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan produk-produk ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Sulawesi Utara optimis dapat mencapai target-target lingkungan yang telah ditetapkan dan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam pengembangan ekonomi hijau. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan momentum ini dan terus berinovasi dalam menghadapi dinamika lingkungan global yang terus berubah.

B. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan sebuah indikator komposit yang menunjukkan penguasaan dan perkembangan sektor ekonomi biru di

Indonesia. Indeks komposit tersebut adalah indikator statistik yang menggabungkan beberapa indikator individu menjadi satu indeks tunggal yang memberikan gambaran keseluruhan tentang suatu fenomena atau kondisi yang kompleks. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 pilar, 11 sub pilar, dan 44 indikator. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro (agregatif), yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kebijakan yang spesifik akan dapat disusun untuk memenuhi target tertentu dari masing-masing pilar.

Pemerintah Sulawesi Utara telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, dan mengembangkan pariwisata bahari yang bertanggung jawab. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan budidaya perikanan laut yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan, yang telah meningkatkan pendapatan nelayan dan mengurangi dampak lingkungan.

Pengembangan Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi , tetapi sangat menekankan kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup didalam ekosistem laut secara keseluruhan. 5 Kebijakan dalam mendukung keberhasilan Ekonomi Biru yaitu : perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya pesisir, laut, dan darat yang ramah lingkungan, pengelolaan kawasan pesisir

dan pulau - pulau kecil serta pengelolaan sampah plastik dilaut.

Pemerintah telah mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian ekosistem laut dan penggunaan sumber daya laut yang bijak. Potensi besar Sulawesi Utara dalam bidang perikanan dan pariwisata bahari telah mulai dikembangkan, dengan penekanan pada pelestarian keanekaragaman hayati laut dan budaya nelayan. Namun, tantangan seperti penangkapan ikan yang berlebihan, polusi laut, dan perubahan iklim masih perlu diatasi untuk mencapai target ekonomi biru yang ambisius.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Utara telah berhasil meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan mengembangkan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Provinsi ini juga telah menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan produk-produk berbasis laut dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Sulawesi Utara optimis dapat mencapai target-target lingkungan yang telah ditetapkan dan menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam pengembangan ekonomi biru. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan momentum ini dan terus berinovasi dalam menghadapi dinamika lingkungan global yang terus berubah.

C. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Bauran energi Sulut untuk tahun 2024 sebesar 23,34% yang bersumber dari data perhitungan DEN, bauran ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu

31,25% di tahun 2023, karena adanya pmbangunan PLTU Binjeita dengan daya 2 x 50 MW sehingga total penggunaan batubara untuk sektor pembangkit sebesar 1.486.488.976 serta adanya data penggunaan batubara untuk industri dari kementerian ESDM RI sebesar 606.805.251 dimana kita lihat peningkatan penggunaan batubara ditahun 2024 sebesar 282,6% jika dibandingkan tahun 2023 atau meningkat 181,6 %.

Grafik 2.49
Bauran Energi Primer Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

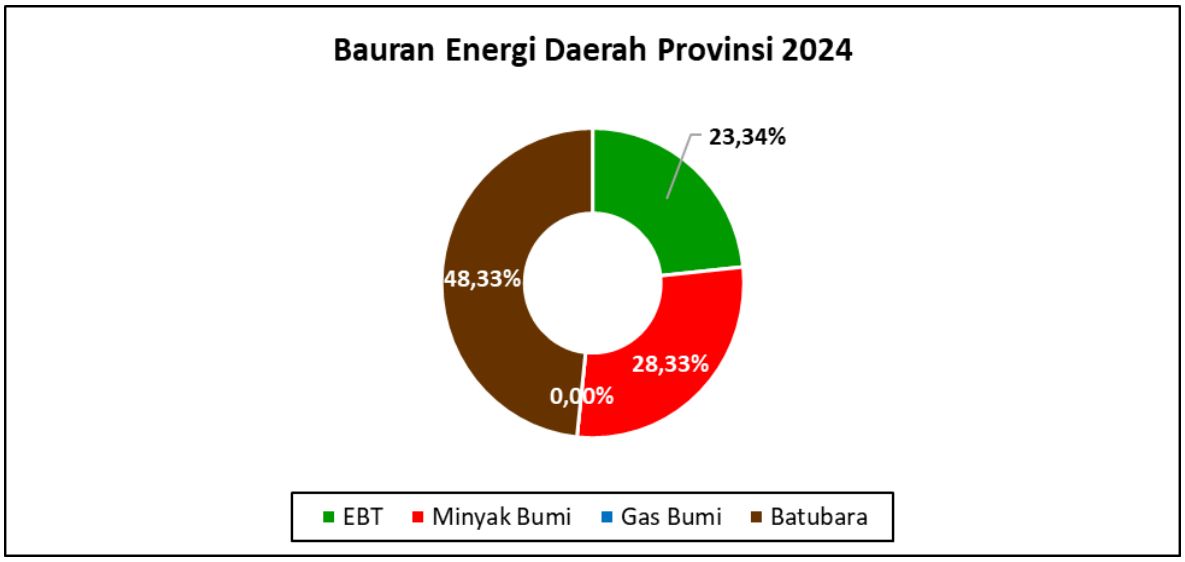

Sumber : Dinas ESDM Daerah Tahun 2025

2.1.4.4 Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak serta infrastruktur jaringan. TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berintegrasi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses lebih cepat dan efisien terhadap

informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi system yang lebih baik di berbagai sektor. Indeks Pembangunan TIK disusun oleh tiga subindeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian.

Nilai indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0-2,50).

Tabel 2.70
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024
Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	2020*	2021*	2022	2023	2024*
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	5,87	5,95	-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2024 (data belum tersedia)*

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dan pada kategori sedang. Dilihat dari subindeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi Sulawesi Utara masuk pada kategori sedang dimana pelanggan tetlepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, *bandwidth* internasional per pengguna, persentase rumah tangga dengan computer dan persentase rumah tangga dengan akses internet. Subindeks penggunaan TIK Provinsi Sulawesi Utara masuk pada kategori sedang di mana persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk dan pelanggan *mobile broadband* internet aktif per 100 penduduk. Subindeks keahlian Provinsi Sulawesi Utara masuk pada kategori sedang di mana

rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder serta angka partisipasi kasar tersier.

2.1.4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Berdasarkan data pada tabel dibawah, terlihat bahwa kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase PMTB terhadap PDRB tercatat sebesar 35,33%. Angka ini mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 35,99%, namun kemudian menurun secara berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, persentasenya turun menjadi 35,13%, dan terus menurun menjadi 34,35% di tahun 2023. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024 yaitu sebesar 32,88%.

Tabel 2.71
Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB (%)	35,33	35,99	35,13	34,35	32,88

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perekonomian daerah. Di Provinsi Sulawesi Utara, aktivitas ekspor menunjukkan dinamika yang menari dan menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor Sulawesi Utara mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan

ekspor yang cukup signifikan sebesar 39,62 persen dari capaian ekspor di tahun 2020. Hal ini dikarenakan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil menggandeng PT. Garuda Indonesia (TBK) untuk bekerja sama dalam rangka ekspor langsung ke Jepang. Tahun 2022 juga terjadi pertumbuhan ekspor sebesar 3,36 persen dari capaian tahun 2021, pertumbuhan ini didukung dengan diversifikasi produk turunan kelapa. Namun, kinerja ekspor terganggu oleh perang militer antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terganggunya pasokan global rantai pangan dan energy dan diperparah dengan munculnya perang baru di jalur Gaza yang menyebabkan menurunnya permintaan ekspor akibat kondisi ekonomi global yang memburuk, sehingga kinerja ekspor di tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar -20,68 persen.

Di tahun 2024 juga mengalami perlambatan ekspor sebesar -4,27 persen dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kondisi geopolitik global yang masih bergejolak sehingga mempegaruhi permintaan ekspor dan berdampak pada naiknya harga sewa kontainer karena kurangnya jumlah kontainer ekspor yang tersedia.

Tabel 2.72
Realisasi Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 (Nilai dalam 000 USD)

Uraian	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor Barang dan Jasa	776.322,53	1.083.921,74	1.120.380,45	870.833,90	833.613,31

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

2.1.4.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Tabel 2.73
Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No.	ASPEK INFRASTRUKTUR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemantapan jalan	0.89	0.86	0.87	0.83	0.83
2	Kemantapan irigasi	0.82	0.95	0.85	0.87	0.91
3	Air minum layak	0.90	0.91	0.94	0.94	0.94
4	Sanitasi layak	0.82	0.85	0.84	0.86	0.87
5	Perumahan layak	0.69	0.7	0.7	0.72	0.74
6	Pengurangan kawasan kumuh	0.95	0.95	0.95	0.95	1.00
7	Rasio Elektrifikasi	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
	INDEKS INFRASTRUKTUR	0.87	0.89	0.88	0.88	0.90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara

Dalam RPJMD 2021 - 2026, telah ditetapkan indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara. Indikator Pembentuk Indeks Infrastruktur, antara lain:

a. Kemantapan jalan

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap tahun 2024 mencapai 82,79% dengan Panjang jalan 990,253 Km berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 117 tahun 2024 tentang Penetapan Ruas-rua s Jalan Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi kemantapan jalan Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2024, hal ini disebabkan karena ada perubahan SK Penetapan Jalan pada tahun 2022, 2023 dan terakhir di 2024, akibat perubahan ini maka mempengaruhi kondisi kemantapan jalan karena adanya perubahan panjang jalan dan kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara.

b. Kemantapan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah irigasi (DI) kewenangan Provinsi Sulawesi Utara dengan total luas potensial seluas 18.302 Ha dengan 12 Daerah Irigasi (DI). Kemantapan irigasi tahun dari tahun 2022, 2023 dan 2024 mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan pada tahun 2021 adanya Program IPDMIP sehingga penganggaran lebih besar dibandingkan dengan tahun sesudah yang sudah tidak adanya Program IPDMIP. Penanganan Daerah Irigasi (DI) melalui Program IPDMIP hanya 3 DI yaitu DI. Ranoyapo, DI. Lolak, Pinogaluman, Monanow dan DI Ayong, Bolangat, Maelang, sehingga perlu penanganan untuk 9 DI kewenangan provinsi lainnya.

Permasalahan kemantapan irigasi antara lain perlu penganggaran untuk Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi, penganggaran penanganan irigasi, serta masalah alih fungsi lahan. Upaya pemerintah selain penanganan Daerah irigasi, tetapi juga menggerakkan kelembagaan petani pemakai air untuk memelihara jaringan irigasi, serta regulasi untuk pengendalian alih fungsi lahan.

c. Akses Air Minum layak

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Persentasi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2024 mencapai 94,46%. Permasalahan penyediaan air minum semakin berkurangnya sumber air baku untuk diolah

menjadi air minum, sementara kebutuhan akan air minum yang layak dan aman semakin meningkat, selain itu masih tingginya angka Non Revenue Water dan Idle capacity di Prov. Sulut, serta investasi di sector air yang masih rendah. Upaya pemerintah untuk penyediaan air minum layak dengan adanya SPAM Regional Bimatara.

d. Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap septik tank yang layak tahun 2024 mencapai 87,31%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akses sanitasi layak mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan tapi belum meningkat secara siqnifikan, hal ini disebabkan masih adanya perilaku BABS di masyarakat, keberadaan infrastruktur sanitasi (IPLT) belum dimiliki oleh semua Kabupaten/Kota, belum semua daerah memiliki regulasi terkait pengelolaan sanitasi serta alokasi pendanaan sanitasi yang masih kurang. Upaya pemerintah mendorong pengelolaan sanitasi layak di Kabupaten/Kota, serta Penghargaan Sensanitasional Award (SSA) bagi Kabupaten/kota dengan pengelolaan sanitasi yang baik.

e. Perumahan Layak

Berdasarkan BPS Tahun 2024, Persentase Rumah Tangga yang menghuni Rumah Tinggal Layak Huni tahun 2024 mencapai 74,21% mengalami kenaikan dari tahun -tahun sebelumnya. Permasalahan perumahan Kawasan permukiman antara lain; masih adanya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, kurangnya akses masyarakat terhadap lahan perumahan yang

murah dan terjangkau, serta keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya pemerintah dalam memberikan rumah tinggal layak huni dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Prasarana- Sarana Umum (PSU).

f. Pengurangan Kawasan Kumuh

Untuk Kawasan kumuh ditetapkan melalui SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota. Sedangkan Provinsi tidak memiliki kawasan kumuh lagi di tahun 2024 sehingga dianggap pengurangan Kawasan kumuh telah mencapai100%.

g. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 mencapai 99,99% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rasio Elektrifikasi tahun 2024 mencapai 99,99% dengan target 100%, adapun disebabkan beberapa indikator capaian target yang tidak bisa dipenuhi. Permasalahan terkait Rasio elektrifikasi dimana Prov. Sulut merupakan daerah kepulauan sehingga perlu akses jaringan listrik. Upaya pemerintah untuk mendorong PLN untuk terlayaninya jaringan listrik lebih khusus daerah kepulauan.

Meskipun begitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2022 telah melakukan perhitungan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang mana salah satu pilarnya (Pilar 2) adalah tentang indeks infrastruktur. Adapun capaian Indeks Pilar Infrastruktur (Pilar 2) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2024 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 2.50
Indeks Pilar Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2024

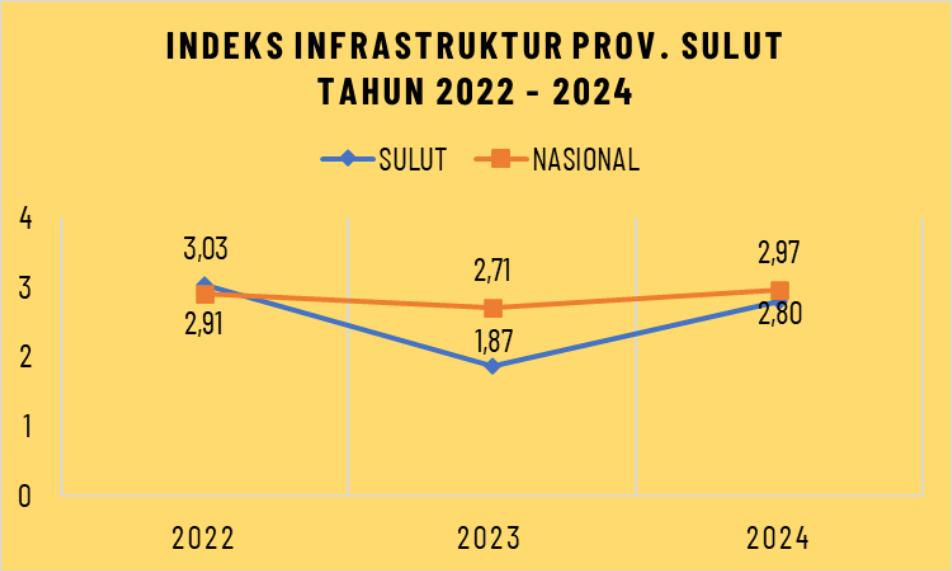

Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa Indeks Pilar Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara dalam 2 (dua) tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian nasional. Hal ini disebabkan oleh **tidak adanya nilai** pada komponen **Layanan Infrastruktur Kereta Api**, **Persentase Susut Energi Listrik** serta **Tingkat Kehilangan Air**. Capaian nilai tiap komponen pada Indeks Pilar Infrastruktur untuk tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Indeks Pilar Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

No	Kode Daerah	Level Daerah	Pilar 2: Infrastruktur									Indeks Pilar Infrastruktur
			Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)		Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	Infrastruktur Transportasi (Udara)	Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)		Infrastruktur Utilitas (Air)		
			2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	
			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan	Kualitas Infrastruktur Jalan	Layanan Infrastruktur Kereta Api	Layanan Infrastruktur Bandara	Layanan Infrastruktur Pelabuhan	Rasio Elektrifikasi	Susut Energi Listrik (%)	Akses Air Minum Layak	Tingkat Kehilangan Air	
25	71	SULAWESI UTARA	5,00	4,91	0,00	3,54	2,02	5,00	0,00	4,72	0,00	2,80

Sumber: BRIN, 2025 (diolah)

Untuk mengukur Indeks Infrastruktur ke depannya pada tahun 2025 - 2030 akan menggunakan nilai yang diukur oleh BRIN yang merupakan satu kesatuan dengan Indeks Daya Saing Daerah.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulwesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan kepala keluarga di Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan.

Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat

dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah yang layak huni.

Secara umum capaian rumah layak huni di Sulawesi Utara berada di atas angka rata-rata nasional. Tahun 2020 tingkat persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap kunian layak dan terjangkau sebesar 69,48 persen. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2024 telah menccapai angka 74,21 persen. Secara keseluruhan persentase hunian layak di Provinsi Sulawesi Utara diperlihatkan pada diagram sebagai berikut:

Grafik 2.51
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

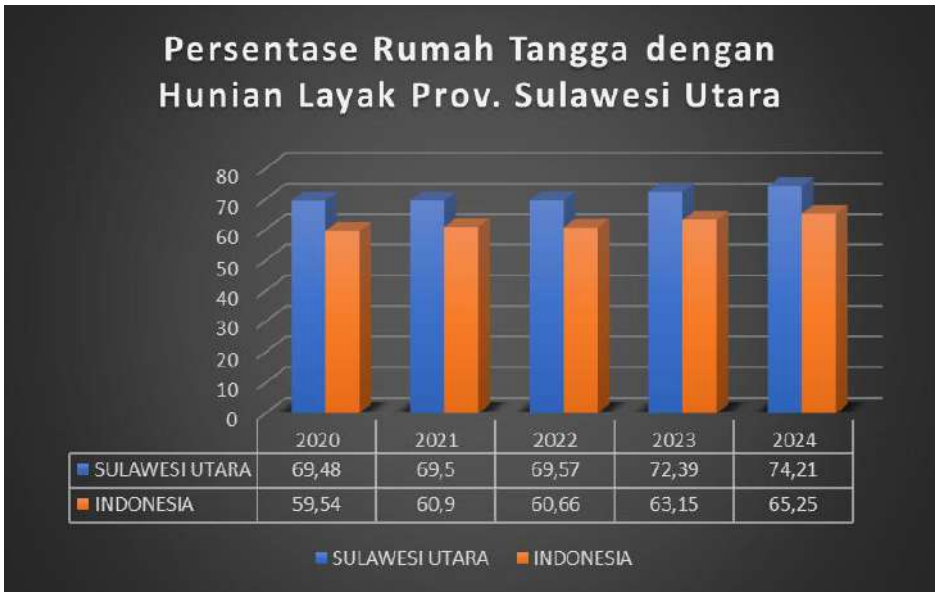

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (diolah)

C. Backlog Kepemilikan Rumah

Backlog kepemilikan rumah adalah selisih antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia dan layak huni. Dalam konteks ini, backlog mencerminkan kebutuhan akan hunian yang belum terpenuhi, khususnya bagi masyarakat yang belum

memiliki rumah sendiri. Backlog kepemilikan menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan perumahan, karena menunjukkan tekanan terhadap sektor perumahan dan urgensi intervensi pemerintah. Tabel berikut menyajikan data Backlog kepemilikan Sulawesi Utara kurun waktu 2020 – 2024.

Grafik 2.52
Backlog Kepemilikan Rumah Sulut Tahun 2020-2024

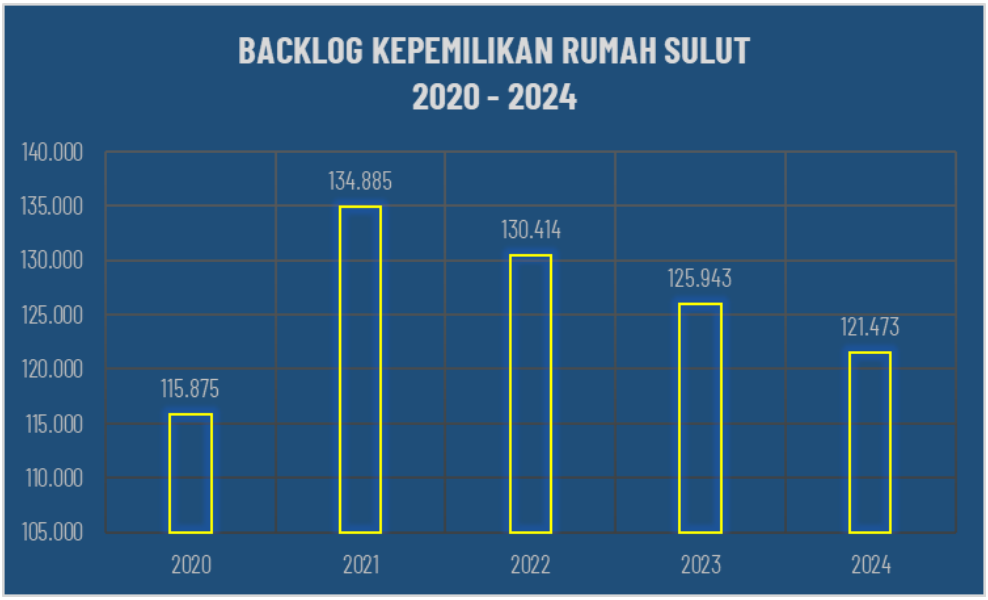

Sumber: BAPPEDA Sulut, 2025 (diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020–2024, Sulawesi Utara mengalami fluktuasi dalam angka backlog kepemilikan. Pada tahun 2020, backlog tercatat sebesar 115.875 unit, kemudian melonjak menjadi 134.885 unit di tahun 2021. Kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh pertumbuhan rumah tangga baru dan keterbatasan pasokan rumah layak. Namun, tren berikutnya menunjukkan penurunan bertahap: 130.414 unit (2022), 125.943 unit (2023), dan 121.473 unit (2024). Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah melalui

program subsidi, pembangunan rumah MBR, dan kemudahan KPR.

D. Penanganan Kawasan Kumuh

Tabel 2.75
Penanganan Kawasan Kumuh

Kab/Kota	Tahun	Luasan (HA)	Update Tahun Pendataan	Luasan Pendataan (HA)	Luasan update Pendataan + SK Kumuh)	Tertangani (Selisih)
Bolaang Mongondow Utara	2023	46,73	2024	214,99	214,99	
Minahasa	2016	375,97	2024	96,13	96,13	279,84
Kepl. Talaud	2022	72,87	2024	130,03	130,03	
Manado	2021	196,85	2024	117,9	117,90	78,95
Kotamobagu	2020	102,3	2024	46,42	46,42	55,88
Minahasa Selatan	2015	32,58	2023	43,68	43,68	
Bolaang Mongondow Selatan	2024	203,85	2024	173,44	173,44	30,41
Minahasa Tenggara	2014	69,66			69,66	
Tomohon	2022	42,27			42,27	
Minahasa Utara	2023	251,14			251,14	
Bitung	2021	65,94			65,94	
Kepl. Siau Tagulandang Biaro	2020	61,6			61,60	
Bolaang Mongondow	2021	713,43			713,43	
Kepl. Sangihe	2021	81,54			81,54	
Bolaang Mongondow Timur	2018	23,75			23,75	
Total		2340,48		822,59	2.131,92	445,08

Sumber: BAPPEDA Sulut, 2025 (diolah)

Luas kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun 2024 seluas 2.340,48 Ha tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Kawasan kumuh ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang mana dalam 1 hamparan/lokasi, luasannya masing-masing di bawah 10 Ha. Setelah dilakukan update data kawasan kumuh pada tahun 2025, maka luas kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Utara berkurang menjadi 2.131,92 Ha. hal ini terjadi karena adanya penanganan yang telah dilakukan pada 4 (empat) kabupate/kota, yakni Kabupaten Minahasa (279,84 Ha), Kota Manado (78,95 Ha), Kota Kotamobagu (55,88 Ha) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (30,41 Ha). Namun demikian, terdapat peningkatan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Talaud (57,16 Ha)

dan Kab. Minahasa Selatan (11,1 Ha). Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki kawasan kumuh kewenangan provinsi.

Untuk Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. sehingga Pemerintah Provinsi belum memiliki data terkait sertifikasi pengembang.

E. Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan fisik dasar, fasilitas penunjang serta sistem pendukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Pembangunan PSU merupakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (untuk kawasan permukiman) serta Pemerintah Pusat dan Pengembang untuk perumahan. perlu digarisbawahi bahwa dalam penyediaan PSU Perumahan, Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan yang sifatnya stimulan, dalam arti bahwa hanya sebagian dari komponen PSU yang disediakan oleh pemerintah, sementara sisanya disediakan oleh pengembang.

Realiasi capaian pembangunan PSU APBN di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.53
Realiasi capaian pembangunan PSU APBN di Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024

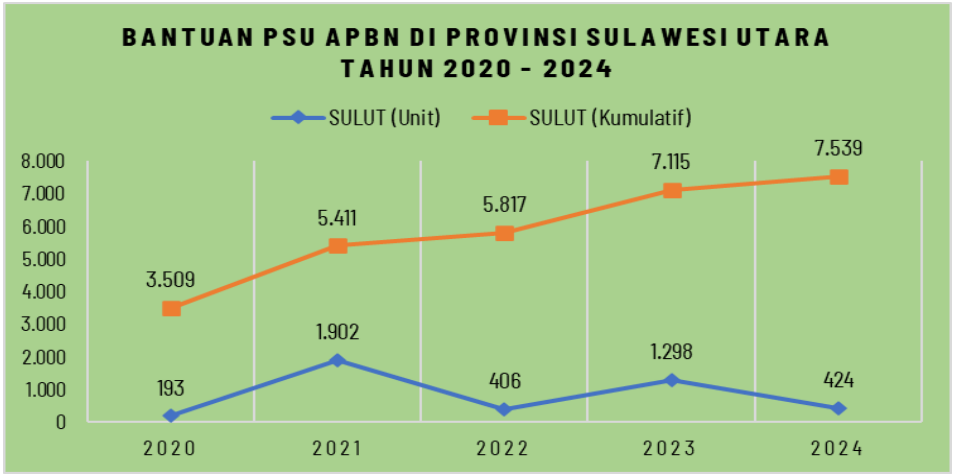

Sumber: BAPPEDA Sulut, 2025 (diolah)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian pembangunan PSU APBN di Provinsi Sulawesi Utara secara kumulatif telah mencapai 7.530 unit yang tersebar pada perumahan di Provinsi Sulawesi Utara. sedangkan untuk pembangunan tahunan jumlahnya bervariasi, dimana jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanya 1.902 unit, sedangkan terendah pada tahun 2020 sebanyak 193 unit, yang merupakan dampak adanya pandemi covid-19 sehingga terjadi *refocusing* dana untuk penanggulangan covid-19.

F. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pemberian BSPS di Provinsi Sulawesi Utara telah dimulai sejak lama. Tahun 2016 kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran APBN untuk mendukung program ini, baik berupa Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK). Secara kumulatif dalam kurun waktu tahun 2016 - 2024, program BSPS ini telah berhasil meningkatkan kualitas hunian berjumlah 22.209 unit.

Sedangkan untuk capaian tahunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.54
Realiasi Capaian Pemberian BSPS di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020 – 2024

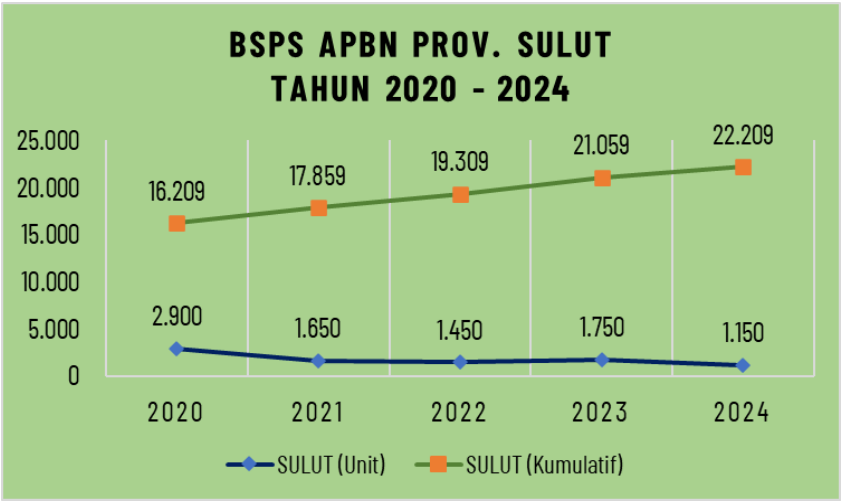

Sumber: BAPPEDA Sulut, 2025 (diolah)

Sedangkan untuk BSPS yang bersumber dari dana APBD telah dilaksanakan sejumlah 400 unit pada tahun 2017. sehingga total kumulatif pelaksanaan program BSPS (APBN dan APBD) sejumlah 22.609 unit.

G. Persentase Desa Mandiri

Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan melalui program peningkatan status desa, termasuk dalam upaya mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur yang memadai, pelayanan umum yang baik, serta kemampuan ekonomi lokal yang berkembang dengan baik.

Berdasarkan data terbaru, sejumlah desa di Sulawesi Utara telah berhasil naik status menjadi Desa Mandiri, yang mencerminkan keberhasilan dalam

pembangunan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan status ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Faktor-faktor utama yang mendorong kemajuan desa di Sulawesi Utara antara lain:

- Pemanfaatan Dana Desa secara optimal untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi produktif,
- Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan dan pendampingan UMKM,
- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan transparansi tata kelola,
- Serta kolaborasi lintas sektor dengan LSM, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Contoh desa yang berhasil mencapai status Desa Mandiri di Sulawesi Utara di antaranya adalah Desa Wineru di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Desa Lembean Timur di Kabupaten Minahasa. Keberhasilan desa-desa ini menjadi inspirasi dan model bagi desa lain dalam membangun kemandirian berbasis potensi lokal.

Melalui pencapaian ini, diharapkan Provinsi Sulawesi Utara mampu mendorong semakin banyak desa untuk bertransformasi menjadi desa mandiri yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Tabel 2.76
Persentase Desa Mandiri Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	%	3,38	8,80	20,35	59,94	5,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Presentase Desa Mandiri selama lima tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun terdapat target yang ditetapkan dan realisasi yang tercapai, yang memberikan gambaran tentang sejauh mana target tersebut tercapai.

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan untuk Presentase Desa Mandiri adalah sebesar 3%, dan realisasinya tercatat mencapai 3,38%, melebihi target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2021, target yang ditetapkan naik menjadi 8%, dan realisasi yang tercapai adalah 8,80%, juga menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari target.

Di tahun 2022, target yang lebih tinggi yaitu 20% ditetapkan, dengan realisasi yang tercatat mencapai 20,35%, yang sedikit melampaui target. Namun, pada tahun 2023, meskipun target tetap sebesar 20%, realisasi yang tercapai jauh lebih tinggi, yaitu 59,94%. Pencapaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan signifikan dalam pencapaian, dengan target yang ditetapkan kembali pada 17,93%, tetapi realisasi hanya mencapai 5,70%, jauh lebih rendah dari yang diharapkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada pencapaian yang lebih tinggi dari target pada beberapa tahun,

terutama pada tahun 2023, pencapaian di tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

2.1.4.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB

Rasio PAD terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan PAD terhadap total output ekonomi suatu daerah (PDRB). Rasio ini menunjukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin mandiri daerah tersebut dalam hal keuangan.

Salah satu pilar dalam UU HKPD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) adalah bagaimana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, supaya daerah itu tidak tergantung dari dana transfer daerah.

Berdasarkan data rasio PAD terhadap PDRB non migas provinsi Sulawesi utara tahun 2020 sd 2024 menunjukkan angka yang relatif rendah. secara rata-rata rasio pajak daerah terhadap PDRB provinsi Sulawesi utara tahun 2020 sd 2024 berada di angka 0,0136%. Angka terendah berada pada tahun 2020 yaitu 0,013 dimana pada tahun tersebut akibat adanya covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat secara umum dan ini dirasakan hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 perekonomian mulai bangkit lagi sehingga rasio PAD terhadap PDRB non migas terjadi kenaikan yaitu pada angka 0,015 dan ini merupakan tertinggi sampai dengan tahun 2024. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi utara belum bisa dikategorikan sebagai daerah yang sudah mandiri dan masih

bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 2.77
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB non Migas (2024)	87.839.530.000.000	91.518.160.000.000	96.480.690.000.000	101.770.980.000.000	107.272.320.000.000
PAD	1.125.317.788.015	1.310.528.740.580	1.464.716.968.805	1.186.354.255.171	1.520.441.788.620
RASIO PAD TERHADAP PDRB	0,013	0,014	0,015	0,012	0,014

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Tingkat Inflasi

Akhir tahun 2024 atau bulan Desember, Provinsi Sulawesi Utara mengalami angka laju inflasi sebesar 0,44 persen dan merupakan yang terendah sepanjang sejarah jauh dibawah laju angka inflasi nasional yang sebesar 1,57 % dan sekaligus juga daerah yang memiliki inflasi terendah kedua secara nasional.

Tabel 2.78
Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Provinsi	Inflasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	-0,18	2,65	4,00	2,87	0,44

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dari sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, secara *year on year (yoy)* sepuluh kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,94 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,84 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92 persen, kelompok

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,72 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,70 persen, kelompok transportasi sebesar 1,57 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,22 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen dan kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen. Satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen.

Penyumbang inflasi terbesar secara *year on year (yoy)* pada bulan Desember yaitu beras sebesar 1,0397 persen dan komoditi penyumbang deflasi terbesar yaitu bawang merah sebesar 0,1131 persen. Penyumbang inflasi terbesar secara *month to month (mtm)* pada bulan Desember 2023 yaitu cabai rawit sebesar 0,3500 persen, sedangkan penyumbang deflasi terbesar adalah ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,0593 persen.

Grafik 2.55
Laju Inflasi menurut Kelompok PengeluaranProvinsi Sulawesi Utara
Tahun 2023

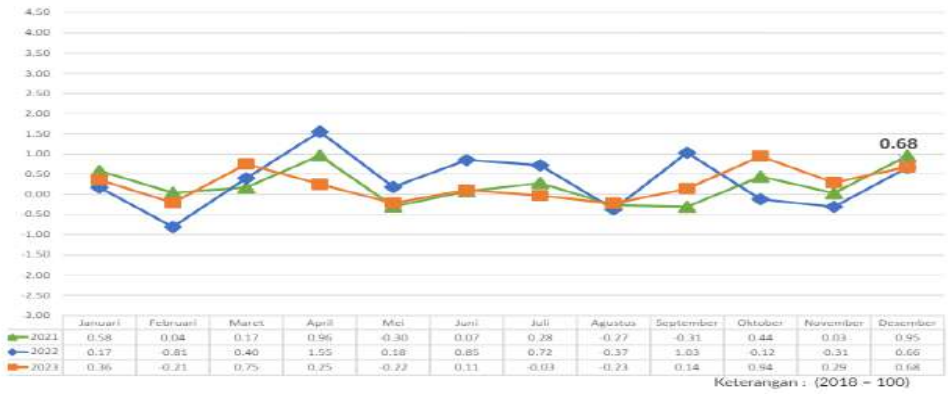

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi di sektor hukum, termasuk perbaikan regulasi, penegakan hukum yang adil, transparansi lembaga hukum, serta akses masyarakat terhadap keadilan. Indeks ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Berdasarkan data pada tahun 2023 belum terdapat nilai untuk Indeks Reformasi Hukum karena Provinsi Sulawesi Utara belum tersedia data untuk dinilai oleh Kementarian Hukum. Namun, pada tahun 2024, indeks ini tercatat sebesar 76,74 kategori BB (Baik). Capaian ini menunjukkan adanya langkah konkret dan progresif dalam upaya perbaikan sistem hukum nasional. Nilai tersebut mencerminkan bahwa meskipun belum memiliki catatan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2024 pemerintah telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan reformasi di bidang hukum.

Tabel 2.79
Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024

INDIKATOR	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	Belum tersedia	76,74

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan. Indeks ini mencerminkan tingkat efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan publik yang diberikan melalui pemanfaatan sistem digital.

Berdasarkan data yang tersedia, nilai Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,28. Pada tahun berikutnya, yaitu 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 2,30. Kenaikan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, di mana indeks ini mencapai angka 3,01. Peningkatan nilai indeks tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari tahun ke tahun, khususnya dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2.80
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020*	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2.26	2,28	2,3	3,01

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatikan, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (*data belum tersedia)*

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting seperti kepastian prosedur, kecepatan layanan, kompetensi petugas, kenyamanan sarana prasarana, serta kepuasan masyarakat. Indeks ini menjadi tolok ukur dalam menilai seberapa baik birokrasi mampu memenuhi kebutuhan publik secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Jika melihat data yang tersedia, terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 3,86 dan berada dalam kategori B. Tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,07 dan masuk ke dalam kategori A-. Tren positif ini terus berlanjut dengan perolehan nilai 4,14 pada tahun 2022. Kemudian, indeks ini mengalami kenaikan tipis namun tetap stabil di angka 4,20 pada tahun 2023 dan 2024, dengan kategori tetap di A-. Peningkatan dan konsistensi ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung lainnya.

Tabel 2.81
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,86 (Kategori B)	4,07 (Kategori A-)	4,14 (Kategori A-)	4,20 (Kategori A-)	4,20 (Kategori A-)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

D. Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Daerah (IID) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat integritas pemerintahan daerah yang mencerminkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, capaian IID mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020, data belum tersedia secara lengkap karena pelaksanaan IID masih berada dalam tahap pengembangan metode dan perluasan cakupan. Tahun berikutnya, yakni 2021, IID mulai menunjukkan hasil dengan nilai 62,67. Nilai ini meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 77,77, yang mencerminkan

adanya perbaikan integritas dan tata kelola di tingkat daerah.

Namun, pada tahun 2023, nilai IID mengalami penurunan menjadi 72,75, dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 73,98. Meskipun sempat mengalami penurunan setelah puncaknya di tahun 2022, tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan upaya yang terus dilakukan dalam meningkatkan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Capaian ini mencerminkan dinamika implementasi kebijakan antikorupsi dan reformasi birokrasi di tingkat daerah, serta pentingnya konsistensi dalam menjaga standar integritas yang tinggi.

Tabel 2.82
Indeks Integritas Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020*	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Daerah	-	62,67	77,77	72,75	73,98

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (data belum tersedia)*

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Tabel 2.83
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara			
	2021	2022	2023	2024
Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100%
Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100%
Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan *crime rate* mempunyai capaian rata-rata 100 persen, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen dalam mengimplementasikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Aksi HAM secara bertahap dan

terukur sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Selama periode pelaporan tahun, Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan sejumlah Aksi HAM yang mencakup empat kategori utama, yakni:

- Aksi HAM Tahap I – Inventarisasi Regulasi dan Program Daerah terkait HAM Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan pendataan dan pengumpulan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan HAM, termasuk Peraturan Daerah dan kebijakan strategis lainnya. Seluruh data telah dilaporkan melalui aplikasi pemantauan Aksi HAM.
- Aksi HAM Tahap II – Pelaksanaan Program Prioritas terkait Kelompok Rentan
- Kegiatan difokuskan pada pemenuhan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Program unggulan mencakup layanan ramah disabilitas di sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan.
- Aksi HAM Tahap III – Penguatan Kapasitas Aparatur dan Sosialisasi HAM
- Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi HAM bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan masyarakat umum, yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
- Aksi HAM Tahap IV – Evaluasi dan Pelaporan
- Proses evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi lintas sektor dan pelaporan

berbasis elektronik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Capaian

- Persentase Pelaksanaan Aksi HAM: Misalnya: 100% capaian dari total indikator.
- Kabupaten/Kota yang Aktif Melaporkan: Jumlah kabupaten/kota dari total yang ada.
- Inovasi Daerah: Peluncuran program, contoh: "Desa Sadar HAM" di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pilot project kolaboratif pemerintah dan masyarakat.
- Tingkat Partisipasi Publik: Meningkat melalui forum konsultasi publik dan kegiatan advokasi HAM yang inklusif.

Beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan peningkatan kapasitas pemahaman HAM di lingkungan ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sinergi antar perangkat daerah serta dukungan teknis dari pemerintah pusat.

Melalui capaian ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat terus meningkatkan kesadaran HAM di semua sektor pembangunan dan menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Sinergi lintas sektor dan dukungan masyarakat akan menjadi kunci keberlanjutan pelaksanaan Aksi HAM di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.84
Persentase Capaian Aksi HAM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	2022	2023	2024
1	PERSENTASE CAPAIAN AKSI HAM	51.44	41.04	34.80

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Sulut, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dari tahun 2022 hingga 2024. Terlihat bahwa terjadi penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian Aksi HAM tercatat sebesar 51,44%. Angka ini menurun cukup signifikan menjadi 41,04% pada tahun 2023. Penurunan kembali terjadi di tahun 2024, dengan capaian yang hanya mencapai 34,80%. Tren penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program-program terkait HAM agar target capaian dapat ditingkatkan kembali di tahun-tahun berikutnya.

C. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI mengukur tiga aspek utama: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Setiap aspek terdiri dari beberapa variabel dan indikator yang mencerminkan kondisi demokrasi di suatu wilayah.

Aspek-Aspek IDI:

a. Kebebasan Sipil: Aspek ini mengukur sejauh mana individu dapat menikmati kebebasan pribadi tanpa campur tangan pemerintah.
b. Hak-hak Politik: Mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat, termasuk dalam pemilu dan kebebasan berpendapat.

c. Lembaga Demokrasi: Menilai efektivitas dan integritas lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tabel 2.85
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	81,41	78,22	76,27	-

Sumber Data: BPS Prov. Sulut Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tiga tahun berturut-turut, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah indikator yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan partisipasi politik.

Pada tahun 2021, Indonesia mencatatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 81,41, yang menunjukkan kondisi demokrasi yang relatif kuat dan stabil pada saat itu. Namun, pada tahun 2022, IDI mengalami penurunan menjadi 78,22, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam kualitas demokrasi. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan IDI tercatat sebesar 76,27, yang berarti terjadi penurunan lebih lanjut dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tren penurunan yang terjadi pada Indeks Demokrasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi, termasuk

kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada periode tersebut.

D. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (IP-KKUPM) adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah, termasuk juga perlindungan terhadap masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah, khususnya melalui perangkat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan peraturan daerah, serta melindungi masyarakat dari gangguan ketertiban maupun bencana. Adapun parameter dari IP-KKUPM adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sebagai berikut : 1) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Penyelenggaraan; 2) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU); 3) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas); 4) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah (biasanya provinsi atau kabupaten/kota) dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Daya saing sebuah entitas wilayah ditentukan oleh kemampuan dalam meningkatkan produktivitas di tiga lini yaitu produktivitas dalam factor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisiensi dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. 4 komponen utama yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusi, pasar dan ekosistem inovasi, yang dijabarkan melalui 12 pilar daya saing yang dikeluarkan oleh BRIN.

Gambar 2.22
Komponen Indeks Daya Saing Daerah

Sumber Data: Badan Riset dan Inovasi Nasional Prov. Sulut Tahun 2025

Pengukuran IDSD 2024 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia danketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

Tabel 2.86
12 Pilar Utama Indeks Daya Saing Daerah Sulawesi Utara

NO.	12 PILAR UTAMA	SULAWESI UTARA	NASIONAL
1	INSTITUSI	4,06	4,18
2	INFRASTRUKTUR	2,80	2,97
3	TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	3,65	3,47
4	STABILITAS EKONOMI MAKRO	4	3,99
5	KESEHATAN	3,95	3,76
6	KETRAMPILAN	4,05	3,91
7	PASAR PRODUK	3,50	2,57
8	PASAR TENAGA KERJA	3,49	3,03
9	SISTEM KEUANGAN	2,66	2,76
10	UKURAN PASAR	4,23	4,35
11	DINAMIKA BISNIS	2,89	3,06
12	KAPABILITAS INOVASI	2,81	3,13
	SKOR RATA-RATA	3,53	

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN 2024

Tabel 2.87
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Skor Indeks	3,15	3,49	3,15	3,48	3,53

Sumber Data: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, nilai Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2020 berada di angka 3,15. Kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 3,49. Namun, pada tahun

2022, skor indeks kembali turun ke angka 3,15. Di tahun berikutnya, yaitu 2023, indeks ini kembali menunjukkan perbaikan dengan skor 3,48, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan perolehan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 3,53. Pergerakan nilai ini mencerminkan adanya dinamika dalam kemampuan daerah menjaga dan meningkatkan daya saingnya dari waktu ke waktu.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Sulawesi Utara merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selama lima tahun pelaksanaan, IKU berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang mencerminkan capaian visi, misi, dan program strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi 5 tahun Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.88
Indikator Kinerja Utama Sulawesi Utara

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,93	73,3	73	73,81	74	74,36	75	75,68
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,53	94,94	94.60	95,29	94.65	95,47	94.70	95,98
Prevalensi Stunting	%	21,2	21,6	16.2	20,5	15	21,3	14	20,8
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,32	49,84	57,28	54,97	58,06	55,39	59,28	Belum Rilis
Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,99)	4,16	4,5 – 5,5	5,42	5,0 – 5,7	5,48	5,7 – 6,0	5,39
Indeks Gini (Gini Ratio).	Angka	0,367	0,359	0,36	0,359	0,355	0,37	0,35	0,347
Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,78	7,36	7,5 – 6,9	7,34	5,93	7,38	5,65	6,7
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,28 (Maret)	7,06	6,47 – 7,18	6,61	6,0 – 6,5	6,10	5,5 – 6,0	5,85
Indeks infrastruktur	Angka	0.880	0,89	0.885	0,91	0.89	0,88	0.895	0,90
Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Angka	0.53	0,866	0.60	0,74	0.68	0,81	0.77	0,81

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	70.51	72,38	70.81	72,37	71.11	73,87	71.41	76,26
Akses Air Minum	%	90	73,31	92	94,15	94	94,37	96	94,46
Akses Sanitasi	%	83	87,31	85	84,05	87	85,91	89	87,31
Opini BPK Kualifikasi Penilaian	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	57,48	60,04	59,95	64,89	61	56,78	62,50	73,38
Indeks SPBE	Nilai	2,8	2,26	3	2,28	3,3	2,3	3,6	3,01

Pencapaian target IKU yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi cerminan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Evaluasi ini menjadi landasan penting bagi setiap perangkat daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk periode berikutnya guna memastikan akuntabilitas dan kinerja yang optimal dalam melayani masyarakat. Evaluasi 5 tahun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**								
	1. Rata-Rata Lama Sekolah	N/A	9,62	9,54	9,68	9,15	9,77	9,62	9,84
	2. Harapan Lama Sekolah	N/A	12,94	12,89	12,95	12,85	12,96	12,94	12,97
	3. APK SMA/SMK/MA	86,16	86,17	85,50%	86.03	86,16 %	103.34%	85,95%	82,57
	4. APM SMA/SMK/MA	64,2	63,33	63,80%	63.30	63,80 %	60,28 %	64,50	64,87
2.	**DINAS KESEHATAN DAERAH**								

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	1. Usia Harapan Hidup	71,05	71,76	72,05	72,08	72,10	72,40	72,15	72,69
	2. Jumlah Kematian Bayi	28	5	240	259	230	238	220	253
	3. Jumlah Kematian Ibu	125	172	35	36	30	48	26	40
	4. Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	N/A	N/A	100%	86,79%	100 %	87,71%	100%	83,33%
	5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH**								
	1. Rasio Kemantapan Jalan	89,54%	91,81%	0,894	0,853	0,899	0,834	0,903	0.8297
	2. Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	84,43%	94,75%	0,857	0,851	0,874	0,866	0,891	0.4946
4.	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**								
	1. Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	N/A	N/A	54	73%	61	86	68	73
	2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	N/A	N/A	35	35,35%	40	47	45	57
5.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**								
	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
6.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**								
	1. Persentase penanganan pra bencana	N/A	N/A	100%	100%	100 %	93,33 %	100%	80%

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	N/A	N/A	100%	88,89%	100 %	100 %	100%	100%
	3. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	N/A	N/A	5 Desa/ Kelurahan	3 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	N/A	N/A	N/A
	4. Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kawasan	100%	1 kawasan	100%
7.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
	1. Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	N/A	100%	89,74%	100%	98,37%	100%	100%
	2. Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	N/A	N/A	100%	100%	100 %	99,69 %	100%	100%
8.	**DINAS SOSIAL DAERAH**								
	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	2,65%	2,65%	4,56%	92,54%	5,02 %	13,65 %	5,52%	10,74%
	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	N/A	N/A	10%	8,7%	15,20 %	19,50 %	20,40%	19,50%
9.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**								
	1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	N/A	N/A	71,85%	66,23%	71,10 %	72,62 %	71,15%	69,11%

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	2. Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	N/A	N/A	20%	20%	40 %	38,11 %	60%	38,11%
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH									
	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	N/A	N/A	69	-	2,5%	16,7%	2,5%	2,90%
	2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	N/A	N/A	29	7	25	28	26	56
	3. Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan kabupaten/kota layak anak	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %
	4. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koprehensif	N/A	N/A	52%	100%	65 %	100 %	75	100 %
11. DINAS PANGAN DAERAH									
	1. Indeks Ketahanan Pangan	79,04%	79,04%	79,04%	74,30%	79,67%	74,30%	80,31%	76,23%
12. DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH									
	1. Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	N/A	N/A	95%	94,10%	95 %	84,51 %	96%	98,20%
	2. Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,36	2,25	2,07%	2,24	2,10 %	2,23	2,06

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%	37%	30%	34,2%	30 %	39,6 %	29,80%	38,8%
13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	1. Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	N/A	N/A	13,27%	13,27%	19,90 %	20,17 %	26,54%	27,93%
	2. Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	N/A	N/A	100%	66,66%	100 %	100 %	100%	100%
	3. Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	N/A	N/A	100%	83,33%	100 %	100 %	100%	100%
	4. Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	N/A	N/A	100%	60%	100 %	100 %	100%	100%
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH									
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,51	72,38	70,81	72,37	71,11	73,87	71,41	76,26
15. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH									
	1. Rasio Konektivitas Provinsi	0,410	0,410	0,420	0,420	0,450	0,420	0,470	0,504
16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH									
	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH									
	1. Persentase Koperasi Sehat	1%	1%	1% (3.803 Unit)	0,5% (3.779 unit)	1 % (3.841 Unit)	1,3 %	1% (3.897 unit)	1%
	2. Persentase UMKM Naik Kelas	2%	2%	2%	2%	2 %	2,1 %	2%	2%
18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH									
	1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10	N/A	10	10,13	10	63,67	12	-30,92
19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH									
	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	0,55%	0,50%	0,65 %	0,65 %	0,75%	3,52%
	2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A	6,69%	6,69%	6,79 %	6,79 %	6,89%	14,09%
	3. Peningkatan prestasi olahraga	10 Nasional internasional	7 Nasional; 1 Internasional	6 Prestasi	8 Prestasi	6 Prestasi	26 Prestasi	6 prestasi	107 prestasi
20. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH									
	1. Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	100%	0%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	N/A	N/A	19 Unit	1 Unit	24 Unit	26 Unit	29 Unit	32 Unit
21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH									
	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	N/A	61%	58,83%	61 %	61,83 %	61,7	68,44
	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	8,13%	66,07%	8,80 %	70,91 %	9,00	62,54

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	N/A	N/A	17,86%	57,52%	18,91%	60,47%	19,81%	60,54%
22. DINAS PARIWISATA DAERAH									
	1. Tingkat Hunian Akomodasi	10%	15%	15%	42,33%	20 %	42,4 %	25%	47,6%
	2. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1%	1,30%	2%	3%	3 %	3,4 %	3,3%	3,5%
	3. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	1.500.000 Wisnus dan 150.000 Wisman	447.020 wisnus dan 23.031 wisman	1.000.000 Wisnus; 25.000 Wisman	603.370 Wisnus; 28.316 Wisman	25.000 Wisman; 1. 000.000 Wisnus	90.671 Wisman; 743.988 Wisnus	25.000 Wisman, 1.000.000 Wisnus	131.114 wisman 1.179.028 Wisnus
	4. Nilai tambah Ekonomi Kreatif	19.710.000	16.156.140	19.710.000	16.156.140	19.710.000	16.156.140	20.506.284.000	790.524.825.067
23. BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	1. Rasio PAD (ADHK)	0,050	0,016	0,015	0,015	0,014	0,016	0,013	0,061
	2. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	0,03	0,02	-0,03	-0,02	-0,03	-0,11	-0,03	-0,07
24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH									
	1. Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	980.422 Ton	746.738,62 Ton	971.185 Ton	739.841,24 Ton	988.400 Ton	826.379,2 Ton	1.007.792 ton (tangkap dan budidaya)	967.548
	2. NTNP (NTN dan NTPi)	103	105,59	104	108,30	105	110,42	106	105

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	3. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	98	95	96%	96,03%	97 %	97 %	97%	97%
25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH									
	1. Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan	1-2%	1,5%	1-2%	3%	1-2 %	1.5 %	1-2%	1,5%
	2. Nilai Tukar Petani	100-103%	110%	100-103%	110%	100-103%	109%	100-103%	107%
26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH									
	1. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	95%	106,3%	93-100%	93%-100%	94%-100%	110,06%	96% – 100%	114,42%
	2. Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%	N/A	1%	2,40%	1 %	0,149 %	1%	0,05%
27. DINAS KEHUTANAN DAERAH									
	1. Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	2.368 Ha	3.279 Ha	2.368 Ha	0 Ha	2.368 Ha	8.070 Ha	2.368 Ha	6.865 Ha
	2. Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2.400 Ha	1.325 Ha	2.400 Ha	1.675 Ha	2.400 Ha	4.419 Ha	2.400 Ha	249,24 Ha
28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH									
	1. Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Rasio elektrifikasi	91%	99%	100%	100%	100%	99.99%	100%	100%

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	3. Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	36%	30%	36%	30%	36 %	30 %	37%	31,25%
	4. Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	99,99%
29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH									
	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	9,15%	10,49%	9,20%	10,45%	9,45%	10,01% (triwulan 3)	9,75%	10,62%
	2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,40%	13,09%	12,45%	13,38%	12,65%	13,078% (capaian triwulan 3)	13,25%	13,65%
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	1. Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	75%	86,51%	75%	93,34%	75%	98,11%
	2. Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	90%	96%	100%	98,52%	100%	98,52%	95-100%	97,04%
31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,32%	60,10%	79,32%	69,89%	79,52%	71,34%	79,65%	N/A
32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
	1. Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	5,30	7,41	5,40 %	9.40 %	5,50	0,76
	2. Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	0,08	0,16	0,09 %	0,16 %	0,10	0,15

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	11,70%	6,96%	11,75 %	7,46 %	11,80	0,72
	4. Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	N/A	N/A	75%	75%	80 %	80 %	85%	85%
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH									
	1. Persentase ASN yang Berkompetensi	N/A	N/A	30%	31,99%	40%	42.13%	60%	53,21%
34. INSPEKTORAT DAERAH									
	1. Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori B, Kab/Kota Rata- Rata B	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC	Provinsi Kategori B, Kab/Kota Rata-Rata B	Provinsi kategori BB dan Kabupaten/Kota rata-rata CC	Provinsi kategori BB dan Kabupaten/Kota rata-rata CC
	2. Nilai LPPD dillingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	N/A	N/A	Provinsi Nilai Tinggi dan Kab/Kota Rata-Rata Tinggi	Provinsi nilai “tinggi” dan Kabupaten/Kota “rata-rata tinggi	Provinsi Nilai Tinggi dan Kab/Kota Rata-Rata Tinggi	Sedang	Provinsi nilai “tinggi” dan Kabupaten/Kota “rata-rata tinggi”	Provinsi nilai “tinggi” dan Kabupaten/Kota “rata-rata tinggi”
	3. Level Maturitas SPIP	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	4. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	5. Persentase Tindak Lanjut Temuan	N/A	N/A	100%	73.89%	100 %	76.91 %	100%	100%
	6. Persentase Temuan BPK	N/A	N/A	10%	46.43%	10 %	N/A	10%	10%
	7. Level Kapabilitas APIP	N/A	N/A	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	8. Persentase Penyampaian LHKPN	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	9. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	N/A	N/A	100%	260%	100 %	260 %	100%	100%
35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
	1.Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	N/A	N/A	40%	45%	45 %	47.36 %	50%	59,21%
	2. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	N/A	35%	41%	45 %	48.71 %	55%	48,72%
36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH									
	1. Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	93,65
37. SEKRETARIAT DAERAH									
	1. Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	7,81	8.28	7.91	4.2	8,01	4,20
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	N/A	N/A	67,1	68,05	70.05	68.39	72	67,68
	3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	N/A	N/A	93,60	N/A	93,80	N/A	94,00	N/A
38. SEKRETARIAT DEWAN									
	1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
	2. Pengambilan Keputusan DPRD	N/A	N/A	11 Keputusan	11 Keputusan	11 Keputusan	11 Keputusan	11 keputusan	9 Keputusan
39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH									

No.	INDIKATOR	TARGET DAN CAPAIAN TAHUNAN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	1. Persentase pelayanan penghubung	N/A	N/A	100%	96%	100 %	100 %	100%	100%

Hasil evaluasi ini menggambarkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif. Meskipun demikian, evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa area yang masih memerlukan perbaikan, seperti pemerataan distribusi sumber daya dan peningkatan kapabilitas digital. Temuan ini menjadi landasan krusial untuk perumusan kebijakan di masa depan, memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Evaluasi 5 tahun Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.	**PENDIDIKAN**								
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	N/A	N/A	100%	100%	100 %	60.28%	100%	63,36%
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang	N/A	N/A	100%	100%	100 %	110.85%	100%	76,83%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	berpartisipasi dalam pendidikan khusus								
1.3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	N/A	N/A	100%	100%	100 %	0	100%	Belum ada Peraturan Gubernur sehingga pembelajaran muatan lokal belum bisa dimasukkan dalam kurikulum
1.4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	01:17	01:13,4	1:14	-	1:14	1:15	01:13	1:14
2.	**KESEHATAN**								
2.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	N/A	N/A	55%	80,39%	60 %	69,13%	60%	69,13%
2.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	N/A	N/A	100%	86,79%	100 %	87,71%	100%	83,33%
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
2.5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	N/A	N/A	RS 100%	80,39%	RS 100%	87,71%	100%	94%
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk;	N/A	N/A	45/ 100.000 penduduk	80/ 100.000 penduduk	45/ 100.000 penduduk	100 %	45/100.000 penduduk	86/100.000 penduduk

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
2.7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	N/A	N/A	100%	92,%	100 %	100 %	100%	95,98%
2.8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
3.1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0	0	0,50	0.0	0,53	0.868	0,58	0.0319
3.2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	0	0	0,50	0.0	0,53	0,340	0,58	0,340
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigas	0,84	0,948	0,857	0.851	0,874	0.866	0,891	0.4946
3.4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	2%	N/A	9%	6.75%	10 %	10 %	11%	11%
3.5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0,02	N/A	0,06%	0.06	0,06 %	0.06	0,07	0.07

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
3.6	Rasio kemantapan jalan	0,89	0,92	0,894	0.853	0,899	0.834	0,903	0.8297
3.7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0,05	N/A	0,051	0.0	0,054	0,065	0,056	0.079
3.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	0%	0%	0%	0%	40 %	0 %	45%	0
3.9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	3	N/A	1	0	1	0	1	0
3.10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	N/A	2	1	2	1	2	1
3.11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
3.12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
3.13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Permendagri 86/2017)	0,53	N/A	0,60	0.74	0,68	0.8153	0,77	0.815
4.	**PERUMAHAN RAKYAT**								
4.1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	0%	2%	Tidak di anggarkan	4 %	0	6 %	0
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	2%	Tidak di anggarkan	4 %	0	6 %	0
4.3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	-	-	100%	Tidak di anggarkan	100 %	0	100 %	0
4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	47%	N/A	54%	73%	61 %	86 %	68 %	86 %
4.5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (IKM)	1 Kegiatan	N/A	1 Kegiatan	Tidak di anggarkan	1 Kegiatan	0	1 kegiatan	0
5.	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
5.3	Persentase penanganan pra bencana	N/A	N/A	100%	100%	100 %	93,33%	100 %	80%
5.4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	N/A	N/A	100%	88,89%	100 %	100%	100 %	100 %
5.5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %
5.6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	N/A	N/A	100%	94,44%	100 %	100 %	100 %	90%
5.7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	N/A	N/A	100%	89,74%	100 %	98,37%	100 %	100%
5.8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	N/A	100%	100%	100 %	99.97%	100 %	100%
5.9	Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	N/A	N/A	100%	100%	100 %	86.61%	100 %	100%
5.10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	N/A	N/A	100%	100%	100 %	99.45%	100 %	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
5.11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	N/A	N/A	100%	100%	100 %	99.69%	100 %	100%
6.	**SOSIAL**								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
6.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	97,96%	100 %	99,51%	100 %	100 %
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%	100%	100%	95,96%	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%	0%	0%	0%	0 %	0 %	100 %	0
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
6.6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif	100%	100%	10%	8,70%	15.20%	19,50%	20,40 %	19.50%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
6.7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	100%	97,91%	100 %	100 %	100 %	100 %
6.8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
6.9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	90%	100 %	100 %	100 %	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
7.	**TENAGA KERJA**								
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	N/A	N/A	33%	40%	46 %	53 %	53 %	53,22 %
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	N/A	N/A	65%	78,13%	70 %	59,55%	75 %	86,80 %
7.3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	N/A	N/A	76,5	83,4	77	81,59%	77,25	82,38
7.4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	N/A	N/A	40%	40%	50 %	86,10%	60 %	47,88 %
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam	N/A	N/A	60%	65%	61 %	50,60%	62 %	58,33 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	1 (satu) daerah provinsi								
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	N/A	N/A	80%	80%	85 %	100 %	90 %	100 %
8.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	N/A	N/A	69%	-	2,5 %	16,7 %	2,5%	2,9 %
8.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	N/A	N/A	29	7	25	28	26	56
8.3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)	N/A	N/A	12,5	21	15	13	17,5	38,6
8.4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	N/A	N/A	80%	50%	85 %	75 %	89 %	92 %
8.5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
8.6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	N/A	N/A	52	100%	65	100 %	100%	100 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
9.	**PANGAN**								
9.1	Persentase cadangan pangan	95%	93% (275 ton)	100% (275 ton)	87,7% (245,66 ton)	100% (275 ton)	99% (273 ton)	100% (98,5 ton)	100% (215,5 ton)
9.2	Persentase daerah rentan rawan pangan	14,03%	14,03%	12,03%	3,51%	10,03%	9,36%	8,03%	15,20%
9.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	60%	60%	85%	85%	89 %	89 %	92 %	92%
9.4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0,015%	0,015%	0,016%	0,015%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%
9.5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari)	2.400 kkal dan 63 gram	2.400 kkal dan 63 gram	2.400 kkal dan 63 gram	2.790 kkal dan 94,67 gram	2.400 kkal dan 63 gram	2.790 kkal dan 94,67 gram	2.400 kkal dan 63 gram	2.823 kkal dan 95,17 gram
9.6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60%	60%	85%	85%	85 %	85 %	92 %	92%
10.	**PERTANAHAN**								
10.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
10.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	33,28%	N/A	35,00%	35,35%	35,00%	35,35%	45,00%	57,00%
10.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100%	N/A	100%	-	100 %	-	100 %	100%
11.	**LINGKUNGAN HIDUP**								

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,51	72,38	70,81	72,37	70,81	72,37	71,41	76,26
11.2	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	60 %	60%
11.3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	KLHS	RPPLH dan KLHS	KLHS	KLHS	KLHS RPJPD KLHS Revisi RTRW Prov. Sulut
11.4	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi	0	0	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI	1 Taman KEHATI	-
11.5	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/ Kegiatan	2 Pelaku Usaha/ Kegiatan	2 Pelaku Usaha/ Kegiatan	3 Pelaku Usaha/ Kegiatan	2 Pelaku Usaha/ Kegiatan	3 Pelaku Usaha/ Kegiatan	3 pelaku usaha/kegiatan	3 pelaku usaha/kegiatan
11.6	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	-	-	1 Kelompok	-	1 Kelompok	-	1 kelompok	-
11.7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat	-	-	100%	-	100 %	-	100 %	-

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
11.8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 penghargaan	2 Penghargaan
11.9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
11.10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40% dari 1.169.559,81 timbulan sampah	69,97% dari 1,054,441,75 timbulan sampah	45%	67,98%	45 %	67,98%	60 %	61,81%
12.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
12.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
12.2	Pemanfaatan data kependudukan	N/A	N/A	80%	80%	80 %	80 %	80 %	60%
12.3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	N/A	N/A	97,5%	94,10%	97,5 %	94,10%	98,5 %	94,96%
12.4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	N/A	N/A	70%	100%	70 %	100 %	75 %	99,01%
13.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	N/A	N/A	64%	63,79.%	64 %	63,79%	68 %	60%
13.2	Prentase peningkatan status desa mandiri	N/A	N/A	14.43%	20,35%	14.43%	20,35%	21,43 %	5,7%
13.3	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	N/A	N/A	13,27%	13,27%	19,90%	20,17%	26,54 %	27,93%
13.4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	N/A	N/A	100%	66,66%	100 %	100%	100 %	100%
13.5	Persentase Pelaksanaan Program	N/A	N/A	100%	83,33%	100 %	100%	100 %	100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	Administrasi Pemerintahan Desa								
13.6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	N/A	N/A	100%	60%	100 %	100%	100 %	100%
14.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
14.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25	2,36	2,25	2,07	2,24	2,10	2,23	2,06
14.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern *(modern contraceptive prevalencerate/mCPR)*	70%	70%	62,5%	59,35%	62,5 %	59,35%	67 %	61,8%
14.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	N/A	N/A	8,76%	28,35%	8,76 %	28,35%	8,45 %	12,3%
14.4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%	37%	30%	34,2%	30 %	39,6%	29,80%	38,8%
14.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	N/A	52,8	N/A	57,0	N/A	62,6	61	62,7
15.	**PERHUBUNGAN**								
15.1	Rasio konektivitas provinsi	0,410	0,410	0.420	0.420	0.420	0.420	0,470	0,504
15.2	V/C ratio di jalan provinsi	N/A	N/A	0.7	0.7	0.7	0.7	0,6	0,7
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	N/A	N/A	-	-	1 pelabuhan	-	1 pelabuhan	-

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
15.4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	N/A	12.100	13.100	14.200	13.500	15.100	13.500	16.000
15.5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	N/A	0	3	-	3	-	3	3
16.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
16.1	Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	N/A	50%	100%	50 %	100 %	100 %	100 %
16.2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	N/A	100%	88%	100 %	88 %	100 %	100 %
16.3	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	N/A	N/A	95%	100%	95 %	100 %	100 %	100 %
16.4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
17.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
17.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.766 unit	3.779 unit	3.803 unit	3.779 Unit (0,5%)	3.803 unit	3779 Unit (0,5%)	3.879 unit	3.879 unit (0,5%)
17.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2%	2%	2%	2%	2 %	2 %	2 %	2%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
18.	**PENANAMAN MODAL**								
18.1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	0%	0%	10,00%	10,13%	10,00%	10,13%	12,00%	-30,92%*
18.2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	2 MOU/ Kerjasama	1 MOU/ Kerjasama	2 MOU/ Kerjasama	1 MOU/ Kerjasama	2 MOU/ Kerjasama	1 MOU/ Kerjasama	4 MOU/Kerjasama	3 MOU/Kerjasama
18.3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	85%	100%	85%	100%	85 %	100 %	90 %	100%
18.4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	70%	106%	70%	106%	70 %	106 %	80 %	150%
18.5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
19.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	0,55%	0,50%	0,65%	0,65%	0,75 %	3,52%
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A	6,69%	6,69%	6,79%	6,79%	6,89 %	14,09%
19.3	Peningkatan prestasi olah raga	10 Nasional internasional	7 Nasional; 1 Internasional	6 Prestasi	8 Prestasi	6 Prestasi	26 Prestasi	6 prestasi	107 prestasi
20.	**STATISTIK**								
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
21.	**PERSANDIAN**								
21.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	N/A	N/A	95%	57,2%	95 %	57,2 %	95 %	100 %
22.	**KEBUDAYAAN**								
22.1	Terlestarikannya cagar budaya	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
22.2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	N/A	N/A	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,021 %	0,020%
22.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	N/A	N/A	9%	8,7%	9 %	8,7 %	10 %	9,5%
22.4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	N/A	N/A	19 Unit	1 Unit	24 Unit	26 Unit	29 unit	32 unit
22.5	Standar pengelolaan Museum Negeri	N/A	N/A	B	B	B	B	Standar “A”	Standar “B”
23.	**PERPUSTAKAAN**								
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	N/A	N/A	61	58,83	61	61,83	61,7	68,44
23.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	N/A	N/A	8,13	66,07	8,80	70,91	9,00	62,54
24.	**KEARSIPAN**								

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	N/A	N/A	17,86	50,38	17,86	50,38	19,81	38,35
24.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	N/A	N/A	215	0	215	0	247	0
	URUSAN PILIHAN								
25.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
25.1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	164.251,94 hektar	224.283.37 hektar	190.776.81 hektar	224.283.37 hektar	190.776.81 hektar	224.283.37 hektar	234.886,92 hektar	239.337,79 hektar
25.2	Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen
25.3	Produksi Perikanan Tangkap	405.422 ton	344.426,77 ton	410.000 ton	360.421 ton	410.000 ton	366.133 ton	412.431 ton	368.057 ton
25.4	Produksi Perikanan Budidaya	575.000 ton	402.311,85 ton	561.185 ton	379.420 ton	561.185 ton	493.246 ton	595.361 ton	599.491 ton
25.5	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	61,50	62,67	67,00	67,75	67,00	67,75	69,19	74,87
25.6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus	2 Kasus	3 kasus	2 Kasus	3 kasus	2 Kasus	3 kasus	3 Kasus
25.7	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan	95,00%	96,00%	96,00%	96,03%	96%	96,03%	97,00%	97,00%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	perundangan yang berlaku								
26.	**PARIWISATA**								
26.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%	122,38%	166%	188%	166%	188%	100%	524%
26.2	Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	100%	100%	666%	402%	100%	402 %	100 %	118%
26.3	Tingkat hunian akomodasi	10%	15%	15%	42,33%	15 %	42,33%	25 %	47,6%
26.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1%	1,30%	2%	3%	3%	3,4%	3,30 %	3,5%
26.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1.500.000 Wisnus dan 150.000 Wisman	447.020 wisnus dan 23.031 wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	603.370 Wisnus dan 28.316 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	603.370 Wisnus dan 28.316 Wisman	1.000.000 wisnus dan 25.000 wisman	1.179.028 Wisnus dan 131.114 wisman
26.6	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi	25%	25%	25%	28,1%	25 %	28,1 %	30%	30%
27.	**PERTANIAN**								
27.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,86%	13,25%	0,86%	13,25%	0,86 %	13,25%	0,89 %	6,50%
27.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%	9,88%	2,00%	9,88%	2,00%	9,88 %	2,00%	0%
27.3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2%	20,73%	2,00%	20,73%	2,00%	20,73%	2,00%	5,50%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
27.4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	4,5%	5,50%	5,50%	5,77%	5,50%	5,77%	7,50%	7,80%
27.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	93%	97,80%	97,00%	97,80%	97,00%	97,80%	97,00%	97,00%
27.6	Cakupan bina kelompok Petani	0,15%	0,15%	0,15 %	0,15%	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20%
27.7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	4,80%	4,85%	5,00%	4,85%	5,00%	4,85%	5,70%	4,91%
27.8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1.059 kg/ha	1.026,96 Kg/Ha	1.064 Kg/Ha	1.026,96 Kg/Ha	1.064 Kg/Ha	1.026,96 Kg/Ha	1.075 kg/Ha	1.074,75 Kg/Ha
27.9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	0,5%	2,40%	1%	2,40%	1 %	2,40 %	1 %	4,57%
28.	**KEHUTANAN**								
28.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	19,77%	25,58%	25,58%	69,23%	25,58%	69,23%	37,21 %	35,48 %
28.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	30%	17,64%	29%	17,64%	29%	17,64%	27%	25,23%
28.3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	1,39%	0,84%	0,84%	2%	0,84%	2%	0,84%	3,67%
29.	**ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**								
29.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
29.2	Persentase desa yang teraliri listrik	100%	99%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,46 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
29.3	Rasio elektrifikasi	91%	99%	100%	99,99%	100%	99,99%	100%	99,99%
29.4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	100%	99,98%	100 %	100%	100%	100%	100%	99,99%
29.5	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
29.6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
29.7	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	35%	30%	36,00%	30,00%	36,00%	30,00%	37,00%	31,25%
30.	**PERDAGANGAN**								
30.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1,20%	1,20%	5-6%	3,34%	5-6%	3,34%	6,25%	-4,27%
30.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%	90%	90%	100%	90 %	100 %	90 %	Tidak ada pengaduan konsumen yang diajukan
30.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	90%	90%	95%	100%	95 %	100 %	95 %	100 %
30.4	Tertib usaha	50%	50%	80%	Tidak ada yang mengajukan SIUP MB TBB	80%	Tidak ada yang mengajukan SIUP MB TBB	80%	Tidak ada yang mengajukan SIUP MB TBB
30.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99%	99%	99%	91,45%	99%	91,45%	99%	54%
30.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40%	40%	40%	100%	40 %	100 %	40 %	100%
30.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga	5%	5%	5%	4,18%	5 %	4,18%	5 %	5%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	barang kebutuhan pokok								
31.	**PERINDUSTRIAN**								
31.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1 Industri besar	1 Industri besar	1 Industri besar	Tidak ada penambahan	1 Industri besar	Tidak ada penambahan industri besar	1 industri besar	1 Industri Besar
31.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	100%	100%	Belum ada RPIP	100%	Belum ada RPIP	100 %	79,47 %
31.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Tidak ada ijin baru yang dikeluarkan	100%	Tidak ada ijin baru yang dikeluarkan	100%	Tidak ada ijin baru yang dikeluarkan	100 %	17,27%
31.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Tidak ada ijin baru	100%	Tidak ada ijin baru	100%	Tidak ada ijin baru	100 %	Tidak ada ijin baru
31.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang	100%	Tidak ada ijin yang dikeluarkan	100%	Tidak ada ijin yang dikeluarkan	100%	Tidak ada ijin yang dikeluarkan	100 %	Tidak ada ijin yang dikeluarkan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	dikeluarkan oleh instansi terkait								
31.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	60% (Buku Profil Industri)	100%	60% (Buku Profil Industri)	100 %	60 % (Buku Profil Industri)	100 %	125%
32.	**TRANSMINGRASI**								
32.1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	N/A	N/A	20%	20%	20 %	20 %	60 %	40 %
32.2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	N/A	N/A	60%	69%	60 %	69 %	80 %	70 %
32.3	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	N/A	N/A	0 KK	0 KK	0 KK	0 KK	100 KK	0 kk
32.4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	0 Dokumen
32.5	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
33.	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**								
33.1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan	N/A	N/A	0,18	0,01	0,18	0,01	0,18	0,14
33.2	Rasio PAD	N/A	N/A	0,015	0,016	0,015	0,016	0,013	0,061
33.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	N/A	N/A	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9	0,6
33.4	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
33.5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	75,00%	86,51%	75,00%	93,34%	75,00%	98,11%
33.6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	90%	96%	100%	98,52%	100 %	98,52%	95-100%	97,04%
34.	**PENGAWASAN**								
34.1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
34.2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	N/A	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3
34.3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
35.	**PENGADAAN**								
35.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	N/A	N/A	≤0,8%	0%	≤ 0,8%	0 %	≤ 0,8%	0%
35.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif	N/A	N/A	100%	34,37%	100 %	34,37%	50 %	94,04 %
35.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	N/A	N/A	95%	48,80%	95 %	48,80%	60 %	20 %
36.	**KEPEGAWAIAN**								
36.1	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	5,30%	7,41%	5,40%	9,40%	5,50%	0,76%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
36.2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	0,08%	0,16%	0,09%	0,16%	0,10%	0,15%
36.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	11,7%	6,96%	11,75%	7,46%	11,80%	0,72%
36.4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	N/A	N/A	75%	75%	80%	80%	85%	85%
37.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
37.1	Persentase ASN yang Berkompetensi	N/A	N/A	30%	31,99%	30 %	31,99%	60 %	53,21%
38.	**MANAJEMEN KEUANGAN**								
38.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	N/A	N/A	-0,12%	0,01%	-0,12%	0,01%	-0,12%	-0,6%
38.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	N/A	N/A	-0.03	-0,02	-0.03	-0,02	-0,03	-0,07
38.3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
38.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya	N/A	N/A	0,040	0,055	0,040	0,055	0,040	0,20
39.	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**								
39.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	N/A	N/A	100%	-	100 %	-	100 %	100 %

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
39.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
39.3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%
39.4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	N/A	N/A	40%	45%	45%	47,36%	50 %	59,21%
39.5	Persentase pelayanan penghubung	N/A	N/A	100%	96%	100 %	100%	100 %	100%
39.6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	93,65
39.7	Indeks Reformasi Birokrasi	57,48	60,04	59,95	64,89	61	56,78	62,5	73,38
39.8	Nilai LPPD	N/A	N/A	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	-
39.9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	77,56%	100 %	77,56%	100 %	77,16
39.10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
39.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	-	100 %	-	100 %	100 %
39.12	Persentase pelaksanaan program	N/A	N/A	100%	95%	100 %	95 %	95 %	95%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	kebijakan administrasi pembangunan								

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pereturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kewenangan provinsi yaitu:

A. Pendidikan terdiri atas:
   - Pendidikan menengah dan
   - Pendidikan dasar

B. Kesehatan terdiri atas:
   - Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
   - Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

C. Pekerjaan Umum terdiri atas:
   - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
   - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

D. Perumahan Rakyat terdiri atas:
   - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
   - Fasilitasi penyediaan rrmah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat terdiri atas:
   - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

F. Sosial terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Laporan penerapan SPM disampaikan Gubernur secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi SPM Kemendagri dalam **https://spm.bangda.kemendagri.go.id/**, dengan rata-rata Tingkat keterisian terhadap 6 bidang urusan SPM dengan kategori Tingkat capaian sebagai berikut:

Tabel 2.91

Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat Capaian

NO	KATEGORI	NILAI	WARNA
1	TUNTAS PARIPURNA	100	
2	TUNTAS UTAMA	90-99	
3	TUNTAS MADYA	80-89	
4	TUNTAS PRATAMA	70-79	
5	TUNTAS MUDA	60-69	
6	BELUM TUNTAS	< 60	
7	ADA SALAH SATU BIDANG CAPAIAN 0%	HITAM	

Tabel 2.92
Rekapitulasi Kinerja Capaian SPM se-Sulut Tahun 2023-2024

NO.	DAERAH	2023 (%)		2024 (%)	
		CAPAIAN (%)	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	PERINGKAT
1	KOTA BITUNG	82,86	1	93,68	5
2	PROVINSI SULAWESI UTARA	78,38	2	95,95	2
3	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	76,60	3	80,67	11
4	KAB. BOLAANG MONGONDOW	75,84	4	82,84	10
5	KOTA KOTAMOBAGU	75,07	5	74,68	13
6	KOTA MANADO	74,58	6	92,65	6
7	KAB. KEPL. SANGIHE	74,48	7	91,05	8
8	KAB. KEPL. TALAUD	72,84	8	66,61	15
9	KAB. KEPL. SITARO	72,25	9	55,31	16
10	KAB. MINAHASA UTARA	71,28	10	87,78	9
11	KAB. MINAHASA TENGGARA	71,21	11	97,85	1
12	KOTA TOMOHON	69,45	12	96,69	3
13	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	68,72	13	94,77	4
14	KAB. MINAHASA	62,23	14	92,52	7
15	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	61,33	15	70,43	14
16	KAB. MINAHASA SELATAN	61,01	16	78,69	12

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan data diatas dapat capaian Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 pada angka 78,38%, itu berarti masuk pada kategori tuntas pratama, tahun 2024 pada angka 95,95% itu berarti masuk pada kategori tuntas utama.

Tabel 2.93
Persentase Realisasi Capaian Spm Per Bidang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2024

No.	Bidang Urusan	2023	2024
1	PENDIDIKAN	86,6%	86.3%
2	KESEHATAN	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM	100%	99.9%
4	PERUMAHAN RAKYAT	100%	99.3%
5	SOSIAL	94,3%	93,61%

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id tahun 2023

Untuk persentase capaian SPM per bidang untuk bidang Pendidikan yang perlu didorong karena capaian hanya 86,3% dan bidang sosial pada angka 93,61% pada tahun 2024.

Startegi peningkatan penerapan SPM perlu dilakukan sehingga capaiak kinerja SPM Provinsi Sulawesi Utara dapat mencapai tuntas paripurna antara lain:

- Memastikan kesiapan anggaran.
- Memahami antara jenis penerima dan mutu layanan, Dimana penerima 80% dan mutu 20%.
- Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 tahun dan berdasarkan hasil tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri 59/2021.
- Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM dengan melalukan koordinasi secara berkala.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM Provinsi maupun Kab/Kota.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan efektif. Kerja sama daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan melalui sinergi antar daerah. Dalam konteks RPJMD, kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta mengatasi tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu daerah saja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban daerah dalam membangun kerja sama serta PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang memberikan panduan mengenai mekanisme dan bentuk kerja sama. Kerja Sama Daerah

adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Bentuk Kerja Sama Daerah antara lain Kerja Sama Antardaerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Pusat. Berikut Kerjasama daerah pemerintah provinsi Sulawesi Utara:

1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)

Tabel 2.94
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (*MASIH BERJALAN/ TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN*)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon	Sukarela	94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai Sekarang	Optimalisasi Pajak Daerah	Nomor : 120.23/110/KSB/2024 Nomor : 08/KSB.TMHN/VIII-2024	9 Agustus 2024	5 Tahun	Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Nomor : 120.23/102/PKS/2024 Nomor : 07/PKS-TMHN/VII/ 2024	19 Juli 2024	5 Tahun	Sukarela	Masih Berjalan	meningkatkan mengordinasikan dan menyinergikan Para Pihak dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.	Para Pihak
2	Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Sukarela	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai Sekarang	Optimalisasi Pajak Daerah	Nomor : 120.23/109/KSB/2024 Nomor : 07/KB/KAB. SAINGIHE/VIII/2024	9 Agustus 2024	5 tahun	Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Nomor: 120.23/99/PKS/2024 Nomor: 900.1.13/39/PKS/1101/KAB.SANGIHE/VII/2024	19 Juli 2024	5 tahun	Sukarela	Masih berjalan	meningkatkan mengordinasikan dan menyinergikan Para Pihak dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.	Para pihak

3.	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Sukarela	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai sekarang					Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	Nomor : 120.23/97/PKS/2024 Nomor : 11/SETDAK O/PKS/BAP PENDA/03/VII/2024	19-07-2024	5 Tahun	Sukarela	Masih Berjalan	mendukung optimalisasi pajak daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan public di daerah dan meningkatkan, mengoordinasikan dan menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan Pajak Daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.	Para pihak

2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

Tabel 2.95
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG								URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAP AN PKS	JANGKA WAKTU PKS				
1	Provinsi Sulawesi Utara	Institut Agama Islam negeri Manado	94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai sekarang	Pelaksanaan TRI DHARMA Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Nomor : 120.23/93/ KSB/2024 Nomor: B.1338/in.25/HM.01/06/2024	07 Juni 2024	5 Tahun					Pendidikan	Masih berjalan	Mendukung peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, mensinergikan Sumber Daya dan kompetensi yang di miliki oleh para pihak guna membangun Sumber Daya Manusia unggul di bidangnya.	Para pihak
2.	Provinsi Sulawesi Utara	Institut Agama Islam Manado	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai sekarang					Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Nomor : 120.23/113/PKS/2024 Nomor : B212/In.25/V.1/PP.00.9/08/2024	26 Agustus 2024	5 Tahun	Hukum dan HAM	Masih Berjalan	mewujudkan lingkungan kehidupan dan lingkungan kerja yang menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dan anak.	Para Pihak
3	Provinsi Sulawesi Utara	PT. Indonesia Nippon Anugrah (INA)	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai sekarang	Peningkatan Kapasitas dan Penyerapan Lulusan SMK dan Sederajat Lainnya di Sulawesi Utara.	Nomor : 120.23/108.1/KSB/2024 Nomor: 137/PKS/IN A/VII-2024	31 Agustus 2024	5 Tahun					Urusan Wajib	Masih berjalan	mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas lulusan SMK sederajat di Provinsi Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Jepang	Para Pihak

4	Provinsi Sulawesi Utara	Yayasan Tsunagu Japan Indonesia	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai Sekarang					Peningkatan Kapasitas dan Penyerapan Lulusan SMA/SMK dan Sederajat Lainnya di Sulawesi Utara	Nomor : 120.23/107/PKS/2024 Nomor : 059/TSUNA GU-KS/2024	23 Agustus 2024	5 Tahun	Wajib	Masih berjalan	mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas lulusan SMA/SMK sederajat di Provinsi Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Jepang.	Para Pihak
5	Provinsi Sulawesi Utara	Politeknik Keuangan Negara STAN	No. 94 Tahun 2021	23 Februari 2021	Sampai Sekarang	Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara	Nomor: 120.23/92/KSB/2024 Nomor : NK-28/PKN/2024	18 April 2024	5 Tahun					Wajib	Masih berjalan	Mendukung terwujudnya kolaborasi dalam upaya menjalin hubungan kemitraan guna meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara dalam bidang keuangan sebagai upaya percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara	Para Pihak

3. SINERGI

Tabel 2.96
Sinergi

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha	Nomor: 120.23/112/KSB/2024 Nomor : B-13/P.1/Gs/08/2024	20 Agustus 2024	2 Tahun	Sukarela	Masih Berjalan	mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara	Para Pihak

Beberapa tantangan dalam implementasi kerja sama daerah dalam RPJMD meliputi perbedaan prioritas pembangunan, keterbatasan anggaran, dan birokrasi yang kompleks. Solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan koordinasi, penyelarasan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama. Dengan adanya kerja sama daerah dalam RPJMD, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi Masyarakat.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kewilayahan untuk pemerataan pembangunan dan keseimbangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, maka dalam RPJMN 2025-2029 telah disebutkan bahwa pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk medukung upaya keberlanjutan. Selanjutnya, pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan pembangunan kewilayahan tahun 2025-2029, maka dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 turut berkontribusi pada tujuan pembangunan kewilayahan wilayah Sulawesi yang telah ditetapkan dalam RPJMN yaitu penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis SDA, melalui pendekatan/strategi pembangunan pusat pertumbuhan dan pengembangan industri berbasis SDA. Hal ini mendukung upaya RPJMN dalam memperkuat ekosistem

percepatan pembangunan daerah. Fokus pada keberlanjutan dalam visi Sulawesi Utara juga mencerminkan komitmen terhadap penjagaan kawasan konservasi dan perhatian terhadap aspek rawan bencana, yang merupakan bagian integral dari upaya RPJMN untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, RPJMD Sulawesi Utara secara komprehensif mendukung arahan kebijakan kewilayahan per Provinsi yang tidak terpisahkan dari RPJMN 2025-2029, serta visi besar Asta Cita.

Rencana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang tepat sasaran. Pembangunan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk membuka peluang ekonomi baru dan memberikan dampak sosial yang positif di tingkat kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan jangka panjang dan menengah yang telah ditetapkan melalui dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat daerah. Dalam konteks APBN, proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai biasanya mencakup

program strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan. Sementara itu, APBD provinsi lebih sering diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah, seperti perbaikan jalan lokal, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan.

Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi ketimpangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi serta pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

A. Meningkatkan Konektivitas

Peningkatan konektivitas adalah upaya untuk memperbaiki dan memperluas jaringan transportasi, komunikasi, dan aksesibilitas antarwilayah. Tujuan utama dari peningkatan konektivitas ini adalah untuk memastikan bahwa orang, barang, layanan, dan informasi dapat bergerak dengan lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Pada awalnya, peningkatan konektivitas diasosiasikan dengan pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik yang memadai memungkinkan mobilitas yang lebih cepat dan efisien, baik untuk manusia maupun logistik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan konektivitas juga mencakup ketersediaan akses komunikasi digital, yang meliputi keberadaan jaringan telekomunikasi dan informasi, termasuk jaringan internet. Dengan infrastruktur digital yang memadai, masyarakat di pelosok daerah dapat lebih mudah mengakses informasi, layanan pendidikan, dan peluang ekonomi digital, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi.

B. Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua wilayah dalam menerima pelayanan dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana dan prasarana dasar serta jaringan telekomunikasi menjadikan wilayah-wilayah yang terisolir dapat lebih terhubung kepada pusat-pusat ekonomi dan layanan utama.

C. Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur adalah tulang punggung yang mendukung aktivitas ekonomi, dan efisiensi. Dengan menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, dan akses internet, pembangunan infrastruktur menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi yang lebih produktif

Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis seperti industri, perkonektivitas dagangan, dan pariwisata, termasuk sektor yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

D. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Keberadaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum/fasilitas pelayanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, fasilitas air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, listrik dan tempat kerja dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk masyarakat di pelosok daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sumber pendanaan utama berasal dari APBN dan APBD. APBN menyediakan alokasi anggaran melalui berbagai kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta melalui dana transfer ke daerah. Sementara itu, APBD dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain sumber dana pemerintah, skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga dapat digunakan untuk mempercepat realisasi proyek. Dalam skema ini, pihak swasta berperan dalam pendanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, sementara pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan. Namun untuk implementasinya, diperlukan pembahasan khusus untuk memastikan kelayakan proyek yang akan dibiayai oleh skema KPBU.

Jenis Proyek Infrastruktur yang Akan Dibiayai

Proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh APBN yang tercantum dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97
Jenis Proyek yang akan dibiayai oleh APBN

No.	Lokasi Prioritas	Nama Proyek
1.	Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang: • Kota Manado • Kota Bitung • Kota Tomohon • Kab. Minahasa Utara • Kab. Minahasa	• Pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang, • Preservasi jalan ruas Airmadidi-Bts. Kota Tondano. • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota dan Regional, • Pembangunan fasititas Pelabuhan P. Bangka- Kahuku • Pengembangan Politeknik Negeri Manado • Pengendali banjir di sungai inlet Datlau Tondano, • Penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR

No.	Lokasi Prioritas	Nama Proyek
2.	Wilayah Metropolitan Manado: ● Kota Manado ● Kota Bitung ● Kota Tomohon ● Kab. Minahasa Utara ● Kab. Minahasa	● Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan hijau yang berkelanjutan, melalui Pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi Transit Oriented Development (TOD), Pembangunan Jalan Perkotaan dan Jalan Lingkar *Manado Outer Ring-Road* (MORR); ● Penanganan Banjir Periode Kala Ulang 25 – 50 Tahunan; ● Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ● Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Swadaya di perkotaan terpadu dengan PSU Perumahan; ● Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama bagi MBR, Generasi Milenial dan Generasi Z; ● Peremajaan dan Pemugaran permukiman kumuh; ● Pembangunan infrastruktur jaringan Transmisi dan distribusi tenaga listrik; ● Pengembangan SPAM Regional Bimatara; ● Bendungan Kuwil Kawangkoan; ● Bendungan Sawangan; ● TPA Regional Manitarang, dan ● PLTSa Kota Manado
3.	Kawasan Perkotaan Sedang: ● Kota Manado ● Kota Bitung	● Bantuan PSU perumahan; ● Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; ● Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama bagi MBR, Generasi Milenial dan Generasi Z; ● Peremajaan dan Pemugaran permukiman kumuh; ● Pengembangan sanitasi; ● Pembangunan dan peningkatan SPAM; ● Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota dan permukiman; ● Sistem Pengelolaan persampahan skala kota; ● Peningkatan layanan konektivitas transportasi, ● Penguatan instrumen peringatan dini bencana.
4.	Kawasan Perikanan Tangkap Bitung: ● Kota Bitung	● Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungsn (*Eco Fishing Fort*) ● Penyiapan sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat penangkapan ikan dan kendaraan pemasaran ikan.
5.	Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya: ● Kab. Bolmong Utara ● Kab. Bolaang Mongondow ● Kab. Minahasa Selatan ● Kota Kotamobagu ● Kota Tomohon	● Rekomendasi perlindungan LP2B; ● Pengendalian alih fungsi lahan pertanian; ● *Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment;* ● Pembangunan Bendungan Lolak.
6.	Kawasan Perdesaan Prioritas: ● KPP Mapalus, Kab. Minahasa	● Pemenuhan akses layanan Kesehatan; ● Pembangunan sarana pelayanan dasar; ● Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; ● Pembangunan jaringan distribusi; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman; ● Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ● Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan; ● pengembangan OM BTS 4G/*Lastmile* dan akses internet
7.	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas: ● PKSN Tahuna (Kec. Kendahe); ● PKSN Melonguane (Kec. Damau, Kec. Pulutan dan Kec. Nanusa); ● Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Kepl. Sitaro (Kec. Siau Barat dan kec. Siau Barat Utara); ● Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Utara (Kec. Likupang Barat dan Kec. Wori)	● Pembangunan Sarana Permukiman, ketenagalistrikan dan energi; ● Pembangunan sarana pendidikan; ● Penyediaan pelayanan kesehatan; ● Penyediaan layanan konektivitas.

No.	Lokasi Prioritas	Nama Proyek
	● Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Selatan (Kec. Tatapaan, Kec. Tenga dan Kec. Sinonsayang) ● Kec. Perbatasan Prioritas Bolaang Mongondow (Kec. Bolaang Timur) ● Kec. Perbatasan Prioritas Bolaang Mongondow Utara (Kec. Bolangitang Barat dan Kec. Pinogaluman).	
8.	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara: ● Kota Kotamobagu	● Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan *accelerograph* melalui lndonesia *Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP), perapatan stasiun lndoncsia Continously Operating Referencee Station (lna-CORS), Peta Ccologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bcncana Gcologi. ● Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik, dengan output; rekomendasi ketahanan bengunan, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana; ● Rehabilitasi den rekonstruksi pascabencana, dengan oulput layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungen di daerah Pascabencana
9.	Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui: ● Peningkatan layanan konektivitas udara melalui bandara di pulau kecil terluar di kab. Kepl. Sangihe dan Talaud; ● Peningkatan layanan konektivitas laut dan integrasi hinterland dengan simpul utama, dengan output pelabuhan perikanan utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, serta pelabuhan lainnya di pulau terluar yang berwawasan lingkungan; ● Pembangunan Jalan Strategis-Jalan Manado Ouler Riagrood III, Pembangunan Jalan Trans pada l8 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, pengembangan pelabuhan, *Replacement* Fasiitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026), *Replacement* Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan
10.	Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan akses rumah layak huni dan pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, Melalui: ● Peningkatan akses rumah layak huni skala kota secara inklusif dan terpadu, serta penanganan permukiman kumuh, dengan output pemugaran dan peremajaan kumuh, serta permukiman Kembali permukiman kumuh, pcnycdiaan rutlah murah bersanitasi baik bagi yang msmbutuhkan, terutama malyaralat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan nrmah lihusus reguler, Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), bantuan pembangunan rumah swadaya, KPM yarg memperoleh bantuan rehabilitasi rumah, bentuan PSU bidang perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan, fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, dan pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan; ● Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi hulu ke hilir, dengan output: pembangunan SPAM Regional ● Reformasi tata kelola pcrsarnpahal, dcngan output; teknologi *Waste-to-energy* (WtE) dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, Pembangunan fasilitas pengolahan sempah bcrbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), fasilitas pengolahan sampah di wilayah pesisir, *project* skema insentif, Sistem Informasi Pengelolaan Sempah Nasional (SIPSN), dan bantuan PSU bidanS perumahan ● Pemenuhan akses sanitasi aman, dengan output; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

No.	Lokasi Prioritas	Nama Proyek
		dan Setempat Skala Kota, serta bantuan PSU bidang perumahan; • Perluasan akses dan interkoneksi layanan listrik terisolasi (*isolated grid*), dengan output: Pembangunan Pembangkit listrik. jaringan dar gardu induk, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T, dan peningkatan pasoksn tenaga listrik 24 jam/hari; • Pemerataan Jaringan telekomunikasi, internet cepat, dan adopsi digital ke seluruh wilayah serta adopsi digital di berbagai layanar publik, dengan output penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM BTS 4G/ lastmile, OM akses internet, layanan publik bidang telekomunikasi, fasilitasi literasi digital, portal layanan administrasi, pendampingan *smart city*, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian, perikanan, dan logistik, fasilitasi digital *technopreneur* pengendalian PSE, akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta fasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama
11.	Provinsi Sulawesi Utara	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap dunia usaha dan dunia industri, melalui: • Pengembangan sarana, prasarana, perluasan akses pendidikan menengah, tinggi dan vokasi sektor strategis, pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art and Math* (STEAM), peningkatan daya saing riset dan inovasi di berbagai bidang, dengan output: revitalisasi sarana dan prasarana pada seluruh jenjang Pendidikan termasuk sekolah, madrasah, Politeknik Pariwisata Manado dan Nusa Utara, bangunan pendidikan vokasi dan pendidikan titggi industri yang ditingkatkan kapasitasnya, Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta progam studi dengan inovasi pembelajaran digital dan berkualitas.
12.	Provinsi Sulawesi Utara	Peningkaten ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil terluar, dengan oulput: pembangunan Pengaman pantai daerah pesisir dan pulau terluar, pengendalian banjir wilayah Metropolitan Manado, peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan accelerograph melalui IDRIP, penyusunan peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi, dan dokumen harmonisasi Perpres RDTR KPN

Untuk mendukung prioritas pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang termuat dalam RPJMN 2025 - 2029 sebagaimana dijelaskan di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah:

1. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Manado - Likupang.

- Percepatan Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Bandara Sam Ratulang menuju Likupang
- Percepatan penyelesaian pembangunan jalan akses menuju KEK Likupang
- Mendorong pemenuhan *Readiness Criteria* dalam kebutuhan pembangunan infrastruktur mendukung DPP Manado - Likupang.
- Mendorong integrasi antarmoda dalam mendukung konektivitas menuju lokasi pariwisata.
- Mendorong pengembangan aspek akomodasi dan hospitality.
- Mendorong diversifikasi dan inovasi dalam pemasaran pariwisata, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
- Mendorong penyediaan fasilitas umum yang memadai seperti toilet, tempat parkir dan lain-lain.
- Pemberian insentif bagi pelaku wisata, khususnya wisata berbasis komunitas lokal untuk lebih memajukan pariwisata lokal.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan kursus, termasuk penyediaan institusi pendidikan pendukung, termasuk pendidikan bahasa asing dan hospitality.
- Mendorong implementasi *blue, green* dan *circular economy* melalui pengembangan wisata atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), termasuk wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention* dan *Exhibition*).
- Mendorong pemanfaatan IT dalam promosi dan pemasaran pariwisata, mendukung lahirnya *startup* bidang pariwisata serta pemasaran berbasis

komunitas dan segmen spesifik (wisata minat khusus).

2. Wilayah Metropolitan Manado
   - Mendorong integrasi perencanaan pembangunan melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait melalui pendekatan *multi level governance*.
   - Mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, drainase dan perumahan melalui penyediaan lahan, pemenuhan *readiness criteria*, dokumen lingkungan serta perizinan yang diperlukan.
   - Mendorong integrasi transportasi antarmoda dalam Wilayah Metropolitan Manado.
   - Mendorong pengelolaan sampah terpadu melalui pemanfaatan TPA Regional Mamitarang.
   - Mendorong penyediaan kebutuhan dasar seperti air minum melalui pembangunan SPAM Regional Bimatara.
   - Menyusun dokumen perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Kawasan untuk mengakomodir kebutuhan layanan air limbah domestik pada Waialah Metropolitan Manado.
   - Mendorong ketersediaan energi melalui pembangunan sumber energi ramah lingkungan.
3. Kawasan Perkotaan Sedang (Kota Manado dan Kota Bitung)
   - Mendorong pengentasan kawasan kumuh perkotaan.
   - Mendorong pemenuhan *Readiness Criteria* dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti air minum,

air limbah domestik, pengelolaan sampah serta perumahan.

- Mendorong ketahanan energi melalui pembangunan dan pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan.
- Mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana.

4. Kawasan Perikanan Tangkap Bitung
   - Memfasilitasi penyediaan kebijakan daerah yang mendukung implementasi *Penangkapan Ikan Terukur (PIT)* dan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan.
   - Memfasilitasi pengembangan kawasan perikanan tangkap dalam dokumen perencanaan daerah dan RTRW.
   - Mendorong perluasan pasar serta memfasilitasi pengembangan kapasitas koperasi dalam pemasaran produk perikanan, termasuk dalam kegiatan-kegiatan temu bisnis di dalam dan luar negeri.
   - Mendorong investasi strategis, khususnya dalam komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol).
5. Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya
   - Mendorong penguatan akses pasar produk pertanian melalui koordinasi dan fasilitasi pemberian sertifikasi dan pengembangan mutu produk.
   - Mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
   - Mendorong inovasi dan adaptasi teknologi pertanian.
   - Mendorong implementasi praktik pertanian yang ramah lingkungan.

- Mendorong penyediaan bibit unggul untuk pertanian dan peternakan.
- Mendorong peningkatan kapasitas koperasi dalam meningkatkan produksi dan mutu produk-produk pertanian dan peternakan.

6. Kawasan Perdesaan Prioritas
   - Mendorong pemerintah kabupaten dalam penyediaan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar).
   - Mendorong penyediaan konektivitas melalui peningkatan jalan provinsi yang melintasi lokasi tersebut.
   - Mendorong penyediaan jaringan internet di kawasan tersebut.
   - Mendorong pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan objek wisata, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, fasilitasi BUMDes dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan.
   - Mendorong pelestarian budaya lokal.
   - Mendorong pengembangan desa cerdas, pengembangan Akademi Desa 4.0, serta penerapan layanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan berbasis digital.
7. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas.
   - Fasilitasi Pemenuhan layanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar)
   - Mendorong Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan
8. Kawasan Rawan Bencana Gempabumi
   - Mendorong Pengelolaan Ancaman Multibencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam

melalui penyediaan peralatan monitoring oleh Pusat.

- Mendorong peningkatan keandalan infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota melalui pemberian rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencana.

9. Lainnya
    - Mendorong percepatan peningkatan layanan konektivitas udara pada bandara di kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.
    - Mendorong penyediaan layanan konektivitas laut dengan mengintegrasikan pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama.
    - Mendorong penguatan infrastruktur penunjang logistik melalui peningkatan kualitas jalan provinsi yang terhubung dengan jalan nasional dan jalur logistik utama.
    - Memfasilitasi peningkatan akses terhadap Rumah Layak Huni di seluruh kabupaten/kota.
    - Mendorong pengentasan kawsan kumuh perkotaan di seluruh kabupaten/kota.
    - Mendorong percepatan akses air minum layak dan aman oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk pembangunan SPAM Regional oleh Pemerintah Pusat untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
    - Mendorong reformasi tata kelola persampahan, melalui penerapat teknologi *Waste-to-Energy,* pengolah sampah dengan sistem sirkular melalui penyediaan TPS3R dan TPST.
    - Mendorong penyediaan akses sanitasi aman oleh kabupaten/kota.

- Mendorong perluasan akses listrik melalui penyediaan pendataan sambungan baru bagi Rumah Tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di wilayah 3T.
- Mendorong pemerataan akses terhadap telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pcnurunan stunting, dan akses kesehatan reproduksi perempuan di seluruh wilayah kabupaten/kota
- Mendorong upaya pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan di seluruh kabupaten/kota
- Mendorong kabupaten/kota untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat melakukan penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional, utamanya di daerah yang sulit akses.
- Mendorong fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan Sumber Daya Manusia yang siap dunia usaha dan dunia industri melalui upaya revitalisasi sarana dan prasarana di seluruh jenjang pendidikan.
- Penyediaan PBI JKN untuk penguatan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat yang belum memiliki JKN.
- Mendorong peningkatan ketangguhan bencana di seluruh wilayah melalui pembangunan infrastruktur tanggap bencana, penyediaan peralatan monitoring dampak bencana serta

integrasi ke dalam dokumen rencana pembangunan spasial dan a-spasial.

Sedangkan untuk usulan proyek prioritas yang akan dibiayai oleh APBN meliputi:

Tabel 2.98
Usulan Proyek Prioritas yang akan dibiayai oleh APBN

No.	Nama Proyek	Lokasi	Ket.
1	***Transportasi dan Konektivitas***		
A	Pembangunan Bandara Lembeh	Kota Bitung	
B	Pembangunan Jembatan Bitung – Lembeh	Kota Bitung	
C	Pembangunan Jalan Tol Manado – Amurang	Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan	
D	Pembangunan Jembatan Jalan Tololiu – Supit (Pelebaran Ruas Lingkar Manado Ringroad I)	Kota Manado	
F	Pembangunan Simpang Susun Transmart Manado	Kota Manado	
G	Lintas Malalayang – Wenang – Paal Dua – Mapanget (LRT)	Kota Manado	
H	Penyelesaian Jalan Manado *Outer Ring Road* (MORR) III	Kota Manado	
I	Peningkatan Status Jalan Lingkar Pulau Salibabu	Kab. Kepl. Talaud	
J	Program Pengelolaan Perkeretaapian (Penyusunan FS, DED, Amdal, Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan, Pembuatan Izin Lokasi, dan Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan)	Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado dan Kota Bitung	
2	***Air Minum/Sumber Daya Air***		
A	Pembangunan SPAM KEK Likupang	Kab. Minahasa Utara	
B	Pembangunan SPAM Regional BIMATARA	Kab. Minahasa Utara	
C	Pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH)	Kab. Kepl. Talaud, Kab. Kepl. Sangihe, Kab. Kepl. Sitaro	
D	Pembangunan D.I. Lolak Atas	Kab. Bolaang Mongondow	
E	Optimalisasi Bendungan Lolak	Kab. Bolaang Mongondow	
F	Lanjutan Revitalisasi Danau Tondano	Kab. Minahasa	
G	Program Ketangguhan Banjir Perkotaan	Kota Manado	
H	Pembangunan Sistem Air Minum Perpipaan Lolak	Kab. Bolaang Mongondow	
I	Pembangunan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat)	Kab. Kepl. Sitaro	
J	***Sanitasi***		
K	Pembangunan TPST Kab. Bolaang Mongondow Timur	Kab. Boltim	
L	Optimalisasi TPA Regional Mamitarang, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Tempat Pengolahan Limbah B3	Kota Manado, Kab. Minahasa Utara.	
3	***Kesehatan***		
A	Pembangunan Rumah Sakit Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Kab. Bolsel	
4	***Pendidikan***		
A	Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda (Taruna Nusantara)	Kab. Minahasa	
B	Pembangunan Universitas Totabuan Bogani (UTB)	Kab. Bolaang Mongondow	
C	Pembangunan Sekolah Rakyat	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Minahasa dan Kota Manado.	
5	***Kelautan dan perikanan***		
A	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kab. Bolaang Mongondow	

No.	Nama Proyek	Lokasi	Ket.
B	Pembangunan *Cold Storage*	Kab. Kepl. Talaud, Kab. Kepl. Sangihe, Kab. Kepl. Sitaro	
6	***Olahraga dan Kesenian***		
A	Pembangunan Gedung Kesenian	Kota Manado	
B	Pembangunan Fasilitas Olahraga Standar Nasional (PON)	Kota Manado	
C	Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Ambang	Kota Kotamobagu	
7	***Lingkungan Hidup***		
A	Revitalisasi Danau Tondano	Kab. Minahasa	
8	***Pengembangan Kawasan Permukiman***		
9	***Komunikasi Digital***		
A	Pembangunan Sistem		
9	***Energi***		
A	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Wilayah Kepulauan	Kab. Kepl. Talaud, Kab. Kepl. Sangihe, Kab. Kepl. Sitaro	
10	***Pariwisata***		
A	Lanjutan Pembangunan Manado Beach Walk (MBW)	Kota Manado	
11	***Kebencanaan***		
A	Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik (RPJMD)	Kota Kotamobagu	
B	Bangunan Pengaman Pantai Pasar Towo'e	Kab. Kepl. Sangihe	
C	Pembangunan Pengaman Pantai Boroko	Kab. Bolaang Mongondow Utara	

Rencana pembangunan infrastruktur melalui APBN dan APBD provinsi merupakan upaya strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek prioritas ini berupa penyusunan dokumen perencanaan dan studi kelayakan serta komitmen penyediaan lahan untuk pembangunannya. Diharapkan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta, berbagai proyek infrastruktur dapat direalisasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meski tantangan tetap ada, perencanaan yang matang, eksekusi yang efektif, serta pengawasan yang ketat dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, visi besar Indonesia

menuju negara yang maju, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam pasal 304 serta pasal 331 sampai dengan pasal 343 Undang Undang nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. BUMD didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP 54 Tahun 2017, BUMD Perumda tugasnya

lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka optimalisasi BUMD perlu dilakukan karena BUMD dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah. Saat ini dari ketiga BUMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hanya PT. Bank SulutGo (BSG) yang menyetorkan Deviden ke Kas Daerah, sementara BUMD lainnya yakni PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) dan PD. Pembangunan Sulut (PDPS) masih belum bisa menyetor Devidennya.

1. PT. BANK SULUTGO:

   BUMD sektor Jasa Keuangan, dengan hasil capaian kinerja dengan penilaian Sehat. Laporan keuangan menghasilkan laba dan menyetorkan deviden setiap tahunnya sesuai ketentuan. Hasil monitoring dan evaluasi periode Januari - Desember terhadap Kualitas Aset, Rentabilitas, Penghimpunan Dana, Efisiensi, Transaksi, dan Jumlah Nasabah menunjukkan peningkatan. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulut sejumlah Rp. 482 Miliar (36,36%), dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki *share* modal terbanyak (PSP). Sementara Modal Inti per 12 Juli 2024 adalah sejumlah Rp. 1,7 Triliun, dan sedang memenuhi persyaratan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang mewajibkan semua Bank untuk pemenuhan Modal Inti sebesar 3 Triliun.

2. PT. Membangun Sulut Hebat:

BUMD PT. MSH didirikan pada tahun 2017, dengan hasil kinerja dengan penilaian Tidak Sehat/Sakit karena belum memberikan dampak . Sementara Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 27,6 Miliar rupiah. PT. MSH *core business*nya sebagai BUPP (Badan Usaha Pengelola dan Pembangun) KEK Bitung, dimana lahan sebesar 534 Ha, terdapat lahan milik Pemprov Sulut sebesar 92,79 Ha yang telah dilakukan Perjanjian KSP (Kerjasama Pemanfaatan) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT. MSH. Di luar lahan Pemprov Sulut terdapat 14 (Empat Belas) Tenant yang telah menghasilkan investasi sebesar Rp. 1,849 Triliun.

3. PD. PEMBANGUNAN SULUT:

BUMD PD. Pembangunan Sulut didirikan sesuai Peraturan (Perubahan) tentang Pendirian PD. Pembangunan Sulut Nomor 3, tanggal 26 Januari 1981. Adapun kinerjanya Kurang Sehat, maka belum menyetorkan Deviden ke Kas Daerah.

Adapun Bidang Usaha BUMD PD. Pembangunan Sulut meliputi:

- Pengelolaan Perparkiran di 4 (Empat) Lokasi: RSUD ODSK, RSUD Manembo-nembo Bitung, RSUD Noongan, dan TPI Tumumpa;
- Supply Pangan bekerjasama dengan PT. Getsa;
- Penyewaan/pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan;
- Penjualan/Toko Bahan Pokok di Kantor PDPS

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD

Pentingnya peranan perencanaan daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Konsep perencanaan dioperasionalkan dalam dokumen APBD untuk dilaksanakan sebagai upaya mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Pendapatan daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2019-2023 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Secara umum pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:
   a. Pajak daerah
   b. Retribusi daerah
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   d. Lain-lain PAD yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
      1. Dana Perimbangan
      2. Dana Insentif Daerah
      3. Dana Otonomi Khusus
      4. Dana Keistuimewaan dan
      5. Dana Desa

b. Transfer Antar Daerah, terdiri dari:
   1. Pendapatan bagi hasil
   2. Bantuan Keuangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:
   a. Hibah
   b. Dana darurat dan/ atau
   c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang menunjang pendapatan daerah.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan public dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan sebagai berikut :

a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasive dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan

Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;

e) Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;

f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;

g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;

h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan

i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap

APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau.

Meningkatkan pendapatan dalam Proyeksi Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu langkah penting dalam membiayai agenda pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan kontribusi tersebut, masih terdapat ruang yang dapat dikelola dari potensi penerimaan daerah. Sulawesi Utara memiliki berbagai sektor unggulan yang dapat menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah seperti sektor pariwisata dengan peningkatan kunjungan wisatawan, sektor pertambangan melalui penetapan WIlayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memberikan peluang signifikan bagi penerimaan daerah apabila dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam menarik investasi industri, logistik, dan hilirisasi produk potensial sumber daya alam Sulawesi Utara.

Realisasi sumber-sumber Pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.99
Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020
-1	-1	-3
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.125.317.788.014,00**
1.1.1	Pajak Daerah	930.415.146.643,00
1.1.2	Retribusi Daerah	114.784.249.029,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	42.255.754.286,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.862.638.056,00
01.02	**Dana Perimbangan**	**2.519.010.935.519**
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	112.524.194.232
01.02.02	Dana Alokasi Umum	1.335.813.209.000
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	1.070.673.532.287
01.03	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA**	**26.367.899.000,00**
01.04	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**20.302.890.673**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**3.690.999.513.207,59**

sumber : BKAD Prov. Sulut, 2024. (Skema berdasarkan permendagri 13 tahun)

Tabel 2.100
Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.958.016.296.497,31**	**3.726.578.804.936,24**	**3.538.185.274.966,21**	3.653.838.603.399,79
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**1.310.528.740.581,31**	**1.464.716.968.806,24**	**1.460.744.817.777,21**	1.521.049.403.395,79
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	1.075.924.577.041,00	1.214.292.047.871,00	1.186.354.255.171,27	1.236.052.643.376,54
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	113.645.575.018,00	167.323.235.600,41	171.202.529.811,00	182.904.842.879,66
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	51.195.170.272,00	44.268.163.142,00	70.918.058.953,00	71.762.282.545,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	69.763.418.250,31	38.833.522.192,83	32.269.973.841,94	30.229.734.150,59
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.626.382.357.008,00**	**2.198.585.567.740,00**	**2.076.188.476.387,00**	**2.131.577.594.004,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.626.382.357.008,00	2.198.585.567.740,00	2.076.188.476.387,00	2.131.577.594.004,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.572.853.136.008,00	2.153.837.223.740,00	2.042.609.180.387,00	2.120.937.395.004,00
1.2.1.3	*Dana Insentif Daerah*	*53.529.221.000,00*	44.748.344.000,00	33.579.296.000,00	10.640.199.000,00
1.3	***Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	***21.105.198.908,00***	**63.276.268.390,00**	**1.251.980.802,00**	**1.211.606.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	*21.105.198.908,00*	63.276.268.390,00	1.251.980.802,00	**1.211.606.000,00**

sumber : BKAD Prov. Sulut, 2024. (Skema berdasarkan permendagri 77 Tahun 2020)

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 menjadi 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal: 3) Belanja Tidak terduga dan 4) Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.101
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7
02.01	**BELANJA OPERASI**	**2.904.429.743.652,00**	**2.826.577.228.890,00**	**2.427.393.726.253,13**	**2.331.624.377.273,00**	**2.718.227.555.723,00**
02.01.02	Belanja Pegawai	1.190.369.817.805,00	1.210.423.059.765,00	1.206.464.424.497,00	1.204.327.865.998	1.423.903.352.025,00
02.01.03	Belanja Barang dan Jasa	896.791.043.512,00	1.005.883.042.598,00	986.815.436.596,13,00	906.534.798.730,00	853.103.584.447,00
02.01.04	Belanja Bunga	5.786.177.935,00	38.724.931.630,00	31.403.032.027,00	16.194.564.352,00	8.879.864.279,00
02.01.05	Belanja Subsidi	00.00	62.972.000,00	2.777.352.000,00	13.293.237.126,00	4.324.568.033,00
02.01.06	Belanja Hibah	808.012.704.400,00	544.370.987.679,00	197.801.370.773,00	190.226.012.667,00	426.928.841.939,00
02.01.07	Belanja Bantuan Sosial	3.470.000.000,00	27.112.235.218,00	2.132.110.360,00	1.047.898.400,00	1.087.345.000
02.02	**BELANJA MODAL**	**1.090.984.905.420,00**	**1.031.253.909.110,00**	**818.966.382.272,71**	**423.879.478.944,00**	**410.830.760.409,00**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	15.583.396.192,00	26.305.556.987,00	17.747.359.211,00	36.218.106.608,00	19.396.472.650,00
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.816.277.959,00	176.526.848.182,00	229.276.640.869,00	165.792.109.225,00	102.240.316.697,00
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.621.209.966,00	308.290.849.539,00	305.532.993.266,71	110.419.926.917,00	165.608.835.649,00
02.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	461.889.771.303,00	518.991.608.652,00	249.606.932.880,00	90.808.712.427,00	107.516.297.364,00
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.250.000,00	1.139.045.750,00	16.802.456.046,00	20.640.623.767,00	1.157.652.900,00
02.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**216.942.675.596,00**	**6.499.465.833,00**	**4.846.207.705,00**	**371.182.409,00**	**450.377.558,00**
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	216.942.675.596,00	6.499.465.833,00	4.846.207.705,00	371.182.409,00	450.377.558,00
02.04	**BELANJA TRANSFER**	**289.548.383.670,00**	**488.583.320.599,00**	**607.551.786.553,00**	**607.788.176.462,00**	**578.425.561.892,00**
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	289,548,383,670.00	410.302.808.029,00	602.711.808.553,00	602.788.176.462,00	578.425.561.892,00
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	00.00	78.280.512.570,00	4.839.978.000,00	5.000.000.000,00	-
TOTAL JUMLAH BELANJA		**4.501.905.708.338,00**	**4.352.913.924.432,00**	**3.858.758.102.783,84**	**3.358.663.215.088**	**3.707.934.255.582**

Sumber : BKAD Prov. Sulut, 2024. (Skema berdasarkan permendagri 77 tahun 2020)

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Penyerapan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan, terutama program dan kegiatan prioritas, akan lebih efisien, sehingga diharapkan SiLPA cenderung menurun. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah provinsi semakin baik, dan bisa mempertahankan status opini BPK. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok. Setelah itu diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.102
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
-1	-2	-4	-5	-6	-7	
03.01	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**949.155.952.296,38**	**779.591.662.911,97**	**499.358.666.550,28**	**230.389.328.038,68**	**253.119.165.434,89**
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	195.997.699.977,38	138.196.715.987,97	304.137.356.720,28	230.389.328.038,68	**253.119.165.434,89**
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	753.158.252.319,00	641.394.946.924,00	195.221.309.830,00		-
03.02	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**50.000.000,00**	**79.789.898.452,00**	**136.790.040.664,00**	**156.790.040.664,00**	**136.790.020.220,00**
03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	50.000.000,00	160.000.000,00	30.000.000.000,00	50.000.000.000,00	30.000.000.000,00
03.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	79.629.898.452,00	106.790.040.664,00	106.790.040.664,00	106.790.020.220,00
03.02.03	Pembiayaan Neto	-	699.801.764.459,97	362.568.625.886,28	73.599.287.374,68	116.329.145.214,89
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	713932259024,97	304904136525,28	230389328038,68	253121347252,89	62.133.592.588,68

Sumber : BKAD Prov. Sulut, 2024. (Skema berdasarkan permendagri 77 tahun 2020)

Neraca Daerah merupakan potret kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Utara yang tergambar dalam Neraca Daerah menunjukkan keseimbangan antara peluang dan tantangan dalam perumusan kebijakan fiskal. Dari sisi jangka panjang, peningkatan ekuitas yang konsisten serta rasio solvabilitas yang tinggi memperlihatkan bahwa Sulawesi Utara memiliki ketahanan fiskal yang cukup kuat, sehingga adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan fiskal melalui peningkatan belanja modal, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis, dan ekspansi investasi di sektor unggulan. Namun, penurunan rasio likuiditas yang ditunjukkan oleh melemahnya kemampuan aset lancar dalam menutup kewajiban jangka pendek menuntut penerapan kebijakan yang lebih adaptif, seperti efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif serta dapat mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen fleksibilitas fiskal. Skema BTT berfungsi sebagai penyangga adaptif untuk merespons perubahan yang tidak terduga, seperti guncangan ekonomi global, bencana, atau fluktuasi sektor unggulan, tanpa harus mengorbankan konsistensi program strategis.

Neraca Daerah tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.103
Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	354.949.390.069,75	585.425.026.710,43	470.869.822.591,18	429.160.743.701,47	280.730.230.953,34
	B. Investasi Jangka Panjang	575.689.296.645,54	566.720.949.013,68	671.446.632.077,47	784.647.998.183,16	742.315.237.844,75
	C. Aset Tetap	8.297.690.654.969,67	8.783.839.167.273,48	9.233.112.974.773,41	8.175.176.676.713,23	8.147.867.694.453,98
	D. Aset Lainnya	706.882.662.125,16	646.409.046.129,82	669.246.511.779,82	1.560.576.382.703,16	1.470.812.379.261,30
	JUMLAH ASET	**9.935.212.003.810,12**	**10.582.394.189.127,40**	**11.044.675.941.221,88**	**10.949.561.801.301,02**	**10.773.657.425.153,37**
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	424.520.064.104,09	435.059.019.124,10	705.372.061.350,79	695.792.677.206,36	558.757.686.770,91
	B. Kewajiban Jangka Panjang	810.828.693.282,00	1.372.593.741.754,00	1.095.104.176.236,00	803.061.570.988,00	698.730.793.748,05
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.235.348.757.386,09	1.807.652.760.878,10	1.800.476.237.586,79	1.498.854.248.194,36	1.257.488.480.518,96
3	EKUITAS					
	Ekuitas	8.699.863.246.424,03	8.774.741.428.249,30	9.244.199.703.635,09	9.450.707.553.106,66	9.516.249.742.164,41
	Jumlah Ekuitas	8.699.863.246.424,03	8.774.741.428.249,30	9.244.199.703.635,09	9.450.707.553.106,66	9.516.249.742.164,41
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.935.212.003.810,12	10.582.394.189.127,40	11.044.675.941.221,88	10.949.561.801.301,02	10.773.738.222.683,37`

2.2.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi sampai dengan tahun 2030 memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Tahun 2025 berdasarkan rancangan akhir RKPD Perubahan yang sudah mempertimbangkan situasi, kondisi dan regulasi yang berlaku pada 2025.
- Rata-rata realisasi pajak daerah 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 3,88 persen.
- Realisasi pajak daerah 2024 dibanding target pajak daerah 2025 turun sebesar -(94.902.599.685) atau berkurang -(7,65 persen) karena adanya Opsen pajak.
- Rata-rata target pajak daerah RPJMD 2025-2029 kenaikan sebesar 1,3 persen dengan base line target 2025
- Belanja Pegawai diprediksi naik karena pengangkatan PPPK formasi Tahun 2024 yang diangkat Tahun 2025, dan pada Tahun 2026 di anggarkan pada APBD dengan perhitungan acress.

- Belanja Barang Jasa tahun 2025 ke tahun 2026 turun karena Belanja PPPK yang awalnya berstatus THL pindah ke jenis belanja pegawai.
- Belanja bunga mengacu pada proyeksi pembayaran akte kepada PT. SMI.
- Belanja Bantuan Sosial (Bansos) diasumsikan sama dengan tahun 2025.
- Proyeksi BTT memperhitungkan bansos yang tidak direncanakan
- Tahun 2025 angka yang ada masih harus mengakomodir hutang bagi hasil tahun sebelumnya. Proyeksi Belanja Bagi Hasil tahun 2026-2030 berdasarkan perhitungan pajak yang dibagi hasil kepada kabupaten/kota.
- Berdasarkan hasil RUPS Bank SulutGO Tahun 2025 menetapkan angka penyertaan modal daerah yaitu sejumlah Rp.41.300.000.000.
- Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana Opsen PKB dan BBNKB langsung di transfer ke Kabupaten kota, untuk itu skema bagi hasil ke kabupaten kota sudah tidak ada.
- Proyeksi transfer pemerintah pusat mengambil posisi realisasi tahun 2024 digunakan sebagai baseline perhitungan besaran pagu sama sampai dengan tahun 2030 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kebijakan nasional.
- Memenuhi amanat Mandatoris besar sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah terutama komponen belanja wajib.
- Memperhitungkan pembayaran menyangkut hutang dan bunga sampai tahun akhir pelunasan.
- Komponen belanja operasi setelah dikurangi belanja pegawai, masih diberikan bobot besar untuk belanja barang dan jasa, disamping memperhitungkan belanja

bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial

- Komponen belanja modal dibagikan ke komponen-komponen belanja dengan mempertimbangkan proporsional.
- Sinergi Kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah untuk menunjang pembiayaan pembangunan dengan alternatif pembiayaan antara lain melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dalam negeri atau kredit pemerintah daerah, blended finance, pembiayaan publik, keuangan syariah, tanggung jawab sosial badan usaha (Corporate Social Responsibility) dan mekanisme pembiayaan lainnya yang mendukung pembangunan daerah.
- Perkiraan belanja untuk pemilihan umum, pelaksanaan Pra-PON/PON dan lainnya, serta SILPA yang direncanakan dan penyertaan modal menjadi penting diperhitungkan dalam pembiayaan daerah, sehingga sudah harus diterapkan dalam besarnya surplus.
- Kebijakan belanja pegawai yang mendominasi belanja operasional, dapat dilaksanakan melalui :
  a. Moratorium penerimaan PNS untuk Tahun 2026 (kecuali untuk formasi yg sangat di butuhkan).
  b. Peningkatan kompetensi PNS termasuk PPPK yg baru diangkat melalui kediklatan tematik sesuai kebutuhan organisasi.
  c. Fleksibilitas mutasi PNS / PPPK untuk memenuhi formasi yg kosong (disesuaikan dgn kualifikasi pendidikan dan kompetensi).
  d. Penghematan belanja aparatur dengan penegakan disiplin.

Tabel 2.104
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030
Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN							
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.521.049.403.395,79	1.515.154.115.593,00	1.538.355.892.833	1.562.088.932.217	1.586.367.897.718	1.611.207.901.425	1.636.624.518.027
	B. Pendapatan Transfer	2.131.577.594.004,00	2.326.293.699.000	2.326.293.699.000	2.326.293.699.000	2.326.293.699.000	2.326.293.699.000	2.326.293.699.000
	C. Lain – lain Pendapatan Daerah	1.211.606.000,00	875.000.000	875.000.000	875.000.000	875.000.000	875.000.000	875.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	3.653.738.702.955,7	3.842.322.814.593,00	3.865.524.591.833	3.889.257.631.217	3.913.536.596.718	3.938.376.600.425	3.963.793.217.027
2	BELANJA							
	A. Belanja Operasi	2.718.227.555.723,00	2.645.675.643.952,60	2.639.013.034.619	2.666.249.167.661	2.710.128.880.352	2.837.076.704.378	2.680.120.558.226
	B. Belanja Modal	410.830.760.409,00	367.514.168.076,40	620.838.471.401	611.352.607.587	585.590.392.431	620.894.007.966	868.861.917.606
	C. Belanja Tak Terduga	450.377.558,00	9.508.656.098	9.508.656.098	10.459.521.708	11.505.473.879	12.656.021.266	13.921.623.393
	D. Belanja Transfer	578.425.561.892,00	638.592.839.959	379.241.098.283	384.273.002.829	389.388.468.185	394.589.117.802	394.589.117.802
	JUMLAH BELANJA	3.707.934.255.582	3.661.291.308.086	3.648.601.260.401	3.672.334.299.785	3.696.613.214.847	3.865.215.851.412	3.957.493.217.027
	SURPLUS/DEFISIT	(54.095.652.182,21)	181.031.506.507	216.923.331.432	216.923.331.432	216.923.381.871	73.160.749.013	6.300.000.000
3	PEMBIAYAAN							
	A. Penerimaan Pembiayaan	253.119.165.434,89	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	136.790.020.220,00	216.031.506.507	251.923.331.432	251.923.331.432	251.923.381.871	108.160.749.013	41.300.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	116.329.145.214,89	(181.031.506.507)	(216.923.331.432)	(216.923.331.432)	(216.923.381.871)	(73.160.749.013)	(6.300.000.000)

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Dari semua indikator urusan Pendidikan selama periode 2019-2023 masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pendidikan menengah yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah tidak mencapai target nasional dan daerah yaitu capaian 74,55% dari target 100%. Hal ini disebabkan oleh masih banyak warga berusia 16 – 18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak harus bekerja daripada melanjutkan pendidikan dan fasilitas pendidikan yang belum memadai dan sulit diakses, terutama di daerah terpencil.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 tahun Penyandang Disabilitas masih rendah dan tidak mencapai target nasional/daerah yaitu capaian 46,49% dari target 100%, jumlah APS disabilitas berjumlah 10.776. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar untuk pendidikan inklusif sehingga akses ke Pendidikan inkulusif terbatas.
3. Rendahnya kompetensi numerasi pada tingkat kabupaten/kota, ditunjukkan dari masih terbatasnya daerah yang mencapai standar asesmen nasional. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pelatihan serta sumber daya guru sehingga pengembangan numerasi belum optimal.
4. Rendahnya kompetensi literasi di satuan

pendidikan, dengan capaian standar kompetensi minimum hanya 26,88%. Kondisi ini tampak kontras dengan tingginya angka melek aksara serta peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Utara. Perbedaan tersebut disebabkan karena capaian asesmen nasional menggambarkan kualitas literasi peserta didik di sekolah, sementara angka melek aksara dan IPLM mencerminkan literasi masyarakat secara agregat, meliputi ketersediaan bahan bacaan, akses terhadap fasilitas literasi, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Rendahnya capaian di sekolah terutama dipengaruhi keterbatasan bahan bacaan dan program literasi yang belum optimal.

5. Rendahnya kompetensi numerasi di satuan pendidikan, dengan capaian hanya 19,39%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat bantu pembelajaran serta minimnya program pelatihan numerasi bagi tenaga pendidik.
6. Permasalahan pada urusan pendidikan terlihat dari rendahnya tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia kerja, yang hanya mencapai 78,24 dari target 82,48. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya kemitraan antara sekolah dan dunia industri yang berdampak pada minimnya kesempatan magang dan pelatihan keterampilan. Selain itu, sebagian lulusan SMK masih menunjukkan kecenderungan memilih pekerjaan tertentu, sehingga mempersempit peluang untuk segera terserap di pasar kerja.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara secara umum meningkat ditandai dengan terus meningkatnya angka harapan hidup, namun masih menyisakan permasalahan sebagai berikut

1. Menurut hasil SSGI Tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 20,8 persen, turun 0,5 persen dari tahun sebelumnya. Meski ada perbaikan, penurunan ini belum signifikan, bahkan sejumlah kabupaten/kota mengalami peningkatan prevalensi cukup tinggi hanya dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan, antara lain layanan kesehatan ibu hamil yang belum optimal, rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, variasi makanan pendamping, serta pemantauan pertumbuhan anak. Selain itu, tingginya kasus penyakit infeksi pada anak turut memperburuk status gizi dan meningkatkan risiko stunting.
2. Angka kematian ibu, bayi, balita, dan neonatal di Provinsi Sulawesi Utara masih relatif tinggi dan belum mencapai target nasional maupun daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya akses serta kualitas layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, kekurangan tenaga medis dan fasilitas yang memadai, rendahnya pengetahuan kesehatan ibu dan perawatan anak, masalah gizi yang belum tertangani, serta keterbatasan ekonomi keluarga dalam memperoleh layanan kesehatan. Permasalahan tersebut diperparah

dengan distribusi tenaga medis dan infrastruktur kesehatan yang belum merata antar kabupaten/kota.

3. Belum semua rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan telah terakreditasi, dimana dari 59 rumah sakit rujukan hanya 52 yang terakreditasi. Hambatan ini disebabkan oleh belum optimalnya standar dan proses akreditasi, serta keterbatasan SDM terlatih. Dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, data per Agustus 2025 menunjukkan terdapat 2.157 dokter umum dan 640 dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, distribusinya tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di Kota Manado (1.203 dokter umum dan 296 spesialis), sementara beberapa kabupaten seperti Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan mengalami kekurangan signifikan. Ketimpangan ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan medis dasar maupun spesialistik, yang turut berkontribusi pada masih tingginya angka kematian ibu dan anak di daerah ini.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pada urusan pekerjaan umum:

1. Cakupan air minum aman di Sulut masih rendah (13,8%) di mana faktor yang mempengaruhi yaitu infrastruktur yang memadai, kualitas air, ketersediaan air baku, manajemen pengelolaan air serta cakupan layanan.
2. Tingginya angka NRW (52,29%) dan idle capacity (39,43% atau 1852 liter/detik) di mana faktor penentu keberhasilannya yaitu infrastruktur yang

memadai, kualitas air, manajemen operasional yang efisien, SDM terlatih, cakupan layanan yang cukup luas serta kebijakan yang mendukung.

3. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah belum tercapai di mana target 24% dan pencapaiannya 51,35% akibat dari operasional TPA umumnya open dumping, dan masih adanya kabupaten yang tidak memiliki TPA.
4. Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman belum tercapai di mana target 12% sedangkan capaian 6,22% akibat dari fasilitas sanitasi aman dan berkelanjutan masih kurang.
5. Persentase angka BABS di tempat terbuka masih tinggi dari target 2,5% sedangkan capaiannya yaitu 5,67% mengakibatkan kesehatan masyarakat menjadi terganggu dan pencemaran lingkungan.
6. Rasio Kemantapan Jalan Provinsi masih di bawah target 0,874 di mana capaiannya yaitu 0,835 di mana memerlukan rehabilitasi jalan dan peningkatan jalan dan ketersediaan lahan.
7. Kondisi mantap irigasi Provinsi masih dibawah target di mana rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dicapai yaitu 0,866 sedangkan target pencapainnya sebesar 0,87.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang terjadi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum tercapainya target persentase rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan, dimana target 72,39 dan pencapaian hanya 66,93 akibat keterbatasan akses, kurangnya suplai rumah serta akses terhadap

pembiayaan yang masih kurang.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sulawesi Utara, sebagai daerah dengan keanekaragaman sosial dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Salah satu permasalahan utama dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah kekurangan jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pelatihan PPNS merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil dalam menangani berbagai masalah hukum dan administratif. Namun, saat ini, jumlah personil Satpol PP yang mendapatkan pelatihan PPNS masih terbatas, mengakibatkan rendahnya efektivitas penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus pelanggaran di tingkat daerah. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya respons terhadap pelanggaran ketertiban umum dan kurangnya kepastian hukum di masyarakat.

Disisi lainnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat dan gangguan ketertiban umum menjadi salah satu isu krusial di Sulawesi Utara. Meskipun beberapa Kabupaten/Kota telah membuat upaya untuk meningkatkan respon terhadap situasi darurat, seringkali terdapat kendala dalam penyediaan dokumen perencanaan yang memadai. Dokumen perencanaan yang kurang lengkap dan terintegrasi dapat menghambat efektivitas koordinasi dan respons saat terjadi krisis atau gangguan

ketertiban.

Peningkatan fasilitasi pelayanan dan kesiapsiagaan memerlukan penyediaan dokumen perencanaan yang lebih baik dan sistematis, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kesiapan dan respons yang cepat dan tepat. Kurangnya dokumentasi yang memadai dapat mengakibatkan lambatnya penanganan situasi darurat dan meningkatkan risiko ketidakstabilan di daerah.

Kombinasi dari kedua masalah ini, penguatan kapasitas personil Satpol PP melalui pelatihan PPNS dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan untuk kesiapsiagaan menjadi prioritas penting. Dengan memperbaiki kedua aspek ini, diharapkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat terjaga dengan lebih baik, serta respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2.3.1.6 Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan bidang sosial di Provinsi Sulawesi Utara secara umum sebagai berikut:

a. Ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan melebar dan tidak mencapai target nasional/daerah yaitu 3,55 dengan pencapaian 3,77. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja dan fasilitas Pendidikan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang belum menyeluruh dan masih kurangnya pemberdayaan ekonomi lokal.
b. Angka kemiskinan menurun, dan tidak mencapai target nasional/daerah. Miskin ekstrem mengalami

penurunan, namun tidak mencapai target nasional/daerah yaitu 5,93 dengan pencapaian 7,38 akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha, kurangnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, ketidak stabilan alam yang tinggi, perubahan iklim global, ketidak stabilan ekonomi makro, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin secara berkala belum optimal.

2.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Sulawesi Utara, sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi strategis.

Salah satu permasalahan utama adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi diatas rata-rata nasional, hal tersebut antaralain dikarenakan ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini mengakibatkan banyak lulusan yang tidak siap untuk langsung masuk ke dunia kerja, sehingga tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja muda cukup tinggi.

Di sisi lain, informasi mengenai kesempatan kerja dan pasar kerja masih kurang tersedia dan terdistribusi dengan baik. Banyak pencari kerja yang kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Hal ini memperparah kondisi pengangguran dan menyebabkan ketidakoptimalan dalam pemanfaatan tenaga kerja

yang ada.

Penerapan peraturan ketenagakerjaan juga menjadi isu penting di Sulawesi Utara. Banyak pengusaha dan pekerja yang masih kurang memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang ada. Akibatnya, sering terjadi ketidakadilan dalam hubungan kerja yang bisa berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, Sulawesi Utara juga harus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap fluktuasi global. Ketergantungan pada beberapa sektor ekonomi tertentu membuat daerah ini rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang adaptif untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah.

2.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu indikator yang belum tercapai adalah Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan belum optimal, penegakan hukum masih lemah, serta layanan pendampingan bagi korban belum merata, terutama di daerah terpencil.

Padahal, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi informal, pertanian, UMKM, dan jasa. Namun,

kontribusi strategis ini belum diimbangi dengan perlindungan hak dan akses terhadap sumber daya yang setara. Norma sosial patriarkis, ketimpangan pendidikan dan pelatihan kerja, serta beban ganda domestik-publik masih menjadi hambatan keterlibatan penuh perempuan dalam pembangunan yang inklusif. Rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal maupun pengambilan keputusan publik mencerminkan belum optimalnya kebijakan afirmatif dan responsif gender.

Edukasi mengenai kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga belum merata, sementara media massa belum berperan maksimal dalam membentuk opini publik. Di sisi lain, pemberdayaan perempuan masih terkendala keterbatasan SDM yang kompeten serta anggaran yang minim, sehingga implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan edukasi publik agar perempuan tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif pembangunan yang berdaya dan terlindungi secara sistemik dan berkelanjutan.

2.3.1.9 Urusan Pangan

Permasalahan pada urusan Pangan yang terjadi sampai saat ini adalah :

1. Inflasi Pangan Bergejolak Tambah Kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan capaiannya di bawah target yaitu 6,94% dari target 5%. Akar permasaalahannya yaitu belum optimalnya

pelaksanaan kegiatan SPHP untuk menekan harga pangan.

2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan di bawah target yaitu sebesar 87 dibanding target 95,4. Akar permasalahannya yaitu pengetahuan dan akses yang terbatas.
3. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan targetnya hampir tercapai yaitu sebesar 89% dari target 90%. Akar permasaalahannya yaitu pengawasan dan kontrol yang terbatas.

2.3.1.10 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan bukan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah karena tanah merupakan sumber daya yang memiliki kepentingan strategis nasional dan sering kali melibatkan berbagai pihak lintas daerah. Pengelolaan tanah memerlukan regulasi yang konsisten dan seragam di seluruh wilayah negara untuk menghindari konflik, memastikan keadilan, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan pertanahan yang holistik dan terpadu, serta mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga memastikan bahwa kebijakan pertanahan tidak tumpang tindih dan tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

2.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat berbagai permasalahan yang masih perlu dihadapi dan dikelola, di antaranya adalah dampak dari perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global,

perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam, tetap menjadi tantangan utama, degradasi ekosistem alami, seperti hutan, terumbu karang, dan lahan basah, akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar, perikanan berlebihan, dan konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman, tantangan dalam pengelolaan limbah padat, cair, dan berbahaya, termasuk sampah plastik, limbah industri, dan e-waste, yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, hilangnya habitat alami dan spesies akibat aktivitas manusia memerlukan upaya konservasi yang lebih intensif dan kolaboratif, eksploitasi berlebihan dan tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam, seperti air, mineral, dan energi, yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

Sulawesi Utara, dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam yang melimpah, menghadapi berbagai permasalahan dalam urusan lingkungan hidup yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Meskipun upaya untuk melestarikan lingkungan telah dilakukan, pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati masih belum maksimal. Kehilangan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya deforestasi, kerusakan habitat alami, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sulawesi Utara umumnya masih menggunakan metode open dumping yang tidak ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta

risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, masih terdapat kabupaten yang belum memiliki TPA yang memadai, sehingga pengelolaan sampah menjadi masalah yang serius dan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga belum optimal, yang berkontribusi pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan dalam pengelolaan limbah, penurunan kualitas air dan udara, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

2.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat ini ditunjukkan oleh belum optimalnya capaian target penerbitan dokumen kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Capaian penerbitan dokumen kependudukan baru mencapai 84,51 persen dari target 95 persen, sementara penerbitan KTP hanya terealisasi sebesar 94,1 persen dari target 97,5 persen. Kesenjangan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur pelayanan.

2.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sulawesi Utara, dengan keragaman budaya dan potensi sumber daya alam yang melimpah,

menghadapi berbagai permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa. Meskipun memiliki potensi besar, banyak desa di provinsi ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses terhadap layanan dasar, keterampilan, dan peluang ekonomi. Masalah utama termasuk ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan, serta terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan.

2.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh belum tercapainya beberapa indikator kinerja utama. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) hanya mencapai 59,35 persen dari target 62,5 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan kontrasepsi modern. Selain itu, indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15–19 tahun juga belum sesuai target, di mana capaian sebesar 34,2 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun masih berada di atas target 30. Hal tersebut terjadi akibat keterbatasan program pencegahan kehamilan remaja yang belum berjalan secara optimal.

2.3.1.15 Urusan Perhubungan

Permasalahan pada urusan perhubungan yang terjadi sampai saat ini adalah masalah fasilitas terminal yang belum memadai, belum ada pelabuhan

pengumpan regional yang dikelola Provinsi, terbatasnya aksesibilitas transportasi laut pada daerah kepulauan dan perbatasan, Pelabuhan Bitung belum operasional sesuai fungsi sebagai IHP dan terbatasnya angkutan massal perkotaan yang memadai.

2.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum tercapainya target Indeks SPBE, dimana dari target 3,3 yang tercapai 2,3. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya masih adanya proses manual dan tidak efisien, pelayanan publik tidak optimal, kualitas dan kuantitas SDM yang tidak memadai dan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.

2.3.1.17 Urusan Koperasi UMKM

Permasalahan pada urusan Koperasi UMKM yang terjadi sampai saat ini adalah

a. Masih terbatasnya akses ke modal dan kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.
b. Masih kurangnya akses pasar internasional dan keterbatasan koneksi bisnis.

2.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Sulawesi Utara, dengan potensi alam dan sumber daya yang melimpah, menghadapi berbagai permasalahan dalam urusan penanaman modal yang memerlukan perhatian serius untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama adalah keadaan infrastruktur yang masih perlu dikembangkan. Infrastruktur penting seperti bandara, pelabuhan, dan jalan yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas,

terutama di daerah-daerah yang produktif. Selain itu, pasokan listrik dan ketersediaan air bersih yang belum mencukupi di beberapa daerah menjadi hambatan signifikan bagi investasi dan pengembangan usaha.

Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mendorong kemudahan berusaha juga menjadi kendala dalam menarik investor. Regulasi yang mendukung kemudahan berusaha akan memberikan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Namun, hingga saat ini, regulasi tersebut belum terwujud secara optimal, sehingga menghambat masuknya investasi baru. Selain itu, pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan yang masih rendah menambah kompleksitas dalam proses investasi. Kurangnya informasi dan pemahaman ini sering kali menyebabkan proses perizinan menjadi lambat dan birokratis, menghambat investor yang ingin beroperasi di wilayah ini.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah status tanah di wilayah investasi yang sering kali kurang jelas. Ketidakpastian status kepemilikan tanah menyebabkan seringnya terjadi gugatan setelah investor melakukan produksi. Hal ini tidak hanya menghambat proses investasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan risiko tinggi bagi para investor.

2.3.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Sulawesi Utara mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan memerlukan perhatian serius. Pertama, kurangnya

pelatihan dan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda menjadi hambatan utama dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka untuk menciptakan lapangan kerja mandiri. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber pendanaan yang seringkali menghalangi inisiatif kewirausahaan yang ada. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai menghambat kegiatan olahraga dan pengembangan bakat di bidang ini, sehingga potensi para pemuda tidak dapat berkembang secara optimal. Ditambah lagi, kurangnya regulasi yang berpihak pada pemuda membuat banyak inisiatif dan program pembangunan kepemudaan tidak berjalan efektif.

2.3.1.20 Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan persandian mencakup berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dan tindakan segera. Saat ini, tingkat keamanan informasi pemerintah hanya mencapai 57,2%, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 95%. Rendahnya tingkat keamanan informasi ini disebabkan oleh kurangnya sistem keamanan yang efektif dan minimnya investasi dalam keamanan informasi. Hal ini membuka potensi akses ilegal terhadap data sensitif pemerintah, meningkatkan kerentanan terhadap serangan malware dan phishing. Selain itu, kurangnya sumber daya untuk menghadapi serangan cyber berisiko mengakibatkan gangguan layanan publik atau pencurian data yang signifikan.

2.3.1.21 Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan statistik mencakup beberapa aspek krusial

yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Saat ini, data statistik yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terintegrasi dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar OPD terkait data. Hal ini mengakibatkan tidak adanya gambaran keseluruhan yang lengkap mengenai pembangunan daerah secara holistik, sehingga menyulitkan perencanaan dan evaluasi program pembangunan secara efektif.

2.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Yang menjadi permasalahan pembangunan bidang kebudayaan adalah belum tercapainya target Indeks Pembangunan Kebudayaan, di mana target 58,06 dan yang dicapai hanya 54,97. Hal ini disebabkan karena peninggalan sejarah kurang diminati oleh masyarakat, informasi tentang peninggalan sejarah terbatas dan kurang menarik perhatian, peninggalan sejarah tidak terawat dan tidak menarik untuk dikunjungi dan wisata sejarah kurang menarik dan tidak banyak diminati. Hal-hal lain yang melatar belakangi yaitu kurangnya pelestarian budaya lokal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, minat masyarakat yang rendah terhadap peninggalan Sejarah, kurangnya promosi dan informasi yang efektif mengenai peninggalan sejarah, kondisi peninggalan sejarah yang kurang terawat dan menarik dan tidak adanya program wisata sejarah yang menarik bagi masyarakat.

2.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Rendahnya minat baca masyarakat menjadi salah satu masalah utama yang berdampak pada tingkat literasi dan pengetahuan warga. Kondisi ini

diperburuk dengan sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai serta kurangnya perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola perpustakaan juga masih terbatas. Ketercukupan koleksi perpustakaan yang seharusnya disesuaikan dengan jumlah penduduk juga belum tercapai.

2.3.1.24 Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan kearsipan menghadapi tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan arsip. Hal ini mengakibatkan banyaknya arsip penting yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menyulitkan akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu ketika diperlukan. Ketidaktahuan mengenai pentingnya arsip dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi publik turut memperburuk situasi. Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap pengarsipan dokumen-dokumen pribadi maupun institusional, yang sering kali berujung pada kehilangan data berharga dan potensi konflik administratif.

2.3.1.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada urusan Kelautan dan Perikanan yang terjadi sampai saat ini adalah :

1. Tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya di mana hasil yang dicapai 493.246,2 Ton masih di bawah target 578.020 ton. Akar permasalahannya yaitu
2. Tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap di mana hasil yang dicapai 333.133 Ton

masih di bawah target 410.380 Ton. Akar permasalahannya yaitu kurangnya peralatan dan penurunan populasi ikan.

3. Masih terdapat bebebrapa kasus pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Perikanan di mana hasil yang dicapai 96,78% masih di bawah target 97%. Akar permasalahannya yaitu akibat pengawasan yang kurang.

2.3.1.26 Urusan Pariwisata

Permasalahan pada urusan Pariwisata yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan PDB sektor pariwisata yaitu 3,4% dari target 4,5%. Akar permasalahan yang bisa diidentifikasi yaitu kurangnya infrastruktur dan kurangnya promosi pariwisata.
2. Rendahnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara di mana target tahun 2023 sebesar 1 juta kunjungan, namun pencapaian baru sebesar 743.948 kunjungan. Akar permasalahan yang bisa diidentifikasi yaitu kurangnya promosi destinasi wisata dan infrastruktur transportasi yang terbatas.
3. Rendahnya nilai tambah ekonomi kreatif yang mana dari target sebesar Rp.134.700.000.000,-, namun pencapaian hanya Rp. 95.832.300.000,-. Akar permasalahannya yaitu kurangnya akses pasar dan distribusi serta kurangnya investasi dalam industri kreatif.

2.3.1.27 Urusan Pertanian

Permasalahan pada urusan Pertanian yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Turunnya jumlah produksi tanaman pangan (Padi dan Jagung) yang disebabkan oleh pengaruh iklim El Nino

2. Ada beberapa produksi komoditi tanaman holtikultura menurun disebabkan karena ketersediaan benih unggul yang masih kurang.
3. Jumlah produksi daging (Sapi, ayam, babi) turun disebabkan karena masih terbatasnya manajemen pakan dan adanya penyakit menular pada ternak
4. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan turun disebabkan karena adanya pemeliharaan tanaman kurang optimal.

2.3.1.28 Urusan Kehutanan

Permasalahan pada urusan Kehutanan yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Rendahnya nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial di mana hasil yang dicapai Rp. 4.734.848.000/Kapita masih di bawah target Rp.1.500.000.000.000/Kapita. Akar permasalahannya yaitu kurangnya akses pasar dan keterbatasan modal.
2. Rendahnya nilai transaksi ekonomi KTH di mana hasil yang dicapai Rp.4.734.848.000/ Kapita masih di bawah target Rp.70.000.000.000/ Kapita. Akar permasalahannya yaitu kurangnya akses pasar dan keterbatasan modal.
3. Rendahnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat di mana hasil yang dicapai 4.000 Ha masih di bawah target 1.000.000 Ha. Akar permasalahannya yaitu kurangnya dukungan kebijakan dan kurangnya pemahaman masyarakat.

2.3.1.29 Urusan ESDM

Permasalahan pada urusan ESDM yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Masih adanya Rumah Tangga yang belum berlistrik PLN di mana hasil yang dicapai 99,99% masih di

bawah target 100%. Akar permasalahannya yaitu adanya mutasi penduduk dan keterbatasan anggaran.

2. Masih adanya Desa yang belum berlistrik PLN di mana hasil yang dicapai 99,35% masih di bawah target 100%. Akar permasalahannya yaitu adanya mutasi penduduk dan keterbatasan anggaran.

2.3.1.30 Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan Perdagangan yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan nilai ekspor non-migas di mana target tahun 2023 sebesar 7,86% sementara pencapaian sebesar -20,68%. Akar permasalahan yang diidentifikasi yaitu penurunan harga komoditas dan kurangnya diversifikasi ekspor.
2. Rendahnya persentase kepatuhan berusaha di mana pencapaian hanya 80% dari target 90%. Akar permasalahannya yaitu kompleksitas regulasi dan kurangnya kesadaran hukum.

2.3.1.31 Urusan Perindustrian

Permasalahan pada urusan Perindustrian yang terjadi sampai saat ini adalah:

1. Rendahnya pertumbuhan nilai ekspor industri pengolahan non-migas di mana pencapaian 0,81% dan target 2,45%. Akar permasalahannya yaitu kurangnya infrastruktur logistik dan kurangnya akses ke pasar internasional.
2. Rendahnya jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas di mana pencapaian 140,625 orang dari target 212.000 orang. kurangnya besar dari target di mana pencapaian hanya keterampilan tenaga kerja dan kurangnya peluang kerja lokal.

3. Rendahnya nilai investasi sektor industri pengolahan non-migas yaitu hanya seRp. 0,07 Triliun dari target Rp. 8,82 Triliun. Akar permasalahannya yaitu kurangnya akses pendanaan dan kurangnya kepastian regulasi.
4. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDRB yaitu hasil yang dicapai pada tahun 2023 hanya sebesar 10,64% sedangkan target 18,15% di mana akar permasalahannya yaitu kurangnya investasi dan keterbatasan teknologi dan inovasi

2.3.1.32 Urusan Transmigrasi

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah-daerah tujuan transmigrasi. Hal ini mencakup keterbatasan akses jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pasokan air bersih dan listrik yang belum optimal. Kondisi ini menyulitkan para transmigran untuk beradaptasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka di daerah baru.

Selain itu, dalam pelaksanaan program transmigrasi sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah pendatang dan kapasitas daerah penerima. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan dalam penyediaan lahan yang layak bagi para transmigran, termasuk konflik kepemilikan lahan dengan masyarakat lokal yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.

2.3.1.33 Urusan Pemerintah Penunjang

Permasalahan pada urusan kepegawaian adalah rasio jabatan fungsional dengan sertifikat kompetensi yang masih rendah (tidak mencapai target

nasional/daerah dimana target 11,75 sedangkan capaian 7,46). Hal ini ditandai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan yang menurun akibat rendahnya jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi.

Disisi lainnya pada urusan pemerintahan, sampai saat ini masih terdapat permasalahan terkait Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai dimana dari target 61 yang dicapai hanya 56,78. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas dan kompetensi ASN, rendahnya adopsi teknologi sehingga proses berlangsung manual dan tidak efisien.

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi, inventarisasi permasalahan pembangunan pada sub bab di atas dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan secara global, nasional, regional dan daerah maka dirumuskan isu strategis pembangunan Sulawesi Utara Lima Tahun ke depan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode clustering, yakni dengan cara mengelompokkan Isu-isu strategis berdasarkan karakteristik, sehingga memudahkan identifikasi prioritas dan arah kebijakan yang lebih terfokus. Adapun kelompok isu strategis dibagi atas 5 (lima) rumpun, yakni:

- Rumpun Sumber Daya Manusia.
- Rumpun Ekonomi.
- Rumpun Infrastruktur.
- Rumpun Lingkungan Hidup.
- Rumpun Tata Kelola dan Akuntabilitas.

a) Rumpun Sumber Daya Manusia

Secara global, perdagangan gelap narkotika transnasional menjadi perhatian utama. Isu ini menurun ke tingkat nasional dalam bentuk tingginya kasus korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, yang diperparah oleh

rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Di tingkat regional, permasalahan ini termanifestasi dalam rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan mutu pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, untuk itu ada tiga isu strategis Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Pembangunan sektor kebudayaan yang masih rendah.

b) Rumpun Ekonomi

Di panggung global, isu geopolitik dan geoekonomi, pelemahan ekonomi Tiongkok, serta kebijakan proteksionisme Amerika Serikat menjadi tantangan. Secara nasional, Indonesia menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), mendorong hilirisasi untuk nilai tambah, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Isu ini di tingkat regional terlihat dari tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya pemanfaatan berbagai potensi, seperti energi terbarukan, wilayah pesisir, dan komoditas unggulan sehingga Isu strategis Provinsi Sulawesi Utara:

1. Optimalisasi kinerja sektor pariwisata yang belum optimal.
2. Peningkatan kinerja industri pengolahan yang juga belum optimal.
3. Peningkatan realisasi investasi.
4. Peningkatan nilai komoditas unggulan daerah.

c) Rumpun Infrastruktur

Di tingkat nasional, isu utama adalah kesenjangan akses dan kualitas infrastruktur serta tingkat konektivitas antarwilayah yang belum merata. Secara lebih spesifik di tingkat regional Pulau Sulawesi, konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah juga belum merata. Berangkat dari isu tersebut, isu strategis di Sulawesi Utara adalah:

1. Peningkatan konektivitas.
2. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar.

d) Rumpun Lingkungan Hidup

Dampak perubahan iklim global merupakan isu sentral di tingkat dunia. Hal ini memicu krisis lingkungan di tingkat nasional, yang berdampak pada ketahanan pangan, energi, dan air. Di tingkat regional, isu ini meningkatkan risiko bencana alam. Dengan demikian, isu strategis untuk Sulawesi Utara adalah:

1. Menjaga ketahanan pangan, energi, dan air.

e) Rumpun Tata Kelola dan Akuntabilitas

Secara nasional, isu yang diangkat adalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan. Isu ini mengerucut di tingkat regional pada tata kelola pelayanan publik. Bagi Provinsi Sulawesi Utara, isu strategis yang ditetapkan adalah

1. Tata kelola pemerintahan.
2. Transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selengkapnya terkait perumusan isu strategis daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Perumusan Isu Strategis Daerah

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sub Bab ini menguraikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 melalui penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang menjadi dasar penentuan program prioritas pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan. Keempat unsur ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan harapan masyarakat, dengan visi sebagai gambaran ideal masa depan, misi sebagai panduan strategis, serta tujuan dan sasaran sebagai alat ukur pencapaian yang terstruktur. Seluruh proses perencanaan disusun menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) agar pembangunan tidak bersifat sektoral atau terpisah, melainkan menyatu antar sektor dan wilayah, sehingga RPJMD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan teknis, tetapi juga sebagai perwujudan komitmen bersama untuk membangun Sulawesi Utara yang lebih baik kedepannya.

3.1.1 Visi

Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan arah dan cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH. Visi ini menjadi pedoman utama dalam merancang kebijakan, strategi, dan program pembangunan lima tahunan, yang bertujuan untuk mendorong kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, adalah:

VISI

MENUJU SULAWESI UTARA MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN
(Towards Advanced, Prosperous, And Sustainable North Sulawesi)

Visi ini menggambarkan tekad dan cita-cita besar untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah yang berkembang secara dinamis, adil dalam pemerataan kesejahteraan sosial, serta bertanggung jawab pada pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan. Tiga pilar utama, yaitu **maju**, **sejahtera**, dan **berkelanjutan**, menjadi dasar perumusan setiap kebijakan dan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Ketiga kata kunci tersebut saling melengkapi dan mengarahkan Sulawesi Utara menuju pembangunan yang inklusif dan progresif. 3 kata kunci utama tersebut diaktualisasikan, sebagai berikut:

1. **Maju** dalam konteks ini menggambarkan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pertumbuhan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

   Kemajuan ekonomi menjadi aspek utama, dengan fokus pada diversifikasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, penguatan kebijakan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan optimalisasi investasi di berbagai sektor

turut berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Dengan strategi ini, Sulawesi Utara tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan dan daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas serta kesejahteraan merata bagi masyarakatnya.

Selain kemajuan ekonomi, "Maju" juga mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur untuk menghadapi tantangan global. Investasi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang kompetitif menjadi prioritas agar masyarakat Sulawesi Utara dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemajuan teknologi juga didorong melalui digitalisasi layanan publik dan infrastruktur komunikasi yang lebih modern.

Sementara itu, dalam bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah berupaya meningkatkan produksi lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor. Semua upaya ini ditopang oleh akses, infrastruktur, peningkatan mutu, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan pendekatan holistik ini, Sulawesi Utara diharapkan menjadi provinsi yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

2. Selanjutnya, kata kunci **Sejahtera** mengacu pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan berarti terwujudnya ketahanan pangan, tercapainya tingkat pendapatan yang layak bagi seluruh penduduk, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

   Pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama, memastikan bahwa daerah perkotaan maupun pedesaan memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur,

pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, masyarakat Sulawesi Utara dapat menikmati kehidupan yang lebih stabil dan produktif, sehingga daya beli meningkat dan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Selain aspek ekonomi, kesejahteraan juga mencakup dimensi sosial, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai dan semakin merata, serta lingkungan aman dan nyaman. Pemerintah Sulawesi Utara berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas akses sekolah hingga ke daerah terpencil, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperkenalkan teknologi dalam pembelajaran.

Pada bidang kesehatan, peningkatan fasilitas medis, ketersediaan tenaga kesehatan, dan program kesehatan preventif menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak, kesejahteraan dalam arti sosial akan terwujud, menciptakan masyarakat sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan Tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Dalam konteks **Berkelanjutan**, mengandung makna mendalam tentang keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial yang menyangkut pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan pelestarian budaya. Ini menegaskan bahwa pembangunan di Sulawesi Utara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.
   Keberlanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang bijak, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penerapan teknologi ramah

lingkungan, hingga pengelolaan institusi serta penerapan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip ini, Sulawesi Utara dapat mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri, dan perikanan secara bertanggung jawab, memastikan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Selain itu, keberlanjutan juga mencerminkan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketersediaan udara sehat, air, serta energi, dan ketimpangan sosial. Melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta tata kelola yang baik, Sulawesi Utara dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Sebagai gerbang Indonesia di Pasifik, provinsi ini memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional yang berkelanjutan, menjalin diplomasi lingkungan, dan berkontribusi dalam upaya global untuk menciptakan masa depan lebih baik bagi semua.

Penetapan Visi "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" menegaskan arah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembangunan jangka menengah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Visi ini menjadi landasan strategis dalam merancang kebijakan dan program yang terukur, menyeluruh, dan berdampak nyata di berbagai aspek, sekaligus mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersinergi menjaga konsistensi, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan. Lebih dari sekadar pernyataan simbolik, visi ini merupakan jiwa dari setiap langkah nyata yang akan membentuk masa depan Sulawesi Utara.

3.1.2 Misi

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, yaitu "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan", telah dirumuskan delapan misi pembangunan yang bersifat jelas dan realistis sebagai panduan utama dalam menyusun kebijakan dan program yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Delapan misi ini tidak hanya menjadi pelengkap dari visi, tetapi berfungsi sebagai arah operasional yang mencerminkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memimpin pembangunan secara terukur, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Setiap misi mengandung arah kebijakan yang spesifik dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah saat menetapkan prioritas pembangunan, sehingga dapat menjembatani antara cita-cita besar visi dengan langkah-langkah nyata dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Adapun delapan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 Mencegah dan memberantas KKN serta Narkoba	**Misi 5** Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air Yang Merata dan Berkelanjutan
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	**Misi 6** Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal
Misi 3 Membangun Perekonomian Daerah	**Misi 7** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Misi 4 Memperkuat Daya Saing Daerah dan International	**Misi 8** Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan

Delapan misi pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai arah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Setiap misi mencerminkan fokus pembangunan yang saling terintegrasi dan menjadi acuan perumusan kebijakan serta pelaksanaan program prioritas secara berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan dari kedelapan misi tersebut:

1. *Misi pertama, yaitu Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba***.** Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada mewujudkan pemerintahan bersih dan masyarakat bebas narkoba. KKN mengancam tata kelola yang baik, sehingga pencegahan dan pemberantasannya menjadi prioritas. Kebijakan difokuskan pada pengawasan, transparansi, dan edukasi, dengan melibatkan aparat hukum dan lembaga Pendidikan;
2. *Misi kedua, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia***.** Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada membangun masyarakat sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kebijakan utamanya meliputi peningkatan pendidikan dan kesehatan, pelatihan vokasi, serta pemberdayaan pemuda di bidang inovasi dan teknologi yang dijalankan dengan menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan gender. SDM unggul akan memperkuat daya saing Sulawesi Utara secara nasional dan internasional;
3. *Misi ketiga, yaitu Membangun Perekonomian Daerah.* Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakannya mencakup pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri kreatif. Pemerintah juga mendorong investasi dan ekonomi digital untuk memperkuat perekonomian daerah serta membuka lebih banyak lapangan kerja;
4. *Misi keempat, yaitu Memperkuat Daya Saing Daerah dan International.* Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan yang difokuskan untuk menjadikan Sulawesi Utara daerah berdaya saing nasional dan internasional. Kebijakannya meliputi penguatan infrastruktur,

peningkatan konektivitas, dan promosi potensi daerah. Pemerintah juga mengembangkan kerjasama internasional untuk mendorong inovasi dan ekspor;

5. *Misi kelima*, yaitu meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan. Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk memastikan akses adil terhadap pangan, energi, dan air bagi masyarakat. Kebijakannya meliputi pertanian dan perikanan berkelanjutan, pengelolaan air yang efektif, serta penggunaan energi terbarukan untuk pembangunan ramah lingkungan;
6. *Misi keenam*, yaitu memperbaiki tata kehidupan masyarakat tertib, aman, dan nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal. Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada menciptakan masyarakat hidup harmonis dan aman, dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah. Kebijakan misi ini mencakup penguatan peran tokoh masyarakat dan lembaga adat, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas;
7. *Misi ketujuh*, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas ASN, serta penguatan evaluasi dan monitoring program pemerintah. Pemerintahan yang bersih dan efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah; dan
8. *Misi kedelapan*, yaitu meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Misi ini memberikan arah terhadap kebijakan untuk difokuskan pada pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah. Kebijakannya meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, transparansi keuangan, serta optimalisasi PAD. Pemanfaatan teknologi informasi diprioritaskan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan anggaran tepat sasaran.

3.1.3 Program Unggulan

Sebagai wujud nyata dari komitmen dalam mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi menetapkan 17 Program Unggulan yang menjadi fokus utama pada pelaksanaan pembangunan lima tahunan ke depan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan strategis sekaligus mengoptimalkan potensi daerah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada hasil, 17 Program Unggulan ini menjadi instrumen penting dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di berbagai sektor, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

Tabel 3.1

17 Program Unggulan

17 Program Unggulan
1. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi;
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial;
5. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
6. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
8. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
9. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;
10. Pengembangan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan *MICE*;
11. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan;
14. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN;
17. Pembinaan Pertambangan Rakyat.

Implementasi 17 Program Unggulan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara, tetapi juga menjadi wujud konsistensi dalam mendorong transformasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antar-perangkat daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan demikian, 17 Program Unggulan diharapkan mampu menjadi pengungkit utama dalam mewujudkan visi besar Sulawesi Utara sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun regional.

3.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran ini merupakan hasil proses cascading yang sistematis dan terstruktur, yaitu penurunan visi dan misi ke dalam arah pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Proses cascading ini penting untuk menjamin konsistensi antara arah kebijakan makro dan pelaksanaan program di lapangan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki rujukan kinerja yang sama dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Tujuan menetapkan arah strategis pembangunan, sedangkan sasaran merinci capaian yang lebih spesifik dan dapat diukur, untuk dijadikan dasar penyusunan indikator kinerja, program prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien.

Penjabaran misi pembangunan daerah Tahun 2025–2029 ke dalam tujuan dan sasaran dirumuskan melalui pendekatan cascading sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Gambar 3.1 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1

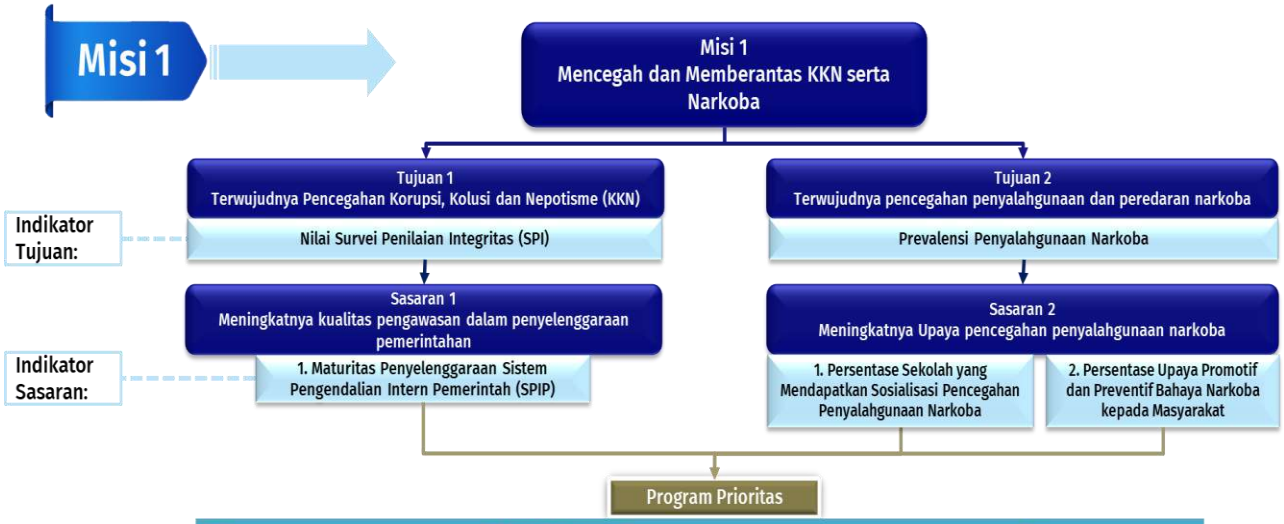

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	Inspektorat
3	Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Program Pengelolaan Pendidikan.	Dinas Pendidikan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	Dinas Kesehatan

Misi ini diimplementasikan melalui dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah Terwujudnya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang diukur melalui indikator Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Tujuan kedua adalah Terwujudnya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, dengan indikator Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba. Kedua tujuan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas dari narkoba.

Guna mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran yang lebih operasional. Sasaran 1 adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, iyang akan diukur melalui Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan Sasaran 2 adalah Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang akan diukur

melalui Persentase Sekolah yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba serta Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat. Sasaran-sasaran ini menunjukkan adanya pendekatan sistematis baik pada ranah birokrasi pemerintahan maupun pada aspek pencegahan sosial masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat enam program prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Program-program tersebut antara lain: Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan oleh Inspektorat, Penguatan Ideologi Pancasila oleh Badan Kesbangpol, serta Program Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sinergi antar-OPD ini menjadi kunci dalam mengimplementasikan misi secara lintas sektor dan memperkuat kolaborasi antara pengawasan internal, pendidikan karakter, serta pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Gambar 3.2 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2

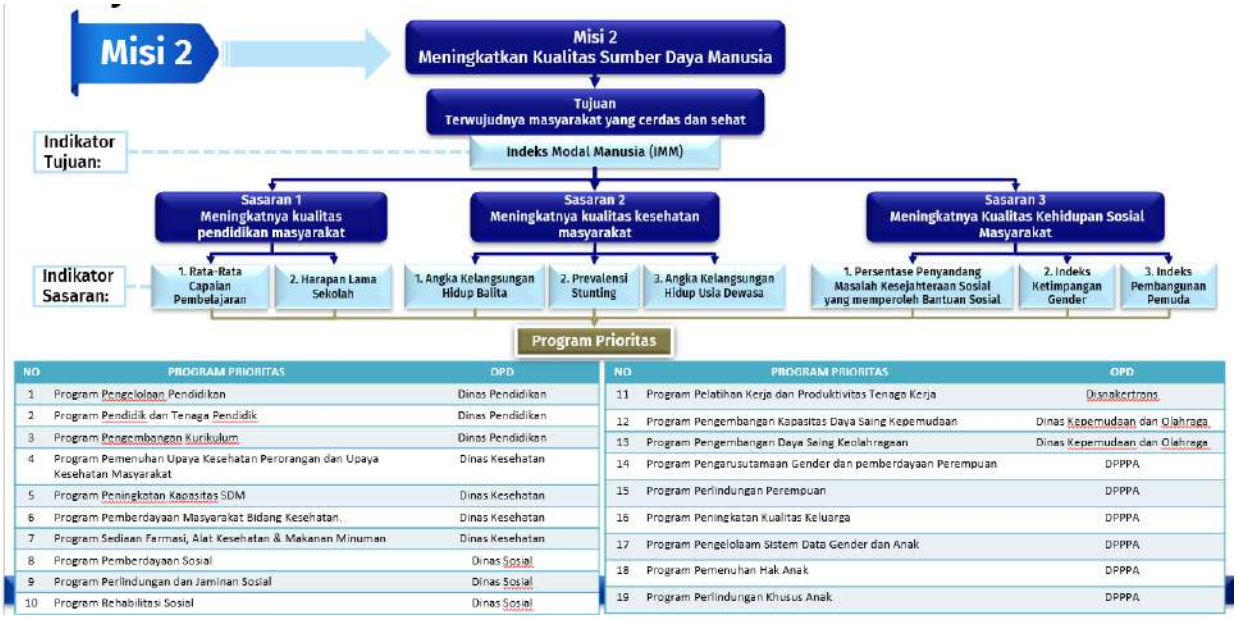

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Dinas Kesehatan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
8	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
9	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
10	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
11	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	DPPPA
15	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA
17	Program Pengelolaam Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
18	Program Pemenuhan Hak Anak	DPPPA
19	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA

Misi 2 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Tujuan utamanya adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sehat, diukur melalui Indeks Modal Manusia (IMM).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis: (1) meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, (2) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dan (3) meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat. Sasaran pertama diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata capaian pembelajaran dan harapan lama sekolah. Sasaran kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan tiga indikator pengukuran, yaitu angka kelangsungan hidup balita, prevalensi stunting, dan angka kelangsungan hidup usia dewasa. Sementara itu, sasaran ketiga berfokus pada meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang diukur menggunakan tiga indikator, yakni persentase

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial, indeks ketimpangan gender, dan indeks pembangunan pemuda. Ketiga sasaran ini saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan memiliki kualitas sosial yang semakin baik secara menyeluruh.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat sembilan belas program prioritas yang dilaksanakan oleh enam OPD utama, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program-program tersebut meliputi pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan upaya kesehatan, penyediaan makanan dan minuman aman, rehabilitasi sosial, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja hingga Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Daya Saing Olahraga dan Peningkatan Kualitas dan Kesetaraan Gender. Sinergi antar-OPD ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan SDM Sulawesi Utara yang unggul, kompetitif, dan memiliki daya tahan sosial.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Gambar 3.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
6	Program pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas ESDM
7	Program Penyendiaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan
8	Program Penyendiaan dan Pengembangan prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan
12	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM-PTSP

Misi 3 berfokus pada Membangun Perekonomian Daerah, dengan tujuan besar yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Pendekatan inklusif menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan ekonomi, sedangkan pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak merusak daya dukung lingkungan dan tetap relevan dalam jangka panjang.

Guna mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran utama. Sasaran 1 adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, dengan fokus

pada peningkatan kontribusi PDRB dari sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, Sasaran 2 bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah, yang dilihat dari kontribusi sektor industri serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB. Kedua sasaran ini menunjukkan strategi pembangunan ekonomi yang seimbang antara sektor jasa, industri ekstraktif, dan sektor berbasis sumber daya lokal.

Guna mendukung sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat ditetapkan 15 program prioritas yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program-program tersebut mencakup pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan daya tarik pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengelolaan pertambangan dan energi, serta penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. OPD yang terlibat antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, inovatif, dan berpihak pada potensi unggulan daerah Sulawesi Utara.

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Gambar 3.4 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
2	Program Penyelenggaraan LLAJ	Dinas Perhubungan
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Dinas PUPR
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAL	Dinas PUPR
6	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPR
7	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
8	Program Peningkatan PSU	Dinas Perkim
9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Dinas PM-PTSP
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Program Pengembangan Ekspor.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Program Stabilisasi Harga, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi 4 mengusung fokus "Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional", dengan tujuan besar yaitu terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui penguatan konektivitas, infrastruktur dasar yang andal, dan pengembangan komoditi unggulan.

Daya saing ini diukur menggunakan Indeks Daya Saing Daerah sebagai indikator utama. Peningkatan daya saing menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan investasi, dan memperluas akses pasar produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah Meningkatnya konektivitas serta akses terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas, diukur melalui dua indikator: Indeks Infrastruktur dan Rasio Konektivitas. Sedangkan Sasaran 2 adalah Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan

melalui inovasi dalam investasi dan perdagangan, yang diukur dengan persentase peningkatan investasi dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sasaran ini menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tidak hanya fisik, tetapi juga mampu membuka akses secara merata serta mendukung kemudahan berusaha dan lalu lintas barang dan jasa.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat 12 program prioritas yang akan dijalankan oleh beberapa OPD teknis, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas PM-PTSP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program-program ini mencakup penyelenggaraan jalan, lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), pengelolaan pelayaran, pengembangan sistem air minum dan sanitasi, serta pembangunan perumahan dan permukiman. Selain itu, juga ada program strategis seperti peningkatan iklim penanaman modal, pengembangan ekspor, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kombinasi program tersebut menunjukkan upaya terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.

5. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Gambar 3.5 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air.	Dinas PUPR
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.	Dinas Pangan
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
5	Program Pengelolaan Ketanagalistrikan.	Dinas ESDM
6	Program Pengelolaan energi Baru terbarukan.	Dinas ESDM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
7	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
8	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
9	Program Pengendalian B3 dan LB3	DLH
10	Program Binwas Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	DLH
11	Program Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan

Misi 5 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, dirumuskan dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah terwujudnya ketahanan pangan, energi, dan air yang tangguh, adil, dan berkelanjutan, dengan indikator pengukuran berupa Indeks Ketahanan Pangan Daerah, Indeks Ketahanan Energi Daerah, dan Kapasitas Air Baku. Tujuan kedua adalah terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat, diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai kedua tujuan ini, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatkan

ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan, diukur melalui tiga indikator utama: persentase daerah rentan rawan pangan, porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer, dan persentase luas layanan irigasi. Sementara itu, sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat yang diukur melalui indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas tutupan lahan. Kedua sasaran ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan sumber daya alam dan energi sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat sebelas program prioritas yang melibatkan OPD teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Pangan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. Program-program tersebut meliputi pengelolaan sumber daya air, peningkatan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengelolaan energi baru terbarukan, ketenagalistrikan, serta pengelolaan persampahan dan hutan. Dengan pendekatan lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menjamin akses dan ketersediaan sumber daya alam secara adil, memperkuat ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

6. Tujuan dan Sasaran Misi 6

Gambar 3.6 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6

Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Penanggulangan Bencana	BPBD; Satpol PP
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
4	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 6 bertujuan untuk memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal. Misi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara ketertiban sosial dan pelestarian budaya sebagai fondasi harmoni masyarakat. Terdapat dua tujuan utama yang menjadi arah pembangunan. Tujuan pertama adalah terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Tujuan kedua adalah terwujudnya daerah yang berkebudayaan maju, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, yang diukur dengan 3 indikator, yaitu indikator persentase penyelenggaraan tibumtranmas, persentase cakupan perlindungan masyarakat, dan indeks resiko bencana. Sementara itu, Sasaran 2 mengarah pada meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan, yang diukur dengan 2

indikator yaitu indikator persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan serta indikator persentase warisan budaya yang dilestarikan. Kedua sasaran ini memperlihatkan bahwa pembangunan sosial yang aman dan nyaman tidak dapat dipisahkan dari pelestarian identitas budaya lokal yang kuat dan partisipatif.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat tujuh program prioritas yang dilaksanakan oleh berbagai OPD seperti Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program-program tersebut meliputi peningkatan ketertiban umum, penanggulangan bencana, pengembangan kesenian tradisional, pelestarian cagar budaya, hingga pemberdayaan lembaga masyarakat hukum adat. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan pendekatan holistik dalam membangun masyarakat yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga kuat secara identitas budaya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga tatanan sosial sekaligus merawat warisan budaya sebagai aset pembangunan daerah.

7. Tujuan dan Sasaran Misi 7

Gambar 3.7 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda – Biro Hukum
2	Program Penataan Organisasi	Setda – Biro Organisasi
3	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan barang dan jasa	Setda – Biro Barjas
4	Program pemerintahan dan Otonomi Daerah	Setda – Biro Pemerintahan
5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset
6	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
7	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
8	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM-PTSP
9	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas KIPS
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
11	Program Perumusan Kebijakan, Pendamingan dan Asistensi	Inspektorat

Misi 7 diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sebagai tulang punggung dalam penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu terwujudnya reformasi birokrasi yang kapabel, bersih, dan akuntabel, yang diukur dengan 5 indikator, yaitu indeks pelayanan publik, Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum dan Indeks SPBE. Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan integritas birokrasi, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara transparan, responsif, dan berdaya

guna. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, serta mendukung terciptanya iklim pemerintahan yang efisien dan bebas dari praktik maladministrasi.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan sejumlah program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek penguatan kelembagaan dan tata kelola, seperti fasilitasi dan koordinasi hukum, penataan organisasi, kebijakan pelayanan pengadaan barang/jasa, pemerintahan dan otonomi daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan kepegawaian daerah. Selain itu, terdapat pula program yang berfokus pada peningkatan layanan publik dan pengawasan, seperti pengelolaan arsip, pelayanan penanaman modal, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan pengawasan, serta pendampingan. OPD pelaksana antara lain Biro Hukum, Organisasi, Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), dan Biro Ekonomi, Badan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas PM-PTSP, Dinas KIPS dan Inspektorat. Kolaborasi lintas biro dan dinas ini menunjukkan strategi menyeluruh dalam membangun sistem pemerintahan modern, transparan, dan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

8. Tujuan dan Sasaran Misi 8

Gambar 3.8 Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 8

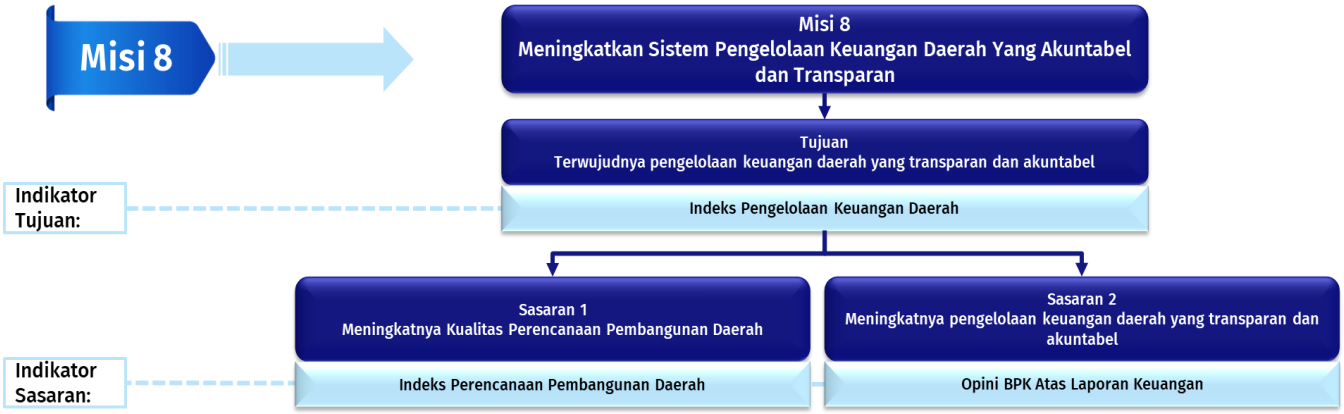

Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OPD
1	Program Perencanaan Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
2	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

Misi 8 difokuskan pada peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Misi ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan bersih dan profesional. Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator pengukuran berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi dua aspek kunci dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan dua sasaran strategis. Sasaran 1 adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara Sasaran 2 adalah meningkatnya

pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang diukur melalui Opini BPK atas Laporan Keuangan. Kedua sasaran ini menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti oleh pelaksanaan anggaran yang disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjaga kepercayaan publik serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Untuk mendukung sasaran tersebut, ditetapkan berbagai program prioritas daerah yang dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya terdapat enam program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda, BKAD, BAPENDA, dan Inspektorat. Program-program tersebut meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan aset; pengelolaan pendapatan; serta penyelenggaraan fungsi pengawasan. Keterlibatan lintas OPD mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam mendukung terciptanya sistem keuangan daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat pembangunan yang optimal bagi masyarakat.

3.1.5 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dan menjadi tolok ukur pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029. Sasaran ini dirumuskan secara terukur dan realistis dengan memperhatikan tantangan aktual, potensi unggulan daerah, serta arah kebijakan nasional. Melalui sasaran pembangunan yang jelas dan terarah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta tercapainya pembangunan yang inklusif

dan berkelanjutan. Rincian sasaran pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025 – 2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1 Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba	**Terwujudnya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**		**Survey Penilaian Integritas (SPI)**	**Nilai**	**73,98**	**75**	**78**	**80**	**81**	**82**	**83**
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)	Terdefinisi (Level 3)
	Terwujudnya Pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran narkoba		**Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba**	**Persen**	**1,69**	**1,50**	**1,50**	**1,25**	**1,25**	**1,00**	**1,00**
		Meningkatnya Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika	Persentase Sekolah yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persen	15	15	25	45	65	75	100
			Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	**Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sehat**		**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Angka**	**0,50**	**0,52**	**0,53**	**0,535**	**0,54**	**0,55**	**0,56**
		1) Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat;	Rata-Rata Capaian Pembelajaran:	Persen	51,72	53,83	54,37	54,92	55,47	56,02	56,57
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97	13,08 - 13,11	13,14 - 13,17	13,20 – 13.23	13,26 – 13,29	13,33 – 13,34	13,39 – 13,40
		2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat;	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Angka	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Prevalensi Stunting	Persen	20,8	19	18,3	17,6	16,9	15	14
			Angka Kelangsungan Hidup Usia Dewasa	Angka	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87
		3) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial	Persen	5,52	6,07	6,19	6,31	6,43	6,55	6,67
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,386	0,371	0,358	0,345	0,333	0,320	0,307
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,83	57.20	58.35	59.51	60.70	61.91	63.14
Misi 3 Membangun Perekonomian Daerah	**Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan**		**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,39**	**6,0 - 7,0**	**6,05 – 7,05**	**6,70 – 7,70**	**7,10 - 8,10**	**7,50 - 8,50**	**7,80 - 8,80**
		1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,68	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
			Kontribusi PDRB Pertambangan dan Penggalian	%	4,9	4,9-5,5	4,9-5,5	4,9-5,5	4,9-5,5	4,9-5,5	4,9-5,5
		2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	10,62	10,76	10,70	10,73	10,76	10,80	10,83

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Potensi Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	20,59	20-22	20-22	20-22	20-22	20-22	20-22
Misi 4 Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional	**Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui Penguatan konektivitas, Infrastruktur dasar yang andal, dan pengembangan komoditi unggulan**		**Indeks Daya Saing Daerah**	**Angka**	**3,53**	**3,53**	**3,56**	**3,59**	**3,62**	**3,65**	**3,69**
		1) Meningkatnya Konektivitas serta akses terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas;	Indeks Infrastruktur	Angka	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40
			Rasio Konektivitas	Rasio	0,504	0,504	0,508	0,512	0,516	0,520	0,524
		2) Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan melalui inovasi dalam investasi dan perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi	%	10	12	14	16	18	20	22
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,62	13,67	13,70	13,73	13,76	13,80	13,83
Misi 5 Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan	**Terwujudnya ketahanan pangan, energi dan air yang Tangguh, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan**		**Indeks Ketahanan Pangan Daerah**	**Angka**	**76,23**	**76,25**	**76,29**	**76,33**	**76,34**	**76,37**	**76,39**
			Indeks Ketahanan Energi Daerah	**Angka**	**6,64**	**6,64**	**6,64**	**6,65**	**6,65**	**6,66**	**6,66**
			Kapasitas Air Baku	**Angka**	**0,61**	**0,61**	**0,70**	**0,79**	**0,88**	**0.97**	**1,06**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pembangunan daerah										
		Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,2	14,9	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7
			Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,34	36	37.72	39,44	41,16	42,88	44,62
			Persentase Luas Layanan Irigasi	%	49,46	49,95	51,50	54,60	56,50	58,10	60,00
	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman Bagi Masyarakat		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Angka**	**76,26**	**78,71**	**78,88**	**79,05**	**79,22**	**79,39**	**79,56**
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	Angka	58,17	75,71	75,91	76,11	76,31	76,51	76,71
			Indeks Kualitas Udara	Angka	93,44	81,60	81,80	82,00	82,20	82,40	82,60
			Indeks Kualitas Air Laut	Angka	83,59	79,29	79,34	79,39	79,44	79,49	79,54
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	61,75	76,68	76,75	76,82	76,89	76,96	77,03
Misi 6 Memperbaiki Tata Kehidupan	**Terwujudnya Daerah yang Tertib, Aman dan Nyaman**		**Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas**	**Angka**	-	**60,50**	**60,50**	**70,00**	**70,50**	**75,00**	**75,00**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	125,91	159,08	159,07 – 157,40	157,39 – 155,72	155,71 – 154,06	154,05 – 149,14	149,13 – 147,46
	Terwujudnya Daerah yang Berkebudayaan Maju		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Angka**	**55,39**	**56,6 - 56,70**	**57,15 - 57,30**	**57,70 - 57,90**	**58,25 - 58,50**	**58,81 - 59,11**	**59,36 - 59,71**
		Meningkatnya Warisan Budaya Yang dilestarikan	1. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan;	Persen	11	15,25	18	21,5	29,75	39,75	49,75
			2. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan;	Persen	8,57	10	11,42	17,14	25,71	37,14	48,57
Misi 7 **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Angka**	**73,38**	**74,70**	**76,02**	**77,34**	**78,66**	**79,98**	**81,30**
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,20	4,21	4,21	4,21	4,22	4,22	4,22
			Nilai SAKIP	Nilai	67,67	68,07	68,46	68,85	69,24	69,63	70,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Indeks Sistem Merit	Indeks	0,80	0,80	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76,74	76	77	77,35	78,55	79,70	80,35
			Indeks SPBE	Indeks	3,01	3,02	3,05	3,10	3,15	3,25	3,30
Misi 8 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	**Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel**		**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Nilai**	**79,30**	**79,32**	**79,34**	**79,36**	**79,38**	**79,40**	**79,42**
		1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	88,38	88	88	89	90	90	90
		2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil analisis isu-isu strategis yang dikemukakan pada Bab II kemudian dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam Bab III ini, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029. Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penyajian lokus pembangunan berdasarkan orientasi wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Selanjutnya Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja, yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Pada akhirnya program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Rumusan Arah Pembangunan merupakan penjabaran langkah-langkah pelaksanaan Sasaran yang akan diambil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Daerah (TPB). Dalam proses perencanaan pembangunan, penentuan strategi menjadi hal yang krusial mengingat penetapan strategi yang tepat akan membuat pencapaian tujuan pembangunan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien. Arah Kebijakan merupakan langkah-langkah penjabaran terhadap strategi terpilih yang berisikan serangkaian kerangka pikir untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Pada akhirnya, arah kebijakan akan menjadi pedoman bagi

setiap pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, digunakan 3 (tiga) pendekatan untuk mendapatkan hasil optimal dan komprehensif. Ketiga pendekatan itu adalah: Pendekatan Holistik-Tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial. Pendekatan holistik-tematik merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan penyelesaian permasalahan terhadap suatu isu strategis dan permasalahan pembangunan dengan memadukan berbagai sektor terkait. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi tentang isu yang akan ditangani dan diikuti dengan penyusunan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, Pendekatan Holistik-Tematik merupakan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian secara menyeluruh terhadap sebuah permasalahan yang timbul.

Sedangkan pendekatan integratif adalah sebuah pendekatan perencanaan yang menekankan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap permasalahan yang mengemuka. Pendekatan integratif menekankan tentang pentingnya menggabungkan berbagai aspek ke dalam suatu proses penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini, pendekatan integratif akan lebih menyasar pada kesesuaian *output* dengan prioritas pembangunan daerah.

Terakhir, adalah pendekatan spasial. Pendekatan spasial merupakan pendekatan berbasis ruang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan untuk mengidentifikasi lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan pendekatan spasial, *outcome* atau hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih nampak. Pada akhirnya, dengan pendekatan ini akan lebih mudah untuk mengukur capaian pembangunan daerah karena ketepatan sasaran dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dan diukur.

Pelaksanaan Pembangunan di Sulawesi Utara Periode 2025 – 2029 tidak terlepas dari RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2045, dimana telah masuk dalam Tahap pertama RPJPD Provinsi Sulawesi Utara.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.2.1.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029 menggambarkan upaya arah kebijakan transformasi yang diturunkan (*cascading*) dari RPJPD 2025-2045 Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta mendukung tercapainya visi daerah, adalah sebagai berikut:

A. Mencegah dan Memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Narkoba

Misi ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan supremasi hukum serta pembangunan karakter manusia. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, serta penanaman nilai integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Kedaulatan supremasi hukum dengan memastikan bahwa regulasi yang ada mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Reformasi substansi hukum menjadi bagian penting dalam mempersempit celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dan jaringan narkoba. Selain itu, stabilitas politik dan keamanan diperkuat melalui sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat sipil

agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam upaya pemberantasan kejahatan ini.

Pemberantasan korupsi dan narkoba juga memerlukan pendekatan berbasis pembangunan karakter manusia dan penguatan modal sosial. Pendidikan antikorupsi dan anti-narkoba diintegrasikan sejak dini dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk generasi yang berintegritas dan memiliki daya tahan terhadap ancaman moral. Program rehabilitasi bagi korban narkoba dioptimalkan sebagai bentuk keseimbangan antara pendekatan hukum yang tegas dan aspek kemanusiaan. Selain itu, pengarusutamaan modal sosial dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan, baik melalui kampanye publik, pemberdayaan komunitas, maupun peran serta tokoh agama dan pemuka masyarakat. Misi penanggulangan dan pemberantasan narkoba diarahkan pada upaya terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Penanganan narkoba tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui strategi preventif dan rehabilitatif. Pemerintah Provinsi memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah rawan dan perbatasan, dengan dukungan infrastruktur keamanan dan teknologi informasi.

Upaya preventif dijalankan dengan mengarusutamakan pendidikan anti-narkoba sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan, kampanye publik, serta pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam program penyadaran

bahaya narkoba. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mendorong pembentukan satgas anti-narkoba di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif diwujudkan melalui optimalisasi pusat rehabilitasi terpadu serta layanan konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memberikan kesempatan kedua kepada para korban untuk kembali berdaya dan produktif. Dengan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan narkoba ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat kolaborasi antara lembaga, misi ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari narkoba, mendukung ketahanan masyarakat, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju daerah aman, sehat, dan berdaya saing.

Untuk itu, diperlukan beberapa strategi agar proses pencegahan dan pemberantasan KKN di Sulawesi Utara terlaksana. Strategi yang ditempuh antara lain:

a) Optimasi proses pra regulasi dan harmonisasi regulasi di daerah;
b) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
c) Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap laporan masyarakat;
d) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;

e) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan efektivitas pemerintahan digital;
f) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, pengangguran, dan pengadaan jasa- serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
g) Pengawasan proses pengembangan karir, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
h) Penguatan integritas partai politik.

B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi ini bertujuan untuk membentuk manusia yang produktif, berdaya saing, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks peningkatan layanan kesehatan, pemenuhan kualitas pelayanan dasar menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan akses layanan kesehatan yang merata, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pelayanan kesehatan. Telemedicine, rekam medis elektronik, serta inovasi berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan efisien. Di bidang pendidikan, kualitas layanan ditingkatkan melalui digitalisasi pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Pendidikan vokasi yang berorientasi pada industri 5.0 serta integrasi literasi digital menjadi bagian penting dalam

menciptakan SDM yang siap menghadapi dunia kerja. Selain itu, dalam bidang sosial, perlindungan bagi kelompok rentan diperkuat dengan skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, berbasis data dan teknologi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan langsung, tetapi juga melalui program pemberdayaan berbasis keterampilan agar individu lebih mandiri dan berdaya saing.

Strategi yang ditempuh antara lain:

1. Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat;
2. Percepatan Penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor;
3. Pemerataan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) di seluruh wilayah dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam;
4. Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan dari masyarakat lokal yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3TP;
5. Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan);
6. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan 13 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan untuk perwujudan lulusan yang sesuai kebutuhan dan berdaya saing di bursa kerja;

8. Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi dan pengadaan prodi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*) yang sesuai dengan pengembangan sektor unggulan perikanan, industri pariwisata, perkebunan, perdagangan, transportasi, dan konstruksi;
9. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
10. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi sektor unggulan perikanan, industri pariwisata, perkebunan, perdagangan, transportasi, dan konstruksi serta ketertarikan dengan DUDI;
11. Pemerataan afirmasi akses pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, penguatan sekolah terbuka dan sekolah dengan kebutuhan khusus;
12. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja;
13. Pengentasan kemiskinan terutama daerah afirmasi 3TP, dan wilayah kepulauan melalui perlindungan sosial adaptif;
14. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas;

15. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran;
16. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial;
17. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya proaktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
18. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
19. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T;
20. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;

21. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
22. Pengembangan teknologi dan kualitas sumberdaya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan;
23. Pengarusutamaan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan SDM melalui penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender, termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengambilan keputusan publik; penguatan layanan berbasis data terpilah jenis kelamin; dan penyediaan fasilitas pendukung yang ramah perempuan dan kelompok rentan.

C. Membangun Perekonomian Daerah

Misi tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Penguatan hilirisasi sumber daya alam unggulan menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi daerah tetapi juga membuka peluang kerja dengan meningkatkan kapasitas riset, konektivitas antar wilayah, serta kewirausahaan masyarakat. Selain itu, ekonomi daerah untuk mengoptimalkan keunggulan absolut dan komparatifnya, baik melalui sektor perdagangan internasional maupun peningkatan daya saing produk lokal agar dapat menembus pasar global.

Dalam mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru, penerapan prinsip keberlanjutan di segala bidang menjadi fokus utama. Transisi energi melalui

pemanfaatan Energy Storage System (ESS) serta teknologi ramah lingkungan diprioritaskan dalam sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Selain itu, akses digital yang merata menjadi fondasi bagi ekonomi kreatif dan UMKM berbasis digital, memungkinkan pelaku usaha untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas. Stabilitas ekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi, stabilitas harga, serta peningkatan kepercayaan investor agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berbagai kebijakan ini diarahkan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu, diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan serta sektor unggulan lainnya;
2. Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan terutama untuk produk pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
3. Pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan ekowisata untuk pertumbuhan berkelanjutan;
4. Peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya);

5. Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah;
6. Pembinaan dan pemberdayaan kegiatan pertambangan rakyat;
7. Pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk ekowisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan aksesibilitas, daya tarik wisata, dan investasi ekonomi lokal yang berkelanjutan;
9. Peningkatan kontribusi perdesaan dalam upaya diversifikasi ekonomi yang inklusif;
10. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan;
11. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
12. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif;
13. Peningkatan rantai nilai dengan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan perikanan, industri pariwisata, perkebunan, perdagangan, transportasi, dan konstruksi terutama ke Filipina dan kawasan Asia Tenggara lainnya, Asia Timur, dan Pasifik;
14. Pelaksanaan afirmasi *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, industri pariwisata, perkebunan, perdagangan, transportasi dan konstruksi;
15. Pengembangan kawasan perkotaan dan Wilayah Metropolitan yang terintegrasi dan berkelanjutan

berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;

16. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
17. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
18. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi produsen pengetahuan serta pemangku kepentingan daerah untuk IPTEKIN inklusif dan Berkelanjutan;
19. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja;
20. Kemudahan perizinan dan optimalisasi pelayanan penanaman modal;
21. Peningkatan produktivitas BUMD;
22. Melibatkan peran ekonomi syariah dalam pembangunan daerah melalui pengembangan kebijakan ekosistem halal;
23. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan

listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan;

24. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis. (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.

D. Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional

Misi ini menekankan pentingnya infrastruktur sebagai fondasi utama dalam meningkatkan konektivitas, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dioptimalkan melalui

pemanfaatan infrastruktur yang telah ada dan pengembangan baru yang berbasis teknologi rendah karbon. Wilayah dengan keunggulan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan, atau pusat pariwisata, merupakan aspek prioritas untuk mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, penyediaan energi berbasis sumber terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dimanfaatkan secara optimal agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana, kualitas dan keberlanjutan menjadi aspek utama. Infrastruktur yang dibangun hendaklah ramah lingkungan dengan menerapkan konsep green building, efisiensi energi, serta pengurangan emisi karbon. Penggunaan bahan konstruksi berkelanjutan dan sistem transportasi publik berbasis energi bersih menjadi langkah strategis dalam mewujudkan daerah modern dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga untuk memastikan adanya konektivitas antar wilayah agar distribusi barang dan jasa lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Untuk menunjang hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;
2. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;

3. Pengembangan Pelabuhan Bitung dan pelabuhan lainnya untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan meningkatkan peran sebagai hub Kawasan Timur Indonesia;
4. Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
5. Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi;
6. Dukungan pengembangan bandara utama Sam Ratulangi, bandara perairan (seaplane), dan bandara lainnya, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas;
7. Dukungan pembangunan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik yang menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara;
8. Pengembangan angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda;
9. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Manado yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang;
10. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim;

11. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
12. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk kota tanpa permukiman kumuh;
13. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
14. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
15. Tersedianya Lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal;
16. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum;
17. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah;
18. Pengelolaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman pada daerah kepulauan dan rawan air;
19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman;
20. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah

terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang);

21. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
22. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
23. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional;
24. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
25. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
26. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance;
27. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan;
28. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
29. Optimalisasi pengembangan investasi daerah, pengembangan ekspor, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

E. Meningkatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air secara Merata dan Berkelanjutan

Misi tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, bencana alam, dan tekanan lingkungan, ketangguhan manusia dan masyarakat perlu diperkuat melalui strategi adaptasi dan mitigasi berbasis inovasi teknologi. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan dengan pendekatan

berkelanjutan yang menyeimbangkan antara eksploitasi dan konservasi. Riset dan inovasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan SDA, termasuk pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, teknologi pengelolaan air, serta diversifikasi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.

Di sektor pangan, penguatan kelembagaan dan instrumen kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan distribusi yang adil, peningkatan produktivitas, serta perlindungan terhadap petani dan nelayan. Dalam aspek energi, transisi menuju energi terbarukan perlu dipercepat dengan investasi dalam teknologi penyimpanan energi dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sementara itu, dalam pengelolaan air, pendekatan berbasis ekosistem diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan juga butuh penguatan melalui edukasi dan regulasi yang mendukung praktik ramah lingkungan.

Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial;
3. Diversifikasi pangan, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian pangan, dan penanganan kerawanan pangan;

4. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
5. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
6. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana;
7. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang;
8. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan;
9. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
10. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
11. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan;
12. Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
13. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
14. Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik;
15. Pemerataan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting;

16. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai;
17. Pengembangan *Flood Forecasting Warning System*;
18. Pengurangan risiko abrasi di pesisir dan kepulauan;
19. Perlindungan Manado dari banjir kala ulang 100 tahun;
20. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan mangrove serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies endemik yang dilindungi di antaranya tarsius;
21. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim;
22. Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas;
23. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim;
24. Penguatan upaya pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim;
25. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (*Food, Energy, and Water*) Nexus;
26. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;
27. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
28. Peningkatan ketersediaan listrik dan optimalisasi pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

F. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Nyaman, dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya yang Berkearifan Lokal

Misi tersebut memiliki peran strategis dalam membangun harmoni sosial yang berlandaskan ketertiban dan keamanan. Keamanan daerah, terutama di wilayah perbatasan, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Daerah perbatasan memiliki posisi strategis sebagai gerbang kedaulatan negara, sehingga penguatan pengawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi peran aparat keamanan menjadi prioritas utama. Upaya ini perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Peningkatan infrastruktur keamanan, seperti pos perbatasan, sistem pemantauan berbasis teknologi, serta patroli rutin, wajib diperkuat guna mencegah potensi ancaman seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas batas. Namun, keamanan tidak hanya bergantung pada aspek militer dan kepolisian, tetapi juga pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Penyediaan lapangan kerja, akses pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang memadai akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Masyarakat yang memahami dan menjunjung tinggi nilai budaya serta identitas lokal cenderung lebih solid dalam menjaga persatuan dan stabilitas daerahnya.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

1. Penguatan kerjasama antarnegara dengan Filipina dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan laut;
4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR,dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional;
5. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
6. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.

G. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan sangat berkaitan erat dengan aspek pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan ASN yang profesional (meritokrasi), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government), Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat, peningkatan inovasi pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perlu mendorong tercapainya sinergitas antar daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

1. Optimasi proses pra regulasi dan harmonisasi regulasi di daerah;
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap laporan masyarakat;
4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan efektivitas pemerintahan digital;
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, pengangguran, dan pengadaan jasa- serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;

7. Pengawasan proses pengembangan karir, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Penguatan integritas partai politik.

H. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan

Misi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan efektif dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Kinerja pemerintah daerah provinsi sangat bergantung pada sistem keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan perlu diperkuat dengan penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-Budgeting dan e-Reporting, agar setiap penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting), bukan hanya sekadar serapan anggaran. Pengalokasian anggaran didasarkan pada prioritas pembangunan daerah serta memiliki indikator kinerja yang jelas. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan agar lebih profesional dan kompeten dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Pengawasan internal dan eksternal juga diperkuat dengan sistem audit yang independen untuk memastikan bahwa setiap belanja daerah digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang hal tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Optimasi proses pra regulasi dan harmonisasi regulasi di daerah;
2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap laporan masyarakat;
4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan efektivitas pemerintahan digital;
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, pengangguran, dan pengadaan jasa- serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
7. Pengawasan proses pengembangan karir, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Penguatan integritas partai politik.

3.2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar tetap sesuai dengan visi dan misi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029 maka perlu ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang nantinya akan

menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun yang akan berikutnya. Arah Kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan fokus dan tema pelaksanaan pembangunan tahunan. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Pembangunan RPJMD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029
(Tabel 3.6 InMenDagri 2/2025)

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan	Penguatan SDM, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi	Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Pemantapan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Perwujudan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Akselerasi Transformasi Menuju SDM Unggul, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Digitalisasi Inklusif Berkelanjutan

Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

1. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
3. Penuntasan pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
4. Upaya lanjutan Perkuatan proses hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi, kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
5. Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di segala bidang, Memfokuskan transisi energi pada penerapan pemanfaatan (ESS).

6. Pemenuhan akses digital di segala bidang.
7. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melalui Perkuatan ekonomi dibidang perdagangan internasional.
8. Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan Perkuatan lembaga tunggal pengelola regulasi, penerapan manajemen pada perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta Perkuatan kapasitas masyarakat sipil.
9. Supremasi hukum serta Perkuatan stabilitas politik dan keamanan, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum, dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian.
10. Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
11. Keamanan daerah terutama di daerah perbatasan.
12. Perkuatan pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial.
13. Perkuatan pembangunan karakter manusia, pengarusutamaan dan menggerakkan modal sosial.
14. Ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Perkuatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
15. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan penggunaan energi terbarukan serta riset, inovasi dan teknologi menopang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan.

16. Ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana serta perkuatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
17. Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon.
18. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
19. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan RPJMD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Mencegah dan Memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Narkoba	✔ Supremasi hukum serta Perkuatan stabilitas politik dan keamanan, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum, dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian; ✔ Perkuatan pembangunan karakter manusia, pengarusutamaan dan menggerakkan modal sosial; ✔ Perkuatan sistem pengawasan internal dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan peran aparat pengawas dan masyarakat guna mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); ✔ Intensifikasi upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui penguatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta kerjasama lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	✔ Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar kesehatan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		✔ Penuntasan pemenuhan kualitas pelayanan dasar pendidikan serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif; ✔ Penuntasan pemenuhan kualitas perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif; ✔ Perkuatan pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial; ✔ Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penguatan sarana, peningkatan kompetensi pendidik, dan perluasan program pembelajaran yang inklusif; ✔ Peningkatan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui penguatan fasilitas, tenaga medis, dan promosi hidup sehat. ✔ Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan	Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		○ Penguatan tata kelola dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender.	
3.	Membangun Perekonomian Daerah	✔ Upaya lanjutan penguatan hilirisasi SDA unggulan, termasuk sektor pertambangan, dukungan riset, inovasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk akselerasi ekonomi daerah; ✔ Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menguatkan keunggulan absolut daerah dan memanfaatkan keunggulan komparatif melalui Perkuatan ekonomi dibidang perdagangan internasional; ✔ Penerapan ekonomi hijau dan energi biru di segala bidang, memfokuskan transisi energi pada penerapan pemanfaatan (ESS/*Energy Storage System*); ✔ Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan aksesibilitas, daya tarik wisata, dan investasi ekonomi lokal yang berkelanjutan. ✔ Pemenuhan akses digital di segala bidang; ✔ Menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan;	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		✔ Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam perencanaan pembangunan daerah; ✔ Ekonomi inklusif dan berkelanjutan didorong melalui penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, perluasan lapangan kerja, dan investasi berbasis potensi lokal; ✔ Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, pemberdayaan pelaku lokal, dan peningkatan daya saing.	
4.	Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional	✔ Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon; ✔ Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; ✔ Penguatan ketangguhan masyarakat, riset dan inovasi untuk mendukung daya dukung lingkungan, serta pengembangan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan SDA; ✔ Penguatan daya saing daerah melalui konektivitas, infrastruktur dasar yang andal, dan pengembangan komoditi unggulan berorientasi pasar.	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		✔ Peningkatan kontribusi komoditi unggulan terhadap PDRB melalui konektivitas, infrastruktur, dan hilirisasi produk bernilai tambah.	
5.	Meningkatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air secara Merata dan Berkelanjutan	✔ Ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Perkuatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; ✔ Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan penggunaan energi terbarukan serta riset, inovasi dan teknologi menopang ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; ✔ Ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana serta perkuatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK; ✔ Peningkatan ketahanan pangan, energi, dan air berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, infrastruktur, inovasi, dan pengelolaan SDA yang adil dan ramah lingkungan; ✔ Peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sampah terpadu berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
6.	Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Nyaman, dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya yang Berkearifan Lokal	✔ Keamanan daerah terutama di daerah perbatasan; ✔ Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai dasar pembentukan perilaku sosial yang tertib, aman, dan nyaman. ✔ Pengembangan pelestarian budaya yang berbasis komunitas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan lokal, melalui edukasi, fasilitasi kegiatan seni budaya, dan penguatan kelembagaan adat sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang tertib, aman, nyaman, dan berakar pada kearifan lokal.	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi
7.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	✔ Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan Perkuatan lembaga tunggal pengelola regulasi, penerapan manajemen pada perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta Perkuatan kapasitas masyarakat sipil; ✔ Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelayanan publik yang transparan dan responsif.	RPJPD Sulut (Perda 5/2024): Arah Kebijakan Periode 2025-2029 : Perkuatan Fondasi Transformasi

No.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
8.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan	✔ Penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, berbasis hukum, berkeadilan, dan berkarakter sosial; ✔ Pengelolaan pelayanan dasar berkualitas dan SDM produktif unggul; ✔ Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Hilirisasi SDA, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Inklusi Digital, dan Stabilitas Berkelanjutan; ✔ Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan untuk Mendukung Ketertiban Sosial, Keamanan Perbatasan, dan Pelestarian Budaya Lokal. ✔ Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan internal yang efektif guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif; ✔ Peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penguatan sistem penganggaran, pelaporan, dan pengawasan berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.	

A. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2025 – 2029. Pada periode ini, arah kebijakan tahun pertama merupakan pengejawantahan akan kesinambungan pembangunan daerah. Transisi arah kebijakan ini menjadi landasan (*baseline*) penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi kuat, sumber daya manusia unggul, serta pemerintahan yang stabil dan berdaya saing. Arah Kebijakan tahun 2025 adalah ***"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui Pariwisata dan Ketahanan Pangan"***. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pemerataaan pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan daya saing investasi daerah;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode 2025 – 2029. Arah Kebijakan di Tahun 2026 ini diarahkan pada "***Penguatan SDM, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi***". Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM;

2. Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
3. Membangun perekonomian daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang berintegritas, penguatan SDM, pengembangan ekonomi kreatif, integrasi perencanaan-pembiayaan, serta optimalisasi eksplorasi, dan perizinan pertambangan dan penggalian;
4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal;
6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
7. Pemenuhan Energi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; dan
8. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah.

C. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah Kebijakan Pada Tahun 2027 difokuskan pada "***Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan***". Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2027 adalah:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas untuk mencegah KKN dan narkoba melalui inovasi layanan publik, ekonomi inklusif, dan SDM berdaya saing berkarakter;
2. Peningkatan kualitas sdm berdaya saing dan berkarakter melalui tata kelola pemerintahan inklusif, ekonomi inovatif, pendidikan berkualitas, serta kesehatan dan budaya berkelanjutan;
3. Penguatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, serta optimalisasi sektor pertambangan berkelanjutan

untuk peningkatan PAD dan pembangunan yang ramah lingkungan;

4. Memperkuat daya saing daerah dan global melalui tata kelola inovatif, sdm unggul, ekonomi inklusif, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air melalui inovasi tata kelola, pemberdayaan ekonomi desa, dan pemanfaatan teknologi berbasis keberlanjutan dan keadilan sosial;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tertib, dan nyaman melalui tata kelola berintegritas, penguatan budaya lokal, dan pelayanan publik berbasis kearifan serta inklusi sosial;
7. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik melalui tata kelola berintegritas, pelayanan publik digital, perencanaan inklusif, pengawasan efektif, serta penguatan nilai pancasila dan budaya;
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan kinerja, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, serta optimalisasi belanja dan pendapatan daerah.

D. Arah Kebijakan Tahun 2028

Tahun 2028 merupakan tahun ke empat dari periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2025 – 2029. Arah kebijakan Pembangunan Daerah pada tahun 2028 ini difokuskan pada "***Pemantapan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan***". Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2028 diarahkan pada:

1. Penguatan tata kelola berintegritas dan kolaboratif untuk pemberantasan KKN dan narkoba guna mewujudkan pemerintahan bersih dan masyarakat aman;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul melalui pendidikan inklusif, kesehatan terpadu, tata kelola dinamis, serta budaya berkarakter;
3. Membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan melalui tata kelola unggul, inovasi desa, integrasi kebijakan, SDM kompeten serta peningkatan PAD dari sektor pertambangan;
4. Memperkuat daya saing daerah dan global melalui inovasi, tata kelola unggul, SDM berkarakter, serta ekonomi lokal berkelanjutan;
5. Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata, berkelanjutan, berbasis riset, inovasi, kearifan lokal, dan tata kelola unggul;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat tertib, aman, nyaman, melalui pelestarian budaya lokal, penguatan integritas, dan pemberdayaan kolaboratif berbasis kearifan lokal;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, transparan, dan responsif berbasis teknologi, riset, kolaborasi, serta penguatan peran masyarakat dan hukum;
8. Penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, berbasis risiko dan teknologi, mendukung integritas, serta peningkatan kualitas belanja publik.

E. Arah Kebijakan Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode 2025 – 2029. Pada tahun ini diharapkan semua target

capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2029 berfokus pada "***Perwujudan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Utara Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan***". Diharapkan bahwa di tahun ini Sulawesi Utara benar-benar telah menciptakan perkuatan fondasi transformasi layak untuk periode selanjutnya. Dimana pada tahun ini juga akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk melaksanakan agenda nasional dan daerah dimaksud. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola berintegritas melalui pengawasan berbasis risiko dan kolaborasi masyarakat untuk mencegah KKN serta narkoba secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter melalui tata kelola pemerintahan dinamis, pendidikan inklusif, serta penguatan budaya, kesehatan, dan inovasi daerah;
3. Penguatan ekonomi daerah berkelanjutan melalui tata kelola dinamis, inovasi desa, dan pemberdayaan lokal, disertai peningkatan nilai tambah sektor pertambangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi;
4. Memperkuat daya saing daerah dan internasional melalui tata kelola berintegritas, inovasi ekonomi, serta jejaring global berkelanjutan dan inklusif;
5. Mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan melalui tata kelola inovatif,

pemberdayaan desa, serta penguatan SDM berdaya saing;

6. Menata kehidupan masyarakat tertib, aman, dan nyaman melalui penguatan budaya lokal, tata kelola berintegritas, serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, transparan, akuntabel, responsif, berdaya saing, dan inklusif melalui pelayanan publik prima serta inovasi pembangunan berkelanjutan;
8. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui inovasi fiskal, regulasi adaptif, serta perencanaan dan pengawasan berbasis kinerja.

F. Arah Kebijakan Tahun 2030

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2030 – 2034. Pada periode ini, arah kebijakan tahun pertama merupakan pengejawantahan akan kesinambungan pembangunan daerah. Transisi arah kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi kuat, sumber daya manusia unggul, serta pemerintahan yang stabil dan berdaya saing. Arah Kebijakan untuk tahun 2030 adalah *"**Akselerasi Transformasi Menuju SDM Unggul, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Digitalisasi Inklusif Berkelanjutan**"*. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2030 diarahkan pada:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, berintegritas, dan bebas narkoba melalui penguatan

pengawasan, penegakan hukum, nilai Pancasila, serta pemberdayaan masyarakat;

2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing melalui tata kelola pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi inklusif yang adaptif, serta profesional;
3. Transformasi ekonomi daerah inklusif melalui tata kelola unggul, inovasi desa, penguatan fiskal, kemitraan strategis, dan pemberdayaan SDM berbasis kearifan lokal;
4. Transformasi daya saing daerah berkelanjutan melalui tata kelola unggul, inovasi ekonomi kreatif, kolaborasi global, dan pembangunan SDM berkarakter;
5. Transformasi ketahanan pangan, energi, dan air secara merata dan berkelanjutan melalui tata kelola daerah berintegritas, inovatif, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat;
6. Akselerasi transformasi kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman melalui penguatan budaya lokal, nilai luhur Pancasila, serta tata kelola berintegritas;
7. Akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, partisipatif, dan transparan guna mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing;
8. Akselerasi transformasi sistem keuangan daerah akuntabel dan transparan untuk tata kelola pemerintahan berintegritas, pembangunan berkinerja tinggi, ekonomi inklusif, dan SDM unggul.

Tabel 3.5
Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 Diselaraskan dalam Arah Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

RPJPD Tahun 2025 -2045				RPJMD Tahun 2025 -2029			
Transformasi		**Arah Pembangunan**		**Misi**		**Arah Pembangunan**	
I	Transformasi Sosial;	IE1	Kesehatan untuk semua	II	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	IE1	Kesehatan untuk semua
		IE2	Pendidikan berkualitas yang merata			IE2	Pendidikan berkualitas yang merata
		IE3	Perlindungan sosial yang adaptif			IE3	Perlindungan sosial yang adaptif
II	Transformasi Ekonomi;	IE4	Iptek,Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	III	Membangun perekonomian daerah	IE4	Iptek,Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
		IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE5	Penerapan Ekonomi Hijau
		IE6	Transformasi Digital			IE6	Transformasi Digital
		IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
III	Transformasi Tata Kelola;	IE9	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	I VII	Mencegah dan Memberantas KKN serta narkoba; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;	IE9	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif

RPJPD Tahun 2025 -2045				RPJMD Tahun 2025 -2029			
Transformasi		**Arah Pembangunan**		**Misi**		**Arah Pembangunan**	
				VIII	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.		
	Keamanan Daerah,	IE10	Hukum Berkeadilan			IE10	Hukum Berkeadilan
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro			IE11	Stabilitas Ekonomi Makro
IV	Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	IE12	Stabilitas Keamanan Daerah	VI	Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal	IE12	Stabilitas Keamanan Daerah
V	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi;	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	V	Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		IE14	Keluarga berkualitas, kesetaraan dan masyarakat inklusif			IE14	Keluarga berkualitas, kesetaraan dan masyarakat inklusif
		IE15	Lingkungan hidup berkualitas			IE15	Lingkungan hidup berkualitas
		IE16	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan			IE16	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

RPJPD Tahun 2025 -2045			RPJMD Tahun 2025 -2029	
Transformasi		**Arah Pembangunan**	**Misi**	**Arah Pembangunan**
		IE17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		IE17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
VI	Kerangka Implementasi Transformasi;	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	IV Memperkuat daya saing daerah dan internasional;	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
		Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		Mewujudkan kesinambungan pembangunan		Mewujudkan kesinambungan pembangunan

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan dasar penetapan Program Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program Pembangunan Daerah merupakan instrumen pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah dijabarkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah.Program Pembangunan Daerah menempati posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena melalui Program pembangunan Daerah, pemenuhan target sasaran serta Indikator Kinerja Utama akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Oleh karena itu maka tidak semua program yang ada dimasukkan dalam Program pembangunan Daerah, tapi hanya program prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja yang berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja dimulai dari visi hingga menghasilkan *outcome* yang diharapkan. *Cascading* kinerja ini bukan sekadar menurunkan indikator secara hierarkis, tetapi lebih menekankan pada perumusan langkah strategis yang terintegrasi dan selaras yang menggambarkan fokus utama pembangunan dalam suatu periode tertentu. Dengan menggunakan pendekatan *cascading* kinerja yang sistematis, program prioritas yang dihasilkan akan terarah dan berorientasi pada hasil nyata, dan untuk kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah.

Sementara itu, implementasi 17 Program Unggulan (PU) yang merupakan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur periode ini diejawantahkan ke dalam 45 Kegiatan Pembangunan (KP) Tahun 2025– 2030 yang merupakan highlight indikasi intervensi sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat. 45 Kegiatan ini perlu mendapatkan perhatian bersama, baik itu Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan agar terjadi keselarasan pelaksanaan pembangunan dari pusat hingga ke daerah, termasuk pemerintah desa. Keselarasan dimaksud dimulai dari aspek perencanaan, dimana kegiatan pembangunan dimaksud telah selaras dengan Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN 2025 – 2029. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Program Prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"						
Misi 1 Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba	Terwujudnya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)(Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
	Terwujudnya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba			Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba(%)		
		Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika		Persentase Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (%)		
				Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Narkoba kepada Masyarakat (%)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies (Kabupaten/Kota)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
				"Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan" ()		
				Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)		
				Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)		
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		
				Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan ()		
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
				Praktik Inisisasi Menyusu Dini ()		
				Persentase penurunan angka kematian Dengue (%)		
				Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif ()		
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
				Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan program pengendalian anti mikroba (PPRA) (%)		
				BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk ()		
				Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
				Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)		
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan POPM Kecacingan setiap 6 bln sekali (Kabupaten/Kota)		
				Persentase cakupan skrining obesitas (%)		
				BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan ()		
				Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)		
				Jumlah Kabupaten Kepulauan yang menerima pelayanan kesehatan (Kabupaten/Kota)		
				Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotika rasional (%)		
				Remaja putri yang Konsumsi TTD ()		
				Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (Kab/Kota)		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pencegahan Hepatitis Virus (Kabupaten/Kota)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)		
				ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART (%)		
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya dengan pemenuhan SPA (%)		
				Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik (%)		
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang menerapkan Sisrute (%)		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)		
				Bor (Bed Occupancy Rate) (%)		
				Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang diterbitkan izin operasionalnya sesuai standar (%)		
				Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)		
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Avlos (Average Length Of Stay) (Hari)		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		
				Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)		
				Toi (Turn Over Internal) (Hari)		
				Persentase RS Provinsi yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)		
				Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan UBM (Kabupaten/Kota)		
				Cakupan penemuan kasus pneumonia balita (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
				Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)		
				Persentase RS yang menerapkan KRIS (%)		
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)		
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)		
				Persentase RS yang melaksanakan sistem klaim sesuai aturan (%)		
				Persentase RS Kabupaten/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)		
				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)		
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan Sehat			Indeks Modal Manusia (IMM)(Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Rata-Rata Capaian Pembelajaran (%)		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)		
				Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)		
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Kelangsungan Hidup Balita (Angka)		
				Prevalensi Stunting (%)		
				Angka Kelangsungan Hidup Usia Dewasa (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies (Kabupaten/Kota)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
				"Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan" ()		
				Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)		
				Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)		
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		
				Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan ()		
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
				Praktik Inisisasi Menyusu Dini ()		
				Persentase penurunan angka kematian Dengue (%)		
				Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif ()		
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
				Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan program pengendalian anti mikroba (PPRA) (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk ()		
				Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
				Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)		
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		
				Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan POPM Kecacingan setiap 6 bln sekali (Kabupaten/Kota)		
				Persentase cakupan skrining obesitas (%)		
				BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan ()		
				Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)		
				Jumlah Kabupaten Kepulauan yang menerima pelayanan kesehatan (Kabupaten/Kota)		
				Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotika rasional (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Remaja putri yang Konsumsi TTD ()		
				Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (Kab/Kota)		
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pencegahan Hepatitis Virus (Kabupaten/Kota)		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)		
				ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART (%)		
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya dengan pemenuhan SPA (%)		
				Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik (%)		
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang menerapkan Sisrute (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		
				Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)		
				Bor (Bed Occupancy Rate) (%)		
				Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (%)		
				Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang diterbitkan izin operasionalnya sesuai standar (%)		
				Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)		
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Avlos (Average Length Of Stay) (Hari)		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)		
				Toi (Turn Over Internal) (Hari)		
				Persentase RS Provinsi yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)		
				Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan UBM (Kabupaten/Kota)		
				Cakupan penemuan kasus pneumonia balita (%)		
				Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
				Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)		
				Persentase RS yang menerapkan KRIS (%)		
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)		
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase RS yang melaksanakan sistem klaim sesuai aturan (%)		
				Persentase RS Kabupaten/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Bto (Bed Turn Over) (Kali)		
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)		
				Gdr (Gross Death Rate) (Per 1000)		
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)		
				Ndr (Net Death Rate) (Per 1000)		
				Indeks Kepuasan Pasien (Skor)		
				Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)		
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
			Menigkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga (Prestasi)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepemudaan (%)		
				Persentase Pemuda Aktif Organisasi (%)		
				Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Narkoba (Orang)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Rasio Keluarga Yang Memahami Kesetaraan Dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK) (Rasio)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)		
				Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)		
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)		
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Terjaminnya Pemenuhan hak anak secara komperhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Peringkat dalam KLA (Persentase)		
Misi 3 Membangun Perekonomian Daerah	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan		Kontribusi PDRB Pertambangan dan Penggalian (%)		
				Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan tervalidasi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)		
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)		
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Ha)	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
				Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Dokumen)		
		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Unggulan Daerah		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		
				Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Laut, pesisir dan pulau2 kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan yang ditetapkan (Hektar)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ton)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERKEBUNAN
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)		
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)		
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)		
				Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)		
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
				Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya realisasi	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	PROGRAM Perencanaan DAN	DINAS PERINDUSTRIAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			pembangunan industri	dan Kawasan Industri (Persentase)	PEMBANGUNAN INDUSTRI	DAN PERDAGANGAN
Misi 4 Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional	Terwujudnya Daya Saing Daerah yang Tinggi melalui Penguatan Konektivitas, Infrastruktur Dasar yang Andal, dan Pengembangan Komoditi Unggulan			Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
		Meningkatnya Konektivitas serta Akses terhadap Infrastruktur Dasar yang Berkualitas		Indeks Infrastruktur (Angka)		
				Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)		
			Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	Rasio Konektivitas Laut (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase penduduk terlayani transportasi umum ((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Unggulan melalui Inovasi dalam Investasi dan Perdagangan		Persentase peningkatan investasi di provinsi (%) Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB (%)		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Misi 5 Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan	Terwujudnya Ketahanan Pangan, Energi dan Air yang Tangguh, Adil, dan Berkelanjutan untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah			Indeks Ketahanan Energi Daerah(Angka)		
				Kapasitas Air Baku((%))		
				Indeks Ketahanan Pangan(Angka)		
		Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Berkelanjutan		Persentase Luas Layanan Irigasi (%)		
				Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)		
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)		
	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Nyaman bagi Masyarakat			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah(Indeks)		
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat		Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
				Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)		
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) B3 Skala Provinsi ()	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 6 Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Nyaman Dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Yang Berkearifan Lokal	Terwujudnya Daerah yang Tertib, Aman dan Nyaman			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlimas(Angka)		
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
				Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Terwujudnya Daerah yang Berkebudayaan Maju			Indeks Pembangunan Kebudayaan(Angka)		
		Meningkatnya Warisan Budaya Yang dilestarikan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)		
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			pengembangan kesenian tradisional			
			Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum (Orang)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS KEBUDAYAAN
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)		
Misi 7 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP (Nilai)		
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
				Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO BARANG DAN JASA
			Meningkatnya kualitas	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	INSPEKTORAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	BIRO HUKUM
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET
			Meningkatnya tata kelola organisassi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Misi 8 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah(Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)		
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET
				Persentase Penurunan SILPA (%)		
			Meningkatnya Upaya Eksetensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 serta mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen penuh mendukung Program Prioritas Nasional melalui perumusan dan pelaksanaan program unggulan daerah yang terintegrasi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025–2029. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta pelestarian lingkungan hidup.

Dalam bidang tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan integritas birokrasi, serta penguatan kapasitas ASN melalui penerapan sistem meritokrasi dan kesejahteraan berbasis kinerja. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Di sektor pendidikan, program penuntasan wajib belajar 13 tahun, pembangunan sekolah unggulan, dan pengembangan pendidikan vokasi menjadi prioritas. Program ini selaras dengan RPJMN yang menekankan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.

Pada bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulut mengakselerasi *Universal Health Coverage* (UHC), penguatan layanan kesehatan primer hingga pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten/kota. Hal ini bersinergi dengan prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting, kematian ibu dan anak, serta penanggulangan TBC.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan drainase dilakukan guna mendukung konektivitas wilayah serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pengembangan *food estate*. Di bidang ekonomi, peningkatan produksi pangan, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, serta pemberdayaan UMKM menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata strategis seperti Manado–Likupang dengan konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular, serta pembangunan *Maritime Logistics Hub* di KEK Manado-Bitung, menunjukkan keterkaitan erat antara prioritas daerah dan PSN. Pemerintah juga mengedepankan agenda perubahan iklim melalui penyusunan *Climate Action Plan* dan pengembangan energi terbarukan.

Dengan demikian, arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029, tetapi juga memperkuat kontribusi daerah dalam proyek strategis nasional, menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya sebagaimana pada Tabel 3.7, dan Tabel 3.8

Tabel 3.7 Keterkaitan antara Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025 - 2029

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
1.	***Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN dan Narkoba:***						
	29. Penerapan dan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention dan Survey Penilaian Integritas (SPI);	Menaikkan gaji ASN, (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KPK, Kemendagri, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	30. Penguatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23%.	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenkeu, Kemendagri, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN	Polri
2.	***Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 13 Tahun dan Introduksi Makan Sehat Bergizi Gratis:***						
	1. Wajib Belajar Anak Usia SD 6-13 Tahun (Angka Partisipasi Murni, APM 100%/95,68%)	Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta memperbaiki sekolah yang memerlukan renovasi.	• Perluasan layanan pendidikan anak usia dini; • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	• Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	15 kab/kota	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota	
	2. Wajib Belajar Anak Usia SMP 13-15 Tahun (APM 100%/76,56%)				15 kab/kota	APBN, APBD Provinsi	

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			• Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	SMA Garuda: Langowan	dan APBD Kab/Kota	
	3. Pemberian Makan Sehat Bergizi Gratis	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	• Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita • Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.	Program Makan Bergizi gratis	15 kab/kota	APBN	Badan Gizi Nasional
3.	***Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi***						
	4. Pembangunan SMK di 15 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Program Diploma, dan Perguruan Tinggi;	Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta memperbaiki sekolah yang memerlukan renovasi.	• Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul • Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Pemprov.
	5. Pengembangan Ekosistem Pendidikan (Peserta Didik, Guru dan Tenaga Pengajar,	Tidak ada	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN	Kemenristekdikti

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	Kurikulum, Institusi Pendidikan, Orangtua dan Keluarga, Pemerintah, Teknologi, serta Komunitas dan Lingkungan)		meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (pelatihan, in-service training), perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja.				
4.	***Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial***						
	6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC);	Pemeriksaan kesehatan gratis, menyelesaikan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten	• Penurunan kematian ibu dan anak; • Pencegahan dan penurunan stunting; • Penyelenggaraan pemeriksanaan kesehatan gratis; • Penuntasan TBC; • Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita; • Penguatan ekosistem pendukung	• Program penuntasan TBC; • Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kab/Kota.	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenkes, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan;						
	8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis);						

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			pemberian makan bergizi; • Eliminasi penyakit Kusta dan *Schistosomiasis;* • Investasi layanan kesehatan primer; • Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kab/Kota dan pengembangan layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses; • Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan.				
5.	***Penguatan Jaringan Infrastuktur Jalan, Irigasi, dan Drainase:***						
	9. Pembangunan Jalan Layang (Fly Over Transmart Kairagi), Autonomous Rail Rapid Transit (ART, Kereta/Trem Tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi, dan Jembatan Penyeberangan Bitung – Pulau Lembeh;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dumoga dan Sangkub untuk Pengembangan Food Estate;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Kab. Bolmong, Kab. Bolmut	APBN	Kementrian PUPR Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana);	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
6.	***Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing:***						
	12. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis *Food Estate* dan *Agri-Genomics*;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya Pengembangan Manajemen Talenta Nasional Riset dan Inovasi seperti Agro-Produksi, Agro-Industri dan Agro-Marketing	• Ketahanan pangan melalui Perhutanan berbasis masyarakat; • Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional;	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pertanian, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	13. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Hortikultura dan Rempah;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pertanian, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	14. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Ternak dan Agribisnis Peternakan;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi.	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pertanian, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	15. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Pengembangan Hilirisasi Kelapa, dan Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Perindustrian, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	16. Pengembangan Resi Gudang, KUR, dan *Marketplace Agribusiness*;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada			
7.	***Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya:***						

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	17. Pembangunan Integrated Likupang Fishing Port and International Fish Market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);	Tidak ada	Pengembangan pangan akuatik	Tidak ada	Kab. Minut	APBN/Loan	Kementrian KKP, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	18. Perluasan dan Rehabilitasi PPI Dagho, Kema, Sitaro, Minahasa, Belang, dan Pembangunan PPI di lokasi strategis lainnya;	Tidak ada	Pengembangan pangan akuatik	Tidak ada	Kab. Kepl. Sangihe, Sitaro, Minut, Minahasa, Mitra	APBN, APBD Provinsi	Kementrian KKP, Pemda Provinsi
8.	***Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM:***						
	19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital;	Tidak ada	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenkomdigi, Kemendes, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan;	Tidak ada	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemendes, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
9.	***Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima:***						

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota;	Tidak ada	Transformasi Digital layanan Publik Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasi	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemendagri, Kemen ESDM PLN Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;	Tidak ada		Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenkomdigi Kemen ESDM PLN Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
10.	***Pengembangan Pariwisata Cerdas (Smart Tourism) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE:***						
	23. Penggunaan Aplikasi Mobile, Situs Web Interaktif, dan Platform Medsos di Kawasan Destinasi Pariwisata;	Tidak ada	• Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital • Transformasi Digital layanan Publik Prioritas	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pariwisata, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	24. Pengembangan Integrasi Praktek Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata;	Tidak ada		Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pariwisata, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	25. Penciptaan Pengalaman Wisata Unik dan Imersif Berbasis Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR);	Tidak ada		Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian Pariwisata, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
11.	***Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistim Meritokrasi, Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Ketatalaksanaan:***						
	26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	Menaikkan gaji ASN, (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemdagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	27. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah;	Tidak ada	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemdagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota
	28. Sosialisasi dan Penerapan Manajemen ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemdagri, Kemenpan-RB, Kemenkeu, Pemda Provinsi,

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
							Pemda Kab/Kota
12.	***Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan:***						
	32. Penerapan GAP *(Good Agriculture Practice)*;	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	• Pengembangan Pangan Akuatik *(Blue Food).* • Pengembangan Pangan Hewani. • Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati • Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan • Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementan, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan;	Tidak ada	• Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan • Konservasi Sumber Daya Air	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian LH, Pemda Provinsi, Kab/Kota

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			• Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut • Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik • Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS). • Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum Terintegrasi Hulu ke Hilir • Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di Tempat Pemrosesan Akhir/Lahan Urug				

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			• Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan				
	34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian LH, Pemda Provinsi, Kab/Kota
13.	***Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan:***						
	35. Penyusunan *Climate Action Plan* (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian LH, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	36. Sosialisasi dan Pengembangan *Carbon Trade* (Perdagangan Carbon);	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementrian LH, Pemda Provinsi, Kab/Kota
14.	***Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial:***						
	37. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Profesionalisme Atlit;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenpora, Pemda Provinsi, Kab/Kota

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	38. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melawan Hoaks, Penipuan, Diskriminasi, dan human trafficking;	Tidak ada	Penguatan karakter dan Jati Diri Bangsa	Tidak ada		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KemenPPPA, Polri, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	
15.	***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:***						
	40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PPPA, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	15 Kab/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemen PPPA, Pemda Provinsi, Kab/Kota
16.	***Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan Logistics Hub sebagai supporting unit untuk IKN:***						
	42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prov. Sulut	APBN, APBD Provinsi	Kemenko Perekonomian, Pemda Provinsi

No.	Kegiatan Pembangunan Provinsi Sulut	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN	Kegiatan Prioritas Utama RPJMN	Proyek Strategis Nasional RPJMN	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
	43. Pembangunan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Kota Manado, Kota Bitung, Kab. Minut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kemenko Perekonomian, Pemda Provinsi, Kab/Kota
	44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific;	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prov. Sulut	APBN, APBD Provinsi	Kemenko Perekonomian, Pemda Provinsi
17.	***Pembinaan Pertambangan Rakyat:***						
	45. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Prov. Sulut	APBN	Kementrian ESDM

Tabel 3.8 Penyelarasan antara Arah Pembangunan Kewilayahan (Lampiran IV RPJMN 2025 – 2029) dengan Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2025 – 2029

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang: ● Kota Manado ● Kota Bitung ● Kota Tomohon ● Kab. Minahasa Utara ● Kab. Minahasa	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: ● Pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi, dengan output: pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi-Bts. Kota Tondano; ● Pengembangan atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), dengan output: pengadaan event skala daerah, nasional, dan internasional, penerapan rencana aksi destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan pengadaan event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); ● Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas	4. Pembangunan SMK di 15 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Program Diploma, dan Perguruan Tinggi; 5. Pengembangan Ekosistem Pendidikan (Peserta Didik, Guru dan Tenaga Pengajar, Kurikulum, Institusi Pendidikan, Orangtua dan Keluarga, Pemerintah, Teknologi, serta Komunitas dan Lingkungan); 9. Pembangunan Jalan Layang (Fly Over Transmart Kairagi), Autonomous Rail Rapid Transit (ART, Kereta/Trem Tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi, dan Jembatan Penyeberangan Bitung – Pulau Lembeh; 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	Bappeda, Balitbangda, DPUPRD, Dinas Pariwisata Daerah, DPKPD, BPSDMD, DPM-PTSPD, BPBD.

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	penunjang, dengan output: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Terpusat Skala Kota dan Regional, serta pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka- Kahuku; • Pengembangan Keterampilan SDM dan layanan pariwisata, dengan output pelatihan keterampilan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata, sertifikasi SDM, dan pengembangan Politeknik Negeri Manado; • Pemasaran Pariwisata, dengan output publikasi, promosi terpadu, pameran, kerjasama dengan maskapai, dan promosi wisata minat khusus; • Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi, dengan output: fasilitas akses pembiayaan digital dan pasar modal berkualitas, rantai pasok industri, promosi investasi pariwisata, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, literasi bisnis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan	20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 23. Penggunaan Aplikasi Mobile, Situs Web Interaktif, dan Platform Medsos di Kawasan Destinasi Pariwisata; 24. Pengembangan Integrasi Praktek Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata; 25. Penciptaan Pengalaman Wisata Unik dan Imersif Berbasis Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	Menengah (UMKM), akses pembiayaan startup, transformasi digital industri, standarisasi usaha, koordinasi implementasi blue, green, circular ecoiomy pada usaha pariwisata, dan fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); ● Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana, dengan output pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano, penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR.	Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 44. Pengembangan *Supply Chain Management* Antar Pemerintah Daerah se-Asia Pacific;		
Wilayah Metropolitan Manado: ● Kota Manado ● Kota Bitung ● Kota Tomohon ● Kab. Minahasa Utara ● Kab. Minahasa	Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam Sistem Perkotaan Nasional, melalui: ● Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan hijau yang berkelanjutan, dengan *output* sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi Transit Oriented Development (TOD),	9. Pembangunan Jalan Layang (Fly Over Transmart Kairagi), Autonomous Rail Rapid Transit (ART, Kereta/Trem Tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi, dan Jembatan Penyeberangan Bitung – Pulau Lembeh;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Bappeda, Balitbangda, DPUPRD, DPKPD

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkar Manado Outer Ring Road; • Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan output: penanganan banjir periode kala ulang 25-50 tahunan; • Peningkatan layanan perkotaan dan kualitas lingkungan, dengan output: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan terpadu dengan PSU perumahan, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran pemukiman kumuh, pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, pengembangan SPAM Regional Bimatara, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan	11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana); 17. Pembangunan Integrated Likupang Fishing Port and International Fish Market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN); 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 23. Penggunaan Aplikasi Mobile, Situs Web Interaktif, dan Platform Medsos di Kawasan Destinasi Pariwisata; 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 38. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melawan Hoaks, Penipuan,	(KPBU)/ *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	Sawangan, TPA Regional Mamitarang, dan PLTSa Kota Manado; ● Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola perkotaan, dengan output pengembangan desa wisata, pilot project kerjasama antardaerah dan multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan, penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu, penguatan smart city, kelembagaan pengelola WM Manado, dan advokasi dalam penerapan PP Perkotaan; ● Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan output: Metropolitan Statistical Area.	Diskriminasi, dan human trafficking; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender; 42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 43. Pembangunan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung; 44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Kawasan Perkotaan Sedang: ● Kota Manado	Pembangunan Perkotaan Non-wilayah Metropolitan melalui pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado dan Bitung, dengan output penyusunan	1. Wajib Belajar Anak Usia SD 6-13 Tahun (Angka Partisipasi Murni, APM 100%/95,68%);	APBD, APBN, Pinjaman Daerah,	Bappeda, Balitbangda,

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
• Kota Bitung	masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, bantuan PSU perumahan, bantuan pembangunan rumah swadaya, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh, pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota dan permukiman, sistem pengelolaan persampahan skala kota, peningkatan layanan konektivitas transportasi, penguatan instrumen peringatan dini bencana, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan	2. Wajib Belajar Anak Usia SMP 13-15 Tahun (APM 100%/76,56%); 5. Pengembangan Ekosistem Pendidikan (Peserta Didik, Guru dan Tenaga Pengajar, Kurikulum, Institusi Pendidikan, Orangtua dan Keluarga, Pemerintah, Teknologi, serta Komunitas dan Lingkungan); 9. Pembangunan Jalan Layang (Fly Over Transmart Kairagi), Autonomous Rail Rapid Transit (ART, Kereta/Trem Tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi, dan Jembatan Penyeberangan Bitung – Pulau Lembeh; 11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana); 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan;	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	DPUPRD, DPKPD, DESDMD.

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.	21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender;		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
		43. Pembangunan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung; 44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Kawasan Perikanan Tangkap Bitung: ● Kota Bitung	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, melalui: ● Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port); ● Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan output: sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan;	11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana); 17. Pembangunan Integrated Likupang Fishing Port and International Fish Market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN); 18. Perluasan dan Rehabilitasi PPI Dagho, Kema, Sitaro, Minahasa, Belang, dan Pembangunan PPI di lokasi strategis lainnya; 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public-Private Partnership*	Bappeda, Balitbangda, DKPD, Disperinda,

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	• Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan output diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan; • Kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan output: pengembangan klaster ikan nila salin, klaster rumput laut berbasis kawasan. promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, investasi strategis kelautan perikanan termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, pelatihan intensif bootcamp dan magang bagi pengurus	20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 29. Penerapan dan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention dan Survey Penilaian Integritas (SPI); 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 43. Pembangunan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung;	(PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, serta kerjasama internasional bidang kelautan dan perikanan.	44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya: ● Kab. Bolmong Utara ● Kab. Bolaang Mongondow ● Kab. Minahasa Selatan ● Kota Kotamobagu ● Kota Tomohon	Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, melalui: ● Penguatan akses pasar komoditas pertanian dan turunannya, dengan output; sertifikasi dan pengembangan produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pengembangan koridor logistik Worotican-Poigar; ● Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan output rekomendasi perlindungan LP2B,	10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dumoga dan Sangkub untuk Pengembangan Food Estate; 12. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Food Estate dan Agri-Genomics; 13. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Hortikultura dan Rempah; 14. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Ternak dan Agribisnis Peternakan; 15. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public-Private Partnership* (PPP),	Bappeda, Balitbangda, DPUPRD, Dinas Pertanian Daerah, Disperinda,

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	pengendalian alih fungsi lahan pertanian, Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment dan pembangunan Bendungan Lolak; • Inovasi dan adopsi teknologi pertanian, dengan output: percontohan pertanian modem, penerapan teknologi pertanian, pengembangan sistem pertanian terpadu di dataran tinggi, dan pengadaan asuransi pertanian; • Implementasi praktik pertanian yang ramah iklim dan rendah karbon, dengan output Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan optimasi lahan pertanian; • Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan output: benih ternak unggul, sarana pembibitan ternak, prasarana pembibitan ternak, ternak ruminansia perah, ternak ruminansia potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil	16. Pengembangan Resi Gudang, KUR, dan Marketplace Agribusiness; 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 24. Pengembangan Integrasi Praktek Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata; 25. Penciptaan Pengalaman Wisata Unik dan Imersif Berbasis Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 32. Penerapan GAP (Good Agriculture Practice); 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan;	dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	peternakan, dan layanan kesehatan hewan. • Peningkatan ekspor produk pertanian melalui pengembangan koperasi, promosi, dan kerjasama, dengan output pelatihan intensif bootcamp dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi, penguatan sistem pengawasan koperasi, rekomendasi kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan, prototyping, piloting project, dan business plan industri suplemen kapsul vitamin a (betacarotene), vitamin e (tocopherol) alami berbasis minyak sawit, promosi dan temu bisnis pada pameran berskala internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk industri makanan, kerjasama pengembangan ekspor produk primer, dan kerjasama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional.	34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 36. Sosialisasi dan Pengembangan Carbon Trade (Perdagangan Carbon); 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender; 42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
		Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Kawasan Perdesaan Prioritas: • KPP Mapalus, Kab. Minahasa	Pengembangen Kawasan Perdesaan Prioritas MAPALUS Kabupaten Minahasa, melalui: • Penyediaan layanan dasar, dengan output: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; • Peningkatan aksesibilitas, dengan output pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pcngembangan OM BTS 4G / *last mile* dan akses internet; • Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan output:	6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC); 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis); 12. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Food Estate dan Agri-Genomics; 13. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Hortikultura dan Rempah; 14. Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Ternak dan Agribisnis Peternakan; 19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	Bappeda, Balitbangda, Dinkes, Dikda, DPKPPD, Disparda, DLHD, DPPD, DK-UMKMD, DPMDD, DKPSD, DPD, DLHD, DESDMD,

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	pcngembangan sarana dan prasarana perdagangan, Pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDes, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan; ● Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal pariwisata, dengan output preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim; ● Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis digital, dengan output pengembangan akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, sarta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD.	21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 25. Penciptaan Pengalaman Wisata Unik dan Imersif Berbasis Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender;		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
		42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas: ● PKSN Tahuna dan Kecamatan	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: ● Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan output: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga; ● Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,	1. Wajib Belajar Anak Usia SD 6-13 Tahun (Angka Partisipasi Murni, APM 100%/95,68%); 2. Wajib Belajar Anak Usia SMP 13-15 Tahun (APM 100%/76,56%); 3. Pemberian Makan Sehat Bergizi Gratis; 4. Pembangunan SMK di 15 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Program Diploma, dan Perguruan Tinggi;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) /*Public-Private*	Bappeda, Balitbangda, BPPD, Dikda, Dinkes, DPPD, DK-UMKMD, DPMD,

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kab. Kepl. Sangihe; • PKSN Melonguane (Kec. Damau, Kec. Pulutan dan Kec. Nanusa); • Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Kepl. Sitaro (Kec. Siau Barat dan kec. Siau Barat Utara); • Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Utara (Kec. Likupang Barat dan Kec. Wori)	dengan output replacement fasilitas pelabuhan Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, pengembangan kawasan pala, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk.	5. Pengembangan Ekosistem Pendidikan (Peserta Didik, Guru dan Tenaga Pengajar, Kurikulum, Institusi Pendidikan, Orangtua dan Keluarga, Pemerintah, Teknologi, serta Komunitas dan Lingkungan); 6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC); 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis); 13. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Hortikultura dan Rempah; 16. Pengembangan Resi Gudang, KUR, dan Marketplace Agribusiness; 18. Perluasan dan Rehabilitasi PPI Dagho, Kema, Sitaro, Minahasa, Belang, dan Pembangunan PPI di lokasi strategis lainnya;	*Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
• Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Selatan (Kec. Tatapaan, Kec. Tenga dan Kec. Sinonsayang) • Kec. Perbatasan Prioritas Bolaang Mongondow (Kec. Bolaang Timur) • Kec. Perbatasan Prioritas Bolaang Mongondow Utara (Kec. Bolangitang Barat dan Kec. Pinogaluman).		19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 32. Penerapan GAP (Good Agriculture Practice); 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 42. Promosi dan Kemitraan Strategis Antar Kawasan Ekonomi dan Industri Dalam dan Luar Negeri; 44. Pengembangan Supply Chain Management Antar Pemerintah Daerah se Asia Pacific;		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
		45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);		
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara: • Kota Kotamobagu	Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara, melalui: • Pengelolaan multi ancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan output: peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensity meter dan accelerograph melalui lndonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), prapatan stasiun lndonesia Continuously Operating Reference Station (lna-CORS), Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana Geologi; • Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik, dengan output; rekomendasi ketahanan	11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana); 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	•

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	bangunan, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana; ● Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan output: Layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan di daerah pascabencana.			
Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui: ● Peningkatan layanan konektivitas udara, dengan output: bandara di pulau kecil terluar Sangihe dan Talaud; ● Peningkatan layanan konektivitas laut dan integrasi hinterland dengan simpul utama, dengan output pelabuhan perikanan utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, serta pelabuhan lainnya di pulau terluar yang berwawasan lingkungan; ● Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan output: Pembangunan Jalan Strategis - Jalan	9. Pembangunan Jalan Layang (Fly Over Transmart Kairagi), Autonomous Rail Rapid Transit (ART, Kereta/Trem Tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi, dan Jembatan Penyeberangan Bitung – Pulau Lembeh; 17. Pembangunan Integrated Likupang Fishing Port and International Fish Market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN); 43. Pembangunan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	●

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	Manado Outer Ring Road lll, Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan, pengembangan pelabuhan, Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026), Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan.			
Provinsi Sulawesi Utara	Penyediaan akses rumah layak huni dan pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui: ● Peningkatan akses rumah layak huni skala kota secara inklusif dan terpadu, serta penanganan permukiman kumuh, dengan output: pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, serta pemukiman kembali permukiman	19. Pengembangan Smart Village Berbasis Digital; 20. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan; 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private*	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	kumuh, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z, penyediaan rumah khusus reguler, Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA), bantuan pembangunan rumah swadaya, KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah, bantuan PSU bidang perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan, fasilitasi subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, dan pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan; • Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi hulu ke hilir, dengan output: pembangunan SPAM Regional; • Reformasi tata kelola persampahan, dengan output; teknologi Waste-to-energy (WtE) dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular, pembangunan fasilitas pengolahan	31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);	*Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	sampah berbasis 3R dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir, project skema insentif, Sistem informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dan bantuan PSU bidang perumahan; • Pemenuhan akses sanitasi aman, dengan output: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Setempat Skala Kota, serta bantuan PSU bidang perumahan; • Perluasan akses dan interkoneksi layanan listrik terisolasi (isolated qrid), dengan output: pembangunan pembangkit listrik. jaringan dan gardu induk, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T, dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari; • Pemerataan jaringan telekomunikasi, internet cepat, dan adopsi digital ke seluruh wilayah serta adopsi digital di			

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	berbagai layanan publik, dengun output: penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM BTS 4G / last mile, OM akses internet, layanan publik bidang telekomunikasi, fasilitasi literasi digital, portal layanan administrasi, pendampingan smart city, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian, perikanan, dan logistik, fasilitasi digital technopreneur, pengendalian PSE, akses internet tetap pita lebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta fasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama.			
Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan stunting, dan akses kesehatan reproduksi perempuan, melalui: ● Percepatan penurunan dan penguatan intervensi spesifik serta sensitif stunting, dentan output: ibu hamil dan balita yang mendapat buffer stock,	3. Pemberian Makan Sehat Bergizi Gratis; 6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC); 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	kegiatan surveilans gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pelatihan stunting, kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan stunting, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, dengan output: daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi, model kurikulum yang adaptif dan kontekstual, bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M; • Peningkatan pelayalan kesehatan dan gizi bagi usia produktif, dengan output: pembinaan lembaga dalam penerapan	Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 29. Penerapan dan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention dan Survey Penilaian Integritas (SPI); 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 37. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Profesionalisme Atlet; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak;	Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	kesehatan kerja, tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja, dan sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja; ● Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia, dentan output: penguatan program dalam mendukung indikator usia produktif dan lansia, koordinasi pelayanan kelompok rentan, sosialisasi kesehatan lansia, sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia, dan fasilitasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan upaya kesehatan produktif dan lansia; ● Peningkatan akses dan kualitas Layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan output: peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) dan KB, Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja, fasilitasi, intensifikasi dan			

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus, dan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender (stunting/AKI, perubahan iklim, kespro).			
Provinsi Sulawesi Utara	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ● Penuntasan TBC, dengan output: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC; ● Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: koordinasi pencegahan dan pengendalian HlV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular; ● Pengendalian penyakit malaria, dengan output: obat dan perbekalan kesehatan	6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC); 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 29. Penerapan dan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention dan Survey Penilaian Integritas (SPI); 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria; • Pengendalian penyakit kusta, dengan output: layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah; • Pengendalian penyakit rabies, dengan output: kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis.	39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak;		
Provinsi Sulawesi Utara	Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, melalui: • Penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan ekosistem digital di daerah sulit akses, dengan output: implementasi layanan telemedicine, pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, serta RS kapal;	6. Pengembangan Universal Health Coverage (UHC); 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 8. Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis); 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 29. Penerapan dan Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership*	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	• Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan output: pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN, instalasi farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dan peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif; • Peningkatan kapasitas dan peran puskesmas, dengan output: Koordinasi manajemen puskesmas dalam penguatan integrasi layanan primer, tenaga kesehatan yang di orientasi/dilatih manajemen puskesmas, tenaga kesehatan yang di orientasi/diberikan pelatihan (SOPHI), dan pelatihan terkait layanan primer dan rujukan; • Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan output: revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan	dan Survey Penilaian Integritas (SPI); 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak;	(PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	Posyandu (SOPHI), pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pemantauan wilayah dengan pendekatan keluarga; ● Pengembangan layanan unggulan dan rujukan kesehatan, dengan output: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/Kota, serta peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur; ● Peningkatan dan pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses dan afirmasi, dengan output: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penugasan khusus			

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer, pendayagunaan dokter spesialis (SDM), dan peningkatan kompetensi melalui program fellowship.			
Provinsi Sulawesi Utara	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap dunia usaha dan dunia industri, melalui: ● Pengembangan sarana, prasarana, perluasan akses pendidikan menengah, tinggi dan vokasi sektor strategis, pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art and Math (STEAM), peningkatan daya saing riset dan inovasi di berbagai bidang, dengan output: revitalisasi sarana dan prasarana pada seluruh jenjang Pendidikan termasuk sekolah, madrasah, Politeknik Pariwisata Manado dan Nusa Utara, bangunan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi industri yang ditingkatkan	1. Wajib Belajar Anak Usia SD 6-13 Tahun (Angka Partisipasi Murni, APM 100%/95,68%); 2. Wajib Belajar Anak Usia SMP 13-15 Tahun (APM 100%/76,56%); 4. Pembangunan SMK di 15 Kabupaten/Kota dan Pengembangan Program Diploma, dan Perguruan Tinggi; 5. Pengembangan Ekosistem Pendidikan (Peserta Didik, Guru dan Tenaga Pengajar, Kurikulum, Institusi Pendidikan, Orangtua dan Keluarga, Pemerintah, Teknologi, serta Komunitas dan Lingkungan); 21. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik di semua Kabupaten/Kota; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	kapasitasnya, Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta program studi dengan inovasi pembelajaran digital dan berkualitas; • Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan output: SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerjasama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerjasama pelatihan,	26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 37. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Pembinaan Profesionalisme Atlet; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender;		

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diktat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling;			
Provinsi Sulawesi Utara	Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui: ● Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan output: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang	1. Wajib Belajar Anak Usia SD 6-13 Tahun (Angka Partisipasi Murni, APM 100%/95,68%); 2. Wajib Belajar Anak Usia SMP 13-15 Tahun (APM 100%/76,56%); 3. Pemberian Makan Sehat Bergizi Gratis; 7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) / *Public-Private*	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan; • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, dengan output: lembaga posyandu yang ditingkatkan kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM, kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang sosial budaya dan kelembagaan di daerah lambat tumbuh, dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat.	26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 40. Sosialisasi dan Aktualisasi Undang-Undang No. 20/2002 Tentang Perlindungan Anak; 41. Sosialisasi dan Aktualisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender;	*Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	
Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan Pulau-pulau kecil terluar, dengan output: pembangunan pengaman pantai daerah pesisir dan pulau terluar, pengendalian banjir wilayah Metropolitan Manado, peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensity meter dan accelerograph melalui IDRIP,	7. Peningkatan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan; 11. Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana); 22. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; 26. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;	APBD, APBN, Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	

RPJMN 2025 – 2029		RPJMD Prov. Sulawesi Utara 2025 - 2029		
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**	**45 Kegiatan Pembangunan Sulawesi Utara**	**Sumber Pendanaan**	**Perangkat Daerah Pelaksana**
	penyusunan peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi, dan dokumen harmonisasi RPerpres RDTR KPN.	31. Peningkatan Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Narkoba; 33. Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 34. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Bagi Individu, Organisasi Masyarakat, dan Pemerintah Daerah yang Peduli Lingkungan; 35. Penyusunan Climate Action Plan (CAP) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 36. Sosialisasi dan Pengembangan Carbon Trade (Perdagangan Carbon); 39. Pengembangan Literasi Digital Generasi Z; 45. Peningkatan Sumberdaya Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Air (Hydropower), Energi Surya (Solar Energy), Tenaga Angin (Wind Energy), dan Energi Panas Bumi (Geothermal Energy);	(KPBU) / *Public-Private Partnership* (PPP), dan/atau Dana Hibah.	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat arah kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Bab ini menjadi bagian penting dalam menjabarkan bagaimana pemerintah daerah mengorganisasikan sumber daya, menetapkan strategi, serta melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sejalan dengan visi *"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"*, serta 8 (delapan) misi pembangunan daerah, maka penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing, serta perlindungan terhadap lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam Bab ini, disajikan keterkaitan antara urusan pemerintahan dengan program dan kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan indikator-indikator utama pembangunan. Penjabaran program didasarkan pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang mengedepankan sinergi antar sektor dan wilayah.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Bab IV, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi ini mencerminkan sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dalam menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan, serta

kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan demikian, Bab ini menjadi fondasi operasional yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.

4.2.2 Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Tabel 4.1
Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.148.751.410.435		1.191.407.415.316,2		1.209.523.775.701,03		1.228.848.042.321,61		1.250.615.617.477,2	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					865.148.677.915		876.430.135.765,3		885.113.330.588,49		894.567.623.311,64		905.573.027.216,49	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	865.148.677.915	100	876.430.135.765,3	100	885.113.330.588,49	100	894.567.623.311,64	100	905.573.027.216,49	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	0	0,1	0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD
														1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	0	0	10		20		30		40		50		1.01.0.00.0.00.01.0014 - CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					282.601.693.548		310.896.876.630,9		320.024.011.973,54		329.674.664.214,97		340.321.691.595,71	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	87,29	89,7	89,7	282.601.693.548	90,06	310.896.876.630,9	92,03	320.024.011.973,54	94	329.674.664.214,97	95,9	340.321.691.595,71	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	86,5	88,07	88,07		90,01		91,8		93,67		94,88		1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	76,83	76,95	77		77,5		78		78,5		80		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG DINAS SANGIHE
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (%)	63,36	63,8	64		65		66		67		70		1.01.0.00.0.00.01.0010 - CABANG DINAS SANGIHE
														1.01.0.00.0.00.01.0011 - UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					800.000.000		880.000.000		946.000.000		993.300.000		1.018.132.500	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	47	47	800.000.000	49	880.000.000	51	946.000.000	53	993.300.000	55	1.018.132.500	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					200.038.972		3.103.558.920		3.336.325.839		3.503.142.130		3.590.720.684	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	99,64	99,64	99,66	200.038.972	99,68	3.103.558.920	99,7	3.336.325.839	99,72	3.503.142.130	99,74	3.590.720.684	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	88,05	88,05	90,05		91,8		93,05		94,56		97,3		1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0		41.844.000		44.982.300		47.231.415		48.412.200	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	22,79	22,79	22,79	0	26,77	41.844.000	32,56	44.982.300	36,69	47.231.415	38,65	48.412.200	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.000.000		55.000.000		59.125.000		62.081.250		63.633.281	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	45	45	1.000.000	47	55.000.000	49	59.125.000	51	62.081.250	53	63.633.281	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					593.398.631.538		624.929.687.317		655.052.409.024		687.805.029.476		722.195.280.950	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					318.877.468.560		334.821.341.988		351.562.409.087		369.140.529.542		387.597.556.019	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	318.877.468.560	100	334.821.341.988	100	351.562.409.087	100	369.140.529.542	100	387.597.556.019	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					249.710.571.725		263.266.350.461		275.305.905.327		289.071.200.593		303.524.760.623	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	-	158	144	249.710.571.725	130	263.266.350.461	116	275.305.905.327	103	289.071.200.593	87	303.524.760.623	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	6	6	11		11		10		10		10		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	103,43	98,6	98,7		98,8		99,2		99,5		99,6		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	74	92	92		92		92		92		92		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (Kab/Kota)	0	0	0		0		0		0		2		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	26	26		40		55		75		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	81	92,86	93,08		93,31		93,54		93,77		94		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. (Kab/Kota)	10	10	10		10		10		15		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	80	80	80		80		80		85		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	79,88	80	82		82		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	73	73	73		73		73		74		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi fasyankes terintegrasi	7,6	7,6	7,6		7,6		7,6		7,6		7,6		1.02.0.00.0.00.01.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)													DINAS KESEHATAN
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	69,9	85	88		90		93		95		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	7	7	6		6		5		4		4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	14,26	15	15		18		20		23		25		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	74	74,25	74,3		75		75		75		83		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	90	80	80		80		80		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan skrining kesehatan jiwa (%)	10	10	15		20		25		30		35		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan UBM (Kabupaten/Kota)	2	6	8		10		12		15		5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)	15	15	15		15		15		15		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase cakupan skrining obesitas (%)	0	20	25		30		35		40		50		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	80	80		80		80		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0,86	0,86	0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	45	65		70		75		80		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)	29,74	29,8	29,85		29,9		30		30		30		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART (%)	84	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus pneumonia balita (%)	40	50	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies (Kabupaten/Kota)	3	3	5		6		7		8		9		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penurunan angka kematian Dengue (%)	0,7	0,6	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan POPM Kecacingan setiap 6 bln sekali (Kabupaten/Kota)	15	15	15		15		15		15		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pencegahan Hepatitis Virus (Kabupaten/Kota)	0	1	5		8		12		15		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (%)	40	40	40		40		40		40		40		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Provinsi yang memenuhi	0	10	40		50		60		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)													DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Kabupaten/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA (%)	0	10	40		50		60		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kabupaten Kepulauan yang menerima pelayanan kesehatan (Kabupaten/Kota)	0	1	1		1		1		1		2		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang menerapkan Sisrute (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya dengan pemenuhan SPA (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang diterbitkan izin operasionalnya sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS yang menerapkan KRIS (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS yang melaksanakan sistem klaim sesuai aturan (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	0	91	92		94		96		98		98		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai standar (%)													
	Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan program pengendalian anti mikroba (PPRA) (%)	0	30	40		50		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotika rasional (%)	0	30	40		50		60		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	94	95	95		95		95		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk ()	87,25	91	92		93		94		95		96		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan ()	24	50	55		60		65		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif ()	55,5	61	64		67		70		73		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	"Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan" ()	44,2	48	52		60		70		80		82		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan ()	74	80	82		85		88		90		92		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Praktik Inisisasi Menyusu Dini ()	58	50	55		60		65		75		77		1.02.0.00.0.00.01.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DINAS KESEHATAN
	Remaja putri yang Konsumsi TTD ()	76,42	65	67		70		75		80		83		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN
	Avlos (Average Length Of Stay) (Hari)	4	3-5	3-5		3-5		3-5		3-5		3-5		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
	Bor (Bed Occupancy Rate) (%)	40	60-85	60-85		60-85		60-85		60-85		60-85		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
	Toi (Turn Over Internal) (Hari)	31	1	1		1		1		1		1		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
														1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD RUMAH SAKIT MATA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					24.810.591.253		26.051.120.816		27.353.676.856		28.721.360.699		30.157.428.734	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	29,85	30	30	24.810.591.253	30	26.051.120.816	35	27.353.676.856	50	28.721.360.699	50	30.157.428.734	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	57	67	67		67		67		67		86		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	50	50	50		50		50		50		50		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN
	Bto (Bed Turn Over) (Kali)	0,08	40	40		40		40		40		40		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
	Gdr (Gross Death Rate) (Per 1000)	0,02	45	45		45		45		45		45		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
	Indeks Kepuasan Pasien (Skor)	90,801	80	80		80		80		80		80		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
	Ndr (Net Death Rate) (Per 1000)	0,04	25	25		25		25		25		25		1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA
														1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPTD RUMAH SAKIT MATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0009 - BALAI PELATIHAN KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0010 - UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI KITAWAYA
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					0		360.000.000		378.000.000		396.900.000		416.745.000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	0	100	360.000.000	100	378.000.000	100	396.900.000	100	416.745.000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					0		430.874.052		452.417.754		475.038.642		498.790.574	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	0	100	430.874.052	100	452.417.754	100	475.038.642	100	498.790.574	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
														1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					342.815.178.033		459.622.028.387,08		748.847.159.944,14		673.485.225.358,83		435.054.154.759,74	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					78.999.832.849		82.949.824.491,45		87.097.315.716,02		91.452.181.501,82		96.024.790.576,91	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	78.999.832.849	100	82.949.824.491,45	100	87.097.315.716,02	100	91.452.181.501,82	100	96.024.790.576,91	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD WILAYAH I
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0004 - UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPT PERSAMPAHAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPTD AIR MINUM
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0008 - UPTD WILAYAH IV TALAUD
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					58.925.191.056		61.871.450.609		64.965.023.139		68.213.274.296		71.623.938.011	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	49,46	49,95	51,5	58.925.191.056	54,6	61.871.450.609	56,5	64.965.023.139	58,1	68.213.274.296	60	71.623.938.011	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	0	0	17		40		65		83		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	17,14	17,31	34,3		68,6		85,7		92,85		100		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	49,46	49,95	51,5		54,6		56,5		58,1		60		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD WILAYAH I
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	49,46	49,95	51,5		54,6		58,5		58,1		60		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	49,46	49,95	51,5		54,6		56,5		58,1		60		1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					11.308.362.002		11.873.780.102		12.467.469.107		13.090.842.563		13.745.384.691	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	4,5	4,55	4,86	11.308.362.002	6,48	11.873.780.102	8,1	12.467.469.107	60	13.090.842.563	80	13.745.384.691	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	4,5	4,55	4,86		6,48		8,1		60		80		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	4,54	4,55	4,86		6,48		8,1		60		80		1.03.0.00.0.00.01.0007 - UPTD AIR MINUM
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.635.423.348		2.767.194.515		2.905.554.241		3.050.831.953		3.203.373.551	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	10	25	2.635.423.348	30	2.767.194.515	40	2.905.554.241	60	3.050.831.953	70	3.203.373.551	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	10	25		30		40		60		70		1.03.0.00.0.00.01.0006 - UPT PERSAMPAHAN
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.410.130.478		3.580.637.001		3.759.668.852		3.947.652.295		4.145.034.909	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0,11	0,12	0,14	3.410.130.478	0,57	3.580.637.001	8,21	3.759.668.852	15	3.947.652.295	30	4.145.034.909	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	0,11	0,12	0,14		0,57		8,21		15		30		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					3.162.508.018		3.320.633.418		3.486.665.090		3.660.998.344		3.844.048.261	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	30	30,3	48	3.162.508.018	50	3.320.633.418	55	3.486.665.090	60	3.660.998.344	65	3.844.048.261	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	30	30,3	48		50		55		60		65		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					7.906.270.044		8.301.583.546		8.716.662.724		9.152.495.860		9.610.120.653	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	63	64	65	7.906.270.044	67	8.301.583.546	72	8.716.662.724	75	9.152.495.860	77	9.610.120.653	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dalam Kondisi Baik (Persentase)													PENATAAN RUANG
	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	63	64	65		67		72		75		77		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					49.498.042.155		51.972.944.263		54.571.591.476		57.300.171.050		60.165.179.602	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	49.498.042.155	100	51.972.944.263	100	54.571.591.476	100	57.300.171.050	100	60.165.179.602	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.589.811.136		4.819.301.693		5.060.266.778		5.313.280.117		5.578.944.122	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	4.589.811.136	100	4.819.301.693	100	5.060.266.778	100	5.313.280.117	100	5.578.944.122	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					110.818.114.283		216.025.111.450,63		493.070.397.158,12		404.919.624.433,01		153.060.273.789,83	
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4	110.818.114.283	84,65	216.025.111.450,63	87	493.070.397.158,12	89	404.919.624.433,01	90	153.060.273.789,83	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4		83,7		84		84,3		84,6		1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD WILAYAH I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4		83,7		84		84,3		84,6		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4		83,7		84		84,3		84,6		1.03.0.00.0.00.01.0008 - UPTD WILAYAH IV TALAUD
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4		83,7		84		84,3		84,6		1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	82,7	82,96	83,4		83,7		84		84,3		84,6		1.03.0.00.0.00.01.0012 - UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					307.048.548		322.400.976		338.521.025		355.447.076		373.219.430	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	7,9	8,65	9,4	307.048.548	10,9	322.400.976	12,4	338.521.025	13,9	355.447.076	15,4	373.219.430	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	7,9	8,65	9,4		10,9		12,4		13,9		15,4		1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT BALAI BINA TEKNIK
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					11.254.444.116		11.817.166.322		12.408.024.638		13.028.425.870		13.679.847.163	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	0	10	20	11.254.444.116	30	11.817.166.322	40	12.408.024.638	50	13.028.425.870	60	13.679.847.163	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Provinsi (Persentase)													
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					34.549.287.013		36.276.751.364		38.090.588.932		39.995.118.379		41.994.874.297	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.604.500.000		11.134.725.000		11.691.461.250		12.276.034.313		12.889.836.028	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	10.604.500.000	100	11.134.725.000	100	11.691.461.250	100	12.276.034.313	100	12.889.836.028	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					720.000.000		756.000.000		793.800.000		833.490.000		875.164.500	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0	0	100%	720.000.000	100%	756.000.000	100%	793.800.000	100%	833.490.000	100%	875.164.500	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					440.000.000		462.000.000		485.100.000		509.355.000		534.822.750	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0	0	100	440.000.000	100	462.000.000	100	485.100.000	100	509.355.000	100	534.822.750	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					22.784.787.013		23.924.026.364		25.120.227.682		26.376.239.066		27.695.051.019	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	68	75	75	22.784.787.013	80	23.924.026.364	86	25.120.227.682	93	26.376.239.066	100	27.695.051.019	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					41.938.509.837		43.151.896.970		43.417.164.604		43.687.487.198		43.963.064.890	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.822.800.315		39.026.253.386		39.233.868.788		39.445.530.768		39.661.420.257	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	28.664.529.033	100	28.664.815.678	100	28.665.102.326	100	28.665.388.977	100	28.665.675.631	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	10.158.271.282	100	10.361.437.708	100	10.568.766.462	100	10.780.141.791	100	10.995.744.626	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.481.747.824		1.489.156.564		1.496.862.014		1.504.608.587		1.512.396.518	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	501.380.054	100	503.886.954	100	506.406.389	100	508.938.421	100	511.483.113	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	635.069.917	100	638.245.267	100	641.436.493	100	644.643.675	100	647.866.894	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	293.622.722	100	295.090.836	100	296.566.290	100	298.049.121	100	299.539.367	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														PAMONG PRAJA
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	51.675.131	100	51.933.507	100	52.452.842	100	52.977.370	100	53.507.144	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.281.252.028		2.281.252.028		2.326.877.068		2.373.414.609		2.420.882.901	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	754.235.827	100	1.154.235.827	100	1.177.320.543	100	1.200.866.953	100	1.224.884.292	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	350.518.233	100	650.518.233	100	663.528.598	100	676.799.170	100	690.335.153	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	176.497.968	100	476.497.968	100	486.027.927	100	495.748.486	100	505.663.456	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					352.709.670		355.234.992		359.556.734		363.933.234		368.365.214	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	200.354.835	100	201.356.609	100	203.370.175	100	205.403.877	100	207.457.916	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	152.354.835	100	153.878.383	100	156.186.559	100	158.529.357	100	160.907.298	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					20.416.972.595		23.479.518.456,35		27.002.446.191,35		31.051.663.178,26		35.709.412.699,84	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.638.915.636		15.684.752.981		18.037.465.900		20.743.085.800		23.854.548.700	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					13.638.915.636		15.684.752.981		18.037.465.900		20.743.085.800		23.854.548.700	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					289.998.455		333.498.223		383.522.956		441.051.400		507.209.110	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)	20	20	20		20		20		20		20		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					14.993.997		17.243.096		19.829.561		22.803.995		26.224.594	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	14.993.997	100	17.243.096	100	19.829.561	100	22.803.995	100	26.224.594	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.235.005.637		3.720.256.483		4.279.294.955		4.920.039.198		5.658.045.078	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100	3.235.005.637	100	3.720.256.483	100	4.279.294.955	100	4.920.039.198	100	5.658.045.078	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dasarnya (Persentase)													
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	-	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
														1.06.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA ARUYEN TOMOHON
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2.472.435.629		2.843.300.973,35		3.269.796.119,35		3.760.265.537,26		4.324.305.367,84	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data	100	100	100	2.472.435.629	100	2.843.300.973,35	100	3.269.796.119,35	100	3.760.265.537,26	100	4.324.305.367,84	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	fakir miskin (Persentase)													
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					394.925.223		454.164.000		522.288.600		600.631.900		690.726.700	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	394.925.223	100	454.164.000	100	522.288.600	100	600.631.900	100	690.726.700	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					370.698.018		426.302.700		490.248.100		563.785.348		648.353.150	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (Persentase)	100	100	100	370.698.018	100	426.302.700	100	490.248.100	100	563.785.348	100	648.353.150	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					32.434.864.030		42.973.031.400		35.778.759.216		36.852.121.992		37.957.685.652	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.364.237.110		17.749.154.963		18.281.629.611		18.830.078.500		19.394.980.855	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	17.364.237.110	100	17.749.154.963	100	18.281.629.611	100	18.830.078.500	100	19.394.980.855	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					86.530.870		89.126.796		91.800.600		94.554.618		97.391.257	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	6,6	6,6	20	86.530.870	26,66	89.126.796	33,33	91.800.600	40	94.554.618	46,66	97.391.257	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					208.513.875		9.915.900.000		1.729.913.875		1.781.811.291		1.835.265.630	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	75	75	80	208.513.875	83	9.915.900.000	85	1.729.913.875	87	1.781.811.291	90	1.835.265.630	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					92.239.488		95.006.673		97.856.873		100.792.579		103.816.356	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	50	50	51	92.239.488	51,5	95.006.673	52	97.856.873	52,5	100.792.579	53	103.816.356	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					14.498.523.000		14.933.478.690		15.381.483.051		15.842.927.542		16.318.215.368	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	173.840	173.840	176.840	14.498.523.000	177.840	14.933.478.690	178.840	15.381.483.051	178.840	15.842.927.542	179.840	16.318.215.368	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					184.819.687		190.364.278		196.075.206		201.957.462		208.016.186	
Terlindunginya Hak-Hak Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (Orang)	32.400	32.400	32.450	184.819.687	32.475	190.364.278	32.500	196.075.206	32.525	201.957.462	32.550	208.016.186	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.701.171.053		11.719.708.414,85		12.298.247.782,74		12.712.172.679,9		13.125.141.564,83	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.537.097.053		9.436.158.714,85		9.895.466.650,24		10.189.249.036,27		10.476.077.847,83	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	8.537.097.053	100	9.436.158.714,85	100	9.895.466.650,24	100	10.189.249.036,27	100	10.476.077.847,83	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					600.000.000		630.000.000		661.500.000		694.575.000		729.303.750	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	49,6	49,6	50,5	600.000.000	51	630.000.000	51,5	661.500.000	52	694.575.000	52,5	729.303.750	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2,9	8	10		12		14		16		18		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					302.021.000		374.258.050		398.024.900		417.933.600		438.814.945	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	-	85	85	302.021.000	90	374.258.050	92	398.024.900	93	417.933.600	95	438.814.945	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Komprehensif (%)													DAN PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					470.000.000		493.500.000		518.175.000		544.083.750		571.287.938	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	1	1	470.000.000	1	493.500.000	1	518.175.000	1	544.083.750	1	571.287.938	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Rasio Keluarga Yang Memahami Kesetaraan Dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK) (Rasio)	38,3	38,3	42,5		45		47,5		50		52,5		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					135.000.000		141.750.000		148.837.500		156.279.375		164.093.344	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	92	93	93	135.000.000	94	141.750.000	95	148.837.500	96	156.279.375	97	164.093.344	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					252.500.000		212.625.000		223.256.250		234.419.062		246.140.015	
Terjaminnya Pemenuhan hak anak secara komperhensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	61,2	61,5		61,8		62,1		62,4		62,7		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					404.553.000		431.416.650		452.987.482,5		475.632.856,63		499.423.725	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	75,5	76	404.553.000	76,5	431.416.650	77	452.987.482,5	77,5	475.632.856,63	78	499.423.725	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	85	85		90		92		93		95		2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERLINDUNGAN ANAK
														2.08.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					22.444.035.623		22.996.875.273		22.009.327.798		22.880.004.496		23.399.962.718	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.806.160.995		13.244.864.442		13.273.952.853		13.298.717.149		13.676.223.038	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	12.806.160.995	100	13.244.864.442	100	13.273.952.853	100	13.298.717.149	100	13.676.223.038	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					750.000.000		503.250.000		456.576.483		477.400.936		488.796.496	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	100	100	100	750.000.000	100	503.250.000	100	456.576.483	100	477.400.936	100	488.796.496	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					6.943.472.399		7.438.329.846		6.427.665.248		6.906.490.478		7.090.006.970	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	87,6	88	88,2	6.943.472.399	88,5	7.438.329.846	88,8	6.427.665.248	89,1	6.906.490.478	89,4	7.090.006.970	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					1.763.367.000		1.600.230.985		1.592.597.985		1.939.360.704		1.883.900.985	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	15,2	14,9	14,7	1.763.367.000	14,2	1.600.230.985	13,7	1.592.597.985	13,2	1.939.360.704	12,7	1.883.900.985	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					181.035.229		210.200.000		258.535.229		258.035.229		261.035.229	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar (Skor)	0	0	50,3	181.035.229	50,35	210.200.000	50,4	258.535.229	50,45	258.035.229	50,5	261.035.229	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN
	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	92	92	92		93		94		95		96		2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	92	92	92		93		94		95		96		2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					28.325.000.000		29.741.250.000		31.228.312.500		32.789.728.125		34.429.214.532	
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					400.000.000		420.000.000		441.000.000		463.050.000		486.202.500	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)	45	50	50	400.000.000	55	420.000.000	60	441.000.000	65	463.050.000	70	486.202.500	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					275.000.000		288.750.000		303.187.500		318.346.875		334.264.219	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	0	100	275.000.000	100	288.750.000	100	303.187.500	100	318.346.875	100	334.264.219	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					26.250.000.000		27.562.500.000		28.940.625.000		30.387.656.250		31.907.039.063	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	45	50	50	26.250.000.000	55	27.562.500.000	60	28.940.625.000	65	30.387.656.250	70	31.907.039.063	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					1.000.000.000		1.050.000.000		1.102.500.000		1.157.625.000		1.215.506.250	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.102.500.000	100	1.157.625.000	100	1.215.506.250	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	0	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.546.103.160		11.781.400.914		12.164.292.941		12.557.621.729		12.961.700.381	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.445.765.550		9.636.500.000		9.925.595.000		10.223.362.850		10.530.063.736	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	8.445.765.550	100	9.636.500.000	100	9.925.595.000	100	10.223.362.850	100	10.530.063.736	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					115.846.210		477.501.020		491.826.051		506.580.832		521.778.257	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan hidup untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	115.846.210	100	477.501.020	100	491.826.051	100	506.580.832	100	521.778.257	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					328.319.867		410.000.000		422.300.000		434.969.000		448.018.070	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	76,26	78,71	78,88	328.319.867	79,05	410.000.000	79,22	422.300.000	79,39	434.969.000	79,56	448.018.070	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					12.038.732		12.399.894		12.771.890		13.155.047		13.549.698	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	4	4	4	12.038.732	8	12.399.894	12	12.771.890	16	13.155.047	20	13.549.698	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					71.684.362		95.000.000		97.850.000		100.785.500		103.809.065	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) B3 Skala Provinsi ()	3	3	3	71.684.362	3	95.000.000	3	97.850.000	3	100.785.500	3	103.809.065	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					61.197.652		315.000.000		324.450.000		334.183.500		344.209.005	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	65	65	65	61.197.652	65	315.000.000	70	324.450.000	70	334.183.500	75	344.209.005	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					31.259.394		105.000.000		108.150.000		111.394.500		114.736.335	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	31.259.394	100	105.000.000	100	108.150.000	100	111.394.500	100	114.736.335	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					329.991.393		545.000.000		561.350.000		578.190.500		595.536.215	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkelola (%)	61,81	57,5	57,5	329.991.393	60	545.000.000	65	561.350.000	70	578.190.500	75	595.536.215	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.116.056.744		6.866.138.443		7.071.122.596		7.284.286.274		7.502.814.862	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5.836.056.744		6.236.138.443		6.423.222.596		6.615.919.274		6.814.396.852	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	5.836.056.744	100	6.236.138.443	100	6.423.222.596	100	6.615.919.274	100	6.814.396.852	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					100.000.000		200.000.000		206.000.000		212.180.000		218.545.400	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	3,74	20	20	100.000.000	30	200.000.000	40	206.000.000	50	212.180.000	55	218.545.400	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	53,46	54	55		62		64		66		68		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					100.000.000		200.000.000		205.000.000		212.180.000		218.545.400	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	64,5	65	65,5	100.000.000	66,2	200.000.000	66,5	205.000.000	66,75	212.180.000	66,85	218.545.400	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	96,07	96,58	97		98,15		98,72		99,25		99,3		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78,54	78,6	78,6		78,7		78,9		78,95		79		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	72,25	72,3	72,3		72,5		72,75		72,9		73		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					60.000.000		150.000.000		154.500.000		159.135.000		163.909.050	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	50	50	50	60.000.000	50	150.000.000	50	154.500.000	50	159.135.000	50	163.909.050	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					20.000.000		80.000.000		82.400.000		84.872.000		87.418.160	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	100	100	100	20.000.000	100	80.000.000	100	82.400.000	100	84.872.000	100	87.418.160	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.367.735.198		13.779.067.252		14.192.439.276		14.602.093.341		15.040.156.139	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.483.970.233		7.708.489.340		7.939.744.020		8.177.936.340		8.423.274.430	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					7.483.970.233		7.708.489.340		7.939.744.020		8.177.936.340		8.423.274.430	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					196.458.850		202.352.615		208.423.193		214.675.888		221.116.164	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	26,54	6,63	6,63	196.458.850	8,29	202.352.615	9,95	208.423.193	13,27	214.675.888	16,58	221.116.164	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					143.750.365		148.062.875		152.504.761		157.079.903		161.792.300	
Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	3,31	3,31	143.750.365	3,98	148.062.875	4,51	152.504.761	4,97	157.079.903	5,3	161.792.300	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					646.460.000		676.153.800		696.438.414		701.212.464		722.248.837	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	9,95	9,95	646.460.000	16,58	676.153.800	14,93	696.438.414	16,58	701.212.464	19,9	722.248.837	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0	6,63	6,63		7,63		9,95		11,61		13,27		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					4.897.095.750		5.044.008.622		5.195.328.888		5.351.188.746		5.511.724.408	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	1,65	1,65	4.897.095.750	1,99	5.044.008.622	2,32	5.195.328.888	2,65	5.351.188.746	2,98	5.511.724.408	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	2,98	2,98		3,98		4,44		4,64		4,97		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					340.000.000		700.000.000		721.000.000		742.630.000		764.908.900	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					80.000.000		175.000.000		180.250.000		185.657.500		191.227.225	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,06	2,1	2,1	80.000.000	2,1	175.000.000	2,1	180.250.000	2,1	185.657.500	2,1	191.227.225	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	38,8	38,59	38,38		38,17		37,96		37,75		37,54		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					100.000.000		175.000.000		180.250.000		185.657.500		191.227.225	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	61,8	61,8	61,95	100.000.000	62	175.000.000	63	180.250.000	63,5	185.657.500	64	191.227.225	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,3	12,3	12,01		12		11,75		11,5		11		2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					160.000.000		350.000.000		360.500.000		371.315.000		382.454.450	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	16,16	16,16	16,48	160.000.000	16,73	350.000.000	16,94	360.500.000	17,18	371.315.000	17,34	382.454.450	2.12.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					25.321.698.380		26.587.783.299		27.917.172.463,96		29.311.031.087,15		30.778.682.641,51	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.353.398.490		18.221.068.414,5		19.132.121.835,23		20.088.727.926,99		21.093.164.323,34	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	17.353.398.490	100	18.221.068.414,5	100	19.132.121.835,23	100	20.088.727.926,99	100	21.093.164.323,34	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Darat (%)	0,3	0,4	0,41		0,42		0,43		0,44		0,45		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					6.234.453.030		6.546.175.681,5		6.873.484.465,58		7.217.158.688,85		7.578.016.623,3	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	22	22	23	6.234.453.030	24	6.546.175.681,5	25	6.873.484.465,58	26	7.217.158.688,85	28	7.578.016.623,3	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Darat (%)	0,504	0,504	0,508		0,512		0,516		0,52		0,524		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Darat (%)	1	0,4	0,41		0,42		0,43		0,44		0,45		2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					704.304.600		739.519.830		776.495.821,5		813.320.612,58		856.086.643,2	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	Persentase penduduk terlayani transportasi umum ((%))	90	91	92	704.304.600	93	739.519.830	94	776.495.821,5	95	813.320.612,58	96	856.086.643,2	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Laut (%)	0,455	0,455	0,455		0,545		0,636		0,727		0,818		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
														2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														ANGKUTAN JALAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.029.542.260		1.081.019.373		1.135.070.341,65		1.191.823.858,73		1.251.415.051,67	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	0,03	0,03	0,034	1.029.542.260	0,036	1.081.019.373	0,038	1.135.070.341,65	0,04	1.191.823.858,73	0,042	1.251.415.051,67	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
														2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					34.537.622.477		41.445.146.972,4		49.734.176.366		59.681.011.640,26		71.617.213.968	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.272.119.625		12.326.543.550		14.791.852.260		17.750.222.712		21.300.267.254	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	10.272.119.625	100	12.326.543.550	100	14.791.852.260	100	17.750.222.712	100	21.300.267.254	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					10.806.286.342		12.967.543.610,4		15.561.052.332		18.673.262.798,98		22.407.915.359	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	10.806.286.342	100	12.967.543.610,4	100	15.561.052.332	100	18.673.262.798,98	100	22.407.915.359	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					13.459.216.510		16.151.059.812		19.381.271.774		23.257.526.129,28		27.909.031.355	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,01	3,02	3,05	13.459.216.510	3,1	16.151.059.812	3,15	19.381.271.774	3,25	23.257.526.129,28	3,3	27.909.031.355	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					12.621.946.097		12.703.988.746		12.787.962.111		13.371.221.063		13.690.392.110	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.370.289.019		11.426.422.079		11.436.698.665		11.612.958.469		11.812.129.516	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	11.370.289.019	100	11.426.422.079	100	11.436.698.665	100	11.612.958.469	100	11.812.129.516	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN					59.225.568		70.000.000		70.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	3	3	4	59.225.568	5	70.000.000	5	70.000.000	10	100.000.000	14	100.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					20.000.000		30.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2	2	1,5	20.000.000	3	30.000.000	4,5	50.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					159.316.799		179.316.799		203.013.578		278.013.578		308.013.578	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2	1	1	159.316.799	1	179.316.799	1	203.013.578	2	278.013.578	2	308.013.578	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2	1	1		1		1		2		2		2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					124.864.543		104.999.700		129.999.700		165.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	500	10	12	124.864.543	10	104.999.700	13	129.999.700	16	165.000.000	20	200.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					279.798.748		284.798.748		289.798.748		365.249.016		470.249.016	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1	1	1	279.798.748	1	284.798.748	1	289.798.748	1	365.249.016	1	470.249.016	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					578.451.420		578.451.420		578.451.420		750.000.000		700.000.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1,5	1,5	2,5	578.451.420	3	578.451.420	4	578.451.420	5	750.000.000	6	700.000.000	2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					16.004.210.582		16.448.253.484		16.904.017.673		17.376.702.787		17.861.920.455	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.801.430.062		11.125.472.964		11.459.237.153		11.803.014.267		12.157.104.695	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dukungan administratif, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintahan daerah					10.801.430.062		11.125.472.964		11.459.237.153		11.803.014.267		12.157.104.695	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	10	12	14	1.000.000.000	16	1.030.000.000	18	1.060.900.000	20	1.092.727.000	22	1.125.508.810	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.202.780.520		1.202.780.520		1.201.180.520		1.202.780.520		1.202.780.520	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	10%	12%	14%	1.202.780.520	16%	1.202.780.520	18%	1.201.180.520	20%	1.202.780.520	22%	1.202.780.520	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	81%	82%	83%	1.000.000.000	84%	1.030.000.000	85%	1.060.900.000	86%	1.092.727.000	87%	1.125.508.810	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	90%	91%	92%	1.000.000.000	93%	1.030.000.000	94%	1.060.900.000	95%	1.092.727.000	97%	1.125.508.810	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.900.000		1.092.727.000		1.125.508.810	
Meningkatnya efektivitas kerjasama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	80%	82%	85%	1.000.000.000	87%	1.030.000.000	88%	1.060.900.000	89%	1.092.727.000	90%	1.125.508.810	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					34.304.648.053		58.472.374.308		59.576.113.269		69.768.542.081		69.859.498.343	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.799.793.010		17.279.226.492		17.797.603.281		18.331.531.366		18.881.477.304	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	16.799.793.010	100	17.279.226.492	100	17.797.603.281	100	18.331.531.366	100	18.881.477.304	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN					1.799.892.412		3.162.999.994		3.227.889.994		3.294.726.694		3.363.568.496	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Narkoba (Orang)	100	100	300	1.799.892.412	400	3.162.999.994	500	3.227.889.994	600	3.294.726.694	700	3.363.568.496	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepemudaan (%)	0,1	0,1	0,2		0,3		0,4		0,5		0,6		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Pemuda Aktif Organisasi (%)	25	25	35		45		55		65		75		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	3,52	3,52	3,62		3,72		3,82		3,92		4,02		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.505.003.753		37.004.847.822		37.509.560.994		47.084.993.251		46.540.443.048	
Menigkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan (Event)	5	10	15	15.505.003.753	20	37.004.847.822	25	37.509.560.994	30	47.084.993.251	35	46.540.443.048	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Jumlah Fasilitasi Olahraga Representatif (Unit)	10	10	13		16		19		22		25		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga (Prestasi)	107	115	115		195		175		100		120		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2,17	2,17	2,67		2,77		2,87		2,97		3,07		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					199.958.878		1.025.300.000		1.041.059.000		1.057.290.770		1.074.009.495	
Menigkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	10,24	10,24	10,34	199.958.878	10,44	1.025.300.000	10,54	1.041.059.000	10,64	1.057.290.770	10,74	1.074.009.495	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan (%)	6,89	6,89	7,01		7,11		7,21		7,31		7,41		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					137.050.610		164.460.732		197.352.878		236.823.454,08		284.188.145	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					137.050.610		164.460.732		197.352.878		236.823.454,08		284.188.145	
Tercapainya kolaborasi,integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,3	2,6	2,7	137.050.610	2,8	164.460.732	2,9	197.352.878	2,9	236.823.454,08	3	284.188.145	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					206.700.014		248.040.016,8		297.648.020		357.177.624,19		428.613.149	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					206.700.014		248.040.016,8		297.648.020		357.177.624,19		428.613.149	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	3	3,3	3,6	206.700.014	3,9	248.040.016,8	4,2	297.648.020	4,5	357.177.624,19	5	428.613.149	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					8.747.624.426		16.473.287.495		17.638.386.120		19.466.777.720		20.856.681.103	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					7.970.697.716		8.103.287.495		8.346.386.120		8.596.777.720		8.854.681.103	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	12	12	12	7.970.697.716	12	8.103.287.495	12	8.346.386.120	12	8.596.777.720	12	8.854.681.103	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
														2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					149.111.111		2.860.000.000		3.146.000.000		3.460.000.000		3.806.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	1,8	1,81	1,82	149.111.111	2,5	2.860.000.000	2,7	3.146.000.000	2,9	3.460.000.000	3,12	3.806.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
														2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					349.363.271		825.000.000		1.075.000.000		1.175.000.000		1.575.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	18,9	19,05	19,25	349.363.271	29,4	825.000.000	33,6	1.075.000.000	37,8	1.175.000.000	42	1.575.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
														2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					14.961.666		400.000.000		450.000.000		500.000.000		670.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	1	1	1	14.961.666	5	400.000.000	6	450.000.000	7	500.000.000	9	670.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					179.744.262		2.225.000.000		2.500.000.000		3.550.000.000		3.700.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	11	15,25	18	179.744.262	21,5	2.225.000.000	29,75	2.500.000.000	39,75	3.550.000.000	49,75	3.700.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	8,57	10	11,42		17,14		25,71		37,14		48,57		2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
														2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					83.746.400		2.060.000.000		2.121.000.000		2.185.000.000		2.251.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum					83.746.400		2.060.000.000		2.121.000.000		2.185.000.000		2.251.000.000	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Jumlah kunjungan wisatawan ke Museum (Orang)	7.139	7.139	7.495		7.869		8.262		8.675		9.108		2.22.0.00.0.00.01.0002 - UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.741.457.433		11.639.457.433		12.009.057.433		13.505.457.433		14.058.457.433	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.010.457.433		10.970.457.433		10.780.457.433		11.580.457.433		11.880.457.433	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					11.010.457.433		10.970.457.433		10.780.457.433		11.580.457.433		11.880.457.433	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					731.000.000		669.000.000		843.600.000		1.475.000.000		1.573.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	1.191	1.191	1.191	731.000.000	1.141	669.000.000	1.235	843.600.000	1.235	1.475.000.000	1.285	1.573.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0		0		385.000.000		450.000.000		605.000.000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	0	0	0	0	3.119	385.000.000	62	450.000.000	130	605.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.565.724.000		3.092.563.000		3.456.820.000		2.686.404.940		2.962.589.800	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.065.724.000		2.092.563.000		2.003.820.000		424.904.940		424.824.800	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	124	124	124	1.065.724.000	128	2.092.563.000	162	2.003.820.000	209	424.904.940	142	424.824.800	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					500.000.000		1.000.000.000		1.400.000.000		2.190.000.000		2.450.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	12	12	12	500.000.000	12	1.000.000.000	12	1.400.000.000	12	2.190.000.000	21	2.450.000.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0		0		53.000.000		71.500.000		87.765.000	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	0	0	0	0	10	53.000.000	13	71.500.000	15	87.765.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					61.566.373.942		66.062.516.519		72.642.624.125		79.875.051.611		87.798.425.148	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					20.259.207.243		22.174.873.926		24.364.547.958		26.762.983.126		29.386.551.418	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	20.259.207.243	100	22.174.873.926	100	24.364.547.958	100	26.762.983.126	100	29.386.551.418	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
														3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					926.321.170		957.498.399		1.057.248.238		1.166.473.062		1.286.120.368	
Laut, pesisir dan pulau2 kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	7,75	7,75	7,75	926.321.170	7,75	957.498.399	7,76	1.057.248.238	7,76	1.166.473.062	7,77	1.286.120.368	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA
	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	7,75	7,75	7,75		7,75		7,76		7,76		7,77		3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
														3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					29.477.127.939		31.153.480.944		34.276.398.354		37.710.222.891		41.473.843.576	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	421.431	415.000	274.828	29.477.127.939	302.707	31.153.480.944	331.873	34.276.398.354	362.397	37.710.222.891	394.356	41.473.843.576	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	421.431	415.000	274.828		302.707		331.873		362.397		394.356		3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	421.431	415.000	274.828		302.707		331.873		362.397		394.356		3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
														3.25.0.00.0.00.01.0004 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	421.431	415.000	274.828		302.707		331.873		362.397		350.000		3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	412.431	415.000	274.828		302.707		302.707		362.397		394.356		3.25.0.00.0.00.01.0007 - UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I
														3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7.393.490.828		7.832.196.658		8.614.416.324		9.474.357.956		10.419.793.752	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	595,361	615.129	654.585	7.393.490.828	667.677	7.832.196.658	681.030	8.614.416.324	694.651	9.474.357.956	708.544	10.419.793.752	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	595,361	615.129	654.585		667.677		681.030		694.651		708.544		3.25.0.00.0.00.01.0008 - UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.302.026.762		3.706.753.206		4.073.428.527		4.485.271.379		4.935.798.517	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi (Ha)	234.886,92	234.886,92	240.114,95	3.302.026.762	242.635,34	3.706.753.206	243.627,15	4.073.428.527	244698. 24	4.485.271.379	245.648,4	4.935.798.517	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	97	98	80		83		85		90		92		3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Luasan kawasan konservasi (Ha)	234.886,92	234.886,92	240.114,95		242.635,34		243.627,15		244698. 24		245.648,4		3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														3.25.0.00.0.00.01.0002 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					208.200.000		237.713.386		256.584.724		275.743.197		296.317.517	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	68	70	72	208.200.000	72	237.713.386	73	256.584.724	73	275.743.197	74	296.317.517	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0001 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	68	70	72		72		73		73		74		3.25.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
														3.25.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.935.077.994		11.989.214.459		12.086.298.904		12.603.565.681		12.923.484.898	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.341.556.851		10.330.134.858		10.398.417.050		10.872.688.851		11.132.219.934	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	10.341.556.851	100	10.330.134.858	100	10.398.417.050	100	10.872.688.851	100	11.132.219.934	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					317.468.414		386.468.414		389.022.970		406.766.308		416.475.820	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	56,97	56,97	76,97	317.468.414	96,97	386.468.414	100	389.022.970	100	406.766.308	100	416.475.820	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					867.520.906		848.079.364		871.520.906		877.281.659		917.294.476	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	33,33	33,33	43,33	867.520.906	53,33	848.079.364	63,33	871.520.906	73,33	877.281.659	83,33	917.294.476	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					172.627.726		188.627.726		189.874.555		198.534.733		203.273.757	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	16,94	16,94	26,94	172.627.726	36,94	188.627.726	46,94	189.874.555	56,94	198.534.733	66,94	203.273.757	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					235.904.097		235.904.097		237.463.423		248.294.130		254.220.911	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan tervalidasi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10.95%	10.95 %	20.95%	235.904.097	30.95%	235.904.097	40.95%	237.463.423	50.95%	248.294.130	60.95%	254.220.911	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					71.956.835.363		67.412.390.853		67.857.459.990		71.939.981.363		72.631.296.795	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					63.799.521.223		59.173.699.287		59.563.846.014		62.252.252.321		63.728.171.639	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan	100	100	100	48.358.564.263	100	43.659.003.999	100	43.945.389.584	100	45.925.948.066	100	47.014.151.729	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
manajemen perkantoran	manajemen perkantoran (%)													
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					15.440.956.960		15.514.695.288		15.618.456.430		16.326.304.255		16.714.019.910	3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	48.358.564.263	100	43.659.003.999	100	43.945.389.584	100	45.925.948.066	100	47.014.151.729	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					15.440.956.960		15.514.695.288		15.618.456.430		16.326.304.255		16.714.019.910	3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	48.358.564.263	100	43.659.003.999	100	43.945.389.584	100	45.925.948.066	100	47.014.151.729	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					15.440.956.960		15.514.695.288		15.618.456.430		16.326.304.255		16.714.019.910	3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	48.358.564.263	100	43.659.003.999	100	43.945.389.584	100	45.925.948.066	100	47.014.151.729	3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					15.440.956.960		15.514.695.288		15.618.456.430		16.326.304.255		16.714.019.910	3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	48.358.564.263	100	43.659.003.999	100	43.945.389.584	100	45.925.948.066	100	47.014.151.729	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					15.440.956.960		15.514.695.288		15.618.456.430		16.326.304.255		16.714.019.910	3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PERKEBUNAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.06.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.27.0.00.0.00.06.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.288.442.145		4.157.868.671		4.183.088.667		4.367.920.784		4.468.774.917	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ton)	308.871	308.871	310.415	2.269.302.554	311.967	2.126.225.928	313.527	2.138.655.178	315.095	2.234.663.209	316.670	2.286.903.311	3.27.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PERKEBUNAN
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (Ton)	308.871	308.871	310.415		311.967		313.527		315.095		316.670		3.27.0.00.0.00.06.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
														3.27.0.00.0.00.06.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.050.174	1.108.964	1.120.148	2.019.139.591	1.132.034	2.031.642.743	1.144.047	2.044.433.489	1.156.181	2.133.257.575	1.168.440	2.181.871.606	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	49.930	51.042	51.552		52.068		52.589		53.115		53.646		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	13.376	26.007	26.266		26.624		26.880		27.009		27.221		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	49.930	51.042	51.552		52.068		52.589		53.115		53.646		3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	13.376	26.007	26.266		26.624		26.880		27.009		27.221		3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.050.174	1.108.964	1.120.148		1.132.034		1.144.047		1.156.181		1.168.440		3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	49.930	51.042	51.552		52.068		52.589		53.115		53.646		3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	13.376	26.007	26.266		26.624		26.880		27.009		27.221		3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.050.174	1.108.964	1.120.148		1.132.034		1.144.047		1.156.181		1.168.440		3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	49.930	51.042	51.552		52.068		52.589		53.115		53.646		3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	13.376	26.007	26.266		26.624		26.880		27.009		27.221		3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.050.174	1.108.964	1.120.148		1.132.034		1.144.047		1.157.181		1.168.440		3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.365.169.454		1.386.910.350		1.398.442.527		2.458.832.352		1.491.884.115	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan yang ditetapkan (Hektar)	403.539	353.783	353.783	530.249.454	353.783	546.559.455	353.783	552.535.815	353.783	574.343.812	353.783	586.279.476	3.27.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PERKEBUNAN
														3.27.0.00.0.00.06.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	40.097,53	40.097,53	40.097,53	834.920.000	40.097,53	840.350.895	40.097,53	845.906.712	40.097,53	1.884.488.540	40.097,53	905.604.639	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					930.836.138		937.850.889		945.026.994		994.860.752		1.022.135.107	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	10	10	930.836.138	10	937.850.889	10	945.026.994	10	994.860.752	10	1.022.135.107	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	35	45	45		50		55		60		70		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	10	10		10		10		10		10		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	35	45	45		50		55		60		70		3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
														3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					782.552.880		860.255.109		865.326.795		923.258.274		954.964.568	
Menigkatnya pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian	Presentasi penanganan bencana pertanian (%)	0,5	0,5	0,5	287.790.272	0,5	360.987.234	0,5	361.450.024	0,5	387.375.472	0,5	401.564.645	3.27.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PERKEBUNAN
														3.27.0.00.0.00.06.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	97	97	97	494.762.608	97	499.267.875	97	503.876.771	97	535.882.802	97	553.399.923	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	71	71	71		71		71		71		71		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	97	97	97		97		97		97		97		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	71	71	71		71		71		71		71		3.27.0.00.0.00.01.0003 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
														3.27.0.00.0.00.01.0004 - UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					73.600.000		74.078.744		74.568.499		77.969.571		79.831.000	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	5	73.600.000	5	74.078.744	5	74.568.499	5	77.969.571	5	79.831.000	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					716.713.523		821.727.803		827.160.494		864.887.309		885.535.449	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Presentasi SDM petani yang ditingkatkan (%)	1	1	1	123.842.168	1	225.000.000	1	226.487.543	1	236.817.647	1	242.471.382	3.27.0.00.0.00.06.0000 - DINAS PERKEBUNAN
														3.27.0.00.0.00.06.0002 - UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1	1	1	592.871.355	1	596.727.803	1	600.672.951	1	628.069.662	1	643.064.067	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan (%)	1	1	1		1		1		1		1		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1	1	1		1		1		1		1		3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN
	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan (%)	1	1	1		1		1		1		1		3.27.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PELATIHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														TEKNIS PERTANIAN
														3.27.0.00.0.00.01.0006 - UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					51.330.050.276		51.663.936.611		52.005.502.554		54.377.475.043		55.675.671.660	
3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					47.851.600.646		47.849.839.879		47.822.189.879		47.803.139.879		47.850.941.420	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	47.851.600.646	100	47.849.839.879	100	47.822.189.879	100	47.803.139.879	100	47.850.941.420	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0004 - BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					2.123.769.148		2.451.195.964		2.809.452.030		5.119.114.510		6.373.448.042	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35	2.123.769.148	0,35	2.451.195.964	0,35	2.809.452.030	0,35	5.119.114.510	0,35	6.373.448.042	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0004 - BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,35	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					600.000.000		602.655.932		608.793.021		644.661.636		626.393.115	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	0	2	2,1	600.000.000	2,2	602.655.932	2,3	608.793.021	2,4	644.661.636	2,5	626.393.115	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
														3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)	0	2	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5		3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					489.680.482		495.244.836		500.067.624		545.559.018		559.889.083	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	30	30	30	489.680.482	30	495.244.836	30	500.067.624	30	545.559.018	30	559.889.083	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD KESATUAN PENGELOLA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	(KUPS) (Persentase)													HUTAN KPHL UNIT VI
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI
														3.28.0.00.0.00.01.0004 - BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON)
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA
	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	0	10	10	265.000.000	10	265.000.000	10	265.000.000	10	265.000.000	10	265.000.000	3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN
														3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					16.420.434.954		16.211.959.854		16.305.734.748		16.906.285.634		17.087.143.284	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.642.162.784		13.387.606.746		13.400.000.000		13.750.000.000		13.805.857.650	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	13.642.162.784	100	13.387.606.746	100	13.400.000.000	100	13.750.000.000	100	13.805.857.650	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS WILAYAH I
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS WILAYAH II
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					1.621.353.108		1.625.353.108		1.625.500.000		1.625.500.000		1.625.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Presentase Pertimbangan Teknis Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (Pertek SIPA) yang dikeluaran (%) (%)	100	100	100	1.621.353.108	100	1.625.353.108	100	1.625.500.000	100	1.625.500.000	100	1.625.500.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS WILAYAH I
	Presentase Pertimbangan Teknis Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (Pertek SIPA) yang dikeluaran (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					700.835.300		750.000.000		815.234.748		950.000.000		950.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Dokumen)	0	60	60	700.835.300	60	750.000.000	60	815.234.748	60	950.000.000	60	950.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Ha)	0	600	600		600		600		600		600		3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS WILAYAH I
	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	0		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS WILAYAH II
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	0	0	0		300 Ha		300 Ha		300 Ha		300 Ha		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS WILAYAH II

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	0		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	0	0	0		300 Ha		300 Ha		300 Ha		300 Ha		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	0		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	0	0	0		300 Ha		300 Ha		300 Ha		300 Ha		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	0		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		5 Pertek		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	0	0	0		300 Ha		300 Ha		300 Ha		300 Ha		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					119.018.900		119.000.000		125.000.000		225.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,34	36	37,72	119.018.900	39,44	119.000.000	41,16	125.000.000	42,88	225.000.000	44,62	350.000.000	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS WILAYAH I
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan	31,25	37	0		0		0		0		0		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Energi Baru Terbarukan (%)													DINAS WILAYAH II
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,34	36	37,72		39,44		41,16		42,88		44,62		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS WILAYAH II
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (%)	31,25	37	0		0		0		0		0		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,34	36	37,72		39,44		41,16		42,88		44,62		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (%)	31,25	37	0		0		0		0		0		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,34	36	37,72		39,44		41,16		42,88		44,62		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (%)	31,25	37	0		0		0		0		0		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,34	36	37,72		39,44		41,16		42,88		44,62		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					337.064.862		330.000.000		340.000.000		355.785.634		355.785.634	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100	100	337.064.862	100	330.000.000	100	340.000.000	100	355.785.634	100	355.785.634	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														3.29.0.00.0.00.01.0001 - CABANG DINAS WILAYAH I
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS WILAYAH II
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS WILAYAH III
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS WILAYAH IV
	Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		3.29.0.00.0.00.01.0005 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.553.935.266		13.594.397.845		14.145.489.543		14.562.261.521		14.925.632.203	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.685.929.414		11.686.391.993		11.837.483.691		11.984.255.669		12.047.626.351	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	0	100	100	11.685.929.414	100	11.686.391.993	100	11.837.483.691	100	11.984.255.669	100	12.047.626.351	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					680.000.000		680.000.000		780.000.000		900.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	100	100	680.000.000	100	680.000.000	100	780.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					750.000.000		750.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.250.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	833.613.310	841.949.440	867.207.930	750.000.000	901.896.240	750.000.000	946.991.060	1.000.000.000	1.003.810.520	1.100.000.000	1.074.077.260	1.250.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														AN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					168.005.852		208.005.852		258.005.852		308.005.852		358.005.852	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	100	100	168.005.852	100	208.005.852	100	258.005.852	100	308.005.852	100	358.005.852	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.748.000.000		3.820.000.000		4.420.000.000		4.850.000.000		4.950.000.000	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.528.000.000		3.600.000.000		4.100.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan	59,52	60	60	3.528.000.000	60	3.600.000.000	60	4.100.000.000	60	4.500.000.000	60	4.600.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kawasan Industri (Persentase)													PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					120.000.000		120.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					69.972.364		72.071.535		74.233.681		76.460.692		78.754.512	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan					15.000.000		15.450.000		15.913.500		16.390.905		16.882.632	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	15.000.000	100	15.450.000	100	15.913.500	100	16.390.905	100	16.882.632	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					29.998.864		30.898.830		31.825.795		32.780.569		33.763.986	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	2	2	29.998.864	3	30.898.830	4	31.825.795	5	32.780.569	6	33.763.986	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					24.973.500		25.722.705		26.494.386		27.289.218		28.107.894	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	4	4	13	24.973.500	18	25.722.705	22	26.494.386	27	27.289.218	31	28.107.894	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
														2.07.3.32.0.00.01.0001 - UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					189.431.652.220		220.146.385.974		239.623.885.922		260.220.370.951		283.465.247.110	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					173.200.227.035		191.298.952.175		209.177.005.153		228.891.200.943		250.442.948.968	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	8.577.205.156	100	10.901.474.291	100	11.441.382.587	100	12.097.651.290	100	12.699.992.222	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
														4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0002 - BIRO HUKUM
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	95	95	95		95		95		95		95		4.01.0.00.0.00.01.0003 - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEREKONOMIAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0005 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0006 - BIRO ORGANISASI
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	89,56	95	95		95		95		95		95		4.01.0.00.0.00.01.0007 - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
														4.01.0.00.0.00.01.0008 - BIRO UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan Administrasi Pimpinan					8.598.077.290		8.770.038.836		8.945.439.613		9.124.348.405		9.306.835.373	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indikator Indeks Layanan Administrasi Pimpinan (Indeks)	92	92	92		93		93		94		94		4.01.0.00.0.00.01.0009 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Meningkatnya kualitas layanan Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (Indeks)	92	92	92	156.024.944.589	92	171.627.439.048	92	188.790.182.953	92	207.669.201.248	92	228.436.121.373	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (Indeks)	91	92	92		92		93		93		94		4.01.0.00.0.00.01.0008 - BIRO UMUM
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.044.599.772		1.233.791.767		1.258.467.603		1.283.636.955		1.309.309.694	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah					1.044.599.772		1.233.791.767		1.258.467.603		1.283.636.955		1.309.309.694	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	44,03	44,03	44,03		44,03		44,03		44,03		44,03		4.01.0.00.0.00.01.0006 - BIRO ORGANISASI
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.345.000.000		1.465.000.000		1.600.000.000		1.783.000.000		1.920.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	-	3,41	3,41	1.345.000.000	3,42	1.465.000.000	3,45	1.600.000.000	3,47	1.783.000.000	3,49	1.920.000.000	4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.103.174.160		21.294.918.216		22.617.418.700		23.171.882.919		24.584.338.837	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	9.103.174.160	100	21.294.918.216	100	22.617.418.700	100	23.171.882.919	100	24.584.338.837	4.01.0.00.0.00.01.0003 - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.236.729.407		2.281.463.996		2.327.093.277		2.373.635.142		2.421.107.845	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	2.236.729.407	100	2.281.463.996	100	2.327.093.277	100	2.373.635.142	100	2.421.107.845	4.01.0.00.0.00.01.0002 - BIRO HUKUM
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					338.892.443		347.739.850		356.660.841		365.799.859		371.072.352	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	338.892.443	100	347.739.850	100	356.660.841	100	365.799.859	100	371.072.352	4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEREKONOMIAN
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.983.562.686		2.023.233.940		2.063.698.619		2.104.972.591		2.147.072.043	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	Level 3 (Proaktif)	Level 3 (Proaktif)	Level 4 (Strategis)	1.983.562.686	Level 4 (Strategis)	2.023.233.940	Level 4 (Strategis)	2.063.698.619	Level 4 (Strategis)	2.104.972.591	Level 5 (Unggul)	2.147.072.043	4.01.0.00.0.00.01.0007 - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					179.466.717		201.286.030		223.541.729		246.242.542		269.397.371	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	95	95	95	179.466.717	95	201.286.030	95	223.541.729	95	246.242.542	95	269.397.371	4.01.0.00.0.00.01.0005 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					150.000.371.474		160.000.810.058		170.000.946.460		180.000.966.854		190.000.876.969	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					85.000.000.878		95.000.274.744		100.000.174.987		100.000.070.236		106.000.006.343	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	85.000.000.878	100	95.000.274.744	100	100.000.174.987	100	100.000.070.236	100	106.000.006.343	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					65.000.370.596		65.000.535.314		70.000.771.473		80.000.896.618		84.000.870.626	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	8.000.299.474	100	8.000.430.058	100	8.000.696.460	100	8.000.821.354	100	10.000.829.894	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	57.000.071.122	100	57.000.105.256	100	62.000.075.013	100	72.000.075.264	100	74.000.040.732	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5.01 - PERENCANAAN					17.819.475.159		18.175.864.662		18.539.381.954		18.910.169.593		19.288.372.987	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.019.920.893		14.300.319.311		14.586.325.697		14.954.685.848		15.351.737.564	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	14.019.920.893	100	14.300.319.311	100	14.586.325.697	100	14.954.685.848	100	15.351.737.564	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.781.645.510		1.817.278.420		1.853.623.989		1.869.531.925		1.827.089.350	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	95	95	95	1.781.645.510	95	1.817.278.420	95	1.853.623.989	95	1.869.531.925	95	1.827.089.350	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95	95	95		95		95		95		95		5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.017.908.756		2.058.266.931		2.099.432.268		2.085.951.820		2.109.546.073	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95	95	95	551.397.970	95	562.425.929	95	573.674.448	95	585.147.937	95	596.850.896	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	95	95	95	560.271.510	95	571.476.940	95	582.906.478	95	594.564.607	95	606.455.901	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	95	95	95	906.239.276	95	924.364.062	95	942.851.342	95	906.239.276	95	906.239.276	5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
5.02 - KEUANGAN					670.134.388.952		674.350.977.054		678.802.724.634		709.762.244.815		726.695.442.633	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					94.908.173.206		95.223.182.699		95.683.593.733		98.925.603.977		100.688.842.786	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	24.579.853.387	100	24.437.728.801	100	24.430.247.985	100	24.422.393.129	100	24.407.240.295	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	93,41	93,41	94,2	70.328.319.819	94,3	70.785.453.898	94,96	71.253.345.748	99,52	74.503.210.848	97,2	76.281.602.491	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN
														5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPTD MANADO
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					567.082.786.203		570.948.611.631		574.903.353.613		602.366.686.446		617.397.554.624	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	11	10-30	10-30	12.651.172.687	10-30	12.651.172.687	10-30	12.651.172.687	10-30	12.651.172.687	10-30	12.651.172.687	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pelayanan Publik (%)													KEUANGAN DAN ASET
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	18	0.16-0.20	0.16-0.20		0.16-0.20		0.16-0.20		0.16-0.20		0.16-0.20		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	-	0.5-1	0.5-1	521.921.919.654	0.5-1	525.787.745.082	0.5-1	529.742.487.064	0.5-1	557.205.819.897	0.5-1	572.236.688.075	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	73	80-100	80-100		80-100		80-100		80-100		80-100		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	32.509.693.862	100	32.509.693.862	100	32.509.693.862	100	32.509.693.862	100	32.509.693.862	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.642.940.103		2.642.940.103		2.642.940.103		2.642.940.103		2.642.940.103	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	-	0.01-0.03	0.01-0.03	2.642.940.103	0.01-0.03	2.642.940.103	0.01-0.03	2.642.940.103	0.01-0.03	2.642.940.103	0.01-0.03	2.642.940.103	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.500.489.440		5.536.242.621		5.572.837.185		5.827.014.289		5.966.105.120	
Meningkatnya Upaya Eksetensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	51,46	47,41	47,79	5.287.644.596	48,17	5.322.014.286	48,55	5.357.192.800	48,94	5.601.534.364	49,33	5.735.242.989	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN
														5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPTD MANADO
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	202.845.126	100	204.163.619	100	205.513.141	100	214.886.595	100	220.015.938	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPTD MANADO
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	41,63	42,63	43,63	9.999.718	44,63	10.064.716	45,63	10.131.244	46,63	10.593.330	47,63	10.846.193	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN
														5.02.0.00.0.00.03.0001 - UPTD MANADO
5.03 - KEPEGAWAIAN					25.136.000.086		25.889.162.360		26.666.782.493		27.466.785.967		28.290.789.547	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.778.584.878		17.281.942.424		17.800.400.697		18.334.412.718		18.884.445.099	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	16.778.584.878	100	17.281.942.424	100	17.800.400.697	100	18.334.412.718	100	18.884.445.099	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					8.357.415.208		8.607.219.936		8.866.381.796		9.132.373.249		9.406.344.448	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	90	90	90	1.755.508.941	90	1.807.256.480	90	1.862.419.436	90	1.918.292.019	90	1.975.840.780	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	90	90	90	5.843.057.886	90	6.018.349.623	90	6.198.900.111	90	6.384.867.115	90	6.576.413.128	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	90	90	90	481.281.481	90	495.719.926	90	510.591.524	90	525.909.269	90	541.686.548	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	90	90	90	277.566.900	90	285.893.907	90	294.470.725	90	303.304.846	90	312.403.992	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					19.572.954.090		20.160.142.713		20.707.339.063		21.328.559.236		21.958.416.013	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.705.913.989		16.177.091.409		16.662.404.151		17.162.276.276		17.677.144.564	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	15.705.913.989	100	16.177.091.409	100	16.662.404.151	100	17.162.276.276	100	17.677.144.564	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.867.040.101		3.983.051.304		4.044.934.912		4.166.282.960		4.281.271.449	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	60	67	69	2.002.705.773	71	2.062.786.946	73	2.124.670.554	75	2.188.410.671	77	2.254.062.991	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60	67	69	1.864.334.328	71	1.920.264.358	73	1.920.264.358	75	1.977.872.289	77	2.027.208.458	5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					5.870.214.029		6.390.153.300		7.029.218.630		7.732.190.510		8.499.459.542	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5.570.032.557		5.848.559.184		6.433.465.103		7.076.861.613		7.784.597.775	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	5.570.032.557	100	5.848.559.184	100	6.433.465.103	100	7.076.861.613	100	7.784.597.775	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					210.081.840		241.594.116		265.753.527		292.328.897		321.561.767	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	59,21	35	40	210.081.840	45	241.594.116	50	265.753.527	55	292.328.897	60	321.561.767	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					90.099.632		300.000.000		330.000.000		363.000.000		393.300.000	
Meningkatnya pemanfaatan Inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	40	90.099.632	45	300.000.000	50	330.000.000	55	363.000.000	60	393.300.000	5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					6.488.026.386		7.432.552.693		7.892.552.693		8.352.552.693		8.072.552.693	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					5.951.552.693		6.551.552.693		6.751.552.693		7.151.552.693		6.851.552.693	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran					5.951.552.693		6.551.552.693		6.751.552.693		7.151.552.693		6.851.552.693	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					429.838.893		625.000.000		785.000.000		815.000.000		825.000.000	
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Persentase terlaksananya sinegritas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang merata si daerah perbatasan negara (%)	100	100	100	429.838.893	100	625.000.000	100	785.000.000	100	815.000.000	100	825.000.000	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA					106.634.800		256.000.000		356.000.000		386.000.000		396.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Presentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan dan dievaluasi (%)	100	100	100	106.634.800	100	256.000.000	100	356.000.000	100	386.000.000	100	396.000.000	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					10.735.006.030		36.535.708.840		37.194.573.800		39.618.514.200		40.784.290.000	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.137.504.380		35.934.708.840		36.496.509.800		38.890.670.500		39.907.895.500	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	10.137.504.380	100	35.934.708.840	100	36.496.509.800	100	38.890.670.500	100	39.907.895.500	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					597.501.650		601.000.000		698.064.000		727.843.700		876.394.500	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung (%)	0	100	100	597.501.650	100	601.000.000	100	698.064.000	100	727.843.700	100	876.394.500	5.07.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGHUBUNG
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					37.072.761.262		38.527.749.394		40.060.667.701		41.677.282.137		43.383.874.448	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.175.542.770		33.140.809.053		34.135.033.325		35.159.084.324		36.213.856.854	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	32.175.542.770	100	33.140.809.053	100	34.135.033.325	100	35.159.084.324	100	36.213.856.854	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.066.265.851		4.472.892.436		4.920.181.680		5.412.199.848		5.953.419.832	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan					4.066.265.851		4.472.892.436		4.920.181.680		5.412.199.848		5.953.419.832	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,					830.952.641		914.047.905		1.005.452.696		1.105.997.965		1.216.597.762	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	-	Terintegrasi (Integrated)	830.952.641	Terintegrasi (Integrated)	914.047.905	Terintegrasi (Integrated)	1.005.452.696	Terintegrasi (Integrated)	1.105.997.965	Terintegrasi (Integrated)	1.216.597.762	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					26.944.330.149,98		32.333.196.180,16		40.416.495.173		52.541.443.791		70.930.949.119	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.069.182.571		10.883.019.086		13.603.773.857		17.684.906.015		23.874.623.121	
Meningkatnya efektivitas tata kelola administrasi dan manajemen perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran (%)	100	100	100	9.069.182.571	100	10.883.019.086	100	13.603.773.857	100	17.684.906.015	100	23.874.623.121	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.525.250.880,93		1.830.301.057		2.287.876.321		2.974.239.217		4.015.222.943	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.525.250.880,93	100	1.830.301.057	100	2.287.876.321	100	2.974.239.217	100	4.015.222.943	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.446.329.256,06		2.935.595.107,06		3.669.493.833		4.770.342.048		6.439.961.765	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai	100	100	100	2.446.329.256,06	100	2.935.595.107,06	100	3.669.493.833	100	4.770.342.048	100	6.439.961.765	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Politik (Persentase)													BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					806.685.980,24		968.023.176		1.210.028.970		1.573.037.661		2.123.600.842	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	-	100	806.685.980,24	100	968.023.176	100	1.210.028.970	100	1.573.037.661	100	2.123.600.842	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					228.382.421,75		274.058.906,1		342.573.632		445.345.722		601.216.725	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	-	-	100	228.382.421,75	100	274.058.906,1	100	342.573.632	100	445.345.722	100	601.216.725	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					12.868.499.040		15.442.198.848		19.302.748.560		25.093.573.128		33.876.323.723	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	-	-	100	12.868.499.040	100	15.442.198.848	100	19.302.748.560	100	25.093.573.128	100	33.876.323.723	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					3840119497327.98		4177469315897.84		4584387664908.22		4693856536670.28		4624552906531.12	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Utara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	75	78	80	81	82	83	
2	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	%	1.50	1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	
3	Indeks Modal Manusia (IMM)	Angka	0,52	0,53	0,535	0,54	0,55	0,56	
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,0-7,0	6,05-7,05	6,70-7,70	7,10-8,10	7,50-8,50	7,80-8,80	
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,53	3,56	3,59	3,62	3,65	3,69	
6	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Angka	76,25	76,29	76,33	76,34	76,37	76,39	
7	Indeks Ketahanan Energi Daerah	Angka	6,64	6,64	6,65	6,65	6,66	6,66	
8	Kapasitas Air Baku	Angka	0,61	0,70	0,79	0,88	0.97	1,06	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	78,71	78,88	79,05	79,22	79,39	79,56	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Indeks Penyelenggaraan Tramtibumlinmas	Angka	60,50	60,50	70,00	70,50	75,00	75,00	
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	56,6-56,70	57,15-57,30	57,70-57,90	58,25-58,50	58,81-59,11	59,36-59,71	
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74.70	76.02	77.34	78.66	79.98	81.30	
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79,32	79,34	79,36	79,38	79,40	79,42	

4.2.2 Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah (IKD)

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	49,46	49,45	51,5	54,6	56,5	58,1	60	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,91	159.08-	159.07-157.40	157.39-155.72	155.71-154.06	154.05-149.14	149.13-147.46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,26	78,71	78,88	79,05	79,22	79,39	79,56	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	6,89	20	23,6	27,2	30,8	34,4	38	
5	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Angka	76,23	76,25	76,29	76,33	76,34	76,37	76,39	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	49,75	70	76	82	88	94	100	
7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	-	0,522	0,5262	0,5304	0,5346	0,5388	0,543	
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	-	37,06	39,65	42,24	44,82	47,41	50	
10	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	94,46	95,5	96,54	97,57	98,61	99,65	100	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	-	14,66	15,4	16,13	16,86	17,6	18,33	
12	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	-	24,59	26,33	28,07	29,82	31,56	33,3	
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	6,4	7,5	11	14,5	18	21,5	25	
14	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	6,16	5,6	5,22	4,84	4,46	4,05	4,05	
15	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	801,02	936	958	990,45	1.044,05	1.124	1.976	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
16	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	54,9	58,34	61,78	65,21	68,65	65,05	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	182,43	183,65	183,89	184,03	184,17	184,31	184,45	
18	Rasio Penduduk	%	104,5	104,64	104,64	104,64	104,64	104,64	104,64	
19	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	49,46	49,95	51,5	54,6	56,5	58,1	60	
20	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	0	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
21	KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA	Kwh/Kapita	801,02	936	958	990,45	1.044,05	1.124	1.976	
22	Rate Nett Recent Migrasi		-1,99	-1,55	-1,25	-0,99	-0,8	-0,75	-0,5	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	6.00-7.00	6.05-7.05	6.7-7.7	7.1-8.1	7.5-8.5	7.8-8.8	
2	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5	0,52	0,53	0,535	0,54	0,55	0,56	
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	55,39	56.6-56.7	57.15-57.30	57.70-57.90	58.25-58.50	58.81-59.11	59.36-59.71	
4	Rata-Rata Capaian Pembelajaran	%	51,72	53,83	54,37	54,92	55,47	56,02	56,57	
5	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh Bantuan Sosial	%	5,52	6,07	6,19	6,31	6,43	6,55	6,67	
6	Persentase Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	%	15	15	25	45	65	75	100	
7	Angka Kelangsungan Hidup Balita	Angka	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase Upaya Promotif dan Preventif Bahaya Narkoba kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97	13.08-13.11	13.14-13.17	13.20-13.23	13.26-13.29	13.33-13.34	13.39-13.40	
10	Prevalensi Stunting	%	20,8	19	18,3	17,6	16,9	15	14	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,386	0,371	0,358	0,345	0,333	0,32	0,307	
12	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,83	57,2	58,35	59,51	60,7	61,91	63,14	
13	Angka Kelangsungan Hidup Usia Dewasa	Angka	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	64,34	64,59	64,7	64,85	65,55	65,95	
15	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	-	158	144	130	116	103	87	
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	-	74,75	75,43	76,1	76,78	77,45	78,12	
17	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	62,54	62,89	63,24	63,59	63,94	64,29	64,64	
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,84	10.15-10.17	10.28-10.30	10.41-10.43	10.54-10.56	10.67-10.68	10.80-10.81	
19	angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	%	34,12	34,5	34,8	35,16	35,67	35,89	36,1	
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	80	80	80	80	80	90	90	
21	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	6	6	11	11	10	10	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
22	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Numerasi	%	-	23.22-25.72	24.22-26.72	25.22-27.72	26.22-28.72	27.22-29.72	28.22-30.72	
23	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	69,35	74.6-	74.6-81.6	87.67-92.52	104.46-113.73	121.25-134.94	138.04-156.15	
24	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,69	73,95	74,16	74,37	74,58	74,79	75	
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	71,67	76,45	77,1	77,75	78,4	79,05	80	
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,98	95.23-95.32	95.31-95.41	95.37-95.52	95.45-95.61	95.53-95.73	95.62-95.84	
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	45	46	47	48	49	50	51	
28	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Literasi	%	-	6.67-13.33	8.34-13.33	10.01-13.33	11.68-13.33	13.33-13.33	15.00-15.00	
29	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	-	11.48-11.76	11.48-11.76	11.48-11.76	11.48-11.76	11.48-11.76	11.48-11.76	
30	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Literasi	%	-	25.31-31.81	27.64-33.14	29.97-34.47	32.30-35.80	34.63-37.13	36.96-38.46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
31	Jumlah Kab/kota yang melakukan pelayanan UBM	Kabupaten /Kota	2	6	8	10	12	15	5	
32	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	103,43	98,6	98,7	98,8	99,2	99,5	99,6	
33	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,85	5.01-5.56	4.86-5.53	4.71-5.50	4.56-5.47	4.40-5.00	4.26-4.80	
34	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)	%	81	92,86	93,86	93,31	93,64	93,77	94	
35	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	(%)	-	72,11	72,91	73,71	74,51	75,29	76,09	
36	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	-	44	46	48	50	52,2	52,2	
37	Persentase cakupan skrining obesitas	%	0	20	25	30	35	40	50	
38	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	-	30	32	34	36	40	-	
39	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	82.43-82.49	82.60-82.75	82.80-82.90	82.95-83.00	83.15-83.40	83.50-84.00	
40	Tingkat kemiskinan	%	6,7	5.59-6.19	5.42-5.82	5.02-5.42	4.62-5.02	4.22-4.62	3.82-4.22	
41	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,68	76,37	77,06	77,74	78,43	79,12	79,81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
42	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7	7	6	6	5	4	4	
43	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)		62,29	64,17	65,68	67,23	68,81	70,43	72,09	
44	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Angka Numerasi	%	-	0.00-6.67	1.67-8.34	3.34-10.01	5.01-11.68	6.67-13.33	8.34-15.00	
45	Cakupan penemuan kasus tuberkolosis	%	74	92	92	92	92	92	92	
46	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	-	1	1	1	1	1	-	
47	Cakupan skrining kesehatan jiwa	%	10	10	15	20	25	30	35	
48	Rata-Rata Asesmen Tingkat Nasional	Nilai	-	53,83	54,37	54,92	55,47	56,02	57,47	
49	Gini Ratio	Indeks	0,347	0.339-0.352	0.338-0.351	0.337-0.350	0.335-0.348	0.332-0.336	0.332-0.335	
50	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	82	85	90	92	93	95	
51	Persentase ARG	%	2,9	8	10	12	14	16	18	
52	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
53	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	---	650-700	700-750	750-755	755-760	760-765	765-770	
55	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	82	85	90	92	93	95	
56	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,98	91,95	94,7	95,55	95,6	96,7	97,1	
57	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	%	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	
58	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	0	45	65	70	75	80	95	
59	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	29,74	29,8	29,85	29,9	30	30	30	
60	Persentase RS Provinsi yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA	%	0	10	40	50	60	90	90	
61	Persentase RS Kabupaten/Kota yang memenuhi kapasitas pelayanan KJSU KIA	%	0	10	40	50	60	80	80	
62	Jumlah Kabupaten Kepulauan yang menerima pelayanan kesehatan	Kabupaten /Kota	0	1	1	1	1	1	2	
63	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kesehatan Lanjutan Lainnya yang menerapkan Sisrute									
64	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya dengan pemenuhan SPA	%	100	100	100	100	100	100	100	
65	Persentase RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Lainnya yang diterbitkan izin operasionalnya sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
66	Persentase RS yang menerapkan KRIS	%	100	100	100	100	100	100	100	
67	Persentase RS yang melaksanakan sistem klaim sesuai aturan	%	100	100	100	100	100	100	100	
68	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan		24	50	55	60	65	70	75	
69	Remaja putri yang Konsumsi TTD		76,42	65	67	70	75	80	83	
70	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan		74	80	82	85	88	90	92	
71	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif		55,5	61	64	67	70	73	75	
72	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk		87,25	91	92	93	94	95	96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
73	Praktik Inisisasi Menyusu Dini		58	50	55	60	65	75	77	
74	"Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan"		44,2	48	52	60	70	80	82	
75	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap Total PDRB	%	4,91	4,93	4,96	4,99	5,02	5,05	5,08	
76	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	1,9	2,3	2,79	3,37	4,09	4,95	5,99	
77	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		84,71	85,82	86,94	88,08	89,23	90,4	91,58	
78	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	107	105-110	105-110	105-110	105-110	105-110	105-110	
79	Indeks Lansia Berdaya		58,8	59,27	59,75	60,23	60,72	61,21	61,7	
80	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi		84,4	84,2	84,86	85,5	86,1	86,69	87	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,68	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	
2	Indeks Infrastruktur	Angka	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	10,62	10,76	10,7	10,73	10,76	10,8	10,83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	20,59	20-22	20-22	20-22	20-22	20-22	20-22	
5	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	13,65	13,67	13,7	13,73	13,76	13,8	13,83	
6	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23,34	36	37,72	39,44	41,16	42,88	44,62	
7	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,8	0,8	0,81	0,81	0,82	0,82	0,83	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	49.88-50.92	50.5-51.0	50.7-51.5	50.9-52.5	50.11-52.74	51.12-52.75	
9	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,44	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,64	
10	Indeks Desa (Persentase Desa Mandiri)	%	35,7	35,63	35,77	36,03	36,43	36,7	36,8	
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,62	10,67	10,7	10,73	10,76	10,8	10,83	
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	-	16,11	17,1	18,09	19,08	19,82	20,81	
13	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	-	58,16	60,15	62,14	64,13	66,13	68,12	
14	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	2.624	3.218	3.329	3.433	3.529	3.604	3.680	
15	Total Kredit/PDRB	(%)	-	30,1	31,97	33,84	35,71	37,6	39,47	
16	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	-	5,9	5,95	6,2	6,4	6,8	6,85	
17	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,5	3,33	3,8	3,46	3,56	3,66	3,66	
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	32,88	34,41	34,42	34,47	34,53	34,58	34,64	
19	Indeks Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	-	53	53	53,5	54	54,5	55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
20	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	0,85	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
21	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-	0,39	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11	1,16	1,16	
23	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	126	127	126	126	126	126	126	
24	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,34	6,6	7	7,5	7,95	8,4	8,85	
25	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Angka	-	2.046.466,68	2.434.744	2.823.022	3.211.309	3.599.580,61	3.987.874	
26	Aset Dana Pensiun/PDRB	(%)	-	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,07	49.6-50.5	50.5-51.0	51.0-51.5	51.5-52.0	52.0-52.5	52.5-53.0	
28	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	-	0,58	0,585	0,59	0,595	0,61	0,625	
29	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	-	9,25	9,35	9,45	9,55	9,65	9,77	
30	Inklusi Keuangan	(%)	-	92,31	92,87	93,43	93,99	94,54	95,11	
31	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	-	0,85	0,95	1,05	1,25	1,5	1,75	
32	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	%	42,5	42,5	43,5	44,5	46	47,5	48,5	
33	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	-	55,81	57,99	60,17	62,35	64,53	66,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
34	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	74,21	76,81	77,61	78,41	79,2	80	80,8	
35	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,72	38	39	40	41	42	42	
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,68	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	
37	Ekspor barang dan jasa (%PDRB)	%	9,22	13.26-13.32	13.32-13.38	13.40-13.46	14.10-14.38	14.88-15.34	14.88-15.34	
38	Rasio Ketergantungan	%	41,6	40,2	40,09	40	39,9	39,8	39,71	
39	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	-	148	163	179	197	217	238	
40	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	0,92	0,95	1,03	1,09	1,18	1,27	1,27	
41	Tingkat Inflasi	%	0,44	1.5-3.5	1.5-3.5	1.45-3.47	1.4-3.45	1.38-3.43	1.36-3.4	
42	Persentase Kepemilikan NPWP	%	65	69	73	77	81	85	90	
43	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5,86	10.9-11.6	10.9-11.6	10.9-11.6	10.9-11.6	10.9-11.6	10.9-11.6	
44	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB	%	0,014	0,0141	0,0143	0,0146	0,0148	0,015	0,0153	
45	Persentase Kontribusi PMTB terhadap total PDRB	%	30	25-30	26-31	27-32	28-33	29-34	30-35	
46	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	82,79	82,96	83,4	83,7	84	84,3	84,6	
47	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang Diolah, Dikaji	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
			dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	dan Dimanfaatkan (100% dari 5 dokumen)	
48	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100 (dari 4 kegiatan usaha penyelesaiaan hambatan pelaku usaha)	100	100	100	100	100	100	
49	RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB	%	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11	1,16	1,16	
50	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	94 (Berdasarkan Jumlah Perizinan Berusaha yang terbit di Tahun 2024 (2.105 dari 2.239 permohonan) dan yang belum memenuhi Persyaratan (134)	94 (Berdasarkan Jumlah Perizinan Berusaha yang terbit di Tahun 2024 (2.105 dari 2.239 permohonan) dan yang belum memenuhi Persyaratan (134)	95	95	96	96	96	
51	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100 (64 investor non UMK)	100 (64 investor non UMK)	50	50	50	50	50	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	73,98	75	78	80	81	82	83	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,38	74,7	76,02	77,34	78,66	79,98	81,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,2	4,21	4,21	4,21	4,22	4,22	4,22	
5	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,504	0,504	0,508	0,512	0,516	0,52	0,524	
6	Nilai SAKIP	Nilai	67,67	68,07	68,46	68,85	69,24	69,63	70	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76,74	76	77	77,35	78,55	79,7	80,35	
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,01	3,02	3,05	3,1	3,15	3,25	3,3	
9	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan	%	75	77	80	82	84	86	88	
10	Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks	48,19	-	48,25	48,5	49	49,5	50	
11	Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	Level 3 (Proaktif)	Level 3 (Proaktif)	Level 4 (Strategis)	Level 4 (Strategis)	Level 4 (Strategis)	Level 4 (Strategis)	Level 5 (Unggul)	
12	Persentase Capaian Aksi HAM	%	34,8	55	57	59	60	62	62	
13	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,53	3,53	3,56	3,59	3,62	3,65	3,69	
14	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Penyediaan Akses Internet		47	47	47	47	47	47	47	
16	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara	Indeks	-	81.90-81.95	81.97-82.00	82.30-82.45	82.52-82.70	82.73-82.80	83.00-84.00	
17	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	43,1	44	45	46	47	48	49	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
18	Persentase Penyelesaian Tingkat Kejahatan	%	52,72	55	58	61	64	67	70	
19	Indeks Integritas Nasional	Persentase	-	76,79	78	78,5	79	79,93	80	
20	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	76,04	80	100	100	100	100	100	
21	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	94	95	96	97	98	99	100	
22	Rasio Konektivitas Laut	%	0,455	0,455	0,455	0,545	0,636	0,727	0,818	
23	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	60	60.00-61.00	61.50-62.00	63.00-64.00	64.50-65.00	66.00-67.00	67.00-68.00	
24	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	62,3	62.30-63.00	67.20-67.50	72.30-73.00	78.00-80.00	82.70-83.20	85.00-90.00	
25	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	80,5	80.50-81.20	81.30-82.00	83.00-84.10	84.50-85.10	85.50-86.00	86.50-87.20	
26	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	81,87	81,95	82	82,45	82,7	82,8	68	
28	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Oleh Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Iklim Inklusivitas SMA	%	56,57	58,07	59,57	61,07	62,57	64,07	65,57	
2	Iklim Inklusivitas SMPLB	%	59,89	61,29	62,69	64,09	65,49	66,89	68,29	
3	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan	%	5,12	7,15	9,81	12,13	15,14	18,3	20,1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	yang Diterbitkan/Diperbarui									
4	Iklim Keamanan SMK	%	65,53	66,73	67,93	69,13	70,33	71,53	72,73	
5	Skor Kemampuan Literasi SMA	%	67,19	67,79	68,39	68,99	69,59	70,19	70,79	
6	Iklim Keamanan SMA	%	68,94	77,99	79,19	80,39	81,59	82,79	83,99	
7	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	91,01	91,56	92,1	92,64	93,18	93,72	94,26	
8	Skor Kemampuan Literasi SDLB	%	61,42	63,02	64,62	66,22	67,82	69,42	71,02	
9	Iklim Kebinekaan SDLB	%	85	86	87	88	89	90	91	
10	Skor Kemampuan Numerasi SMPLB	%	51,67	51,92	52,17	52,42	52,67	52,92	53,17	
11	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	71,55	72,11	72,91	73,71	74,51	75,29	76,09	
12	Skor Kemampuan Numerasi SMK	%	52,59	54,79	56,99	59,19	61,39	63,59	65,79	
13	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	10,11	10,11	30,12	45,13	65,14	75,15	90,16	
14	Iklim Kebinekaan SMK	%	68,12	69,42	70,72	72,02	73,32	74,62	75,92	
15	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi	Persentase	46,49	47,59	49,23	51,49	53,49	54,47	56,07	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dalam pendidikan khusus (APS)									
16	Skor Kemampuan Literasi SMALB	%	49,39	49,89	50,39	50,89	51,39	51,89	52,39	
17	Iklim Inklusivitas SDLB	%	64	65,3	66,6	67,9	69,2	70,5	71,8	
18	Iklim Inklusivitas SMK	%	53,93	56,23	58,53	60,83	63,13	65,43	67,73	
19	Skor Kemampuan Numerasi SDLB	%	73,42	74,02	74,62	75,22	75,82	76,42	77,02	
20	Iklim Kebinekaan SMA	%	70,55	71,55	72,55	73,55	74,55	75,55	76,55	
21	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	76,13	77,17	78,21	79,25	80,28	81,32	82,36	
22	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	65,12	67,2	69,19	73,14	79,13	82,19	85,24	
23	Skor Kemampuan Literasi SMK	%	60,2	61,5	62,8	64,1	65,4	66,7	68	
24	Skor Kemampuan Numerasi SMA	%	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49	65,09	66,69	
25	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	72,48	73,12	73,76	74,4	75,04	75,68	76,33	
26	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	10,11	10,11	10,5	10,89	11,12	11,35	11,86	
27	Skor Kemampuan Numerasi SMALB	%	50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	53,1	53,6	
28	Iklim Kebinekaan SMALB	%	64,67	66,67	68,67	70,67	72,67	74,67	76,67	
29	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	64,12	65,1	70,2	75,15	80,14	85,2	90,25	
30	Skor Kemampuan Literasi SMPLB	%	55,58	56,08	56,58	57,08	57,58	58,08	58,58	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
31	Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	62	63,6	65,2	66,8	68,4	70	71,6	
32	Iklim keamanan SMALB	Nilai	64,56	65,86	67,17	68,46	69,76	71,06	72,36	
33	Iklim Keamanan SDLB	%	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	
34	Iklim Kebinekaan SMPLB	%	67	68,8	70,6	72,4	74,2	76	77,8	
35	Iklim Keamanan SMPLB	%	69,33	70,53	71,73	72,93	74,13	75,33	76,53	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	%	20,8	19	18,3	17,6	16,9	15	14	
2	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	29,85	30	30	30	35	50	50	
3	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	74	92	92	92	92	92	92	
4	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	57	67	67	67	67	67	86	
5	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	26	26	40	55	75	95	
6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	2	
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	(%)	81	92,86	93,08	93,31	93,54	93,77	94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	(treatment success rate)									
8	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kab/Kota	10	10	10	10	10	15	15	
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	80	80	80	80	80	85	85	
12	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	79,88	80	82	82	85	85	90	
13	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	73	73	73	73	73	74	75	
14	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	69,9	85	88	90	93	95	95	
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	14,26	15	15	18	20	23	25	
17	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	74	74,25	74,3	75	75	75	83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
18	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	90	80	80	80	80	90	90	
19	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten /Kota	15	15	15	15	15	15	15	
20	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
21	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	%	84	90	90	90	90	90	90	
22	Cakupan penemuan kasus pneumonia balita	%	40	50	95	95	95	95	95	
23	Jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies	Kabupaten /Kota	3	3	5	6	7	8	9	
24	Persentase penurunan angka kematian Dengue	%	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
25	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan POPM Kecacingan setiap 6 bln sekali	Kabupaten /Kota	15	15	15	15	15	15	15	
26	Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pencegahan Hepatitis Virus	Kabupaten /Kota	0	1	5	8	12	15	15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
27	Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu	%	40	40	40	40	40	40	40	
28	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	0	91	92	94	96	98	98	
29	Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan program pengendalian anti mikroba (PPRA)	%	0	30	40	50	60	70	80	
30	Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotika rasional	%	0	30	40	50	60	70	80	
31	Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	94	95	95	95	95	100	100	
33	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	30	30,3	48	50	55	60	65	
3	Persentase Cakupan Infrastruktur	Persentase	63	64	65	67	72	75	77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Permukiman dalam Kondisi Baik									
4	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional		0	10	25	30	40	60	70	
6	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	4,5	4,55	4,86	6,48	8,1	60	80	
7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	82,7	82,96	83,4	83,7	84	84,3	84,6	
8	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persentase	0	10	20	30	40	50	60	
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	0,11	0,12	0,14	0,57	8,21	15	30	
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	7,9	8,65	9,4	10,9	12,4	13,9	15,4	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang	Persentase	0	0	2%	4%	6%	8%	10%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni									
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	68	75	75	80	86	93	100	
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	68%	75%	75%	80%	86%	93%	100%	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	90	90	95	95	95	95	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	80	80	85	85	90	95	
4	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	-	90	95	95	95	100	100	
5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	-	85	90	90	95	95	100	
6	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	-	75	85	95	100	100	100	
AF	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	6,6	10	20	26,66	33,33	40	46,66	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	41	41,19	41,36	41,52	41,68	41,84	42	
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	8	10	12	14	16	18	20	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	5,43	8	10	15	20	25	30	
5	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi	%	46,86	76,45	77	77,1	77,2	77,3	77,4	
6	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	49,9	50,5	51	51,5	52	52,5	53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AG	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Indeks Keamanan Pangan Segar	Indeks	0	0	50,3	50,35	50,4	50,45	50,5	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,2	14,9	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,6	88	88,2	88,5	88,8	89,1	89,4	
4	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persentase	92	92	92	93	94	95	96	
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AH	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	45	50	50	55	60	65	70	
2	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk	Persentase	45	50	50	55	60	65	70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu									
5	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
6	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
7	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
AI	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Angka	76,26	78,71	78,88	79,05	79,22	79,39	79,56	
AJ	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	64,5	65	65,5	66,2	66,5	66,75	66,85	
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,74	20	20	30	40	50	55	
3	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	50	50	50	50	50	50	50	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	53,46	54	55	62	64	66	68	
5	Persentase Akta Kelahiran yang	Persentase	96,07	96,58	97	98,15	98,72	99,25	99,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Diterbitkan bagi yang Melaporkan									
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	72,25	72,3	72,3	72,5	72,75	72,9	73	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	78,54	78,6	78,6	78,7	78,9	78,95	79	
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AK	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	26,54	4,97	6,63	8,29	9,95	13,27	16,58	
2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	0	4,97	6,63	7,63	9,95	11,61	13,27	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	100	1,99	3,31	3,98	4,51	4,97	5,3	
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	6,63	9,95	16,58	14,93	16,58	19,9	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	0	1,99	2,98	3,98	4,44	4,64	4,97	
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	0	1,32	1,65	1,99	2,32	2,65	2,98	
AL	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,06	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,3	12,3	12,01	12	11,75	11,5	11	
3	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	16,16	16,16	16,48	16,73	16,94	17,18	17,34	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	38,8	38,59	38,38	38,17	37,96	37,75	37,54	
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	61,8	61,8	61,95	62	63	63,5	64	
AM	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	(%)	90	91	92	93	94	95	96	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	22	22	23	24	25	26	28	
3	Rasio Konektivitas Darat	%	0,504	0,504	0,508	0,512	0,516	0,52	0,524	
AN	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	publik pemerintah daerah									
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	85	85	87	89	91	93	95	
AO	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu.	%	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	
2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1	2	4	6	8	10	12	
3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2	2	2	2	2	2	2	
4	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	500	10	12	10	13	16	20	
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	2	1	1	1	1	2	2	
6	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
7	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	3	3	4	5	5	10	14	
8	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	1,5	1,5	2,5	3	4	5	6	
9	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dari Informal ke Formal									
10	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	2	2	1,5	3	4,5	6	6	
11	PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NON PERTANIAN PADA LEVEL PROVINSI	%	9,15	9,25	9,35	9,45	9,55	9,65	9,77	
12	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	
13	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2,5	3,33	3,8	3,46	3,56	3,66	3,66	
14	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	0,5	0,7	1,5	2,3	3,1	3,4	4,1	
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	
16	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	2,26	2,55	2,65	2,7	2,75	2,94	5,56	
17	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	0	1,93	3,85	5,78	7,7	9,63	11,55	
AP	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	
AQ	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	3,52	3,52	3,62	3,72	3,82	3,92	4,02	
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepemudaan	%	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Jumlah Fasilitasi Olahraga Representatif	Unit	10	10	13	16	19	22	25	
4	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	2,17	2,17	2,67	2,77	2,87	2,97	3,07	
5	Persentase Pemuda Aktif Organisasi	%	25	25	35	45	55	65	75	
6	Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan	Event	5	10	15	20	25	30	35	
7	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi Narkoba	Orang	100	100	300	400	500	600	700	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepramukaan	%	6,89	6,89	7,01	7,11	7,21	7,31	7,41	
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	10,24	10,24	10,34	10,44	10,54	10,64	10,74	
10	Peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga	Prestasi	107	115	115	195	175	100	120	
AR	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	68	70	75	80	85	90	100	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	68	70	75	80	85	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AS	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	43,1	44	45	46	47	48	49	
AT	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Angka	1	1	1	5	6	7	9	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	1,8	1,81	1,82	2,5	2,7	2,9	3,12	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	11	15,25	18	21,5	29,75	39,75	49,75	
4	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	0,315	0,315	5	10	12	15	17	
5	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	18,9	19,2	19,25	29,4	33,6	37,8	42	
6	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	8,57	10	11,42	17,14	25,71	37,14	48,57	
AU	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,44	68,47	68,5	68,53	68,56	68,59	68,72	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	0	0	5	7	9	11	13	
AV	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Persentase Akses Masyarakat terhadap	Persentase	0	0	0	90	92	94	96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	30	40	50	60	70	80	90	
3	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	0	15	30	45	60	80	
AW	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	1.007.792	1.030.129	929.413	970.384	1.012.903	1.057.048	1.102.900	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	595,361	615.129	654.585	667.677	681.030	694.651	708.544	
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	7,75	7,75	7,75	7,75	7,76	7,76	7,77	
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	421.431	415.000	274.828	302.707	331.873	362.397	394.356	
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	%	97	98	80	83	85	90	92	
6	Luasan kawasan konservasi	Ha	234.886,92	234.886,92	240.114,95	242.635,34	243.627,15	244698. 24	245.648,4	
7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	68	70	72	72	73	73	74	
8	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
AX	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
2	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Orang	30	30	30	30	30	30	30	
3	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	131.114	148000-148360	157000-163000	173000-179000	190000-200000	217000-228480	229000-238000	
4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	1.179.028	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
5	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	16,94	16,94	26,94	36,94	46,94	56,94	66,94	
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	10.95%	10.95%	20.95%	30.95%	40.95%	50.95%	60.95%	
7	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	519	519	545	572	601	631	662	
8	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	638	638	670	704	739	776	815	
AY	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	
2	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
3	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	
4	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	1	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	1-1.3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	0	0	5	5	5	5	5	
6	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Ton	308.871	308.871	310.415	311.967	313.527	315.095	316.670	
7	Cakupan luas lahan yang ditetapkan	Hektar	403.539	353.783	353.783	353.783	353.783	353.783	353.783	
8	Presentasi SDM petani yang ditingkatkan	%	1	1	1	1	1	1	1	
9	Presentasi penanganan bencana pertanian	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
10	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.050.174	1.108.964	1.120.148	1.132.034	1.144.047	1.156.181	1.168.440	
11	Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	49.930	51.042	51.552	52.068	52.589	53.115	53.646	
12	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	13.376	26.007	26.266	26.624	26.880	27.009	27.221	
13	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	10	10	10	10	10	10	10	
14	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	97	97	97	97	97	97	97	
15	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	35	45	45	50	55	60	70	
16	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
17	Persentase Penanganan Dampak	Persentase	71	71	71	71	71	71	71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Perubahan Iklim Terhadap Pertanian									
18	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	40.097,53	40.097,53	40.097,53	40.097,53	40.097,53	40.097,53	40.097,53	
19	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan	%	1	1	1	1	1	1	1	
20	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	268.275	269.616	270.964	272.319	273.681	275.049	276.425	
21	Jumlah Produksi Jagung	Ton	652.241	660.000	666,683	674,023	681,444	688,947	696,54	
22	Jumlah produksi tanaman hortikultura jenis tomat	Ton	33.883	34.650	34.997	35.346	35.700	36.057	36.417	
23	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2.751	2.812	2.840	2.869	2.897	2.926	2.955	
24	Jumlah Produksi Telur	Ton	3.663	4.334	4.377	4.420	4.463	4.506	4.549	
25	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	5.500	5.610	5.722	5.837	5.953	6.072	6.194	
26	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	43.542	56.027,06	56.027,06	56.027,06	56.027,06	56.027,06	56.027,06	
27	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Babi, Ayam)	Ton	9.713	21.673	21.889	22.204	22.417	22.503	22.672	
28	Jumlah Produksi Padi	Ton	397.933	448.964	453.465	458.011	462.603	467.234	471.900	
29	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	13.296	13.580	13.716	13.853	13.991	14.131	14.273	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
AZ	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**									
1	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	0,042	0,042	0,045	0,05	0,06	0,06	0,06	
2	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	6.663.553.900	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
3	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS		0	10	10	10	10	10	10	
4	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)		30	30	30	30	30	30	30	
5	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
6	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi dan manajemen perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)		30	30	30	30	30	30	30	
8	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	244	240	240	240	240	240	240	
9	Luas lahan yang dihijaukan diluar kawasan hutan negara	Ha	100	100	100	100	100	100	100	
BA	**3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									
1	Persentase Rekomendasi Usaha Pengelolaan Geologi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dan Sumber Daya Mineral									
2	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Ha	0	600	600	600	600	600	600	
3	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase Pertimbangan Teknis Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (Pertek SIPA) yang dikeluaran (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Dokumen	0	60	60	60	60	60	60	
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-4,27	1	3	4	5	6	7	
2	TINGKAT INFLASI	%	0,44	2.5-3.5	2.5-3.5	2.3-3.7	2.3-3.7	1.5-3.8	1.5-3.8	
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	-	--	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
5	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	-	-	5	5	5	5	5	
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	4,22	5	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	0,83	0,84	0,86	0,91	0,94	1,03	1,07	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0,125	0,127	0,129	0,131	0,133	0,135	0,137	
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	
5	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	6,75	7,75	8,75	9,75	10,75	11,75	12,75	
BD	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
1	Jumlah lokasi yang di evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman	Lokasi	0	1	2	3	4	5	6	
2	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persentase	4	9	13	18	22	27	31	
3	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indikator Indeks Layanan Administrasi Pimpinan	Indeks	92	92	92	93	93	94	94	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	94,04	50	50	50	50	50	50	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	20	60	60	60	60	60	60	
5	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	â‰¤ 0,8	â‰¤ 0,8	â‰¤ 0,8	â‰¤ 0,8	â‰¤ 0,8	â‰¤ 0,8	
6	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	
7	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	Indeks	91	92	92	92	93	93	94	
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	19,17	10	10	10	10	10	10	
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,2	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
10	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	-	3,41	3,41	3,42	3,45	3,47	3,49	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,68	86,824	86,969	87,113	87,258	87,402	87,546	
12	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	98	98,2	98,5	98,8	99	99,2	99,6	
13	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	Indeks	91	92	92	92	93	93	94	
14	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BG	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	95	95	95	95	95	95	95	
BH	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Jumlah Dokumen Manajemen Aset yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	51,46	47,41	47,79	48,17	48,55	48,94	49,33	
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	11	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30	
4	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penurunan SILPA	%	-	0.5-1	0.5-1	0.5-1	0.5-1	0.5-1	0.5-1	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	18	0.16-0.20	0.16-0.20	0.16-0.20	0.16-0.20	0.16-0.20	0.16-0.20	
7	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-	0.01-0.03	0.01-0.03	0.01-0.03	0.01-0.03	0.01-0.03	0.01-0.03	
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	41,63	42,63	43,63	44,63	45,63	46,63	47,63	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
10	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	73	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
BI	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Terjaganya Kualitas Riset/ Penelitian		0	0	2	2	2	3	3	
2	Terlaksananya Analisis Kebijakan Berbasis Bukti		0	0	3	3	4	4	4	
3	Terfasilitasinya produk inovasi untuk dimanfaatkan		0	0	1	1	2	2	2	
BJ	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	74	74	75	76	78	80	80	
2	Jumlah ZI WBK (Perangkat Daerah)		2	2	2	2	2	2	2	
3	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	76	78	78	80	80	80	80	
5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	73	73	75	75	75	80	80	
6	Persentase Laporan LHKPN bagi ASN wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	
9	Monitoring Center for Prevention (MCP)	Nilai	85	85	85	85	85	85	90	
BK	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang merangkum visi dan misi pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan yang diarahkan untuk menjawab tantangan utama daerah, antara lain peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang akuntabel.

Fokus utama RPJMD meliputi transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan integrasi antarwilayah, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dokumen ini merupakan komitmen kolektif antara Pemerintah Provinsi, DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara merata dan berkeadilan.

5.1 Kesimpulan Substansial

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah, serta memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah lainnya. Dokumen ini memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas daerah, serta kerangka pendanaan yang terukur dan realistis. Seluruh substansi dirancang untuk menjawab isu strategis pembangunan, menutup kesenjangan wilayah, serta mendorong inovasi dan keberlanjutan.

RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi pembangunan menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penjabaran misi ke dalam indikator kinerja

utama menjadi acuan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan, baik pada tataran makro provinsi maupun pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2025–2029 akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan akan dirancang secara menyeluruh, terpadu, dan memperhatikan dimensi tematik serta spasial (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial/THIS), dengan tetap mempertimbangkan kondisi wilayah, potensi lokal, serta aspirasi masyarakat.

Seluruh Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Dokumen tersebut kemudian diimplementasikan setiap tahun melalui RKPD sebagai dasar penyusunan APBD tahunan. Dengan pendekatan ini, perencanaan dan penganggaran daerah akan lebih sinergis dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, hasil evaluasi pembangunan secara berkala akan disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi, serta dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menerapkan prinsip manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh siklus pembangunan. Identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga potensi hambatan dapat diminimalisir sedini mungkin, dan target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu, efisien, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan pembangunan daerah juga diwajibkan memperhatikan lima prinsip pengarusutamaan pembangunan lintas sektor, yakni:

1. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, agar seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, mendapatkan manfaat yang adil dan setara dari setiap kebijakan pembangunan.
2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam kebijakan daerah, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
3. Transformasi digital, guna memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong akselerasi pembangunan berbasis teknologi informasi.
4. Pembangunan rendah karbon, melalui berbagai upaya pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan ekonomi tetap selaras dengan kelestarian alam.
5. Pembangunan yang berketahanan iklim, dengan mendorong daerah agar lebih siap menghadapi risiko perubahan iklim, seperti bencana alam, degradasi lahan, dan naiknya permukaan air laut, yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan.

Kelima prinsip tersebut akan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh program pembangunan daerah. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan daya tahan daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi dilakukan melalui Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja (LKjIP), serta Kajian Tengah dan Kajian Akhir Periode RPJMD.

Pengukuran kinerja pembangunan dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, baik di tingkat provinsi maupun perangkat daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan, perbaikan program, serta penyempurnaan perencanaan dan penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

Sistem pengendalian dan evaluasi juga didukung oleh penggunaan data yang sahih dan pendekatan berbasis bukti *(evidence-based policy)*, sehingga hasil evaluasi mampu menghasilkan rekomendasi yang tajam dan tepat sasaran, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan.

Dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikannya sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Semoga dokumen ini menjadi fondasi yang kokoh bagi transformasi Sulawesi Utara yang lebih maju, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat di Bumi Nyiur Melambai.

GUBERNUR SULAWESI UTARA
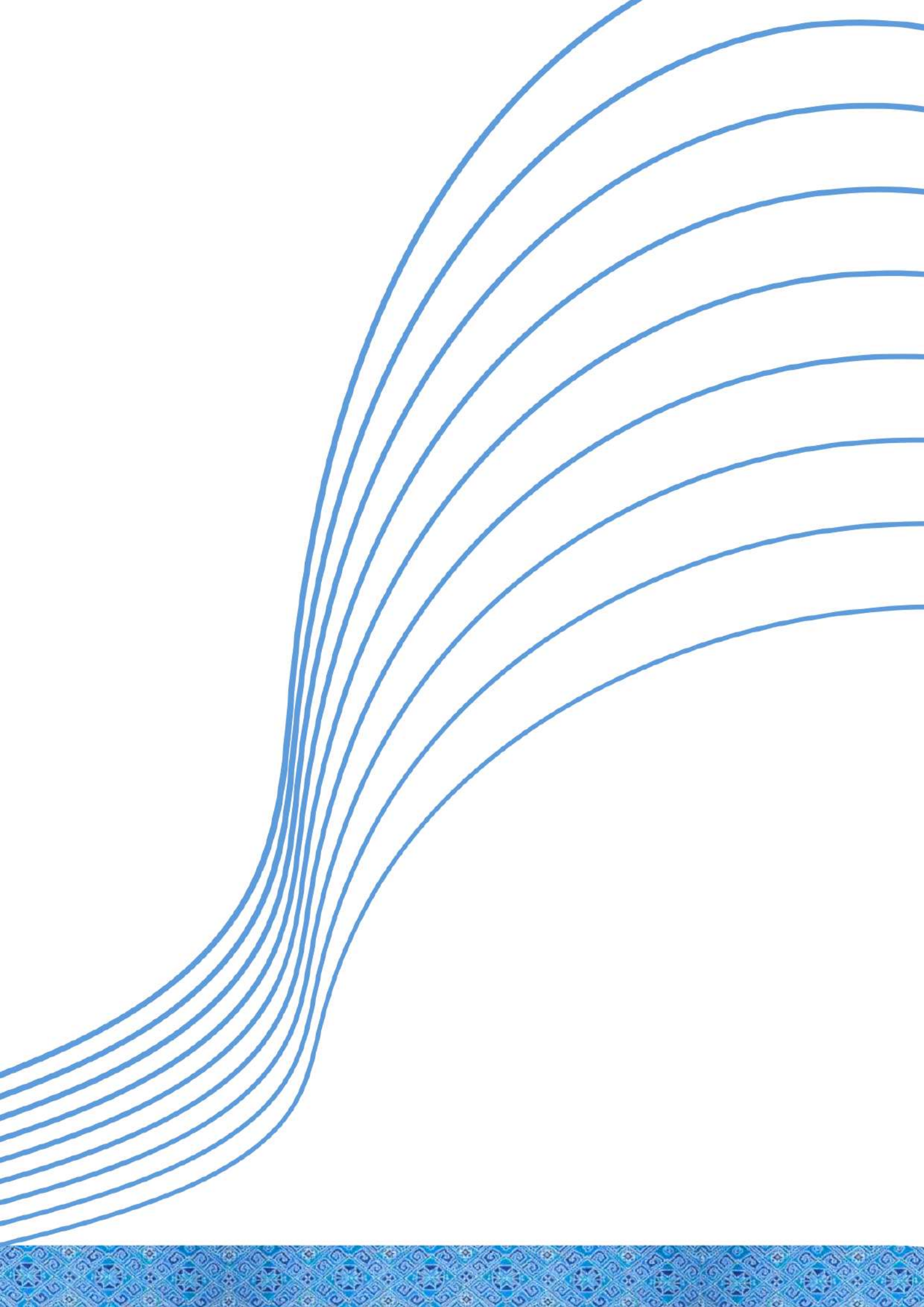
YULIUS SELVANUS